

HARMONI



Volume X, Nomor 2, April–Juni 2011

Jurnal Multikultural & Multireligius

AGAMA DALAM PUSARAN KONFLIK DAN KOHESI SOSIAL

From 'Abd Allah to Khalifat Allah: Imagining
a New Model of Indonesian Muslim
Education

Abd Rahman Mas'ud

Umat Beragama di Kabupaten Kediri:
Antara Harmoni dan Konflik

Haidlor Ali Ahmad

Pengaruh Agama dan Nilai-nilai
Keagamaan terhadap Kerjasama Antar
Umat Beragama di Kota Palu

Bashori A Hakim

Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan
Umat Beragama: Studi terhadap
Masyarakat Angantiga Bali

Joko Tri Hariyanto

Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah
ex-Transmigrasi Sausu Kabupaten Moutong
Sulawesi Tengah

Nuhrison M Nuh

Kajian Efektivitas Penggunaan Dana
Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas
Keagamaan di Propinsi Kalimantan Tengah

Kustini

Program Dana Bantuan Rumah Ibadat
dan Ormas Keagamaan di Provinsi Aceh:
Sebuah Kajian Evaluasi

Agus Mulyono

Penyiaran Agama dalam Perspektif Islam
dan Kristen di Panakkukang Kota Makassar

Muchit A Karim

Jurnal Harmoni	Nomor 2	Volume X	Halaman 262	Jakarta April–Juni 2011	ISSN 1412-663X
-------------------	------------	-------------	----------------	----------------------------	-------------------

ISSN 1412-663X

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Agama dalam Pusaran Konflik
dan Kohesi Sosial

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume X, Nomor 2, April - Juni 2011

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENANGGUNG JAWAB:

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)
M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Ahmad Syafi'i Mufid (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Nuhrison M. Nuh (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Bashori A. Hakim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Mucht A Karim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Titik Suwariyati (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Kustini (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Ibnu Hasan Muchtar (Puslitbang Kehidupan Keagamaan)
Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)
Rikza Chamani (IAIN Walisongo Semarang)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

SEKRETARIAT:

Ahsanul Khalikin, Achmad Rosidi dan Fathan Kamal

REDAKSI & TATA USAHA:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, Jl. MH Thamrin No 6 Jakarta Telp. 021-3920421/Fax.021-3920425
Email: jurnalharmoni@yahoo.com

SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

COVER

Mundzir Fadli

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi
Pemimpin Redaksi ___237

Gagasan Utama

Perjumpaan di Ranah Esoterisme
M. Afif Anshori ___241

From 'Abd Allah to Khalifat Allah: Imagining a New Model of Indonesian Muslim Education
Abd Rahman Mas'ud ___261

Dakwah Berbasis Multikulturalisme
A Ilyas Ismail & Prio Hotman ___273

Penelitian

Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik
Haidlor Ali Ahmad ___289

Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang Jawa Timur
Mursyid Ali ___306

Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Palu
Bashori A Hakim ___320

Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan Umat Beragama: Studi terhadap Masyarakat Angantiga Bali
Joko Tri Hariyanto ___340

Kajian Upaya Deradikalisme Keagamaan: Studi Kasus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama

Abdul Jamil ___367

Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah ex-Transmigrasi Sausu Kabupaten Moutong Sulawesi Tengah

Nuhrison M Nuh ___385

Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Propinsi Kalimantan Tengah

Kustini ___403

Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Provinsi Aceh: Sebuah Kajian Evaluasi

Agus Mulyono ___422

Penyiaran Agama dalam Perspektif Islam dan Kristen di Panakkukang Kota Makassar

Muchit A Karim ___444

Telaah Pustaka

Agama dalam Pergulatan Ekonomi dan Politik di Aceh

M Yusuf Asry ___464

Pedoman Penulisan ___478

Lembar Abstrak ___481

Indeks Penulis ___489

Ucapan Terimakasih ___494

Agama dalam Pusaran Konflik dan Kohesi Sosial

Pemimpin Redaksi

Agama adalah gejala yang begitu sering “terdapat di mana-mana”. Dalam masyarakat tertentu perangkat organisasi keagamaan – yang merupakan tempat tersimpannya etika universal – dan struktur bisa menimbulkan suasana tertentu sehingga usaha-usaha untuk menyebarkan agama dapat berjalan bersama dengan usaha-usaha perluasan kekuatan politik. Situasi ini telah menimbulkan bentrokan-bentrokan politik keagamaan yang besar di antara beberapa kelompok masyarakat. Bentrokan-bentrokan semacam itu bisa dianggap sebagai (usaha) mempersatukan karena bentrokan-bentrokan ini telah berfungsi menyatukan bersama masyarakat masing-masing yang terlibat.

Dari sudut pandang inilah dapat dikatakan bahwa Pasukan Salib (dalam Perang Salib) telah membantu mempersatukan agama Kristen di Barat. Tetapi pada skala yang lebih luas peperangan yang banyak menumpahkan darah antara pasukan Kristen dan Islam itu merupakan contoh penting dari adanya kecenderungan agama yang bersifat mengacaukan dan menghancurkan. Bahkan dalam lingkungan

agama Kristen bisa diperdebatkan bahwa Pasukan Salib melepaskan kekuatan-kekuatan yang bersifat menghancurkan, paling tidak sama besarnya dengan kekuatan-kekuatan (pasukan) yang mereka kerahkan. (Nottingham, 1993: 56-57).

Dari catatan sejarah perang antarpenganut agama yang dalam konsep (ajaran) berbagai agama disebut sebagai “perang suci”, namun akibatnya (tidak bisa dipungkiri) sangat mengerikan. Akibat dari sisi kelam agama dalam perjalanan sejarah umat manusia, dituduh sebagai penghambat kemajuan manusia, mempertinggi fanatisme dan sifat tidak toleran, pengacuhan, pengabaian, tahayul dan kesia-siaan (Lihat: O’dea, 1987: 2).

Dalam berbagai agama terdapat ajaran untuk saling mengasihi, memberikan santunan kepada fakir-miskin, anak yatim dengan berbagai macam istilah, seperti sedekah, amal, derma, *charity* dan lain-lain. Tetapi dalam implementasinya banyak tokoh-tokoh berbagai agama mengambil *prebandel* sebagai sumber kehidupan, bahkan tidak sedikit dari mereka yang kemudian menjadi parasit bagi umatnya sendiri. Elit agama lebih memandang umat sebagai SDM yang bisa dieksploisir dan sekaligus harus dipertahankan. Akibatnya, agama sering dianggap mempunyai efek negatif terhadap kesejahteraan masyarakat dan individu. Isu-isu keagamaan menjadi salah satu masalah penyebab perang, keyakinan agama sering menimbulkan sikap tidak toleran. Loyalitas agama hanya menyatukan beberapa orang tertentu dan memisahkan yang lainnya. Sebagaimana dinyatakan oleh Jonathan Swift, ~seorang pengurus gereja Anglikan~ dalam ungkapan berikut; “*Kita mempunyai cukup agama hanya membuat kita untuk membenci, namun tidak cukup untuk membuat saling mencintai*” (O’dea, 1987: 139). Agama telah menimbulkan khayalan yang paling luas dan juga digunakan untuk membenarkan kekejaman orang yang luar biasa terhadap orang lain (Nottingham, 1993: 3).

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perang atau konflik antarumat beragama diindikasikan antara lain karena dalam setiap tradisi keagamaan selalu terkandung benih-benih ideologi atau teologi yang bersifat isolasionis konfrontasionis dan kebencian. Teologi

isolasionis memandang setiap agama hidup dan berkembang dalam “ghetto-nya” sendiri-sendiri. Faktor inilah yang sering menjadikan ajaran agama mengarah kepada eksklusifisme; sedangkan teologi konfrontasionis memandang setiap agama melihat yang lain dan yang berbeda sebagai pesaing yang perlu dicurigai; teologi kebencian dimana setiap agama memandang yang lain dan yang berbeda sebagai musuh yang harus ditaklukkan (lihat: Moh. Shofan, 2011: 33).

Oleh karena benih-benih ideologi dan teologi yang disemai dalam lingkungan seperti itu telah menggiring pertumbuhan dan perkembangan agama ke arah yang bersifat negatif dan sulit untuk bisa terbebas dari pusaran konflik.

Selain sisi negatif agama di atas, agama juga mempunyai sisi positif, antara lain, fungsi kohesi-sosial yang menjadikan agama sebagai salah satu struktur institusional penting yang melengkapi keseluruhan sistem sosial. Agama dicirikan sebagai pemersatu aspirasi manusia yang paling *sublime*, sebagai sumber besar moralitas, sumber tatanan masyarakat dan perdamaian batin individu. Agama sebagai sesuatu yang memuliakan dan yang membuat manusia beradab. (lihat: O’dea, 1993: 2).

Sejarah telah membuktikan bahwa agama telah berhasil menyatukan umat beragama, sekurang-kurangnya antara umat Muslim, Yahudi dan Kristen. Indahnyanya kehidupan yang penuh toleransi tersebut telah mengilhami Maria Rosa Menocal untuk menulis buku *Ornament of The World: How Muslims, Jews, and Christians Created a Culture of Tolerance in Medieval Spain* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul *Seotong Surga di Andalusia Kisah Peradaban Muslim, Yahudi, Kristen Spanyol Pertengahan (750-1495)*.

Namun seotong surga di Andalusia itu telah hilang, dan yang diidealkan tentang harmonisasi kehidupan antarumat beragama bertolak belakang dengan fakta yang ada. Di berbagai belahan dunia, antarumat beragama saling menindas, mengintimidasi, merampas, bahkan saling membunuh. Padahal sesungguhnya tidak ada agama yang mengajarkan tindakan kekerasan. Munculnya kekerasan atas

nama agama sesungguhnya dipicu oleh misinterpretasi, misinformasi, atau kesempatan wawasan belaka terhadap agama lain. Secara eksoteris, setiap agama jelas berbeda, namun dari aspek esoteris sesungguhnya ada kesamaan-kesamaan visi dan misinya.

Pada edisi ini, Jurnal Harmoni menyajikan tulisan M. Afif Anshori dengan judul *"Perjumpaan Agama-agama di Ranah Esoterisme"*. Tulisan lain yang membahas hubungan antarumat beragama ditulis oleh A Ilyas Ismail dan Prio Hotman dengan judul *"Dakwah Berbasis Multikulturalisme"*. Hasil penelitian menampilkan Haidlor Ali Ahmad dengan judul *"Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik"*, Bashori A Hakim dengan judul *"Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Palu"*, Mursyid Ali dengan judul *"Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang"*, Joko Tri Hariyanto dengan judul *"Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan Umat Beragama: Studi terhadap Masyarakat Angantiga Bali"*, Nuhriison M Nuh *"Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah ex-Transmigrasi Sausu Kabupaten Moutong Sulawesi Tengah"*, dan Muchid A Karim dengan judul *"Penyiaran Agama dalam Perspektif Islam dan Kristen di Panakkukang Kota Makassar"*.

Beberapa tulisan lain yang masih ada relevansinya dengan tugas dan fungsi Puslitbang Kehidupan Keagamaan Bidang Pelayanan karya tulis Abd Rahman Mas'ud dengan judul *"From 'Abd Allah to Khalifat Allah: Imagining a New Model of Indonesian Muslim Education"*, Kustini dengan judul *"Kajian Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah"*, Agus Mulyono dengan judul *"Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Provinsi Aceh: Sebuah Kajian Evaluasi"*. Bidang Kajian Aliran dan Faham Keagamaan, tulisan Abdul Jamil dengan judul *"Upaya De-Radikalisasi Keagamaan: Studi Kasus Lakpesdam NU"*, dan Telaah Pustaka oleh M Yusuf Asry dengan judul buku *"Agama dalam Pergulatan Ekonomi"*. Selamat membaca.***

Perjumpaan Agama-agama di Ranah Esoterisme

M. Afif Anshori

*Dosen IAIN Raden Intan
Lampung*

Abstract

*Everyone is longing for harmony in his life regardless of ethnicity, race, and religion. But in fact, in many parts of the world people tend to mutually oppress, intimidate, rob and even to kill. Undoubtedly, the teachings of any religion are not to teach violence. Violence in the name of religion is triggered by mis-interpretation, misinformation and lack of insight of understanding towards other religions. Exoterically, each religion is obviously different, both from the aspect of the history, rituals, the name of God, scripture, religious ceremonies, and so on. From the esoteric aspect, there are commonalities of vision and mission. Hence on this aspect of esotericism religions can actually meet to each other. **Key words:** esotericism, eksoterisme, pluralism and harmonisasi life.*

Pendahuluan

Pada dasarnya, ketika dilahirkan, manusia sudah membawa naluri untuk beragama, dalam arti mengenal Tuhan, meski kadarnya sangat kecil. Rudolf Otto dan St. Agustinus menyatakan: “...they are born with inner capacity of sensing God and can not help themselves. (Clarck, 1967: 80).”

Maka dalam perspektif psikologi agama, manusia disebut *homo religious*. Kondisi seperti itu dalam Islam disebut fitrah, disebutkan dalam al-Qur'an Surat al-Rum: 30, yang artinya:

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui". (Q. S. al-Rum, 30: 30).

Selain dari itu, Rasulullah pun mempertegas lagi dalam haditsnya: yang artinya:

"Tidaklah seorang anak dilahirkan ke dunia kecuali dalam keadaan suci. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya (memeluk) Yahudi, Nasrani atau Majusi". (Muslim, 1377H: 216).

Dalam pengertian yang lebih khusus, fitrah dapat ditafsirkan sebagai suatu kondisi manusia yang amat meyakini adanya Tuhan atau telah memiliki naluri untuk beragama.

Adanya naluri beragama tersebut dapat ditelusuri secara psikologis dengan mencermati fenomena adanya tradisi pembacaan do'a bagi orang yang meninggal, atau berdo'a ketika menghadapi bahaya mengancam dirinya. Tentunya, berdo'a sebagai suatu aktivitas ritual tersebut ditujukan kepada Yang Menguasai Hidup. Hal itu menunjukkan bahwa pada relung jiwa terdalam, seseorang merasa takut dan khawatir akan datangnya kematian. Ernest Becker dalam *The Denial of Death*, yang dikutip oleh Dr. Fransisco Jose Moreno, menyatakan: *"Perasaan takut mati dalam diri kita lebih banyak dirasakan daripada keinginan untuk mengakuinya, dan dalam menghadapi persoalan ini kita mengikuti pola tradisional yakni dengan cara menekan perasaan tersebut"*. (Moreno, 1985: 17). Syamsuddin Abdullah menulis, bahwa *"agama itu tumbuh dan berkembang dari adanya perasaan takut atau disebabkan dari adanya perasaan takut serta disebabkan oleh keinginan-keinginan untuk menghindari kekuatan-kekuatan yang tidak disenangi dan lain-lain hal semacam itu, yang bersifat kejiwaan"*. (Abdullah. 1977: 8).

Teori di atas dikembangkan oleh aliran *psychologis-evolutionistis*. Rasa takut muncul manakala manusia dihadapkan pada kekuatan lain yang mengancam dirinya, seperti gempa bumi, banjir, badai, tsunami, gunung meletus, dan sebagainya, manusia mencoba mencari pertolongan kepada Yang Maha Tinggi, yang mampu menolong dan menyelamatkan jiwanya. Perasaan takut dan ketidakberdayaan itu sesungguhnya merupakan ekspresi tak sadar akan sikap *religiousitas* seseorang. Dengan demikian, ia dapat merasakan dirinya sangat lemah yang mau tidak mau membutuhkan “kehadiran” Yang Maha Kuat (Tuhan). Proses “perjumpaan” manusia dengan Tuhan atau pengakuan akan “kehadiran” Tuhan dalam dirinya membutuhkan proses “pembersihan jiwa” karena Tuhan itu Maha Suci, sehingga hanya mungkin didekati oleh orang-orang yang bersih saja. Tindakan pembersihan jiwa tersebut terdapat di semua agama. Kajian tentang bagaimana ritual pembersihan jiwa dilakukan, sesungguhnya merupakan ranah esoterisme agama.

Perspektif Esoterisme

Istilah *esoteris* berasal dari kata *esoteric* (adj) atau kata sifat yang berarti “*intended only for those who are initiated, for a small circle of disciples or follower; abstruse*”. (Hornby. 1974: 291). *Esoteric* dapat pula diartikan “*hanya diketahui dan difahami oleh beberapa orang tertentu saja*”. (Echols. et.al. 1996: 218). Dalam perkembangan selanjutnya, kata *esoteris* berarti aspek dalam batin, hakikat, inti atau substansi, sebagai lawan dari aspek luar, aspek lahir, aspek syariat dan aspek materi. Maka yang dimaksud dengan Esoterisme Agama-agama adalah ajaran berbagai agama yang menekankan kajian pada aspek batin yang merupakan inti dari agama.

Adalah Ananda Kentish Coomaraswamy dan Rene Guenon (1886-1951) yang pada awal abad ke 20, menghidupkan kembali nilai-nilai dan hikmah, kebenaran abadi yang ada pada Tradisi dan agama-agama. Coomaraswamy menyebutnya dengan *Philosophia Perennis* atau filsafat abadi. (Nasr.1993: 53-54). Sedangkan Guenon menyebutnya dengan *Primordial Tradition* (tradisi primordial).

Gagasan mengenai filsafat abadi atau tradisi primordial tenggelam dalam peradaban Barat. Ini disebabkan filsafat yang dominan adalah filsafat keduniawian. (Schuon, 1976: vii). Filsafat tersebut dibangun berdasarkan pandangan hidup sekular-liberal yang meminggirkan nilai-nilai yang ada pada Tradisi dan agama-agama.

Rene Descartes, bapak filsafat modern, dengan prinsip aku berfikir maka aku ada (*cogito ergo sum*), misalnya, telah menjadikan rasio sebagai satu-satunya kriteria untuk mengukur Kebenaran. Wahyu dan “Intelek” dalam struktur epistemologi terpinggirkan dengan filsafat Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia hanya mengetahui yang *phenomena* bukan yang *noumena*. Intelek tidak mendapat tempat dalam struktur epistemologi Kant. Sekularisasi epistemologi semakin bergulir dengan munculnya filsafat Hegel dan Marx yang menganggap realitas sebagai perubahan yang dialektis. (Surrey 1998: 120-21).

Guenon, yang memeluk Islam pada tahun 1912 (nama Islamnya adalah Abdul Wahid Yahya) berpendapat bahwa sebenarnya ilmu yang utama adalah ilmu tentang spiritual. (Nutrizio 1983: 69). Selain dari itu, ilmu yang lain harus juga diusahakan dan dicapai, namun ilmu tersebut hanya akan bermakna dan bermanfaat jika dikaitkan dengan ilmu spiritual. Menurut Guenon, substansi dari ilmu spiritual bersumber dari supranatural dan transendent dan ilmu tersebut adalah universal. Oleh sebab itu, ilmu tersebut tidak dibatasi oleh suatu kelompok agama tertentu. Ia adalah milik bersama semua Tradisi Primordial (*Primordial Tradition*). Perbedaan teknis yang terjadi merupakan jalan dan cara yang berbeda untuk merealisasikan Kebenaran yang diyakini. Perbedaan tersebut sah-sah saja karena setiap agama memiliki kontribusinya yang unik untuk memahami Realitas Akhir. (Waterfield, 1987: 126).

Gagasan Coomaraswamy dan Guenon untuk menghidupkan kembali kebenaran abadi yang ada pada Tradisi dan agama-agama dikembangkan lebih lanjut oleh Frithjof Schuon (1907-1998). Pemikiran Schuon banyak dipengaruhi, khususnya oleh pemikiran Guenon. Pengaruh Guenon pada Schuon dapat dilacak dari proses

ketertarikan Schuon pada pemikiran ini ketika Schuon mulai mengirim surat kepada Guenon sejak berusia kurang lebih 12 tahun. Korespondensi ini berlangsung selama 20 tahun. Keduanya baru saling bertemu pada tahun 1938 di Kairo.

Schuon, yang dikenal juga sebagai Isa Nuruddin Ahmad al-Shadhili al-Darquwi al-Alawi al-Maryami, adalah seorang tokoh terkemuka dalam filsafat abadi dan metafisika tradisional. Pemikirannya dipuji dan diikuti oleh para intelektual bertaraf internasional dan lintas agama. Dalam karya-karyanya, Schuon menegaskan kembali prinsip-prinsip metafisika tradisional, mengeksplorasi dimensi-dimensi esoteris agama, menembus bentuk-bentuk mitologis dan agama serta mengkritik modernitas yang berlebihan. Schuon mengangkat perbedaan antara dimensi-dimensi tradisi agama eksoteris dan esoteris sekaligus menyingkap titik temu metafisik antar semua agama-agama ortodoks. Ia mengungkap Satu-satunya Realitas Akhir, Yang Mutlak, Yang Tidak Terbatas dan Yang Maha Sempurna dan selanjutnya ia menyeru supaya manusia dekat kepada-Nya.

Berkaitan dengan pemikiran tentang hal tersebut di atas, Schuon menggunakan istilah *religio perennis* (Agama Abadi). Ialah pemikir keagamaan yang pertama kali menggunakan istilah tersebut, dan menggunakannya dalam karyanya *Regards sur les mondes anciens* (Cahaya tentang Dunia-Dunia Kuno). (Schuon. 1982). Istilah *Religio Perennis* sinonim dengan beberapa istilah lain yang seperti *Philosophia Perennis*, Hikmah Abadi (*Sophia Perennis*, *al-Hikmah al-Khalidah*, *Sanatana Dharma*), Agama Hikmah (*Religio Cordis*, *al-Din al-Hanif*), Agama Hati (*Religion of the Heart*), Primordial Tradition dan Sains Sakral (*Scientia Sacra*). Semua istilah ini bermaksud sama, yaitu menegaskan titik-temu agama-agama dan menolak pandangan hidup filsafat modern yang relativistik, positivistik dan rasionalistik. (Nasr~ed~ 1986: 483-522).

Studi terhadap agama-agama selama ini lebih banyak menyoroti aspek-aspek perbedaannya ketimbang persamaannya, sehingga memunculkan *truth claim*, yang paling benar ajaran yang dianutnya, sementara yang lain salah. Meyakini kebenaran keyakinannya sendiri

memang suatu keniscayaan, akan tetapi menafikan kebenaran orang lain dapat memunculkan konflik horizontal, dan inilah yang terjadi selama ini. Padahal perbedaan itu berada pada ranah esoteris belaka. Menurut Schuon, agama-agama bertemu pada level yang esoteris dan bukan pada level eksoteris. (Schuon. 1990: 55).

Esoterisme Islam

Dalam kasus agama Islam, Polemik mengenai esoterisme telah lama berlangsung, paralel dengan sejarah perkembangan Islam. Selama ini, para sarjana sering membenturkan antara paham esoterisme Islam (baca sufi) *vis a vis* esoterisme Islam (baca fuqaha), dengan asumsi bahwa esoterisme Islam muncul sebagai sintesis dari berbagai paham *Liyan*. (Sugiharto. 1996: 7-8). atau mengadopsi ajaran-ajaran non Islam seperti dikatakan oleh Von Kraemer, Ignaz Goldziher, Reynold A. Nicholson, Asin Palacios dan O'Leary. (Al-Taftazani. 1983 26). Padahal menurut Sayyed Hossein Nasr, tasawuf itu, secara esensial bermakna "*the inner and esoteric dimension of Islam*", yang bersumber dari al-Qur'an dan hadits Nabi. (Nasr. 1996: 121).

Sebagai aspek esoteris dari agama Islam, tujuan tasawuf adalah memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan, sehingga disadari benar bahwa seseorang berada di hadirat Tuhan. Sedangkan esensinya adalah kesadaran akan adanya komunikasi dan dialog antara roh manusia dengan Tuhan, dengan cara mengasingkan diri dan berkontemplasi. (Nasution. 1978: 56). H. Aboe Bakar Atjeh menyebutkan, bahwa esensi tasawuf adalah mencari jalan untuk memperoleh kecintaan rohani. (Atjeh. 1984: 28). Hamka mengutip pernyataan al-Junaid mengatakan, "esensi tasawuf ialah keluar dari budi dan perangai yang tercela dan masuk kepada budi dan perangai yang terpuji". (Hamka. 1980: 18).

Bagi K. J. Wassil, pratek tasawuf ialah usaha bagaimana seseorang membersihkan jiwanya. Membersihkan jiwa atau ruh dengan jalan menghilangkan sifat-sifat buruk dan tercela, lalu mengisi dengan sifat-sifat yang baik dan terpuji. (Johan Effendi. 1993: 34).

Dari pendapat-pendapat tersebut dapatlah disimpulkan bahwa esensi tasawuf yang sesungguhnya adalah merupakan suatu upaya pendekatan diri kepada Tuhan dengan sedekat-dekatnya, bahkan “menyatukan” diri dengan Tuhan, melalui jalan pembersihan rohani dari sifat-sifat tercela. Bermula dari upaya seperti ini, para ulama *mutashawwifin* kemudian membuat formulasi-formulasi penjenjangan (*maqamat, stasions, stages*) yang harus dilalui oleh seorang “pencari jalan (*seekers/ salik*) agar mampu bersatu dengan Tuhan. Oleh karena itu, dalam dunia Islam kemudian berkembang teori-teori tasawuf yang beraneka ragam, baik yang bersifat moderat maupun ekstrem. Keragaman tersebut semakin berkembang pula, paralel dengan kemunculan aliran-aliran tarekat, yang memiliki metoda dan sistema tersendiri. (Anshori, 2004).

Ketika tasawuf bersentuhan dengan pemikiran kalam (teologi) dan filsafat, dalam perkembangan selanjutnya, tasawuf mulai mengarah kepada konsep-konsep teoritis yang sulit dipahami masyarakat. Hal ini nampak dari ajaran Dzun Nun al-Mishri, Rabiah Adawiyah, Abu Yazid al-Busthami, Abu Mansur al-Hallaj, Muhyiddin Ibn Arabi, Al-Jili, dan lain-lain yang seringkali menjadi hal yang kontroversial. Perkembangan semacam ini, pada akhirnya menimbulkan kritik tajam dari ulama-ulama esoteris (baca: syari’at/ fiqh), dengan tuduhan bahwa perilaku para sufi tersebut dianggap menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah.

Pertentangan tersebut berakhir setelah al-Ghazali berhasil mensinkronkan antara tasawuf dengan syari’ah, atau esoterisme dengan eksoterisme, dengan formulasi tersendiri yang berbeda dari para sufi sebelumnya. (Roshental. 1965: 106-109). Al-Ghazali menyerukan kepada ahli hakekat (esoteris) agar pengamalan tasawufnya seharusnya mengindahkan/memperhatikan batas-batas yang digariskan oleh hukum syari’at. Sebaliknya, menurut Al-Ghazali, ahli fiqh/syari’at dalam pengamalan agamanya juga harus memperhatikan aspek batini dan keakhiratan. Dengan demikian, pertentangan kelompok esoteris dan esoteris dapat diatasi, bahkan keduanya saling mengisi. (Anshary. 1986: 86). Apabila para

pendahulunya lebih mengarahkan ajarannya pada “*union mystics*” (kesatuan manusia dan Tuhan), yang tidak dapat dipahami masyarakat awam, sebaliknya, al-Ghazali menekankan ajaran tasawufnya kepada *mahabbah* dan *ma’rifat* yang dapat diusahakan, dicerna dan diamalkan oleh banyak lapisan masyarakat. (Schimmel, 1986: 98).

Mengacu kepada misi utama Rasulullah yakni “memperbaiki & menyempurnakan akhlaq manusia”, maka jelas bahwa esoterisme menjadi sentral ajaran Islam. Sebab dengan akhlaq yang mulia, akan tercipta harmonisasi kehidupan umat manusia, dengan tidak membedakan suku, ras, golongan bahkan agama. Itulah sebabnya, mengapa proses Islamisasi di Nusantara pada abad 12-15 M, tidak menimbulkan gejolak yang berarti dalam masyarakat, bahkan eksistensi Islam dapat diterima pada masyarakat Hindu & Budha, karena pendekatannya menggunakan Islam esoteris.

Esoterisme Kristen

Secara esensial, sesungguhnya ajaran Kristen lebih menekankan aspek-aspek esoteris ketimbang eksoteris. Ini terlihat dari esensi ajaran Kristen yang menekankan pada pembersihan jiwa dari segala dosa. (Verkuyl. 1976: 47-60), meskipun konsep tentang dosa berbeda dengan agama lain. Juga dapat dibaca pada Injil Perjanjian Lama atau Perjanjian Baru, yang di dalamnya hampir-hampir tidak ditemukan ajaran “syari’at”. Memang, kedua Injil tersebut berisi kisah kronologis para nabi dengan ajarannya (Perjanjian Lama), sementara Perjanjian Baru berkisah tentang pribadi Yesus.

Kisah-kisah pribadi Yesus inilah yang dijadikan pedoman hidup umat Kristiani. (Niftrik et.al. 1987: 184-289). Mengenai siapa Yesus, menurut orang Kristen dan Katolik adalah Allah Putera yang turun ke dunia untuk menjadi manusia dan penebus dosa umat manusia. Terhadap tokoh ini beraneka ragam pendapat: Golongan Yahudi, berpendapat bahwa Yesus itu tokoh pemberontak dan pengacau. Golongan Kristen, memujanya sebagai pribadi Allah yang turun mengejawantah. Perbedaan yang kontras dengan Islam dalam hal eksistensi Yesus adalah bahwa golongan Islam berpendapat: Yesus

hanyalah seorang Nabi besar, tetapi bukan putera Allah.

Terlepas dari semua pandangan yang berbeda diatas, kalau kita meninjau tokoh ini, memang Yesus dapat dikatakan merupakan tokoh esoteris. Ia mengajarkan kerendahan hati yang tulus (Matius 6: 6). Dalam memberi sedekah pun Yesus mengutuk sikap munafik, (Matius 6: 3). Juga dalam hal berpuasa sikap munafik yang hanya ingin dilihat orang lain sangat dicela oleh Yesus (Matius 6: 16-18).

Yesus mengajarkan kepada umatnya supaya tidak membalas dendam kepada orang lain (Matius 6). Ia paling membenci sesuatu hal yang dibuat-buat, hari Sabat yang dianggap keramat oleh golongan Parisi didobraknya, karena mereka melaksanakan hukum hari Sabat secara berlebih-lebihan sehingga cinta kasih kepada sesama diabaikan demi kekeramatan hari Sabat.

Dalam memilih murid-muridnya, Yesus tidak memandang dari mana asal usulnya. Mateus, seorang penarik bea yang dalam pandangan masyarakat Yahudi bukan profesi yang baik, dipilih sebagai seorang muridnya. Petrus seorang nelayan sederhana, dipilih sebagai sesepuh murid yang lain.

Yesus tidak menyukai kekerasan, walaupun itu kepada musuhnya. Ketika Petrus melukai telinga tentara yang akan menangkap Yesus sehingga daun telinganya putus, daun telinga itu justru diambil oleh Yesus dan dilekatkan kembali ketempat asalnya. Kepada orang yang mendengarkan pengajarannya, ia tidak melupakan kesejahteraan. Ketika pada waktu makan dan tidak tersedia makanan, Yesus mengambil sepotong roti kecil dan dua ekor ikan yang dibawa oleh anak kecil kemudian diperbanyak olehnya dan dibagikan kepada orang-orang itu; tetapi manakala pada kesempatan lain orang berbondong-bondong mengikuti, justru Yesus menolaknya karena tahu bahwa motivasinya karena ingin roti hasil mukjizat Yesus.

Esoterisme Budha

Dalam agama Buddha, esoterisme menempati posisi sentral, karena sejak kemunculannya yang dicetuskan oleh Sidharta Gautama,

merupakan ajaran esoteris. Dalam konsep ketuhanan, agama Buddha berbeda dengan konsep dalam agama Samawi dimana alam semesta diciptakan oleh Tuhan dan tujuan akhir dari hidup manusia adalah kembali ke surga ciptaan Tuhan yang kekal. Sebagaimana diungkapkan oleh Sang Budha, dalam *Sutta Pitaka, Udana VIII : 3*, yang merupakan konsep ketuhanan Yang Mahaesa dalam agama Buddha. Ketuhanan Yang Mahaesa dalam bahasa Pali adalah *Atthi Ajatang, Abhutang, Akatang, Asamkhatang* yang artinya "Suatu Yang Tidak Dilahirkan, Tidak Dijelmakan, Tidak Diciptakan dan Yang Mutlak". Dalam hal ini, Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu yang tanpa aku (*anatta*), yang tidak dapat dipersonifikasikan dan yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apa pun. Tetapi dengan adanya Yang Mutlak, yang tidak berkondisi (*asamkhata*), maka manusia yang berkondisi (*samkhata*) dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan (*samsara*) dengan cara bermeditasi.

Dalam masalah moral, sebagaimana agama Islam dan Kristen, ajaran Buddha juga menjunjung tinggi nilai-nilai kemoralan. Nilai-nilai kemoralan yang diharuskan untuk umat awam umat Buddha biasanya dikenal dengan *Pancasila*. Kelima nilai-nilai kemoralan tersebut: *pertama, Panatipata Veramani Sikkhapadam Samadiyami* yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup; *kedua, Adinnadana Veramani Sikkhapadam Samadiyami*, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pencurian/ mengambil barang yang tidak diberikan; *ketiga, Kamesu Micchacara Veramani Sikkhapadam*, yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perbuatan asusila; *keempat, Musavada Veramani Sikkhapadam Samadiyami*, yang artinya (aku bertekad akan melatih diri menghindari melakukan perkataan dusta; *kelima, Surameraya Majjapamadatthana Veramani Sikkhapadam Samadiyami* yang artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari makanan atau minuman yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran.

Selain nilai-nilai moral di atas, agama Buddha juga amat menjunjung tinggi karma sebagai sesuatu yang berpegang pada prinsip sebab akibat. *Kamma* (bahasa Pali) atau *Karma* (bahasa

Sanskerta) berarti perbuatan atau aksi. Jadi ada aksi atau karma baik dan ada pula aksi atau karma buruk. (Widyadharmas. 1991: 24). Saat ini, istilah karma sudah terasa umum digunakan, namun cenderung diartikan secara keliru sebagai hukuman turunan/hukuman berat dan lain sebagainya. Guru Buddha dalam *Nibbedhika Sutta; Anguttara Nikaya* 6. 63 menjelaskan secara jelas arti dari kamma:

Para bhikkhu, *cetana* (kehendak)lah yang dinyatakan sebagai *kamma*. Setelah berkehendak, orang melakukan suatu tindakan lewat tubuh, ucapan atau pikiran. "

Jadi, *kamma* berarti semua jenis kehendak (*cetana*), perbuatan yang baik maupun buruk/jahat, yang dilakukan oleh jasmani (*kaya*), perkataan (*vaci*) dan pikiran (*mano*), yang baik (*kusala*) maupun yang jahat (*akusala*).

Kamma atau sering disebut sebagai Hukum Kamma merupakan salah satu hukum alam yang berkerja berdasarkan prinsip sebab akibat. Selama suatu makhluk berkehendak, melakukan *kamma* (perbuatan) sebagai sebab, maka akan menimbulkan akibat atau hasil. Akibat atau hasil yang ditimbulkan dari *kamma* disebut sebagai *Kamma Vipaka*.

Para Buddha pada dasarnya mempunyai tiga prinsip dasar ajaran, yaitu seperti yang tercantum di dalam *Dhammapada* 183: a) *Sabbapapassa akaranam* = tidak melakukan segala bentuk kejahatan; b) *Kusalasupasampada* = senantiasa mengembangkan kebajikan; c) *Sacittapariyodapanam* = membersihkan batin atau pikiran.

Ajaran Sang Buddha memberikan bimbingan kepada umatnya untuk membebaskan batin dari kemelekatan kepada hal yang selalu berubah (*anicca*), yang menimbulkan ketidakpuasan (*dukkha*); karena semuanya itu tidak mempunyai inti yang kekal, tanpa kepemilikan (*anatta*). Usaha pembebasan ini dilakukan sesuai dengan kemampuan dan pengertian masing-masing individu. (Sumedha1989: 21-86).

Sang Buddha sebagai penunjuk jalan tidak menjanjikan sesuatu hadiah ataupun hukuman bagi para pengikutnya, sebab ia mengajarkan Dhamma atas dasar cinta kasih, tanpa pamrih apapun

bagi dirinya. Ia berpedoman kepada 3 dasar kebijaksanaan yang bebas dari pamrih: a) Ia tidak girang atau gembira bilamana ada orang yang mau mengikuti ajarannya; b) Ia tidak akan kecewa atau menyesal bilamana tidak ada orang yang mau mengikuti ajarannya; c) Ia tidak merasa senang atau kecewa bilamana ada sebagian orang yang mau mengikuti ajaran-Nya, dan ada sebagian lagi yang tidak.

Esoterisme Hindu

Secara teologis, Hindu sering dianggap sebagai agama yang beraliran politeisme karena memuja banyak dewa, tapi tidak sepenuhnya benar. Dalam agama Hindu, dewa bukanlah Tuhan itu sendiri. Menurut umat Hindu, Tuhan itu Maha Esa, tiada duanya. Dalam salah satu ajaran filsafat Hindu, *Advaita Wedanta* menegaskan bahwa hanya ada satu kekuatan dan menjadi sumber dari segala yang ada (Brahman), yang memanifestasikan diri-Nya kepada manusia dalam beragam bentuk.

Dalam agama Hindu, terdapat lima keyakinan dan kepercayaan yang disebut Pancasradha, sebagai keyakinan dasar umat Hindu, yaitu: a) *Widhi Tattwa* - percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa dan segala aspeknya; b) *Atma Tattwa*- percaya dengan adanya jiwa dalam setiap makhluk; c) *Karmaphala Tattwa* - percaya dengan adanya hukum sebab-akibat dalam setiap perbuatan; d) *Punarbhava Tattwa* - percaya dengan adanya proses kelahiran kembali (reinkarnasi); e) *Moksa Tattwa* - percaya bahwa kebahagiaan tertinggi merupakan tujuan akhir manusia. (Suja. 2003: 5).

Widhi Tattwa merupakan konsep kepercayaan terdapat Tuhan yang Maha Esa dalam pandangan Hinduisme. Agama Hindu yang berlandaskan Dharma menekankan ajarannya kepada umatnya agar meyakini dan mengakui keberadaan Tuhan yang Maha Esa. Dalam filsafat *Advaita Wedanta* dan dalam kitab *Weda*, Tuhan diyakini hanya satu namun orang bijaksana menyebutnya dengan berbagai nama. Dalam agama Hindu, Tuhan disebut Brahman. Filsafat tersebut tidak mengakui bahwa dewa-dewi sebagai Tuhan tersendiri atau makhluk yang menyaingi derajat Tuhan. (Prabhupada, Bhagawadgita).

Atma tattwa merupakan kepercayaan bahwa terdapat jiwa dalam setiap makhluk hidup. Dalam ajaran Hinduisme, jiwa yang terdapat dalam makhluk hidup merupakan percikan yang berasal dari Tuhan dan disebut Atman. *Jivatma* bersifat abadi, namun karena terpengaruh oleh badan manusia yang bersifat maya, maka Jivatma tidak mengetahui asalnya yang sesungguhnya. Keadaan itu disebut *Awidya*. Hal tersebut mengakibatkan Jivatma mengalami proses reinkarnasi berulang-ulang. Namun proses reinkarnasi tersebut dapat diakhiri apabila Jivatma mencapai moksa. (Sukartha, dkk).

Agama Hindu mengenal hukum sebab-akibat yang disebut Karmaphala (*karma* = perbuatan; *phala* = buah/hasil) yang menjadi salah satu keyakinan dasar. Dalam ajaran Karmaphala, setiap perbuatan manusia pasti membuahkan hasil, baik atau buruk. Ajaran Karmaphala sangat erat kaitannya dengan keyakinan tentang reinkarnasi, karena dalam ajaran Karmaphala, keadaan manusia (baik suka maupun duka) disebabkan karena hasil perbuatan manusia itu sendiri, baik yang ia lakukan pada saat ia menjalani hidup maupun apa yang ia lakukan pada saat ia menjalani kehidupan sebelumnya. Dalam ajaran tersebut, dapatlah dikatakan bahwa manusia menentukan nasib yang akan ia jalani sementara Tuhan yang menentukan kapan hasilnya diberikan (baik semasa hidup maupun setelah reinkarnasi).

Punarbhawa merupakan keyakinan bahwa manusia mengalami reinkarnasi. Dalam ajaran Punarbhawa, reinkarnasi terjadi karena jiwa harus menanggung hasil perbuatan pada kehidupannya yang terdahulu. Apabila manusia tidak sempat menikmati hasil perbuatannya seumur hidup, maka mereka diberi kesempatan untuk menikmatinya pada kehidupan selanjutnya. Maka dari itu, munculah proses reinkarnasi yang bertujuan agar jiwa dapat menikmati hasil perbuatannya (baik atau buruk) yang belum sempat dinikmati. Proses reinkarnasi diakhiri apabila seseorang mencapai kesadaran tertinggi (moksa).

Dalam keyakinan umat Hindu, Moksa merupakan suatu keadaan di mana jiwa merasa sangat tenang dan menikmati kebahagiaan yang sesungguhnya karena tidak terikat lagi oleh berbagai macam nafsu maupun benda material. Pada saat mencapai keadaan Moksa, jiwa terlepas dari siklus reinkarnasi sehingga jiwa tidak bisa lagi menikmati suka-duka di dunia. Oleh karena itu, Moksa menjadi tujuan akhir yang ingin dicapai oleh umat Hindu, "*Mokhsartam Jagathita ya ca iti dharma*". Untuk mewujudkan hal itu, perilaku umat Hindu seharusnya mencerminkan nilai-nilai *sathyam* (kebenaran), *sivam* (kebajikan) dan *sundaram* (keindahan). (Maswinara ed. 1998).

Upaya Mencari Titik Temu

Dalam sejarah peradaban manusia, konflik-konflik horizontal yang paling mudah menyulut emosi adalah konflik-konflik yang telah menyentuh ranah keagamaan, walau sebenarnya akar masalahnya bukan persoalan agama. Mengapa? Sebab dalam kerangka pemikiran mainstream, permasalahan agama, adalah persoalan suci dan profan, benar dan salah, atau baik dan buruk, sehingga perjuangan atas nama agama menjadi suatu "perjuangan suci", dan jika mati dalam rangka melaksanakan perjuangan tersebut, disebut martir atau mati syahid.

John Hick adalah seorang pemikir yang dianggap sebagai penggagas upaya pencarian titik temu agama-agama dengan konsep pluralisme agama. Hick mendefinisikan *religious pluralism* sebagai berikut:

Philosophically, however, the term refers to a particular theory of the relation between these traditions, with their different and competing claims. This is the theory that the great world religions constitute variant conceptions and perceptions of, and responses to, the one ultimate, mysterious divine reality. Explicit pluralism accepts the more radical position implied by inclusivism: the view that the great world faiths embody different perceptions and conceptions of, and correspondingly different responses to, the Real or the Ultimate, and that within each of them independently the transformation of human existence from self-centeredness is taking place. Thus the great religious traditions are to

be regarded as alternative esoteriological 'spaces' within which--or ways along which--men and women can find salvation, liberation and fulfillment. (Husaini. 2004: 7).

Definisi di atas menyimpulkan bahwa agama-agama besar mengandung persepsi-persepsi varian dari "yang asal", yaitu realitas ketuhanan yang misterius dan respon-respon terhadapnya. Pada akhirnya Hick sampai pada satu kesimpulan bahwa agama pada hakekatnya adalah jalan yang berbeda-beda menuju tujuan (the Ultimate) yang sama. The Real atau Yang Ada (Tuhan), hanya Esa, namun penyebutan dan interpretasi manusia saja yang berbeda-beda. Pluralisme agama Hick kelihatannya adalah bentuk pengembangan dari paham inklusivisme. (Thayib, ed. 1997: 70). Dr. J. Verkuil dalam bukunya *Samakah Semua Agama?* Memuat kisah Nathan der Weise (Nathan yang Bijaksana) karya Lessing (1729-1781). Kesimpulan dari kisah itu adalah bahwa semua agama intinya sama saja. Intisari agama Kristen, menurutnya adalah Tuhan, kebajikan, dan kehidupan kekal. Intisari itu, demikian Verkuyl, juga terdapat pada agama Islam, Yahudi, dan agama lainnya. Konferensi Parlemen Agama-agama di Chicago tahun 1893, selanjutnya mendeklarasikan bahwa seluruh tembok pemisah antara berbagai agama di dunia sudah runtuh. Konferensi itu, lebih jauh menyerukan "persamaan" antara Kon Fu Tsu, Budha, Islam dan agama lainnya.

Pada level Indonesia, Nurcholis Madjid, Ulil Abshar Abdalla, dan Said Agil Siradj, termasuk cendekiawan yang mengusung "pluralitas" dengan tendensi "menyamakan" agama-agama yang ada. Ulil Abshar Abdalla menyatakan, "Semua agama sama. Semuanya menuju jalan kebenaran. Jadi, Islam bukan yang paling benar." (Gatra, edisi 21 Desember 2002). Said Agil Siradj menyatakan bahwa agama Islam, Yahudi dan Kristen adalah agama yang "sama-sama" memiliki komitmen untuk menegakkan kalimat Tauhid, karena, secara geneologi, ketiga agama ini, mengakui bahwa Ibrahim adalah 'the foundation father's. (Noersena, 2001: 165-169). Abdul Munir Mul Khan menyatakan bahwa agama-agama hanyalah salah satu "pintu" menuju surga Tuhan yang satu. Dan surga Tuhan itu hanya bisa dimasuki dengan keikhlasan, pembebasan manusia dari

kelaparan, penderitaan, kekerasan dan ketakutan, tanpa melihat agamanya. (Mul Khan. 2002: 44).

Senada dengan para tokoh pembaharu di atas, Nurcholis Madjid berpendapat bahwa Islam “bukanlah” nama agama. Dengan menginterpretasi Q. S. Ali Imran ayat 67, yang menceritakan tentang polemik kecil antara Yahudi dan Nasrani. Kedua kelompok ini, demikian Nurcholis, mengklaim Nabi Ibrahim a. s. masuk ke dalam golongannya. Lalu Al-Qur’an menegaskan bahwa Ibrahim adalah “hanîfan musliman”. Yang terakhir ini diartikannya “seorang pencari kebenaran yang tulus dan murni (*hanif*), dan seorang yang berhasrat untuk pasrah”. Ia keberatan bila kalimat itu diartikan bahwa Ibrahim adalah seorang muslim. (Rasyid, 2002: 54). “Islam” bagi Nurcholis bukanlah nama sebuah agama formal (*organized religion*), karena menurutnya, istilah itu muncul pada abad kedua hijrah. Setiap agama yang mengajarkan sikap tunduk dan berserah diri, dalam pandangannya, adalah Islam. Karenanya, bukan hanya Islam (sebagai *organized religion*), namun Kristen, Yahudi, Hindu, Budha dan lain-lain adalah Islam. (Ibid).

Pada level ke-Indonesia-an, cendekiawan yang tergolong pluralis mengindikasikan betapa banyaknya konflik antar umat beragama (baik antar maupun intern) disebabkan karena sikap eksklusif para pemeluknya terhadap ajaran agama mereka. Yang terakhir ini, menurut mereka, cenderung menjadi “pemberhalaan” konsep ajaran agama itu sendiri, sehingga sebagian umatnya lupa pada esensi agama yang sebenarnya yaitu sikap tunduk dan pasrah pada kebenaran. Karena –mengutip istilah Nurcholis Madjid– sebaik-baik agama di sisi Allah (baca: Yang Mutlak-pen) ialah *al-hanafiyat al-samhah*, semangat kebenaran yang lapang dan terbuka. (Ibid). Karena itu, dengan perspektif “Teologi Inklusif”, kelompok ini berpendapat bahwa pandangan subjektif seperti, “Hanya agama sayalah yang memberi keselamatan, sementara agama Anda tidak, dan bahkan menyesatkan” akan mengakibatkan sikap menutup diri terhadap kebenaran agama lain, dan berimplikasi serius atas terjadinya konflik atas nama agama dan Tuhan.

Dengan demikian, sikap *truth claim* harus dihindari, dan bahwa perbedaan pandangan itu sebagai suatu keniscayaan. Oleh karena itu, yang harus dicari adalah nilai-nilai kesamaan antaragama dalam rangka untuk membangun harmonisasi kehidupan umat manusia. Al-Qur'an sendiri telah mengisyaratkan hal tersebut dalam Q. S. Ali 'Imran ayat 64.

Kemudian, bagaimana dengan perbedaan antaragama?. Aspek perbedaan biarlah menjadi keyakinan masing-masing, seperti ketuhanan Trinitas dalam Kristen, atau konsepsi dewa-dewi dalam Budhisme, sesaji, pembakaran mayat, ataupun upacara-upacara suci lainnya yang ada pada masing-masing agama.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa pada esensinya semua agama menekankan pada ajaran pietisme (kesalehan), yakni proses pembersihan jiwa dengan melakukan berbagai kebajikan yang bersifat individual maupun sosial. Islam mengajarkan *âmanû wa 'amilu al-shâlihat* (beriman dan beramal shaleh) ataupun *tazkiyat al-nafs* (pembersihan jiwa), begitu pula dengan Kristen yang menekankan ajaran cinta kasih, serta Buddha dan Hindu yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral dengan tujuan akhir karmaphala atau moksa.

Penutup

Setiap agama memiliki dua sisi dalam ajarannya yaitu sisi eksoteris (lahiriah) dan sisi esoteris (batiniah). Keragaman ajaran keagamaan pada seluruh agama dapat dilihat pada sisi eksoteris (lahiriah) yang berkaitan dengan tata cara ritual keagamaan masing-masing agama. Sementara, aspek esoteris atau batiniah berkaitan dengan tujuan dasar dan esensial dari mengapa orang beragama. Pada tataran ini, setiap agama memiliki tujuan akhir yang sama yang berpuncak pada keyakinan bahwa tujuan masing-masing agama pada hakekatnya adalah menggapai Tuhan. Namun demikian, dalam realitas dan cara yang dilakukan, masing-masing agama memiliki tata cara dan aturan-aturannya tersendiri. Tata cara dan aturan-aturan yang seringkali dipahami secara berlebihan (eksessive) dari para pengikutnya dengan berusaha merendahkan para pemeluk agama yang berbeda darinya

inilah, merupakan hal-hal yang seringkali menimbulkan konflik antar pemeluk agama.

Jika semua agama berangkat dari faktor esoterisme masing-masing, sudah dipastikan akan terjadi harmonisasi kehidupan baik pada tataran sosial, politik, ekonomi maupun budaya, karena tidak ada satupun agama yang mengajarkan kepada pemeluknya untuk melakukan tindakan anarkhis, intimidasi, a susila ataupun kriminalitas lainnya. Ringkasnya, sudah saatnya kita membangun peradaban baru dengan esoterisme yang lapang terhadap perbedaan dan keragaman.

Daftar Pustaka

- Anshori, M. Afif, 2004. *Dzikir Demi Kedamaian Jiwa - Solusi Tasawuf Atas Problema Manusia Modern*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Anshary, Muhammad Abd Haqq, 1986. *Sufism and Shari'ah*, Islamic Foundation, London.
- Abdullah, Syamsuddin, 1977. *Ilmu Agama (Uraian tentang Obyek dan Metode)*, Fakultas Ushuluddin, Yogyakarta.
- Clarck, Walter Houston, 1967. *The Psychology of Religion*. Mc Millan. New York.
- Cudamani, t.t. *Karmaphala dan Reinkarnasi*. Hanuman Sakti.
- Departemen Agama RI, 1987. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an.
- Departemen Agama RI. , 1986/87. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Qur'an Dept. Agama. Jakarta.
- Echols, John M. & Hassan Shadly, 1996. *Kamus Inggris-Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Effendi, Djohan, 1993. *Sufisme dan Masa Depan Agama*. Pustaka Firdaus, Jakarta.

Gatra, edisi 21 Desember 2002

Guenon, Rene, *The Lord of the World*, Terj. dari *Le Roi du Monde* (North Yorkshire: Coombe Springs Press, 1983).

Husaini, Adian, 2004, *Tinjauan Historis Konflik Yahudi Kristen Islam*, Jakarta: Gema Insani Press.

Hornby, A. S. , 1974. *Oxford Advance Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press, Oxford .

Maswinara, I Wayan (editor), 1998. *Buku Pendidikan Agama Hindu untuk Perguruan Tinggi*, Paramita, Surabaya.

Mulkhan, Abdul Munir, 2002. *Ajaran dan Kematian Syekh Siti Jenar*, Kreasi Wacana, Yogyakarta.

Nasution, Harun. 1978. *Filsafat dan Mistisisme dalam Islam*. Bulan Bintang, Jakarta.

Nasr, Sayyed Hossein, 1996. *Ideals and Realities of Islam*, (London: George Allen & Unwin Ltd,

Niftrik, C. G. van DR. B. J. Boland, 1987. *Dogmatika Masa Kini*. BPK Gunung Mulia, Jakarta.

Noersena, Bambang, 2001. *Menuju Dialog Teologis Kristen-Islam*, Yayasan Andi, Yogyakarta.

-----, (Editor), 1986. *The Essential Writings of Frithjof Schuon*, (New York: Amity House Inc..

-----, 1993. *The Need for a Sacred Science*. State University of New York, New York .

Rasyid, Daud, Dr. MA, 2002. *Pembaruan Islam dan Orientalisme dalam Sorotan*, Akbar Media Eka Sarana, Jakarta.

Schuon, Frithjof. 1986. *The Essential Writings of Frithjof Schuon*, Ed. Seyyed Hossein Nasr. Amity House Inc. New York.

Suja, I Wayan. 2003. *Perkembangan Agama Hindu di Indonesia*, dalam Elga Sarapung, *Sejarah, Teologi dan Etika Agama-agama, Dian/Interfidei*, Yogyakarta.

- Sukartha, I Ketut, dkk, t.t. *Widya Dharma Agama Hindu*, Ganeça Exact, Bandung.
- Schimmel, Annemary, 1986. *Mystical Dimension of Islam*, trans. Sapardi Djoko Damono, Pustaka Firdaus, Jakarta.
- Schuon, Frithjof, 1976. *Islam and the Perennial Philosophy*. World of Islam Festival Publishing Company, Ltd.
- , 1990. *To Have a Center*, World Wisdom Books, Bloomington.
- Sugiharto Bambang, 1996. *Postmodernisme: Tantangan bagi Filsafat*, Kanisius, Yogyakarta.
- Thayib, Anshari dkk. (ed.), 1997. *Ham dan Pluralisme Agama*, (Jakarta: Pusat kajian Strategi dan Kebijakan (PKSK).
- Verkuyl, J., 1976. *Etika Kristen Bagian Umum*, PBK Gunung Mulia, Jakarta.
- Waterfield, Robin, 1987. *Rene Guenon and the Future of the West: The life and writings of a 20thcentury metaphysician*, Crucible.

From ‘Abd Allah to Khalifat Allah: *Imagining a New Model of Indonesian Muslim Education*

**Prof. Abdurrahman
Mas`ud, Ph.D.**

*Kepala Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstrak

Humanism Agama adalah suatu paradigma baru dalam mengimplementasikan pendidikan agama di Indonesia. Paradigma ini memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti common sense, individualisme untuk mendapatkan kemerdekaan, kehausan untuk memperoleh pengetahuan, ajaran dalam pluralistik, kontekstualism, keseimbangan antara hukuman dan ganjaran. Humanism Agama penting untuk diperkenalkan pada masyarakat Indonesia karena sistem pendidikan Islam yang sekarang sedang berjalan belum mengembangkan potensi pelajar, dan sering berorientasi pada individu saja.

***Kata kunci:** Humanisme agama, Pendidikan, Mahasiswa*

Background

Religious Humanism (RH) is a way of religious outlook that places human as human, and an effort to humanize science with its faithfulness to the bond with God and bond with people or *hablum min Allah* dan *hablum minannas*. This paradigm in Islamic education is characterized by common sense, individualism with its emphasis on individual responsibility, thirst

for knowledge, pluralism, contextualism that favor functionalism over symbolism, and the balance of reward and punishment.

There are some reasons underlining the implementation of this concept for Indonesian Muslim education. The next argument clears up why RH needs to be developed and reintroduced in Indonesia. Religiosity that underscores ritual and vertical relationship. It is indisputable that religiosity in Indonesia is much characterized by ritual piety than social piety. Social control, *amr ma'ruf wa nahy munkar*, is only effective through words. Why the fasting Ramadan keeps Muslims busy, while in the month after Ramadhan, mosques are relatively empty, and why the number of pilgrims get increased years after years, even in such period of national crisis.? Another question should be addressed as to why the practice of corruption in Indonesia does not yet show its sign of decline despite so many efforts, and of religious national leaders. The contradictory question yields a fact that religiosity in this archipelago suffers a gap between the concept of *hablum minallah wa hablum minannas*, *bond with God and with people*.

The implication of the above faith style is social phenomenon characterized by its richness of ritual and religious culture, lacking of spiritual values in the benefit of humanity. The sentiment of this community is high when it deals with prayer, *halal* and *haram* and anything in the name of God.

On the other hand, religious sensitivity becomes unsharpened when the problems faced are dealing with human affairs such as corruption, injustice, inappropriate acts against the poor and the oppressed. That these problems remain significant Indonesia is an evidence that Muslim community in Indonesia are not problem-solvers. Problem solving by definition is putting what you know and what you can do into action. Not that Indonesian community do not know about their problem. Indeed they do, but always having difficulty to put them into praxis. In the field of education and also leadership, problem solving should remain very important. Because

of this inability to apply the concept of problem solving in a wide sense, this community is in a big trouble in solving its national crisis in all-encompassing dimensions, while other neighboring countries have successfully solved their own problem.

As a direct impact of the above problem, social piety (*salih*) is far away from the community. *Salih* in the pesantren tradition is usually the opposite of *talih*. Looking at its real meaning carefully, one will note that the opposite of *salih* as mentioned in the holy qur'an is *fasad*. Muhammad Asad interprets *la tufsidu fil ardl: do not spread corruption on earth*. Corruption is anything that against the natural law or *sunnatullah*. The background of the revelation is related to the hypocrites of Medinan who pretended to be Muslims. It is indeed a close and direct relation between hypocrisy and the act of spreading corruption on earth. As an actual and current illustration could be understood, namely the same phenomenon taking place in Indonesia encircled by its richness of corruption and two-facedness

In Indonesian community, destructive action can be found ubiquitously as mentioned above. At least there are malpractice in government not to mention in the neighborhood of religious department, society, maltreatment of ocean, nature, and forest. All of this transgression is rooted in the human actor. So unless the number of corruption lowers, the number of hypocrites are still significant. It is relevant to quote the Prophetic tradition in this context. "No religion, for those who have no trust." In daily practice it seems hard to build trust here at least among politicians, businessman, and society at large.

Students potentials are not yet proportionally developed. The available transmission of knowledge do not concentrate on human resources development or even individual-oriented.

Different policies of education on the national level has been set up interchangeably. Old paradigm was always teachers-centered education. Since 1980s students-centered education had been introduced. However, field research showed that students remained inactive, even there was a joke "the new concept" means many

students became more stupid. The ineffectiveness of this method is caused by many things. Among others are teachers' unpreparedness, unmatched references used at schools, and other cultural reasons. The available educational policies aims at more physical development than character building.

Students responsibility and independence is still far from achievement in education. It is assumed that the undesired condition is due to the way community believe which lacks of attention on the concept of *khalifatullah*. The latter was less paramount than the concept of *`abdullah* in the community. Again education cannot be separated from the way of religious life in the community. In general, Muslims believe that to be a Muslim should be to be *salih, santri*, to be good *`abdullah*, a slave who devotes his entire life to God to get His *ridha*. This kind of philosophy is not incorrect in the standard of the religion, but it is still imperfect. Vertical responsibility in this concept is unquestionable, but horizontal responsibility including social and universal obligation are not well noticed. Individual responsibility to institutionalize the teaching of God in the field of *hablum minannas* is again having trouble.

The nature of Humanistic Muslim Education

The characteristic of this new paradigm is the results of reflective efforts and the reconstruction of Islamic history with the emphasis of the first five centuries, and of the normative teaching of Islam, and universal Humanistic values as well. These characteristics are an approach and axiom which offer basic principles. There are at least six fundamentals that need to be reconsidered in Islamic education as follows:

Common sense

That an individual is *khalifatullah fil ardl*, is historically caused by the power of Adam to reason, power of knowledge. That's why the term used in the Qur'an is *`allama* which means God taught Adam. This means that Adam as a student will be provided with divine

knowledge. This knowledge differentiates Adam from any other creatures which are invalid to be *Khalifatullah fil ardl*. This learning process had brought adam to the status of *`alim*. In Islam *al-`Alim* is more noble than *al-`Abid*, the worshiper symbolized by angles. Indeed, in Islam those who acquire knowledge are more respected than those who merely worship God all the time. The superiority of the learned man, *al-`alim*, over the worshipper, *al-`abid*, is like Muhammad's superiority over the least of Muslims. (Sunan At-Tirmidzi: 7). Among Muslims this last *hadith* is so popular that they consider seeking knowledge to be an integral part of performing worship.

Shortly, common sense is the distinctive element. In a famous verse, it is mentioned: *yarfa`I Allahu alladhina amanu minkum wa utul `ilma darajat*. In other verse it is taught that common sense and listening are both important. Those who do not exercise their common sense and listening are losers and part of *ashab al-sya`ir*, the residents of hell.

That education in Indonesia does not yet focus on the common sense, could be seen on the learning process that puts more focus on whatso called *what oriented-education*, rather than *why oriented-education*. The *oriented-education* is dominated by method of memorization, since students have to memorize bigger part of materials. Many occasions reveals that most teachers are complaining the too overload of students materials. Accumulating materials, giving information are method and goal of this kind of education. That is why, the room for reasoning and interactive academic activity here almost does not exist. Anything connected with common sense is so minor that distract both teacher and students. A very nice example is given by an educational anthropologist, Professor Ron Lukens-Bull, that there is a joke inspired by Friere's ideas which says that a lecture is the process by which information is transferred from the teacher's notebook to the students notebooks without passing through the minds of either. Although a joke, there is great wisdom here, exactly of the nature called for by Friere. Friere calls us as teachers to abandon our posture of authority in as far as we can (in the end we still have to hand out

grades, although I am sure Friere would want to see an end to that whole system) and think of ourselves as guides, more advanced students, who can lead the students to discover for themselves the lessons we wish them to learn.

Individualism to get independence

Individual preparation to be pious, perfect with some skills and independent is a concrete goal of Islamic education. So far there is a common misunderstanding of Individualism It is misunderstood as egoism, *selfish*, and in Arabic *ananiyyah*, whis is slef-benefit. The conventional presumption is that individualism is more Western, and it can be seen from the word I always capitalized, indicating super ego of the West. Therefore, the Oriental people generally stereotype Western people as individualistic, egoistic, in accord with their famous ideology of individualism.

The appropriate individualism in the Western concept should match with a popular Arabic poem as follows:

“Innal fata man yaqulu ha anazda laisal fata man yaqulu kana abi”

Indeed, a youngster is he who is self-reliant, He is not the one who takes advantage of his father's nobility.

Self-reliance or independence is the most important part of individualism. In this case individualism is not unfamiliar. If its emphasis is on one's responsibility, it is indeed recommended in Islam. That all parts of one's body will be responsible for what they have done in this world can be seen in the verse as follows:

“That Day we shall set a seal on their mouth. But their hands will speak to us, and their feet bear witness, to all that they did.”(Qur'an, 36: 65).

This verse should be reinterpreted as a duty of education to institutionalize responsibility of every person including individual, social, universal, and religious responsibilities.

Thirst for knowledge

Islam is a religion that definitely places knowledge in a very special status. "Allah will exalt those who believe among you and those who have knowledge, to high degrees.". (Qur'an, 58: 11). And it is Islam that absolutely promotes its followers to acquire knowledge as far as they can, even as far as China *utlubul `ilma walaukana bishshin*, This Hadith was relevant to the situation of the seventh century due to the progress of Chinese civilization at that time. Presently the Hadith should be reinterpreted by meaning *Utlub al-`ilma walaukana bil amerika au walau kana bil yaban*: to pursue knowledge in either Japan or the US. Also seek knowledge from cradle to grave, *minal mahdi ila al-lahdi*, a teaching which is more than life long-education.

As a matter of fact, there has been a strong linkage between the learning and its prime mover, since Islam is a religion that distinctly places knowledge in a very special status. Allah would exalt to high degrees those who believe among Muslims and those who have knowledge. It is also a significant fact that the Prophet's first experience of the *wahy* of the Qur'an started with the divine command "read," *iqra*. (Qur'an, 96: 1- 5). The following *ayat* confirms that by the pen, *al-qalam*, Allah taught men how and what one did not know. This verse thus absolutely signifies the importance of reading as an intellectual activity and of writing which is attributed to *al-qalam*, in the process of teaching-learning in a wide sense. To many Muslims the Qur'an itself is not only a book of guidance, *huda lil muttaqin*, but also an inspiring summons to undertake an intellectual pursuit. The words, *ya`qilun*, and *ya`lamun*, which mean to reflect and to have knowledge are, for instance, quite ubiquitous in the Qur'an. The word `aql in different forms can be found at least 49 times in the Qur'an, while `ilm occurs more than 450 times. This calculation is based on the various derivations of the two words, however, they all come from the two mentioned roots.

The special position of seeking knowledge above have been proven by the historical fact of the Golden age of Islam in the past, especially from the seventh century up to the eleventh century.

The Teaching of Pluralism

Indonesia is a plural society state. Sociologically it is any society in which there exists a formal division into distinct racial, linguistic, or religious groupings. Such distinction may be horizontal or vertical. (David Jary. 1991)

It is normatively understood that Islam appreciates diversity. In a popular teaching : *wa in tasawau lahalaku*: if all of you are similar, you will be diminished. Greater traditions were made of small traditions.

Anyhow, like other developing countries, Indonesia is still facing pluralism problems. "*How to accept others, while we disagree?*" is a simple definition that always include the issue of tolerance. In the US, there is a political proverb that is institutionalized in society "*I disagree with what you said, but I'll defend to the death your right to say it*".

Various ethnic riot in Indonesia lately indicated that pluralism is still a major problem. Field research shows that both Muslims and non-Muslims prohibit their children to turn on radio or TV with religious other programs. The case is also the same at school. Although it should be noteworthy that so many Muslim students go to non-Muslim school for the school favorite and model.

Had not the Indonesian founding fathers developed pluralistic attitudes, Indonesia would never have embraced the Pancasila as a state ideology, which is other than "Islam" despite the fact that the population consists more than 90 % Muslims. Before the country was beset with multi dimensional crisis in 1997, Indonesia was famous with its peace, tranquility, and its mutual respect that attracted international visitors. Instead of a culture of aggressive defense there were openness and tolerance. Even the former president and former chairman of the influential traditional Islamic Nahdatul Ulama Organization, Abdurrahman Wahid, calls for religious tolerance, human rights and protection of the Christian minority", what was confirmed by Franz Magnis-Suseno, a Christian missionary who teaches in Indonesia. After the crisis, the statistic of the visitors dropped. Even some Indonesianists such as Mark Woodward and

Ron Lukens-Bull, cancelled their travel to the country because of the unpredictable and nuncrollable situation in 2001. .

Different from most Muslim countries, Islam was brought to Indonesia with peace through trading and spiritual healing in the hands of Muslim Sufis. Pluralistic and egalitarian nature of Islam are believed to have attracted Indonesian mass to embrace Islam in the 13th century.

Normatively Islam supports pluralism and *cross-culture*. The Qur'an indicates that people are made of *nationalities, tribes* to know one another (Qur'an, 49:13) Mankind brotherhood, is therefore, strengthened in Islam. Besides Islam demoralizes any racial, tribal, national, and primordial prejudices. This philosophy should be followed in a daily life practice. The history of classical Islam shows *cross-culture* between Islamic culture and the Greek had produced an amazingly new civilization.

Contextualism which is more function over symbolism

Indonesian society used more symbol than function. Beset with symbolism, they live with the past-oriented than future-oriented. The dominant santri community had justification for this with their principle *al-muhafadhatu `ala qadim al-salih, wal akhdhu bil jadidi al-aslah* to preserve a good tradition from the past, and to adopt a better thing which is a new. Their history also shows that classical books (kitab kuning) has been overwhelmingly maintained. This community has been in forefront to maintain tradition and local culture. This does not mean that what they are doing is bad. Because as matter of fact there are so many positive aspects behind traditionalism which is different from conservatism. My dissertation shows that the pesantren community has shown their progress through outstanding Muslim scholars such Nawawi al-Bantani who used to be master of Hijaz. (Rachman, 1997. Dissertation).

Therefore, it is not only pesantren community who preferred symbol or structure-oriented. In public school this phenomena is

also distinct. When the writer had a chance to teach philosophy in a prestigious university in Central Java, most students tended to memorized the material. Why Indonesian students mostly did not speak both English and Arabic while they have been learning the languages since childhood? This is because they learn more grammar and structure than the function of the languages. This is ironic because *language is a set of habits and means of communication*. How can they use the languages while they never practiced the language as both speaking and writing skills. *Shortly the idea of function is not that popular in the country.*

In Islam, principally essence and function should not be defeated by symbolism. The Holy Qur'an suggests: *Lan yannala Allaha luhumuha wala dima'uha wa lakin yanaluhuttaqwa minqum.*

The balance between reward and punishment

In the West, there is a theory that needs to be considered in the east: *"The experimental evidence suggests that the most effective system of rewards and punishments is one in which the former are emphasized and the latter minimized or avoided whenever possible."* (International Encyclopedia. 1968:218).

In the East including in Indonesia, punishment in schools is rampant. This is believed to have discouraged students to be self-confident and self-esteem. In the basic tenet of Islam, the balance between the two method should be applied. The Prophet Muhammad life was beset with giving more rewards to his community rather than punishment despite the fact that he was harshly punished and kicked out from Mecca, his own community, he showed no revenge.

Conclusion

RH is a religious concept that places human as a human, and is an effort to humanize sciences with its responsibility to the bond with God and people. Should this concept be applied in Islamic education, it emphasizes common sense, individualism to reach independence

and responsibility, thirst for knowledge, teaching of pluralism, contextualism that prioritizes function over symbol, and the balance between reward and punishment.

The implementation of this concept is a must, due to the following considerations and problems. The educational and religious phenomenon in society indicate repeated unsolved problems. Among others are vertical and ritual religiosity are very dominant, social piety is far away, Students potentials are not yet proportionally developed, and students responsibility and independence is still far from achievement in education

This research has successfully discovered some findings and at the same time recommended some paradigmatic changes in Indonesian Muslim education such as from punishment-oriented to reward-oriented to empower students' potentials.

To give honor and respect to humanity is basic principle of Humanism. At the same time, individual cannot be divorced from his important *divine agency* or *khalifatullah* mission. This means the main job of a teacher is to prepare students with his love to be a pious individual who has social, religious and universal responsibilities. His job is not only to transfer *knowledge, and values* as commonly mistaken, since what kind of values will be passed to students is still questioned. The certain thing in line with the concept of RH is preparing individual to reach responsibility and perfection or *istikmal*. This implies a teacher is required to do his best to help students become himself, an *insan kamil*, a perfect model in the eyes religion and people at large. The method definitely involves the participation of both students and teacher which includes *process of becoming, process of educating, liberating, and civilizing*.

Bibliography

- Mas'ud. Abdurrahman, 2002. *Menggagas Format Pendidikan Islam Nondikotomik: Humanisme Relijius Sebagai paradigma Pendidikan Islam*. Gama Media Jogjakarta: September.
- _____, 1999. "Menggagas Pendidikan Islam Non-Dikotomik", *BIMA SUCI*, No. 10, tahun 1999.
- _____, 2000. "Reward and Punishment in Islamic Education", *Ihya `Ulum -al-Din* vol.2., no.1, Feb.
- _____, 1997. *The Pesantren Architects and Their Socio-Religious Teachings* Disertasi UCLA, AS.
- Wahid. Abdurrahman, 1999. *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, LKIS.
- Dodge, Bayard, 1962. *Muslim Education in Medieval Times*, Washington, D.C.
- Doren, Charles Van, 1991. *A History of Knowledge*, New York.
- Jary, David, *The Harper Collins Dictionary of Sociology*, (New York: 1991)
- Drewes, 1978. *An Early Javanese Code of Muslim Ethics*, (the Hague: 1978)
- Eko Wijayanto, 2001. *Menumbuhkan Keberagaman yang Humanistik*," *KOMPAS*, 3 Agustus.
- George Makdisi, 1990. *The Rise of Humanism in Classical Islam and the Christian West*, Edinburgh.
- International Encyclopedia of the Social Sciences*, volume 13 and 14, (New York: 1968).
- James Hitchcock, 1982. *What is Secular Humanism?* Servant Books.
- Jonathan Berkey. 1993. *The Transmission of Knowledge in Medieval Cairo*, New Jersey.
- Maududi in *the Meaning of the Qur'an*, (Delhi: 1988), vol III
- Muhammad Asad, 1992. *the Mesagge of the Qur'an*. Spain.
- Sheila Ellison, 1996. *368 Ways to Help Your Children Grow*, Illinois, US.

Dakwah Berbasis Multikulturalisme

**A. Ilyas Ismail &
Prio Hotman**

Dosen FIDKOM UIN
Syarif Hidayatullah
Jakarta

Peneliti Forum
Kebebasan untuk
Keadilaan dan
Kemanusiaan (F-3K)
Jakarta.

Abstract

In the last three decades, many views of an exclusive and less friendly to ethnic-cultural diversity emerged clearly. Religious ethnic-cultural diversity is considered as a barrier to a political stability. Due to this assumption, the immigrants, minorities and rural residents have been marginalized by the object of political policies with ethnocentrism bias. At the end of the twentieth century and into the twenty-first century, spearheaded by a number of Western countries, a discourse that is more friendly towards multiculturalism has developed to support sensitiveness to diversity, and to recognize the rights and the existence of minorities.

Key words: *globalization, multiculturalism, inclusiveness, cultural propaganda.*

Pendahuluan

Pada penghujung abad kedua puluh dan memasuki abad dua satu ini, timbul wacana baru dalam pemikiran dakwah, sebagai respon terhadap perubahan-perubahan besar yang terjadi, misalnya pergeseran pola pemikiran dari modern ke paska modern. (Banting. 2006: 18). Paradigama baru dakwah

ini, dilatarbelakangi terutama oleh dua fenomena baru paska modern, yakni globalisasi dan perkembangan politik praktis. (Southphommanase, 2005:401).

Baik fenomena globalisasi, maupun perkembangan politik praktis di dunia belakangan ini, masing-masing menghadapi persoalan dakwah kontemporer kepada bentuk masyarakat majemuk multi budaya dan multi etno-religius. (Squires. 2002: 114).

Dari sudut persoalan globalisasi, dakwah dihadapkan kepada persoalan tentang bagaimana caranya menyampaikan pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat global yang ditandai dengan makin sempitnya sekat-sekat antar kultur dan sekat masyarakat etno-religius. (Effendy. 2001: 5).

Pada masa lalu, dakwah masih mungkin bersikap abai terhadap perkembangan yang terjadi di luar dunia Islam misalnya, namun pada masa kita sekarang -di mana istilah dunia muslim sendiri seolah terlihat kabur batas-batasnya oleh fenomena globalisasi- dakwah tidak bisa tidak harus memberi respon, dan dipaksa untuk terlibat secara aktif menghadapi semua fenomena yang terjadi di seluruh belahan dunia. Untuk tujuan ini, umat muslim tidak bisa bekerja sendirian, tapi perlu melakukan interaksi yang lebih intens dan persuasif dengan banyak komunitas etnis dan etno-religius di seluruh dunia. (Knitter. 2008: 118).

Persoalan-persoalan dunia saat ini tidak lagi bersifat lokal, dan karenanya tidak lagi menjadi tanggung jawab komunitas tertentu. Lebih dari itu, persoalan-persoalan itu kini mengglobal, menjadi persoalan umat manusia secara umum, dan karenanya menjadi tanggung jawab bersama. (Ibid: hal. 119).. Penyelesaiannya tidak mungkin secara independen, tapi interdependensi yang menuntut keterlibatan aktif semua anggota masyarakat dunia secara simultan. Keharusan mereka untuk terlibat dalam memecahkan persoalan global, pada gilirannya tidak lagi mengizinkan suatu peradaban atau komunitas mengisolasi diri dari peradaban atau komunitas lainnya. (Ibid, h. 4).

Sebagai implikasi dari tuntutan politik demokrasi yang tidak mungkin ditolak, dakwah juga, seperti telah disinggung di atas, dengan sendirinya dihadapkan kepada persoalan seputar hak-hak sipil dan HAM, serta pengakuan akan eksistensi kelompok minoritas, yang sebagiannya dulu tidak pernah disinggung dalam sejarah dakwah. Sebut saja misalnya konsep tentang ahlu dzimmah atau jizyah. (Huwaidi, 1999).

Basis pemikiran dakwah multikultural sejatinya berangkat dari pandangan klasik dakwah kultural, yakni pengakuan doktrinal Islam terhadap keabsahan eksistensi kultur dan kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan prinsip tauhid. Hanya saja, dakwah multikultural berangkat lebih jauh dalam hal intensitas atau keluasan cakupan kulturalnya. Kalau dakwah paradigm kultural hanya berfokus pada persoalan bagaimana pesan Islam dapat disampaikan lewat kompromi dengan budaya tertentu, maka dakwah multikultural memikirkan bagaimana pesan Islam itu disampaikan dalam situasi masyarakat yang plural, baik kultur maupun keyakinannya, tanpa melibatkan unsur “monisme moral” yang bias merusak pluralitas budaya dan keyakinan itu sendiri. Pendekatan multikulturalisme mencoba melihat yang banyak itu sebagai keunikan tersendiri dan tidak seharusnya dipaksa untuk disatukan, tetapi tetap berjalan harmonis dalam keragaman. (Mulyana, 2003: 69). Intinya, pendekatan multikulturalisme dalam dakwah berusaha untuk mencapai dua hal, yaitu titik temu dalam keragaman, dan toleransi dalam perbedaan. Dakwah dengan pendekatan multikulturalisme adalah sebuah pemikiran dakwah yang *concern* pada penyampaian pesan-pesan Islam dalam konteks masyarakat plural dengan cara berdialog untuk mencari titik temu atau kesepakatan terhadap hal-hal yang mungkin disepakati, dan berbagi tempat untuk hal-hal yang tidak bisa disepakati. (Ibid, hal. 45).

Karakteristik Dakwah Berbasis Multikulturalisme

Sebagai paradigma baru dalam dakwah yang dihadapkan pada persoalan globalisasi dan perkembangan politik praktis, maka

dakwah berbasis multikulturalisme memiliki ciri khas tersendiri yang membedakannya dengan dakwah konvensional. Terkait dengan ini, setidaknya dapat disebut empat ciri khas yang perlu diperkenalkan jika ingin melakukan dakwah dengan pendekatan multikulturalisme.

Pertama, mengakui dan menghargai keunikan dan keragaman etno-religio. Dalam pendekatan multikulturalisme, keunikan masing-masing budaya atau keyakinan itu amat dihormati dan dihargai, sehingga multikulturalisme berbeda sama sekali dengan relativisme dan sinkretisme. Dalam multikulturalisme, keragaman budaya dan keyakinan itu dinilai sebagai sebuah fakta dan bukan problem, karenanya ia harus diterima apa adanya. (Ibid, hal. 96). Dalam perspektif multikulturalisme, orang boleh menentukan satu dari banyak keyakinan untuk dirinya, tanpa perlu menilai bahwa yang tidak dipilihnya itu lebih rendah nilainya dari keyakinan yang dipilih. Sebaliknya, masing-masing keyakinan dan budaya itu harus dilihat sebagai yang unik dan teman seperjalanan (*fellow traveler*). (Ujan, Op.Cit: 100). Karena itu, multikulturalisme tidak berarti relativisme yang memiliki konotasi menyamakan keyakinan atau budaya, dan bukan juga sinkretisme, yang berarti mencampuradukan beberapa paham ideologi atau keyakinan. Multikulturalisme bukan relativisme, yang berarti suatu paham yang menyamakan kebenaran-kebenaran lokal, dan bukan pula sinkretisme yang berarti sinkretisme yang serupa dengan relativisme, karena tidak memilih keyakinan atau budaya tertentu, karena beranggapan bahwa semuanya serba relatif, bisa diragukan, dan tidak bernilai.

Kedua, mengakui adanya titik kesamaan dalam keragaman etno-religio. Dalam pendekatan multikulturalisme, diakui adanya titik-titik kesamaan antara pelbagai keyakinan dan kultur yang beraneka ragam di samping juga tidak ditolak adanya aspek-aspek yang tidak mungkin dikompromikan (*uncompromisable*). Mengikuti alur berpikir multikulturalisme, keanekaragaman budaya dan keyakinan itu tidak mengandaikan suatu perbedaan yang tidak terjematani. Perbedaan-perbedaan itu, terbentuk oleh situasi dan konteks yang tidak terpatok mati dalam sejarah, melainkan selalu berkembang.

Karena itu, sesungguhnya dalam keanekaragaman budaya dan keyakinan selalu terdapat nilai-nilai bersama yang menjadi titik temu dalam membangun relasi sosial. Sebut saja nilai-nilai seperti cinta, kebenaran, penghargaan terhadap hidup, kesetiaan, integritas, kesamaan, tanggung jawab dan keadilan, adalah titik temu dari semua budaya dan agama, dan bukan milik agama dan budaya tertentu. (Ibid, h. 39). Maksudnya semua nilai yang disebutkan itu dapat ditemukan dalam semua budaya dan agama. Namun demikian, multikulturalisme juga mengakui adanya disensus dalam hal-hal yang sifatnya privat dan tidak bisa dikompromikan. Contohnya seperti detail-detail keyakinan dan ritualnya. Terhadap yang terakhir ini, pendekatan multikulturalisme berkepentingan untuk melakukan pengelolaan (manajemen konflik) terhadap perbedaan-perbedaan dan belajar hidup di dalamnya. Perbedaan-perbedaan itu harus diakui dan dihargai tanpa perlu menjadikannya sebagai gangguan atau lawan dari keharmonisan. (Ibid, h. 98).

Ketiga, paradigma fenomena keberagaman sebagai kultur. Pendekatan multikulturalisme mencoba memahami tingkah laku umat beragama sebagai sebuah fenomena kultur. Benar bahwa agama itu tidak bisa disamakan begitu saja dengan kebudayaan. Agama bersumber dari yang suci (*ilahiyyah*) dan sifatnya *immutable* dan *ahistoris*, sedangkan budaya sumbernya adalah akal manusia dan tidak bersifat suci dan menyejarah. Namun demikian, apa yang dinilai sebagai ilahi dan suci, tidak mungkin dipahami kecuali lewat yang manusiawi, duniawi (profane), dan menyejarah atau lewat mediasi budaya. Faktanya tidak ada agama yang bebas budaya, dan semenjak kelahirannya, budaya dan agama selalu saling mempengaruhi. (Ibid, h. 115). Melalui pola pikir ini, pendekatan multikulturalisme berusaha memahami dan mengakomodir perbedaan-perbedaan keyakinan tersebut dalam konsep dan bingkai budaya yang mendukung adanya toleransi (*tasmauh*), harmoni social, dan kerjasama untuk kebaikan dan takwa (*al-ta`awun `ala al-birr wa al-taqwa*).

Keempat, kemestian progresivisme dan dinamisme dalam memahami agama. Karena yang dilihat melalui pendekatan multikulturalisme adalah tingkah laku beragama sebagai sebuah kultur, dan bukan agama itu sendiri, maka pola pikir ini mengandaikan tak adanya “pensakralan” dalam wujud setiap kebudayaan agama. Setiap kebudayaan agama (religio cultural), begitu multikulturalisme, pada dasarnya berwatak “dinamis-progesif, yang bermakna bahwa setiap kebudayaan agama itu adalah suatu proses yang tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, sejalan dengan pemahaman dan penghayatan tentang agama itu sendiri, serta interaksi para penganut agama dengan sesamanya, dan seiring dengan dinamika dan perkembangan zaman dalam dimensi ruang dan waktudunia. Karena itu, walaupun esensi agama itu suci dan bersumber dari “yang suci”, tapi wujud empiriknya yang ditunjukkan melalui perilaku umat beragama adalah tidak suci dalam arti mutlak benar. Perilaku keberagamaan sejatinya merupakan konstruksi-kontekstual, yang selalu berkembang sejalan dengan situasi dan kondisi yang mengitarinya. Pola pikir multikulturalisme menolak pandangan “esensialisme eksklusif”, yang berpendapat bahwa pemahaman agama bersifat tetap, stabil dan tidak berubah, sehingga mereka yang memiliki paham berbeda, dipandang dan dihukumi sebagai kelompok sesat dan menyesatkan (*ahl al-bida` wa al-ziyagh*). Sikap dan paham yang memutlakkan diri ini, tentu tidak sejalan dengan semangat keragaman yang diusung multikulturalisme. (Ibid, h. 17).

Sebagai pola pikir yang relative baru, paham multikulturalisme menimbulkan pro dan kontra di tengah-tengah masyarakat muslim. (Misrawi. 2007: 215). Kelompok yang kontra, tentu melihat paham ini sebagai paham sesat dan merupakan “projek” Barat untuk melemahkan Islam. Sementara kelompok yang pro mencoba melihat segi-segi positif multikulturalisme, terutama bila dikaitkan dengan pluralitas etno-religio bangsa ini. Untuk keperluan ini, mereka tidak sulit untuk mencari akar-akar paham ini dari sumber-sumber utama Islam itu sendiri, yaitu al-Qur’an dan al-Sunnah, seperti di bawaah ini

Pertama, ditilik dari segi semantik, multikulturalisme yang secara leteral bermakna paham tentang keragaman budaya, maka dalam hal ini al Qur'an sejak dini telah memberikan isyarat bahwa manusia itu ditakdirkan Tuhan sebagai yang berbangsa-bangsa dan bersuku-suku (multietnis) agar mereka itu saling mengenal (*li ta'ârafû*). Keragaman bangsa dan suku itu, mengandaikan ketiadaan keseragaman keyakinan dan budaya. Karena itu, dalam ayat yang lain, al Qur'an menegaskan bahwa Tuhan tidak berkehendak untuk menjadikan manusia ini sebagai yang homogen. Kemudian dilanjutkan bahwa maksud dari ketentuan Tuhan menjadikan manusia sebagai multi etnis dan religius itu adalah agar mereka saling berlomba-lomba mencari kebaikan (*fastabiq al khairât*). (QS al Mâidah: 48). Dua kata kunci dari keterangan al Qur'an di atas, yakni saling mengenal (*li ta'ârafû*) dan berlomba-lomba mengejar kebajikan (*fastabiq al khairât*), adalah dasar dari sikap multikulturalisme tentang keragaman sebagai fakta di satu sisi, dan kesetaraan kaum beriman dalam kedudukannya sebagai teman seperjalanan (*fellow traveler*) di sisi lain. Artinya, bahwa keragaman budaya dan agama itu adalah kenyataan sebagai wujud dari kehendak Tuhan yang tidak mungkin ditolak, dan karenanya yang mungkin dilakukan manusia hanyalah konstruksi positif. Wujud kongkrit dari konstruksi positif itu adalah berupa pencapaian prestasi budaya yang bermanfaat bagi kualitas hidup manusia (*istibâq al khairât*), dan itu hanya mungkin diwujudkan bila mana telah terjadi dialog antar budaya dan keyakinan yang beragam (*bi al ta'âruf*).

Kedua, sebagai sebuah paham tentang keragaman, multikulturalisme sejatinya adalah kelanjutan dari paham pluralisme. Sebagai kelanjutan pluralisme, multikulturalisme berusaha untuk menegaskan –di samping mengembangkan –pemikiran pluralisme yang antara lain mengakui adanya *common platform* antar kebudayaan dan keyakinan yang beraneka ragam itu, sekaligus mengakui pula adanya aspek-aspek yang tidak bisa dikompromikan. Dari sudut doktrin Islam, pengakuan tentang *common platform* itu dilegitimasi melalui QS Âlu 'Imran/3: 64 yang berbicara tentang ajakan kepada kelompok agama lain untuk mencari benang merah atau titik kesamaan (*kalimatun sawâ'*) sebagai landasan menjalin dialog dan kerjasama

sosial. (Rachman, 2001: 16). Adapun mengenai hal-hal yang tidak mungkin disepakati, maka al Qur'an mengajarkan sikap toleransi (*tasamuh*) dan melihatnya sebagai yang unik. Ini dilegitimasi melalui QS al Kâfirûn/109: 6 "...bagimu agamamu, dan bagiku agamaku...". Mengenai yang terakhir ini, sikap toleransi diketengahkan sebagai bentuk pengakuan Islam atas keragaman keyakinan (dan juga budaya) yang tidak perlu diselesaikan oleh manusia. Demikian itu karena ia adalah hak prerogatif Tuhan, dan Tuhan yang berjanji akan menyelesaikannya sendiri di akhirat nanti. (QS. Al Hajj 59, QS Âlu 'Imrân: 55, QS Al Mâidah: 48, QS Al An'am: 164).

Ketiga, agama memang berasal dari Tuhan dan kesuciannya dipelihara oleh Tuhan sendiri (*wa innâ lahu lahâfizûn*), namun pemahaman manusia akan agamanya itu tidak suci, tapi berwatak historis dan berjalan dalam garis *trial error* menuju yang ideal. Karena itu, al Qur'an mengajarkan untuk tidak sekali-kali memutlakan sejarah, tetapi lebih kepada belajar apa yang kurang dari sejarah itu sendiri. Firman Allah "...sungguh telah berlalu ketentuan-ketentuan Allah, maka berjalanlah di muka bumi dan perhatikan kesudahan orang yang mendustakan..." QS Âlu 'Imrân/3: 137.

Keempat, karena pemahaman agama manusia itu tidak memiliki sifat suci, maka ia terbuka untuk dikritisi, didekonstruksi, dan diramu ulang sesuai dengan kebutuhan perkembangan kemanusiaan. (Rachman, 2010: 488). Terkait dengan ini, al Qur'an mencela orang-orang yang berpaham statis, tidak dinamis, atau mempertahankan status quo dan menjuluki mereka dengan sebutan *abawiyyun* (orang yang gemar mentaklid leluhur). Firman Allah "...dan jika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan oleh Allah, mereka berkata: tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami..." QS al Baqarah/2: 170.

Sedangkan landasan dari hadis, dokumen tentang pidato nabi Muhammad ketika haji perpisahan (khutbah haji wada'), merupakan pijakan kuat yang dapat dijadikan pendukung gagasan multikulturalisme.

Titik temu di antara pelbagai agama dan kebudayaan adalah ketakwaan. Dalam hal ini, ukuran yang digunakan bersifat ilahi, artinya, Tuhanlah yang berhak menghisab siapa sebenarnya yang paling bertakwa. Karena itu, multikulturalisme menjadi keniscayaan untuk mendorong toleransi dalam keragaman agama sekaligus meneropong wilayah etnisitas dan kebudayaan demi menciptakan tatanan sosial yang egaliter dan menghargai hak-hak manusia. (Misrawi. Op.Cit: 218).

Metode Dakwah Berbasis Multikulturalisme

Berpijak dari landasan dalil-dalil keagamaan di atas, para pemikir muslim progresif berusaha mengembangkan suatu pendekatan baru dalam dakwah yang mampu mengakomodir perkembangan sosial dan politik masyarakat global-prulal-multikultural. Pendekatan baru ini, terutama didasari oleh tuntutan terhadap peranan agama-agama dalam menjawab persoalan masyarakat multikultural di satu pihak, dan pengakuan umat muslim bahwa agamanya merupakan agama dakwah baik secara teoritis maupun praktis di pihak yang lain. (Hasan. Op.Cit: 198). Sebagai pemikiran baru, pendekatan multikulturalisme, tentu saja, tidak serta merta diterima kaum muslim. Sudah barang tentu, sangat wajar timbul keraguan dan bahkan mungkin kecurigaan-kecurigaan. Meski begitu, mengingat kebutuhan untuk menjawab tuntutan dan tantangan zaman, apalagi terutama karena pendekatan ini sejatinya memiliki dasar legitimasi dari doktrin fundamental Islam -dengan kemungkinan penolakan karena penafsiran yang berbeda- maka pemikiran dakwah dengan pendekatan multikultural boleh dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan melengkapi pendekatan-penekatan yang lain.

Dengan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka dakwah multikultural mengajukan program atau pendekatan dakwah seperti berikut.

Pertama, berbeda dengan pemikiran dakwah konvensional yang menempatkan konversi iman sebagai bagian inti dari dakwah, pendekatan dakwah multikultural menilai bahwa dakwah tidak lagi

secara eksplisit dimaksudkan untuk mengislamkan umat non muslim. Lebih dari itu, pendekatan dakwah multikultural menekankan agar target dakwah lebih diarahkan pada pemberdayaan kualitas umat dalam ranah internal, dan kerjasama serta dialog antar agama dan budaya dalam ranah eksternal. Berbeda dengan pendekatan konvensional, pendekatan dakwah multikultural, seperti dinyatakan menilai fenomena konversi non muslim menjadi muslim adalah efek samping dari tujuan dakwah, dan bukan tujuan utama dari dakwah itu sendiri.

Mengikuti pendekatan multikultural, dakwah kontemporer tidak lagi berorientasi pada aspek kuantitas, tapi lebih kepada kualitas dalam wujud keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan bagi kemanusiaan sejadi. Keragaman budaya dan agama, adalah sunatullah yang tidak mungkin dirubah atau diganti. Dengan kata lain, adalah suatu hal mustahil bercita-cita menjadikan manusia ini menjadi satu umat, satu agama, dan satu budaya. Bahkan angan-angan tersebut justru bertentangan dengan kebijakan (*police*) Allah sendiri yang tidak berkehendak untuk menjadikan manusia sebagai satu umat (QS. Yunus/10: 99).

Melalui pengakuan adanya kesepakatan atau titik temu antar iman (*common platform*), maka dalam perspektif dakwah multikultural, seperti berulang kali dikatakan Nurcholais madjid, bahwa mengajak orang kepada Islam, tidak selalu identik dengan mengajak orang untuk beragama Islam. (Madjid, Op.Cit: 19).

Kedua, dalam ranah kebijakan publik dan politik, dakwah multikultural menggagas ide tentang kesetaraan hak-hak warga negara (*civil right*), termasuk hak-hak kelompok minoritas. (Rachman, Op.Cit: 674). Tujuan dari program dakwah ini, terutama dimaksudkan agar seluruh kelompok etnis dan keyakinan mendapat pengakuan legal dari negara dari satu aspek, dan bebasnya penindasan atas nama dominasi mayoritas dari aspek yang lain. Untuk kepentingan ini pula, pendekatan dakwah multikultural berusaha memberi dukungan moral dan legitimatif atas budaya politik demokrasi. Demikian itu, karena budaya politik demokrasi – terlepas dari kekurangannya –

sampai saat ini dinilai sebagai yang paling mengakomodir ide-ide egalitarianisme hak sipil dan kelompok minoritas dalam masyarakat multikultural. (Ujan, Op.cit: 43-45). Melalui budaya demokrasi ini, dakwah multikultural berusaha agar kebijakan atau produk politik yang bias etno-religius dapat dieliminasi dan digantikan dengan kebijakan-kebijakan politik yang ramah dan peka terhadap keragaman etnis dan keyakinan masyarakat.

Ketiga, dalam ranah sosial, dakwah multikultural memilih untuk mengambil pendekatan kultural ketimbang *harakah (salafi jahidy)*. Seperti telah disinggung, bahwa pendekatan multikultural sejatinya merupakan kelanjutan dari pendekatan dakwah kultural dengan perbedaan pada tingkat keragaman dan pluralitasnya. Dalam masyarakat multikultural, sepanjang terbebas dari kepentingan politik, keragaman keyakinan dan budaya itu sesungguhnya merupakan fakta yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun konflik yang sering terjadi antar keyakinan dan agama, sejatinya adalah efek negatif dari perebutan kepentingan dalam ranah politik. (Mul Khan. Op.Cit: 195). Untuk tujuan ini, dakwah multikultural memang berbeda dan kurang sepaham dengan pemikiran dakwah yang mengedepankan Islam sebagai *manhaj hayah*, dan Islam sebagai *din, dun-ya* dan *daulah*, seperti digagas dan dikedepankan oleh Sayyid Quthub dan tokoh-tokoh Ikhwan yang lain. (Rachman. Op.Cit: 247). Demikian itu, karena kedua ide di atas berpotensi melahirkan radikalisme agama yang eksklusivistik, dan dinilai tidak sejalan dengan perkembangan masyarakat global-multikultural yang inklusif dan plural. Berlawanan dengan di atas, dakwah multikultural memilih pendekatan kultural yang mengedepankan strategi sosialisasi Islam sebagai bagian integral umat, dan bukan sesuatu yang asing melalui pengembangan gagasan Islam sebagai sistem moral (*al islam huwa al nizham al akhlaqiyyah*). (Mul Khan. Op.Cit: 225).

Keempat, dalam konteks pergaulan global, dakwah multikultural menggagas ide dialog antar budaya dan keyakinan (*intercultur-faith understanding*). Dalam merespon fenomena globalisasi yang sedikit demi sedikit menghapus sekat-sekat antar budaya dan agama

sekarang ini, dakwah multikultural, seperti diusulkan Mulkan, merasa perlu membangun “etika global” yang digali dari sumber etika kemanusiaan universal yang terdapat dalam seluruh ajaran agama. (Ibid: 45). Untuk tujuan tersebut, pendekatan dakwah multikultural memulai agendanya, antara lain, dengan menafsir ulang sejumlah teks-teks keagamaan yang bias eksklusivisme, misalnya, dengan metode hermeneutika. (Rachman. Op.Cit: 508).

Kelima, terkait dengan program seperti tersebut dalam point keempat, para pengggas dakwah multikultural, merasa perlu untuk menyegarkan kembali pemahaman doktrin-doktrin Islam klasik, dengan cara melakukan reinterpretasi dan rekontruksi paham Islam, sesuai dengan perkembangan masyarakat global-multikultural. Seperti telah disinggung, doktrin-doktrin Islam klasik seperti terkodifikasi dalam kitab-kitab yang sampai kepada kita sekarang ini, adalah sebuah penafsiran Islam, dan bukan Islam itu sendiri. Karena itu, ia tidak tertutup, tetapi terbuka untuk dikritisi dan ditafsir ulang. Penafsiran baru ajaran Islam itu harus berimbang, berpijak dari orisinalitas tradisi di satu pihak, tapi harus tetap terbuka kepada ide-ide perkembangan keilmuan kontemporer di lain pihak. (Madjid. Op.Cit: 485). Dengan ungkapan lain, penafsiran itu memang harus terbuka (*open minded*), tapi juga tidak kehilangan arah, akar, dan tetap mencerminkan identitas keislaman dengan pijakan yang kuat (*al hujjah al balighah*) berdasarkan al Qur’an dan Sunnah. Pola pemikiran semacam ini, disebut oleh Rachman, sebagai pemikiran yang inklusif (terbuka dan menghargai keragaman), dinamis (bergerak sejalan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman), dan progresif (berorientasi kepada peningkatan dan kemajuan masa depan yang berkelanjutan).

Epilog: Masa Depan Dakwah Multikulturalisme

Dakwah berbasis multikultural, sejatinya merupakan pengembangan dari paradigma dakwah kultural. Lebih tepatnya, paradigma dakwah ini berangkat dari dialog antara pemikiran dakwah kultural dan fenomena masyarakat global. Bisa dimaklumi

bila tokoh-tokoh yang menyuarakan dakwah berbasis multikultural tak lain adalah tokoh-tokoh yang juga menyuarakan dakwah kultural, di samping pula mereka yang aktif menyuarakan hak-hak asasi manusia, kebebasan berpikir, dan dialog antar agama. Dari lingkup nasional, sebut saja tokoh-tokoh pemikir muslim seperti Abdurrahman Wahid, yang menyuarakan ide pribumisasi Islam, atau Nurkholis Madjid, dengan gagasan kosmopolitanisme Islamnya, adalah juga tokoh-tokoh yang aktif menyuarakan ide-ide demokrasi dan pluralisme sebagai dasar masyarakat multikultural. Abdul Munir Mulkhan, tokoh yang mengusung isu Islam dan budaya lokal, adalah juga tokoh yang menyuarakan keterkaitan agama dan pluralitas budaya (multikulturalisme). (Wijdan. op.cit: 251).

Sejumlah nama, dari tokoh-tokoh yang lebih muda, misalnya Masdar Farid Mas'udi, Ulil Abshar Abdalla, Moqshit Ghazali, Budi Munawar Rachman, Zuhairi Misrawi dan Lutfi Assaukanie, adalah tokoh-tokoh yang bisa dipandang sebagai pendukung dakwah berbasis multikulturalisme. Mereka adalah orang-orang yang sangat vocal menyuarakan demokrasi dalam bidang politik, pluralisme dalam bidang sosial-kemasyarakatan, dan progresivisme dalam bidang pemikiran Islam. Diakui, pada umumnya mereka tidak secara eksplisit menyebut dakwah multikulturalisme sebagai pendekatan sosialisasi Islam, tapi secara implisit. Sebut saja, Zuhairi Misrawi, misalnya, mengangkat pemikiran inklusivisme, pluralism, dan multikulturalisme dalam al-Quran. Ini sama maknanya dengan pemikiran dakwah berbasis multikultural dalam al Qur'an. Juga Abdul Munir Mulkhan yang mengangkat ide kesalehan multikultural sebagai ganti atau padanan dari dakwah dengan pendekatan multikultural.

Dari lingkup global, ide dakwah berbasis multikultural dapat ditangkap melalui pemikiran tokoh-tokoh kelas dunia, seperti Khaled Abou Fadl, Muhammad Arkoun hingga Nasr Hamid Abu Zaid yang mengangkat tema tentang kritik ortodoksi serta kebebasan berfikir dan multitafsir agama. Sedangkan tentang isu seputar demokrasi, dan hak-hak asasi manusia muncul nama-nama seperti

Abdullahi Ahmad al Na'im, dan mantan rektor universitas al Azhar 'Umar Hasyim. Sedangkan mengenai isu-isu seputar dialog antar agama dan pluralism, dapat disebut nama seperti Ismail al Faruqi dan pemikir Iran kenamaan Abdul Aziz Sachidena. Bahkan dalam soal yang terakhir ini, ulama besar dunia, Syekh Yusuf Qardhawi, dapat pula disebut di sini. Dalam buku, *Khithabuna al-Islami fi `Ashr al-`Awlamah*, tokoh yang satu ini sangat mendorong dialog antar peradaban (*al-hiwar*) sebagai pilihan pendekatan dakwah abad global. (Al-Qaradhawi, 2004: 54-55).

Terakhir, sebagai sebuah ide yang masih baru, perlu juga dikatakan bahwa pendekatan multikulturalisme untuk dakwah masih menuai kontroversi dan belum diterima oleh kaum muslim secara luas. Penolakan tersebut, terutama datang dari lembaga resmi keislaman atau ulama-ulama konservatif. Sebut saja seperti ide pluralisme dan kebebasan berfikir sebagai landasan multikulturalisme, masih harus berhadapan dengan fatwa haram dari lembaga keulamaan formal di Indonesia. (Rachman. Op.Cit: 5). Juga karena masih sangat baru, adalah suatu ketergesa-gesaan di samping tidak adil pula rasanya menilai sisi kelemahan atau kelebihan dari gagasan pendekatan dakwah dengan multikulturalisme. Namun demikian, fenomena-fenomena seperti merebaknya aliran-aliran radikal Islam, meningkatnya frekuensi konflik antar agama dan budaya, hingga ketegangan antar peradaban bisa dinilai sebagai suatu tahap perkembangan kemanusiaan di mana pendekatan multikulturalisme menjadi suatu kebutuhan mutlak untuk diterapkan sebagai alat "dakwah agama-agama".

Daftar Pustaka

- Al-Naysabury, Abu al Hasan 'Ali Ibn Ahmad al Wahîdy, t.t. *Asbâb al Nuzûl al Qur'ân*, Mauqi' al Warraq.
- Ali, Yusuf, 2009. *The Meaning Of The Noble Qur'an*, h. 71. Baca Juga Mun'im Sirry, *Berlomba-lombalah Dalam Kebajikan: Tafsir 5: 48 Dan Diskursus Kontemporer Plurralisme Agama*, dalam Elza Pedi Taher, ed., *Merayakan Kebebasan Beragama*, Kompas, Jakarta.

- Arkoun, Mohammad, 2000. *Qadâyyâ Fî Naqd al 'Aql al Dîny: Kaifa Nafham al Islâm al Yaum*, Dar al Tali'ah, Beirut.
- Abu Zayd, Nasr Hamid, 1994. *Naqd al Khitâb al Dîny*, Cet. Kedua, Sînâ li al Nasyr, Kairo.
- Al Na'im, Abdullah-i Ahmed, 1994. *Dekonstruksi Syari'at: Wacana Kebebasan Sipil, Hak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*, LKIS, Yogyakarta.
- Al Faruqi, Ismail Ragi, 1991. *Dialogue of The Abrahamic Faiths*, Virginia.
- Al-Qaradhawi, Yusuf, 2004. *Khithabuna al-Islami fi `Ashr al-`Awlamah*, Dar al Syuruq, Kairo.
- Banting, Keith and Will Kymlicka, 2006. *Introduction to Multikulturalism and Welfare State: Setting The Context*, dalam Will Kymlicka and Keith Banting, Ed., *Multikultural and The Welfare State: Recognition and Redistribution in Contemporary Democracies*, Oxford University Press, Newyork. First Published.
- Effendy, Bachtiar, 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan: Perbincangan Mengenai Islam, Masyarakat Madani dan Etos Kewirausahaan*, Galang Press, Yogyakarta.
- El Fadl, Khaled M. Abou, 2008. *Speak In The God Name*, terjemah Cecep Lukman Hakim, Serambi Ilmu Semesta, Jakarta.
- Ghazali, Abdul Moqshit, 2009. *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis al Qur'an*, Katakita, Jakarta.
- Gottfried, Paul Edward, 2002. *Multikulturalism and Politic of Guilt: Toward a Secular Theocracy*, University of Missouri Press.
- Hanbal, Ahmad Ibn, t.t. *Musnad Ahmad*, Mauqi' al Islam.
- Harris, Philip R. dan Robert T. Moroan, 2003. *Memahami Perbedaan-Perbedaan Budaya*, dalam Jalaluddin Rakhmat dan Deddy Mulyana, *Komunikasi Antar Budaya: Panduan Berkomunikasi Dengan Orang-Orang Berbeda Budaya*, Cet. Ketujuh, Rosdakarya, Bandung.
- Hasyim, Ahmad Umar, t.t. *al Da'wah Islâmiyyah Manhajuhâ wa Ma'âlimahâ*, Dar al Gharîb, Kairo.

- Hodgson, Marshal, 1974. *The Venture Of Islam: Consience and History in World a Civilization, The Classical Age of Islam*, University of Chicago Press, Chicago.
- Huwaiti, Fahmi. 1999. *Muwâtinûn lâ Zimmîyûn*, Cet. Ketiga, Dar al Syuruq, Kairo.
- Judith Squires, 2002. *Cultur, Equality and Diversity*, In Paul Kelly, ed., *Multikulturalism Reconsidered*, Polity Press, Cambridge.
- Knitter, Paul F., 2008. *One Earth Many Religion: Multifaith Dialouge and Global Responsibility*, Alih Bahasa Nico. A. Likumahuwa, BPK Gunung Mulia, Jakarta .
- Misrawi, Zuhairi, 2007. *Al Qur'an Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Fitrah, Jakarta.
- Paul Edward Gottfried, 2002. *Multikulturalism and Politic of Guilt: Toward a Secular Theocracy*, University of Missouri Press, Missouri US.
- Rachman, Budhy Munawar, 2001. *Islam Pluralis: Wacana Kesetaraan Kaum Beriman*, Paramadina, Jakarta.
- _____, 2010. *Reorientasi Pembaharuan Islam*, LSAF, Jakarta.
- Rais, M. Dhiauddin, 2001. *Teori Politik Islam*, Alih Bahasa Abdul Hayyi al Kattanie dkk, Gema Insani Press, Jakarta.
- Sachedina, Abdul Aziz, 2001. *The Islamic Roots of Democratic Pluralism*, Newyork: Oxford University Press.
- Squires, Judith, 2002. *Cultur, Equality and Diversity*, In Paul Kelly, ed., *Multikulturalism reconsidered*, Cambridge: Polity Press.
- Tim Southphommanase, 2005. *Grounding Multikultural Citizenship: From Minority Right to Civic Pluralism*, dalam *Journal Of Intercultural Studies*, Routlege Taylor and Francis Group.
- Ujan, Andre Ata. et.al., 2009. *Multikulturalisme: Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*, Indeks, Jakarta.

Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik

Haidlor Ali Ahmad

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Kediri Regency is located in East Java which has a variety of ethnicities, cultures and religions. Local wisdom in Kediri has created harmony among religious communities. Local wisdom as it had said "rukun agawe Santosa congkrah agawe Bubrah" (harmony makes us prosperous, while break up makes us destroyed). In addition, even stabilized economic factors have realized a sense of harmony, especially when other local wisdoms which remain functional in Kediri are heard. This study used a qualitative approach.

Key words: *local wisdom, harmony, flow of religious, religious broadcasting.*

Latar Belakang

Menjelang dan pasca lengsernya Presiden Suharto, di berbagai wilayah di Indonesia terjadi berbagai macam kerusuhan sosial (*riots*) dan konflik etnis. Kerusuhan-kerusuhan itu antara lain terjadi di Purwakarta (awal November 1995), Pekalongan (akhir November 1995 dan April 1997), Medan (April 1996), Tasikmalaya (September 1996), Rengasdengklok (Januari 1997), Temanggung dan Jepara (April 1997), Banjarmasin (Mei 1997), Sampang dan

Bangkalan (Mei 1997), Tanah Abang (Agustus 1997), Ende dan Subang (Agustus 1997) Mataram dan Ujungpandang (September 1997) (Burhanuddin dan Subhan, 1999: 3). Menurut Johan Effendy pola-pola kerusuhan secara umum menunjukkan kesamaan meskipun pelakunya berbeda. Kerusuhan yang sering menyeret persoalan suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) seolah menjadi kata kunci, sehingga akibat yang ditimbulkan menjadi luar biasa memprihatinkan dan mengerikan (Burhanuddin dan Subhan, 1999: ix). Hal ini terbukti dengan munculnya berbagai konflik etnik dengan eskalasi yang lebih besar, seperti konflik Ambon, Poso, dan konflik di Kalimantan Barat dan Tengah dari Sanggao Ledo hingga Sampit.

Namun hubungan antarkolektivitas tidak selalu menjurus kepada konflik sosial atau permusuhan terbuka. Seringkali hubungan antar kedua pihak itu faktor bersama yang dapat melancarkan proses yang mengarah kepada kehidupan bersama secara rukun dan serasi (Soemardjan, 1988: 5). Sebagaimana yang terjadi di Kelurahan Tambakboyo, Ambarawa, dimana pada saat di berbagai wilayah di Indonesia terjadi kerusuhan justru di Kelurahan ini terbentuk suatu kehidupan yang harmonis antarumat beragama. Padahal di Kelurahan ini tingkat heterogenitas keagamaannya cukup tinggi, bahkan di salah satu dusun rasio antara penganut agama Islam dan non Islam mencapai 11:9 (Ahmad, 1999: 2).

Sebenarnya bukan hanya di Kelurahan Tambakboyo saja kehidupan umat bergama dalam keadaan harmonis, masih banyak wilayah-wilayah lain yang kehidupan umat beragamanya juga berjalan harmonis, meskipun di banyak wilayah yang lain terjadi konflik etnik yang mengerikan. Sebagaimana yang terjadi di Anak Benua India, yang dipertanyakan dan sekaligus harus dijawab oleh Ashutosh Varshney, mengapa kekerasan komunal atau etnis hanya terjadi di segelintir wilayah di sebuah negara, sementara kedamaian etnis atau komunal tetap terpelihara di banyak wilayah lainnya di Negara yang sama? (Varshney, 2009: vi).

Hal di atas dapat terjadi karena pada tiap-tiap daerah atau wilayah memiliki potensi konflik sekaligus potensi rukun sendiri-sendiri.

Sehingga kekerasan komunal atau etnis dapat saja terjadi di wilayah tertentu, sementara kedamaian etnis atau komunal tetap terpelihara di wilayah lain. Guna mengetahui potensi konflik dan sekaligus potensi rukun khususnya antarumat beragama di Kabupaten Kediri peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Dari deskripsi di atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: a) Bagaimana kondisi kehidupan antarumat beragama di daerah Kediri?; b) Potensi konflik apa saja yang terdapat dalam kehidupan antarumat beragama?; dan c) Bagaimana kerukunan hidup antarumat beragama dapat terwujud?.

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah: *pertama* untuk mengetahui dan mendiskripsikan kondisi kehidupan antarumat beragama di daerah Kediri; *Kedua*, mengetahui dan mendiskripsikan potensi konflik dalam kehidupan antarumat beragama; *ketiga* untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mendorong terciptanya kondisi harmoni.

Kerangka Konseptual

Harmoni (kerukunan) umat beragama adalah keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajaran agamanya dan kerjasama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006 Bab I pasal 1).

Konflik, pada umumnya sebagian besar literatur tentang konflik etnis gagal membedakan antara kekerasan etnis dan konflik etnis. Dalam setiap masyarakat yang majemuk dari segi etnis dan memungkinkan ekspresi bebas tuntutan-tuntutan politik, konflik etnis secara umum tidak terhindarkan. Harmoni dalam hal ini juga dapat disamakan dengan kedamaian etnis, sebagai keadaan tidak adanya

kekerasan, tetapi bukan tidak ada konflik (Ashutosh Varshney, 2009: 29-30).

Agama dalam hal ini termasuk etnis. Etnis dalam arti sempit berarti berkaitan dengan “ras” atau “kebahasaan”. Inilah pengertian etnis yang banyak difahami dalam perbincangan populer. Tapi istilah “etnis” juga dapat difahami dalam pengertian yang memiliki implikasi yang lebih luas. Seperti pendapat Horowitz, seluruh konflik yang didasarkan atas identitas-identitas kelompok yang bersifat *akskriptif* - ras, bahasa, agama, suku atau kasta – dapat disebut konflik etnis (Ashutosh Varshney, 2009: 5).

Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu diantaranya yang ditulis oleh Haidlor Ali Ahmad dengan judul *Agama dalam Budaya Lokal di Kediri: Tarik Menarik Kaum ‘Puritan’ dengan Kaum Tradisional’* dalam jurnal *Dialog* Nomor 48, Tahun 1998. Tulisan ini mengemukakan varian agama yang lebih spesifik dari yang telah dikemukakan Clifford Geertz, dari varian Santri terdapat a) *wong ora ngerti po pincang lan alif bengkong* (santri nir pendidikan); b) Santri *deles* atau santri *cekek*, (santri dengan orientasi pendidikan pondok pesantren kecil); c) Santri dengan orientasi pendidikan sekolah umum/pesantren besar; selain itu adanya tarik-menarik antar kaum puritan dan kaum tradisional berkenaan dengan tradisi keagamaan yang biasa dilaksanakan masyarakat.

Juga tulisan Haidlor Ali Ahmad dengan judul *Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan, Gurah, Kediri, Jawa Timur* dalam Rudy Harisyah Alam (ed), *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006. Tulisan ini mendeskripsikan tentang proses sosialisasi kearifan lokal di masyarakat, ada beberapa kearifan lokal yang sudah tidak fungsional dan ada beberapa yang masih fungsional.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Kediri Jawa Timur ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penekanan kajiannya pada

pemberian penjelasan suatu gejala sosial dengan menggunakan gejala-gejala sosial yang lain dan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, pengamatan lapangan (sejauh hal itu memungkinkan untuk dilakukan) dan studi dokumentasi (dalam upaya verifikasi data yang diperoleh dari wawancara).

Untuk mengukur validitas/tingkat keakuratan data digunakan teknik *triangulasi* dengan melakukan *cross-check* data dengan membandingkan dan mengecek derajat keterpercayaan suatu informasi menggunakan waktu dan alat yang berbeda. Misalnya, membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, dengan dokumen, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dan ketika sendirian, membandingkan antara pendapat rakyat biasa dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan antara informasi pada saat situasi penelitian dengan saat normal sepanjang waktu (Moleong, 2002: 178).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompok-kelompokkan, dikategorisasikan dan dianalisa, dihubung-hubungkan dan dibanding-bandingkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, sehingga data tersebut mempunyai makna. Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, kemudian ditarik kesimpulan, dan implikasi serta saran kebijakan.

Sekilas Daerah Sasaran Penelitian

Kabupaten Kediri terletak pada kordinat 11147'05" sampai dengan 112°18'20" bujur timur dan 7°36'12" sampai dengan 8°0'32" lintang selatan. Luas wilayah Kab Kediri kurang lebih 138.605 hektar. Terdiri dari tanah sawah 47.320 hektar, tanah darat 91.285 hektar. Wilayah Kabupaten Kediri dibatasi oleh: Kab.Jombang di sebelah utara dan timur; Kab Blitar di sebelah selatan; Kabupaten Tulungagung di sebelah selatan dan barat; Kab Nganjuk di sebelah barat dan utara.

Jumlah Penduduk Kab Kediri 1.531.187 jiwa, terdiri dari penduduk laki-laki 770.269 jiwa dan perempuan 760.918 jiwa, yang tergabung dalam rumah tangga sebanyak 389.373 KK. Jumlah penganut agama sebagai berikut: penganut Islam 1.414.614 orang, Kristen 34.147 orang, Katolik 8.309 orang, Hindu 7.386 orang, dan Buddha 371 orang. Sedangkan jumlah rumah ibadat yang tersedia, bagi umat Islam sebanyak 1.824 masjid, 4.377 langgar dan 708 mushalla; bagi umat Kristen 226 gereja, bagi umat Katolik 27 gereja, bagi umat Hindu 46 pura. (Kediri Dalam Angka, 2010).

Kondisi Kerukunan

Berdasarkan penuturan beberpa orang informan (Ketua dan Sekretaris FKUB Kepala Kantor Kesbang dan Linmas, Kepala Bidang Integrasi Bangsa, Kasi Urais Kantor Kemenag) kondisi kerukunan antarumat beragama di Kab Kediri cukup kondusif. Kerukunan antarumat di Kediri tercermin antara lain, pada waktu Kapolresta (Kabupaten dan Kota) Kediri dijabat oleh G. Aritonang yang beragama Kristen menyelenggarakan acara buka bersama dari berbagai unsur ikut serta, dari Pemda, Kodim, para ulama NU, Muhammadiyah, Penyiari Sholawat Wahidiyah (PSW) dan LDII secara bergilir dari kantor-kantor di wilayah Kabupaten dan Kota Kediri.

Ketua FKUB menambahkan kerukunan antarumat beragama juga disebabkan karena Kab Kediri termasuk daerah yang tenang, keadaan ekonomi di Kediri cukup kondusif karena keberadaan pabrik rokok Gudang Garam. Keberadaan pabrik rokok tersebut cukup banyak menyedot tenaga kerja baik secara langsung maupun tidak langsung dan relatif banyak memberikan kesejahteraan bagi sebagian masyarakat Kediri.

Di samping faktor-faktor di atas, kondisi kerukunan antarumat beragama di Kediri ini tercipta karena adanya kearifan lokal yang dimiliki masyarakat, yang antara lain berupa pepatah, seperti "*rukun agawe santosa congkrah agawe bubrah*" (rukun membuat kita sentosa, percekocokan membuat kita hancur). Pepatah tersebut biasanya

disampaikan oleh para dalang dalam pagelaran wayang kulit. Ketua FKUB menyampaikan bahwa, belakangan kearifan lokal tersebut sering pula disampaikan oleh para kiyai/ustadz dalam ceramah-ceramah *walimatul arus* dipadukan dengan dalil-dalil agama baik dari Al-Quran maupun Hadits.

Berkenaan dengan kerukunan banyak kearifan lokal berupa petuah-petuah, antara lain: *aja tumbak cucukan* (jangan suka memperuncing masalah), *aja seneng adu-adu* (jangan suka menghasud), *aja lamis* (jangan suka membicarakan orang lain), *sing beneh ngalah* (yang arif mengalah). Agar tidak gampang melakukan konflik, ada pesan *menang ora kondang, kalah ngisin-ngisini* (menang tidak mashur, kalah memalukan). Agar lawan konflik tidak dendam, *nglurug tanpa bala, menang tanpa ngasorake* (mendatangi lawan tanpa teman, menang tidak memermalukan lawan) (lihat: Ahmad, 2006; 115-1160).

Ketua FKUB menambahkan bahwa, sebagai pencerminan kerukunan bersama dalam bentuk kerja bakti di Kediri ada istilah "*gugur gunung*". Kearifan lokal ini mengandung makna yang dalam, ibarat sebuah gunung tidak akan dapat diratakan dengan tanah daratan, tapi jika dilakukan bersama-sama (gotong royong), maka betapa pun besarnya gunung atau besar dan beratnya suatu pekerjaan pasti dapat diselesaikan.

Masyarakat Kediri – secara umum – memiliki pengendalian diri yang kuat, ada isu-isu apapun tidak mudah terpancing. Ketika dipancing agar melakukan aksi pembalasan terhadap kasus pemukulan terhadap seorang guru Pawiatan Doho oleh orang tua murid dari etnis Tionghoa pada tahun 1980-an, tidak berhasil. Meskipun santri-santri Lirboyo sudah berdatangan ke pusat kota tetapi tidak terjadi tindakan balas dendam. Demikian pula pada waktu terjadi provokasi pembunuhan dukun santet pasca lengsernya Presiden Suharto, hanya terjadi sekali, yaitu di Desa Tiru Lor Kecamatan Gurah. Selanjutnya pembunuhan dukun santet marak terjadi di daerah Banyuwangi.

Budaya Kediri cenderung lebih dekat dengan budaya Jawa Tengah (Negari Gung Surakarta) yang lebih halus. Hal ini dapat dibuktikan misalnya dengan adanya dua versi wayang kulit, a) wayang kediren (versi Kediri) dan b) wayang *cekdong* atau surabayan (versi Surabaya). Dimana seni wayang kediren ini lebih mencerminkan kehalusan, sementara wayang surabayan lebih mencerminkan karakter yang keras.

Demikian juga tampak pada kesenian jaranan (kuda lumping), di Kediri terdapat dua versi kuda lumping yang cukup kontras, yakni a) kuda lumping versi Kediri (jaranan pegon) dan b) reog Ponorogo. Dimana jaranan pegon lebih mencerminkan peragaan seni tari yang halus dan tata busana yang indah; Sementara reog lebih mencerminkan seni yang menonjolkan keperkasaan dan watak yang keras (Ahmad, 2006: 119-122).

Selain itu, masyarakat Kediri juga memiliki kearifan lokal yang mengatur tata pergaulan sehari-hari (*quotidian*) yang berjarak (tidak terlalu akrab). Jangankan antarpenganut agama dan antarvarian priyayi, santri dan abangan, antarsub varian santri (*wong orangerti po pincang lan alif bengkong*, santri *deles* atau santri *cekek*, dan santri dengan orientasi pendidikan umum dan pesantren besar) (lihat: Ahmad, 1998: 10) mereka sebaiknya tidak terlalu akrab meskipun merupakan tetangga dekat (depan rumah atau satu pagar). Tetapi mereka dapat menjadi sangat dekat melalui bentuk-bentuk *asosiasional* ikatan kewargaan (yang berfungsi sebagai *bridging*, berupa kepentingan bisnis, klub olah raga, teman sekolah atau teman sekantor. Atau mereka akan datang kerumah tetangga (yang seharusnya berjarak tersebut) jika ada slametan atau upacara siklus hidup yang berfungsi sebagai *bonding* dalam bentuk keseharian ikatan kewargaan.

Potensi Konflik

Pendirian Rumah Ibadat

Potensi konflik antarumat beragama di Kediri yang agak sering muncul adalah berkenaan dengan pendirian rumah ibadat, namun

selama ini potensi tersebut dapat diredam. Misalnya, pada tahun 2005 terjadi peristiwa pembakaran gereja di Kecamatan Grogol (Wawancara dengan Suprianto Pembimas Kristen Protestan). Ketua dan Sekretaris FKUB menjelaskan sebenarnya yang dibakar bukan bangunan gereja, tapi berupa kayu-kayu untuk rencana pembangunan gereja dan pembakaran tersebut karena masalah persaingan bisnis (usaha perdagangan). Setelah kejadian tersebut yang menghasut terjadinya pembakaran kemudian diusir dari desa lokasi perencanaan pembangunan gereja tersebut.

Konflik berkaitan dengan rumah ibadat umat Hindu di Desa Punthuk Banaran, awalnya konflik bersifat personal (antarindividu) yang secara kebetulan antara Muslim dan Hindu. Munculnya konflik berawal dari tempat perjudian yang menimbulkan dendam pribadi yang kemudian mengarah kepada antarkelompok sehingga pura dibakar masa. Tetapi umat Hindu bersyukur dengan adanya peristiwa tersebut karena pura tersebut akan direnovasi, sehingga mendapat perhatian dari berbagai fihak, dan akhirnya bupati juga memberikan sumbangan (Wawancara dengan Drs. Yuliyana, Pembimas Hindu). Namun ketika hal itu dikonfirmasi kepada Ketua dan Sekretaris FKUB, mereka tidak pernah mendengar kasus pembakaran pura di Desa Punthuk Banaran. Yang mereka ketahui pembakaran pura di Desa Menang sempat menimbulkan keterkejutan sebagian masyarakat (pada tahun 2006, sebelum FKUB dibentuk). Tetapi ternyata ulah orang yang sakit jiwa yang sedang membakar sesuatu (Betawi=nabuni; Jawa=objong-obong) yang kemudian apinya menyambar pintu pura.

Di Desa Segaran (pertengahan tahun 2009) yang mayoritas penduduknya beragama Kristen dan warga Muslim hanya 40 KK. Warga Muslim membeli tanah dan rencananya di tanah tersebut akan dibangun mushala, tetapi pembelian tanah tersebut didahului oleh warga Kristen. Sehingga masalah tersebut dilaporkan kepada FKUB, dan akhirnya dapat diselesaikan oleh FKUB (Wawancara dengan Ketua FKUB, di depan sekretaris FKUB/Pembimas Katolik).

Dakwah/Penyiaran Agama

Dakwah/penyiaran agama di Kediri tidak terjadi tubrukan dengan umat agama lain. Sebagai contoh di Dukuh Banjaranyar Desa Gemplolan, yang dulunya merupakan pedukuhan basis Partai Komunis Indonesia dengan organisasi-organisasi *under bow*-nya, seperti Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat dan Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani). Tetapi setelah terjadi peristiwa G 30 S PKI, pedukuhan tersebut menjadi arena penyiaran berbagai agama, yakni Islam, Kristen, Hindu dan Buddha.

Namun para penyiar agama di pedukuhan tersebut ibarat suatu kompetisi, mereka dapat bermain secara *fair play* tidak terjadi percekocokan (pertengkaran mulut) apalagi kekerasan fisik. Sehingga pasca peristiwa G 30 S-PKI, di pedukuhan tersebut pernah dibangun langgar di tempat yang konon dulunya pernah ada langgar. Tetapi ternyata langgar yang baru dibangun itu tidak bertahan lama. Karena warga sekitarnya kemudian menganut agama Kristen, dan rumah yang *mangku* langgar (di halaman rumahnya ada langgar) yang dijadikan tempat beribadah, bahkan yang menjadi pendeta dulunya dari keluarga *tangklukan* dan pernah menjadi ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) ranting Desa Gemplolan.

Penyiaran agama di Pedukuhan Banjaranyar tak kunjung surut, meski penyiaran agama Hindu dan Buddha tidak lagi pernah kedengaran, namun penyiaran agama Islam dan Kristen terus berjalan dan akhirnya di dusun Gemplolan belakangan telah dibangun sebuah masjid dan terdapat sebuah gereja sementara menempati rumah penduduk. Meski gereja sementara itu tidak ada ijin tetapi tidak dipermasalahkan oleh penduduk sekitar.

Penyiaran agama Kristen di Kecamatan Mojo di daerah pegunungan (atas) di kalangan masyarakat Islam “abangan” dirasakan agak meresahkan atau mengusik masyarakat Muslim di Mojo bawah. Ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah agak malu-malu (tidak berani) mengambil sikap atau memberikan reaksi terhadap kegiatan para misionaris di daerah Mojo atas tersebut.

Sehingga ada pondok pesantren di Mojo bawah yang mengirimkan para santri ke daerah pegunungan. Namun para santri di daerah tersebut menghadapi kesulitan karena masyarakat Mojo atas kurang antusias dengan kegiatan dakwah.

Jamaah Tabligh (JT) dengan kegiatan *jaulah*-nya dalam melakukan penyeimbangan terhadap kegiatan para misionaris. Namun di kalangan ormas-ormas Islam sendiri terdapat rasa kecurigaan terhadap kelompok JT, sehingga secara internal Islam, JT juga merupakan potensi konflik (Wawancara dengan Muhammad Sulton Amin S.Ag, staf Penamas). Masyarakat daerah Mojo menyebut JT santri kompor, karena kemana-mana mereka membawa peralatan masak-memasak termasuk kompor.

Tempat Ziarah (Wisata Agama)

Yayasan Hododento dari Yogyakarta pada tahun 1970-an setiap tanggal 1 Suro (Muharam) selalu mengadakan ritual besar-besaran di Makam Joyoboyo, tetapi penduduk sekitar tidak pernah peduli dengan kegiatan tersebut. Justru masyarakat sekitar memanfaatkan momen tersebut untuk tujuan ekonomi dengan berjualan makanan dan minuman, serta menyediakan tempat parkir kendaraan.

Demikian pula peringatan hari-hari besar Katolik yang diselenggarakan di Poh Sarang (tempat wisata relegi milik Katolik) juga tidak menimbulkan masalah. Penduduk sekitar justru mengambil manfaat secara ekonomi, selain berdagang makanan dan minuman, menyediakan tempat parkir, penginapan dan kemudian berkembang juga penjualan berbagai macam souvenir, dan ada pula pedagang makanan khas dari daging kelelawar buah (*codot*) yang berasal dari kecamatan lain (Kecamatan Grogol).

Bantuan Keagamaan

Di Kecamatan Kayen, Gereja Katolik menyediakan pupuk organik dan penyuluhan pertanian. Kegiatan yang sama juga dilakukan di Kecamatan Pagu dengan tempat kegiatan/praktek seluas 4½ hektar,

terdiri dari tanah sawah 4 hektar dan tanah darat $\frac{1}{2}$ hektar. Di Bedali juga diadakan sentra kegiatan yang sama. Meski sentra-sentra kegiatan tersebut berada di lingkungan mayoritas Muslim tetapi dapat diterima dengan baik oleh masyarakat Muslim sekitarnya. Selain itu di Desa Kali Bagor Kecamatan Grogol dibangun poliklinik bantuan kesehatan masyarakat dapat diterima oleh masyarakat Muslim sekitarnya. Di Gurah terdapat panti rehabilitasi kusta, yang masuk rehabilitasi semuanya dari warga Muslim.

Aliran/Faham Keagamaan Baru

Menurut penuturan salah seorang pejabat di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri, di Desa Pamenang Kecamatan Pagu muncul aliran/faham yang diberi nama Aliran Tri Tunggal, yang didirikan oleh seorang perempuan bernama Mpu Nur Alam. Sebenarnya aliran ini sudah cukup lama didirikan dan diajarkan kepada pengikut-pengikutnya secara diam-diam. Pendiri aliran ini telah berkirim surat kepada Presiden dan Menteri Agama. Sehingga Menteri Agama menugaskan salah seorang staf ahli untuk meneliti aliran/faham tersebut, beberapa waktu sebelum penelitian ini dilaksanakan. Isi ajaran aliran ini berdasarkan wangsit yang dituangkan dalam sebuah buku yang relatif tebal dan pernah diterjemahkan oleh dua perguruan tinggi terkemuka di negeri ini. Nur Alam merencanakan akan mendirikan tugu sebagai simbol perdamaian dunia, dengan anggaran 9 triliun, dan mengklaim sudah memiliki seluruh dana yang dibutuhkan. Namun munculnya aliran ini tidak mengusik ketenangan masyarakat beragama di Kediri, bahkan beberapa tokoh agama yang penulis wawancarai tidak mengetahui kemunculan aliran tersebut.

Penyelesaian Konflik

Menurut Ketua FKUB, potensi konflik yang muncul hanya berupa intrik-intrik kecil yang dapat diselesaikan di tingkat desa, dan jarang sekali sampai ke tingkat kabupaten. Pertentangan masalah agama maupun politik tidak pernah menimbulkan demo yang anarkhis.

Peran Kantor Kemenag

Kantor Kemenag selalu melakukan kordinasi dengan FKUB, terutama berkaitan dengan masalah ijin pendirian rumah ibadat. Selain itu, Kantor Kemenag juga mengundang atau melakukan rapat dengan tokoh/pemuka agama setempat untuk memperoleh informasi, misalnya tentang keberatan masyarakat setempat berkenaan dengan pendirian rumah ibadat tertentu; atau untuk mengetahui tingkat kebutuhan umat tertentu terhadap pendirian rumah ibadat yang sedang dipermasalahkan. Semua yang berkaitan dengan pendirian rumah ibadat Kantor Kemenag mengacu kepada PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, dan semua rumah ibadat tak terkecuali masjid juga perlu ijin (Wawancara dengan Drs. Nurkholis, Kepala Kantor Kemenag Kab Kediri).

Penyuluh agama dalam ikut serta menyelesaikan konflik cenderung lebih fokus pada area binaannya. Jika terjadi konflik para penyuluh –sebagai tokoh- berperan dalam mengawal masyarakat dan cukup efektif dalam menjembatani mereka yang sedang konflik untuk dapat melakukan musyawarah mencapai titik temu. Namun dalam hal ini yang lebih menonjol adalah penyuluh honorer, karena jumlahnya lebih banyak dari penyuluh PNS (Wawancara dengan Moh. Sulton Amin, staf Penamas Kantor Kemenag).

Kantor Kemenag dapat menangkap sinyal adanya potensi konflik dari para penyuluh (Wawancara dengan Moh. Sulton Amin, staf Penamas Kantor Kemenag). Untuk menangani masalah konflik dan penelitian lapangan sebelum Kantor Kemenag mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat, kantor Kemenag memiliki tim untuk penelitian lapangan. Anggota tim tersebut terdiri dari perwakilan agama-agama yang ada sama seperti FKUB (minus Buddha dan Konghucu). Dengan adanya tim tersebut rekomendasi yang dikeluarkan Kantor Kemenag selama ini tidak menimbulkan masalah apa-apa.

Peran Pemerintah Daerah

Kelompok Islam abangan yang pengetahuan agamanya relatif rendah agar tidak menjadi sasaran penyebaran agama lain, dan dikhawatirkan akan mengganggu kerukunan umat beragama, Bupati Sutrisno (sekarang mantan) telah membentuk Kelompok Bimbingan Belajar Solat (KBBS). Meski sasaran utama dari program ini adalah orang-orang tua yang lemah pengamalan ibadahnya, tetapi hasilnya telah menjadi semacam gerakan santrinisasi di kalangan masyarakat Islam abangan. Hasilnya cukup banyak (meskipun tidak ada angka-angka yang pasti) orang-orang yang dulunya abangan sekarang sudah menjalankan syariat Islam, termasuk ibadah haji atau minimal sekarang kalangan abangan dalam berpakaian banyak yang mengenakan simbol-simbol santri (Wawancara dengan Moh. Sulton Amin, staf Penamas Kantor Kemenag).

Menurut Imam Khusairi Tokoh NU dari Gurah yang pernah berdialog langsung dengan Sutrisno, Bupati Kediri, berkenaan dengan program KBBS ia mengutip argumen Bupati “Kalau membangun secara fisik itu gampang, ada uang sekian M, mau bangun gedung berapa tingkat dalam tempo sekian bulan atau tahun langsung kelihatan hasilnya. Tetapi kalau kita mau membangun rohani, membangun mental ya seperti program KBBS ini, hasilnya tidak bisa langsung kelihatan, kita harus menunggu beberapa tahun lagi kita baru bisa melihat hasilnya”. Imam Khusairi selanjutnya mengatakan bahwa ia sekarang dapat melihat hasilnya, suasana keagamaan yang lebih baik tampak nyata di wilayah Kabupaten Kediri dibandingkan dengan beberapa tahun lalu (Wawancara dengan Drs. Imam Khusairi, tokoh NU).

Di lapangan untuk monitoring kegiatan ini juga melibatkan Kantor Kemenag. Tetapi belakangan kegiatan ini mulai pasif, karena Bupati baru belum menggerakkannya kembali. Meski Bupati baru adalah isteri Bupati lama (Wawancara dengan Moh. Sulton Amin, staf Penamas Kantor Kemenag).

Peran FKUB

FKUB menyelenggarakan pertemuan (rapat) minimal 3 bulan sekali. (Wawancara dengan Suprianto, Pembimas Kristen Protestan). FKUB telah memberikan rekomendasi sebanyak 6 rekomendasi, untuk pembangunan masjid 4, pura 1, gereja Protestan 1 dan menolak 1 gereja Katolik. Penolakan pemberian rekomendasi terhadap gereja Katolik tersebut dengan alasan: a). menjaga lingkungan agar tetap kondusif terhadap kerukunan umat beragama; b). banyak surat yang masuk yang isinya merasa keberatan karena masyarakat lingkungan tempat akan didirikan gereja banyak yang tidak tahu adanya rencana pendirian gereja; c). Dari 60 orang yang semula sudah memberikan tanda tangan banyak yang mencabut kembali tanda-tangannya, dengan alasan karena tidak tahu. Sehingga FKUB melakukan sidang dan akhirnya sepakat untuk menjaga agar umat beragama tetap hidup rukun, maka FKUB tidak memberikan rekomendasi pendirian gereja Katolik tersebut. (Wawancara dengan Suko Promiyoto, Pembimas Katolik dan Sekretaris FKUB).

Dalam upaya pemeliharaan kerukunan antarumat, FKUB melakukan sosialisasi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 kepada tokoh-tokoh dan para pemuka agama, aparat pemda termasuk camat, kepala KUA, penyuluh dan guru-guru agama (Wawancara dengan Suko Promiyoto, Pembimas Katolik/Sekretaris FKUB). Peran FKUB sangat penting, kehadirannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang heterogen seperti di Kediri. Peran FKUB sangat strategis karena dalam pelaksanaan kerjanya FKUB melibatkan para tokoh/pemuka agama (Wawancara dengan Drs. Yuliyana, Pembimas Hindu).

Di Kediri FKUB dinilai cukup berperan dalam penyelesaian konflik (Wawancara dengan Muhammad Sul-ton Amin staf Penamas Kantor Kemenag). Salah satu contoh penyelesaian konflik berkaitan dengan pendirian rumah ibadat, yang permasalahannya timbul karena tidak adanya dukungan masyarakat, FKUB melakukan dialog dengan tokoh-tokoh agama setempat untuk masukan sehingga FKUB dapat mengambil kebijakan, rumah ibadat yang akan didirikan di tempat yang tidak ada umatnya diadakan penukaran tempat

atau pindah ke tempat lain yang ada umatnya (Wawancara dengan Suprianto, Pembimas Kristen Protestan).

Kesimpulan

Studi ini menyimpulkan bahwa kondisi kehidupan antar umat beragama di Kabupaten Kediri cukup kondusif karena selain secara ekonomi cukup tenang, pada umumnya masyarakat Kediri tidak begitu mempermasalahkan hal-hal yang di daerah lain dapat menjadi potensi konflik.

Kehidupan keagamaan di Kabupaten Kediri tidak lepas dari adanya potensi konflik pada persoalan pendirian rumah ibadat, tempat-tempat ziarah (wisata religi), penyiaran agama, dan aliran-aliran keagamaan baru. Namun potensi konflik yang berupa intrik-intrik atau gesekan-gesekan antar umat beragama itu dapat diselesaikan di tingkat desa, tidak sampai berkembang menjadi konflik terbuka.

Faktor-faktor yang mendorong terciptanya kondisi harmoni, terdapat cukup banyak kearifan lokal yang masih fungsional untuk mewujudkan kerukunan. Selain itu peran tokoh-tokoh agama melalui musyawarah dan tokoh formal (*umara*), cukup kondusif dalam mewujudkan kerukunan. Belakangan peran-peran tersebut lebih banyak dilakukan oleh FKUB.

Rekomendasi

Dari kesimpulan di atas, penulis merekomendasikan diantaranya; a) Pemerintah daerah diharapkan dapat menjaga kestabilan ekonomi yang selama ini telah terbina dan seyogyanya dapat meningkatkan taraf kehidupan ekonomi masyarakat, di samping tetap melestarikan kearifan lokal yang fungsional bagi terwujudnya kerukunan; b) Kepada berbagai pihak, terutama aparat terkait untuk tetap dapat menjaga agar potensi-potensi konflik yang ada dapat dikelola dengan baik sehingga tidak berkembang menjadi ancaman bagi kerukunan; c) Agar tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh formal (aparat pemerintah, khususnya Kantor Kemenag dan pemda) dan FKUB dapat terus

memainkan perannya dalam memelihara kerukunan di wilayah kerjanya masing-masing.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali, *Agama dalam Budaya Lokal Kediri: Tarik Menarik Kaum 'Puritan' dengan Kaum Tradisional*, *Dialog* Nomor 48, Tahun 1998.
- _____, *Kerukunan Hidup Umat Beragama, Studi Kasus di Kelurahan Tambakboyo, Ambarawa, Jawa Tengah*. Jakarta: Balai Penelitian Agama dan Kemasyarakatan, 1999/2000.
- _____, *Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan, Gurah, Kediri, Jawa Timur*, dalam Rudy Harisyah Alam (ed), *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Balai Litbang Agama Jakarta dan Penamadani, 2006.
- Burhanuddin, Jajad dan Arief Subhan, 1999. *Sistem Siaga Dini untuk Kerusakan Sosial*. Jakarta, Balitbang Agama Departemen Agama RI dan PPIM IAIN.
- BPS Kabupaten Kediri, *Kediri dalam Angka Tahun 2009*.
- PBM, No. 9 dan 8 Tahun 2006.
- Soemardjan, Selo, 1988. *Stereotip Etnik, Asimilasi, Integrasi Sosial*. Jakarta: PT Pustaka Grafika Kita.
- Varshney, Ashutosh, 2009. *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil*. (terj. Siti Aisyah dkk.), Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama.

Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang Jawa Timur

Mursyid Ali

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

The population of Indonesia has not entirely become free from religious social conflict. Various issues are often based upon the name of religion which could harm the nation in the context of religious harmony. One case related by the matter of religion once happened in Malang, East Java. Ethnic diversity, culture and religion as the characteristics and identities attached to the city may become a high potential conflict in the name of religion, but if managed properly, harmony among the religious diversity in the area will be created. This study uses qualitative methods.

Keywords: *assets of the nation, social interaction, global culture, a shared commitment.*

Latar Belakang

Pluralisme sosial yang terdapat di Kota Malang merupakan aset bangsa yang dapat berkontribusi positif serta negatif bagi dinamika sosial dan perwujudan kerukunan serta keutuhan umat beragama di Kota Malang. Fenomena potensi konflik sosial bernuansa keagamaan diberbagai daerah termasuk di Jawa Timur umumnya dan Kota Malang khususnya, masih acap kali muncul walaupun frekuensi dan eskalasinya relatif

kecil, tidak sampai mengancam keutuhan bangsa. Dalam kehidupan di masyarakat kita, belum terbebas sepenuhnya dari konflik sosial bernuansa agama. Meski sesungguhnya fenomena ini telah mulai menampakkan diri ke permukaan waktu jauh sebelumnya, namun agaknya fenomena tersebut yang kini banyak menggumpal menjadi berbagai potensi konflik sosial di masyarakat. Emil Salim, mengategorikan konflik yang terjadi di Indonesia, umumnya merupakan bentuk konflik "*dwiminoritas*" dan "*triminoritas*", lantaran terbentuk atas himpitan dua atau tiga konflik seperti antar suku dan agama, atau antar ras, suku, dan agama sekaligus (Kompas: 2009)

Terlepas dari apa bentuk konflik yang terjadi, faktor penyebab dan fungsinya bagi terbentuknya proses sosial, ternyata konflik berkepanjangan tidak hanya berakibat semakin sulitnya dicarikan strategi pemecahannya tapi juga berdampak semakin rusaknya tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Dalam hal inilah, Pemerintah dan masyarakat mencari solusi paling tepat untuk mengatasi konflik yang terjadi serta membangun kerukunan hidup masyarakat sehingga terbentuk NKRI yang kuat, yang dapat dimulai dari berbagai daerah seperti Kota Malang, dan juga dapat dilakukan tindakan preventif bila belum membesar menjadi konflik sosial, apalagi masih berupa potensi konflik. Berbagai strategi penguatan integrasi bangsa yang benar-benar "*integrated*" dan sekaligus memperkecil konflik-konflik sosial memang, sudah banyak yang ditempuh. Salah satunya melalui pendekatan agama (*religious approach*) yang memfokus pada upaya pemungisian agama pada proporsi yang tepat sebagai "*social integrator*" dalam perspektif luas. Namun demikian, membangun kerukunan agama tidaklah ringan. Mekipun sejumlah pedoman telah digulirkan, pada umumnya masih sering terjadi gesekan-gesekan ditingkat lapangan, terutama berkaitan dengan penyiaran agama, pembangunan rumah ibadat, dan sebagainya (Ali, Mursyid (*ed*), 2009: xiv). Pada tingkat tertentu ini dapat mengganggu kerukunan hidup antar umat beragama.

Selain persoalan konflik tersebut dan untuk menjawab berbagai persoalan yang muncul serta sekaligus melihat sejauhmana tingkat

kerekatan dalam hubungan antara umat beragama dewasa ini. Telah banyak penelitian-penelitian yang mengungkap tentang Kerukunan Umat Beragama yang dimulai dengan mengungkap dan memetakan terjadinya penyebab konflik umat beragama yang dilakukan berbagai lembaga, seperti yang sudah dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan tentang Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta bekerjasama dengan Badan Litbang Agama Departemen Agama 1997, Pemetaan Kerukunan Hidup Umat Beragama di Jawa Barat, tahun 2009, oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Pada tahun 2010 ini Puslitbang Kehidupan Keagamaan melakukan kembali penelitian tentang Potret Kerukunan Hidup Umat Beragama di Jawa Timur, khususnya Kota Malang.

Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian

Adapun masalah yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah: a). Bagaimana Kondisi umum kerukunan dan konflik kehidupan beragama Kota Malang?; b) Faktor apa saja yang potensial menopang kerukunan di Kota Malang?; c) Faktor apa saja yang dapat memicu konflik di Kota Malang? d) Kasus-kasus apa saja yang pernah muncul di Kota Malang?; Bagaimana langkah-langkah penyelesaian konflik yang dilakukan di Kota Malang?; Bagaimana upaya untuk memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup umat beragama di Kota Malang?

Tujuan penelitian ini untuk kondisi terkini mengenai: a) Mengetahui Kondisi umum kerukunan dan konflik kehidupan beragama Kota Malang; b) Mengetahui faktor apa saja yang potensial menopang kerukunan di Kota Malang; c) Mengetahui faktor apa saja yang dapat memicu konflik di Kota Malang; Mengetahui kasus-kasus apa saja yang pernah muncul di Kota Malang; d) Mengetahui langkah-langkah penyelesaian konflik yang dilakukan di Kota Malang; e) Mengetahui upaya untuk memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup umat beragama di Kota Malang.

Kerangka Konseptual

Kemajemukan

Kemajemukan merujuk pada pengertian macam-macam. Menurut Fediyani (1986:ix), kemajemukan (pluralitas) berarti terdapatnya keanekaragaman unsur penyusun masyarakat, yaitu suku bangsa (etnik), agama, golongan-golongan sosial lainnya. Unsur-unsur struktur social tersebut, secara sosio-kultur maupun politis, memiliki identitas masing-masing yang cenderung untuk saling diketahui dan diterima dalam masyarakat.

Implikasinya, kemajemukan dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai asset kekayaan masyarakat (atau bangsa) yang dapat berkontribusi positif bagi tumbuhnya persaingan secara sehat yang berakibat terjadinya kemajuan atau perubahan social yang dinamik. Arthur F. Bentley (1908) dalam bukunya David L Sill (1986:168), tentang *International Encyclopedia of the Social Science*, menggaris-bawahi bahwa dinamika perubahan social sangat ditentukan oleh interkasi antar kelompok yang berbeda. Namun dalam keadaan berbeda, kemajemukan tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi juga sebagai pertentangan atau konflik, melainkan bagaimana mengelola secara kreatif sehingga mewujud dalam *cooperation dan competition*.

Jarak Sosial

Secara bahasa Jarak Sosial terdiri dari kata Jarak dan Sosial. Jarak didefinisikan sebagai berikut: 1) ruang sela (panjang atau jauh) antara dua benda atau tempat: antara Mekkah dan Madinah kami tempuh dengan bus dalam 5 jam; 2) jari-jari bulatan (lingkaran): bulatan yangnya; pohon perdu yang tingginya 2 m, bergetah, berwatna putih, batangnya mudah patah, berbiji polong, bijinya terletak dalam pangsa, sebesar kacang tanah, apabila tua berwarna hitam dan dapat dipakai sebagai bahan minyak pelumas, banyak macamnya, seperti; Belanda; keliling, pagar, Cina, Ricinus communis. Sedangkan Kata Sosial di

defenisikan sebagai berikut: 1) berkenaan dengan masyarakat: perlu adanya komunikasi-dalam usaha menunjang pembangunan ini; 2) (cak) suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dosen): ia sangat terkenal pula. Dengan demikian, **Jarak Sosial** diartikan sebagai tingkatan keakraban yang menandai hubungan individu dalam interkasi sosial.

Kerukunan: Konsep dan Signifikansi Sosialnya

Perkataan “rukun”, secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila Lubis, H.M Ridwan (1924:21). Kemudian, perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun sebagai kata sifat berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih (Poerwodarminto: 1954). Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan “*harmonious*” atau “*concord*” (M. Echols, John dan Shadily, Hasan (1994: 468). Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak-berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (lawan disintegrasi) yang berarti: “*the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*” (W. Wallace, 1990: 9).

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (=unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Lubis, Ridwan, 2004: 24-26). Sebagai kondisi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial, kerukunan memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan struktur sosial suatu masyarakat. Kerukunan dapat menjadi katup pengaman (*safety valve*) bagi disintegrasi sosial. Kerukunan dapat mereduksi konflik, disamping secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat (*social equilibrium*). Kerukunan, dengan demikian berfungsi mengontrol, memelihara, menguatkan dan membangun “ikatan sosial” struktur

masyarakat. Kerukunan mengontrol unsur untuk saling mengikat dan memelihara keutuhan bersama agar tetap eksis dan *survived*.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif analitis, dengan pendekatan studi kasus, memfokuskan pada kajian potensi yang dapat menciptakan kerukunan dan ketidak rukunan/potensi konflik di Kota Malang pada tahun 2010. Peneliti ini mencari informasi melalui wawancara mendalam kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, FKUB, Kesbanglinmas, Kementerian Pariwisata, Kemenag dan masyarakat di Kota Malang. Waktu wawancara dilakukan sesuai kesepakatan bersama antara peneliti dan informan. Dilakukan studi kepustakaan, telaah dokumen, buku-buku, jurnal, hasil-hasil penelitian dan pengamatan terhadap obyek yang berkenaan dengan fokus kajian ini.

Dari informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian di klasifikasi, diedit, dideskriptifkan, dianalisis, dikomparasikan dan diinterpretasikan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.

Kehidupan Sosial dan Budaya

Kota Malang yang terletak di tengah-tengah wilayah kabupaten Malang, merupakan salah satu kota tujuan wisata di Jawa Timur karena potensi alam dan iklim relatif sejuk yang dimilikinya. Kota Malang seluas 110.06 kilometer bujur sangkar terbagi dalam lima kecamatan masing-masing: Kecamatan Kedungkandang, Sukun, Klojen, Blimbing, dan Kecamatan Lowokwaru.

Dari atas pegunungan Buring, lokasi yang paling tinggi (\pm 667 meter diatas permukaan laut) yang terletak disisi timur Kota Malang, terlihat jelas pemandangan indah berupa barisan gunung Kawi dan Panderman (di barat), gunung Arjuno (utara), gunung Semeru di timur, serta hamparan kota yang terlihat dibawahnya.

Disimak dari kemampuan membangun wilayahnya, tercatat seluruh kelurahan sebanyak 57 buah di Kota Malang. Termasuk kelurahan swasembada, artinya mampu menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri. Menurut hasil proyeksi penduduk tahun 2009, jumlah penduduk Kota Malang sebanyak 820.857 jiwa, terdiri dari 406.755 jiwa laki-laki, dan sebanyak 414.102 jiwa perempuan. Untuk menopang hidup kesehariannya, sebagian besar penduduk setempat berkiprah disektor perdagangan (33,08 persen). Selebihnya sekitar jasa (28,96 persen), industri (15,92 persen), sektor pertanian hanya (12,02 persen) dan lainnya sekitar 11 persen. (Kota Malang dalam Angka. 2000).

Selanjutnya ditilik dari sisi budaya, menurut Ayu Sutarto dari Universitas Jember, di Jawa Timur terdapat empat kawasan budaya besar yang cakupan wilayah pengaruhnya luas, masing-masing kawasan budaya Jawa Mataram, Arek, Madura Pulau dan Pandalungan. Selain itu terdapat kawasan budaya lebih kecil seperti budaya Jawa Panarogan, Osing, tengger, Bawlan, Kangean, dan Samih. (Kompas, 11 Maret 2009). Sementara Kota Malang yang dijadikan sasaran lokasi, kajian ini termasuk dalam kawasan budaya "Arek" yang cakupan wilayahnya membentang dari pesisir utara di Surabaya hingga pedalaman selatan daerah Malang. Wilayah Arek/Pesisir ini tergolong paling pesat perkembangan ekonominya. Tak heran bila arus migrasi dari wilayah lain, banyak masuk ke kawasan ini. Karena banyak bersentuhan dengan pendatang dari luar, karakter komunitas Arek ini menurut Ayu Sutarno mempunyai semangat yang tinggi, solidaritas kental dan terbuka terhadap perubahan.

Kehidupan Agama

Ditilik dari sisi keyakinan beragama, mayoritas penduduk Kota Malang, yakni sekitar 85,71 persen beragama Islam. Selebihnya sebanyak 6,25 persen penganut Kristen (Protestan), 6,26 persen beragama Katolik, 0,80 persen pemeluk agama Budha dan Hindu sebanyak 0,98 persen.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan jumlah penduduk menurut agama ini bisa disimak dalam tabel berikut:

TABEL 1
PENDUDUK KOTA MALANG MENURUT AGAMA TAHUN 2008

No	Kecamatan	Islam	Kristen	Katolik	Hindu	Budha
1	Kedungkandang	155.240	1.350	3.229	248	140
2	Sukun	142.242	14.101	15.638	3.681	2.090
3	Klojen	108.576	7.368	8.864	1.375	1.582
4	Blimbing	131.844	19.995	15.375	1.750	1.520
5	Lowokwaru	149.781	7.339	7.108	790	1.111
Total		687.683	50.153	50.212	7.844	6.443
Prosentase		85,71%	6,25%	6,26%	0,98%	0,80%

Sumber: Kemenag Kota Malang

Catatan: Kong Hu Chu, Belum ada catatan

Sementara jumlah rumah ibadat untuk masing-masing kelompok agama: Masjid sebanyak 362 buah, Gereja Kristen 79 buah, Gereja Katolik 23 buah, Vihara Budha 9 buah dan Pura untuk umat hindu di kota Malang sebanyak 4 buah.

TABEL 2
JUMLAH DAN PROSENTASE RUMAH IBADAT DI KOTA MALANG-TAHUN 2008

No	Rumah Ibadat	Frekuensi	Prosentase	Daya Tampung
1	Masjid	362	75,89	1.900
2	Gereja Kristen	79	16,56	635
3	Gereja Katolik	23	4,82	2.183
4	Vihara	9	1,89	716
5	Pura	4	0,84	1.961
Total		477	100,00	1.682

Dari data tabel di atas, tergambar bahwa kelompok Kristen yang dari segi komposisi penduduk sebanyak 6,25 persen, memiliki jumlah gereja relatif besar yaitu sekitar 16,56 persen dari jumlah Rumah Ibadat yang ada di kota Malang. Berbeda dengan kelompok Katolik yang prosentase penganutnya relatif sama dengan kelompok Kristen yakni sebesar 6,26 persen, tapi prosentase Rumah Ibadatnya hanya 4,82 persen.

Sementara kelompok Muslim yang prosentase penganutnya 85,71 persen berbanding dengan 75,89 persen Rumah Ibadat – Kelompok Hindu sebesar 0,98 persen berbanding dengan 0,84 persen Rumah Ibadat – Dan kelompok Buddha sebanyak 0,80 persen, dengan jumlah Rumah Ibadat sebesar 1,89 persen dari keseluruhan jumlah Rumah Ibadat di Kota Malang.

Tingginya jumlah gereja Kristen di Kota Malang menurut sementara tokoh FKUB setempat antara lain: 1) Banyaknya sub. kelompok atau sekte dalam Kristen yang membutuhkan gerejanya sendiri-sendiri, 2) Semangat kelompok untuk beribadat/mendirikan Rumah Ibadat senantiasa meningkat, 3) Memiliki sumber dana yang cukup.

Aktivitas Keagamaan

Selanjutnya mengenai aktivitas kelompok keagamaan secara umum sebagai berikut, Dilingkungan kelompok Muslim setempat terdapat dua Ormas yang relatif besar pengaruhnya. Pertama Nahdatul Ulama (NU) yang banyak berkiprah di pendidikan, pembinaan agama, dan dakwah serta politik melalui Pondok Pesantren, Madrasah Tempat Ibadat, Majelis Taklim, Kelompok-kelompok Tahlilan baik di tingkat kota bahkan sampai di tingkat RT-RW di tiap kelurahan. Kedua, Muhammadiyah dengan beragam aktivitasnya di bidang pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, melalui sekolah - sekolah umum tingkat dasar sampai perguruan tinggi – panti asuhan – rumah sakit/klinik – koperasi – perhotelan, dialog/diskusi dan usaha lain di sektor jasa.

Agak mirip dengan Muhammadiyah kelompok Kristen dan Katolik setempat banyak berkiprah di bidang pendidikan dan sosial melalui sekolah-sekolah umum, sekolah Alkitab, sekolah tinggi Teologia, klinik, panti asuhan, dan diskusi-diskusi.

Sementara kelompok Hindu dan Budha secara umum aktivitasnya relatif terbatas, lebih bersifat internal, misalnya peringatan hari besar keagamaan kelompok. Selain jumlah penganutnya memang relatif

sedikit, kedua kelompok ini (Hindu dan Budha) terkesan lebih berorientasi pembinaan keagamaan ke dalam (internal), dan tidak membawa misi ke luar kelompok.

Kerukunan dan Konflik

Kerukunan dan konflik merupakan suatu proses dan refleksi interaksi sosial yang dinamis, tidak permanen. Suatu komunitas yang sekarang rukun, lantaran berbagai ihwal sewaktu-waktu bisa berubah menjadi konflik dan sebaliknya. Perubahan dari rukun menjadi tidak rukun dan sebaliknya dipengaruhi oleh kemungkinan banyak faktor dalam proses interaksi sosial yang berlangsung antar individu dan antar kelompok. Bisa pengaruh faktor agama, faktor sosial, atau kombinasi faktor sosial dan agama sekaligus.

Kondisi umum Kota Malang yang sekarang ini relatif kondusif, menurut beberapa tokoh keagamaan setempat, ditopang oleh berbagai faktor yang dipandang menguntungkan bagi upaya perwujudan kerukunan antara lain; a) Komitmen yang tinggi, partisipasi, saling pengertian, dan peran sentral para tokoh agama selaku simbol pemersatu. Dukungan politis pemda yang besar dengan otonominya selaku penanggungjawab utama dalam upaya perwujudan wilayah setempat. Ajaran keagamaan dan kearifan budaya lokal yang sarat dengan nilai dan pesan-pesan kerukunan. Tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial warga setempat, dari waktu ke waktu makin meningkat. (Wawancara dengan pengurus FKUB, 25 Nopember 2010, di Kantor FKUB Kota Malang).

Sedangkan sejumlah aspek yang dipandang potensial dan dapat memicu konflik dan mengganggu upaya perwujudan kerukunan meliputi: a) Perbedaan paham dan pengamalan ajaran agama yang tidak selaras dengan kelompok arus utama (internal kelompok agama), seperti Ahmadiyah, Saksi Yehoval. Pembangunan dan penggunaan rumah ibadat yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Juga oleh karena Persaingan politik yang kurang sehat dan penyalahgunaan simbol agama untuk menggalang dukungan kepentingan politik praktis sesaat. Dampak

budaya global yang tidak sesuai dengan ajaran agama dan kearifan lokal setempat maka harus dihindarkan.

Kasus-Kasus

Berdasarkan laporan kantor kementerian Agama dan Pemda setempat serta penuturan para tokoh ormas keagamaan, kondisi umum Kota Malang saat ini relatif rukun. Tidak ada kasus konflik terbuka yang melibatkan massa atau kelompok-kelompok keagamaan secara luas. Beberapa kasus yang pernah muncul yang relatif kecil dan dapat diselesaikan oleh umat beragama bersama-sama pemda setempat antara lain:

Penistaan Agama

Seorang warga non muslim masuk masjid “Al-Salam” di Kecamatan Lowokwaru, dengan berpakaian Muslim, kemudian diketahui identitasnya sebagai non muslim oleh pengurus dari pengurus dan jamaah masjid terkait. Peristiwa yang terjadi tahun 2007 tersebut dipandang oleh kelompok muslim setempat sebagai penistaan atau penodaan agama, melanggar Undang-undang Penetapan Presiden Nomor 1 tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan, atau Penodaan Agama. Kasus ini diselesaikan melalui Keproses pengadilan.

Rumah Tinggal Sebagai Tempat Ibadat

Hal tersebut terjadi dengan melibatkan orang luar yang bukan warga setempat. Kasus ini terjadi tahun 2010 di Kecamatan Kedungkandang – Kota Malang, dan diselesaikan secara kekeluargaan oleh pihak-pihak terkait bersama-sama dengan FKUB dan pemda setempat.

Pembatalan IMB

Rencana pembangunan gereja di Jalan Gajah Mada, Kota Malang yang sudah mendapat Rekomendasi Kementerian Agama dan FKUB setempat, tidak mendapat izin dari Walikota karena dipandang

tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Malang Nomor 8 tahun 2007, tentang Sistem dan Prosedur Tetap Pelayanan Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat dan Pelayanan Perijinan Tempat Kegiatan pendidikan di Kota Malang.

Renovasi Rumah Ibadat

Rumah ibadat dimaksud berupa masjid, yang terletak di Kelurahan Waru Kecamatan Lowokwaaru (2009) yang dianggap mengganggu lingkungan, berbatasan langsung dengan jalan umum. Persoalan ini berhasil diredam melalui musyawarah secara kekeluargaan antar pihak-pihak terkait setempat.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: a) kondisi umum kerukunan kehidupan beragama Kota Malang saat ini, relatif rukun. Tidak ada konflik keagamaan yang sifatnya terbuka dan melibatkan massa atau kelompok agama; b) komitmen, partisipasi, saling pengertian, dan peran sentral para tokoh agama setempat selaku lambang pemersatu yang solid; c) Dukungan dari Pemda; d) Ajaran agama dan kearifan lokal yang sarat dengan nilai dan pesan-pesan kerukunan; e) Tingkat pendidikan, ekonomi, dan kesejahteraan sosial yang semakin meningkat.

Sementara faktor-faktor yang dianggap dapat memicu konflik meliputi: a) Paham dan Pengamalan ajaran agama yang tidak sesuai dengan paham agama kelompok arus utama – b) Penyalahgunaan simbol-simbol agama untuk kepentingan politik praktis – c) Wawasan keagamaan yang sempit dan fanatisme kelompok berlebihan – d) Dampak budaya global yang tidak selaras dengan ajaran agama dan kearifan lokal seperti pergaulan bebas, budaya serba uang, kekerasan dosen.

Beberapa kasus yang pernah muncul di Kota Malang diantaranya: a) Kasus penistaan/penodaan agama di Kecamatan Lowokwaru (2007) – b) Penggunaan Rumah tinggal sebagai Rumah Ibadat – 3) Renovasi

Masjid yang dianggap mengganggu lingkungan, karena berbatasan langsung dengan jalan umum.

Langkah-langkah penyelesaian konflik yang lazim ditempuh meliputi: a) Pendekatan secara kekeluargaan; b) Musyawarah antar tokoh keagamaan, masyarakat dan pejabat pemerintah setempat; c) Melalui dialog FKUB; d) Proses hukum.

Rekomendasi

Untuk memelihara dan meningkatkan kerukunan hidup umat beragama dan keutuhan bangsa di Kota Malang, perlu dilakukan upaya: a) Peningkatan efektivitas fungsi lembaga-lembaga keagamaan dan pranata kearifan budaya lokal – b) Peningkatan waasan keagamaan masyarakat – c) Menggalakkan dialog multi kultural dan kerjasama kemanusiaan lintas agama, etnis, budaya, dan profesi – d) Efektivitas peran FKUB – e) Memperkaya wawasan dan pengalaman tentang kerukunan melalui program kurikuler di lingkungan lembaga pendidikan

Daftar Pustaka

- Ali, Mursyid, 2005. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Jakarta.
- Amstrong, Karen, 2001. *Berperang Demi Tuhan*, Mizan, Bandung.
- Balitbang Agama, 1999. *Sistem Siaga Dini, Untuk Kerusuhan Sosial*.
- Badan Pusat Statistik, 2009. *Kota Malang Dalam Angka*.
- Berger, Peter. L., Thomas Luckman, 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan*. LP3ES.
- Fedyani, Achmad, 1986. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham Dalam Ajaran Islam*. Rajawali, Jakarta.
- Kompas, 11 Maret 2009
- Kota Malang Dalam Angka, 2010

- Mudzhar, Atho, 2002. *Konflik Etnis Religius Indonesia Kontemporer*, Balitbang dan Diklat Depag.
- Purwasito, Andrik, 2003. *Komunikasi Multikultural*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Saiful Mujani, 2006. *Masalah Toleransi Antar Agama*, Lembaga Survei Indonesia,
- Sill, David L (ed.). 1968. *International and Schuster and Prentice Hall International*, London.
- Tim. 2009. *Pendidikan Perdamaian Berbasis Islam*, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Turmudzi, Endang, 2003. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*, LKIS, Yogyakarta.

Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama Antar Umat Beragama di Kota Palu

Bashori A. Hakim

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Cultural and religious values have given a significant influence on inter-religious cooperation in Palu. Kaili community culture has become a dominant in Palu which dominates the cultural practices in the area of the city. Cultural societies such as mutual help, respect to each individuals (including respect for guests), togetherness, tolerance and harmony between the members are simultaneously in contact with religious values and to give positive effects on the condition of harmony and cooperation among religious believers. This study used a qualitative approach.

***Keywords:** social conflict, cultural values, communal conflicts, economic disparities.*

Latar Belakang

Bangsa Indonesia yang secara geografis tersebar di seluruh Kepulauan Nusantara ini, sesuai fakta sejarah terdiri atas berbagai suku, bahasa, tradisi, adat istiadat dan budaya, bahkan agama. Konsep *negara-bangsa* yang kita kenal di bumi nusantara ini justru bersumber dan digali dari nilai-nilai budaya dan nilai-nilai

keagamaan yang tumbuh di kalangan masyarakat. Dengan konsep demikian diharapkan akan terjalin kehidupan masyarakat Indonesia yang harmonis, rukun dan bersatu. Sekalipun masyarakat kita terdiri atas berbagai latar belakang budaya maupun agama, namun mereka terjalin dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dalam satu bangsa, bangsa Indonesia.

Akan tetapi dalam perjalanan bangsa dan dinamika kehidupan masyarakat memungkinkan terjadinya kondisi yang tak dapat dielakkan, misalnya timbul benturan-benturan kepentingan antar kelompok masyarakat yang berbeda, baik berbeda suku maupun agama. Konsep negara-bangsa yang semula diharapkan mampu merajud keragaman budaya dan agama, serta integrasi bangsa yang dicita-citakan selama ini, akhir-akhir ini terasa semakin jauh dari harapan. Hal itu ditandai oleh semakin maraknya berbagai macam konflik di berbagai daerah, terutama sejak awal era reformasi pada tahun 1998. Peristiwa konflik yang timbul tidak hanya terjadi di daerah-daerah yang sejak sebelumnya kehidupan masyarakat memang kurang harmonis, tetapi juga terjadi di daerah-daerah yang sejak sebelumnya diketahui sebagai daerah yang kondusif dan terjadi kerjasama antarumat beragama. Beberapa kasus konflik dimaksud misalnya: peristiwa kekerasan di Situbondo tahun 1996 (*M. Zainuddin Daulay, 2002:125*), peristiwa Kupang tahun 1998 (*Ibnu Hasan Muchtar, 2004:145*), kasus Ambon tahun 1999 (*Syuhada Abduh, 2004:111*) serta peristiwa Poso tahun 1998-2002 (*Mursyid Ali, 2003:83*). Dalam peristiwa kerusuhan itu ada yang membawa-bawa faktor agama untuk menarik dukungan yang luas dari kelompok agama tertentu. Ada pula yang membuat garis pembatas sehingga cenderung membatasi bahkan menghindari terjadinya kerjasama antarumat beragama.

Pihak pemerintah selama ini telah berupaya meredakan setiap terjadi gejolak kasus konflik. Dalam kasus konflik tertentu bahkan diupayakan terciptanya kerukunan dan perdamaian pada pasca konflik, misalnya melalui pertemuan untuk memperoleh kesepakatan-kesepakatan dan perjanjian antar pihak yang bertikai.

Untuk menciptakan kondisi rukun, perlu dikenali faktor-faktor yang menyebabkan tidak rukun. Ada faktor nonkeagamaan yang menyebabkan ketidakrukunan di samping faktor keagamaan. Faktor non keagamaan dimaksud adalah: kesenjangan ekonomi, kepentingan politik dan perbedaan nilai sosial budaya. Sedangkan faktor keagamaan yang dapat menyebabkan ketidakrukunan – sekalipun tidak langsung- antara lain: penyiaran agama, bantuan keagamaan luar negeri, perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda, pengangkatan anak, pendidikan agama, perayaan hari besar keagamaan, perawatan dan pemakaman jenazah, penodaan agama, kegiatan kelompok sempalan, transparansi informasi keagamaan, serta pendirian rumah ibadat (*Nicolas, Woly, J, dkk (Penyunt.), 2009:39-40*).

Terlepas dari faktor-faktor nonkeagamaan maupun faktor keagamaan yang menyebabkan ketidakrukunan di atas, faktor jalinan komunikasi menjadi unsur penting dalam upaya meredakan ketidakrukunan. Melalui komunikasi yang terjalin dengan baik, dimungkinkan faktor-faktor penyebab ketidakrukunan di atas akan dapat diatasi.

Komunikasi antarumat beragama dapat terjalin dengan baik melalui peningkatan kerjasama antarumat beragama, misalnya kerjasama di bidang sosial, ekonomi maupun budaya. Di bidang budaya, kerjasama yang dapat dilakukan antara lain berupa penggalakan atau menghidupkan kembali (*revitalisasi*) budaya damai ataupun kearifan lokal.

Dalam kaitannya dengan kearifan lokal, sesungguhnya bangsa kita tergolong kaya dengan kearifan lokal yang cenderung beragam dan bervariasi menurut daerah masing-masing, namun nuansa dan intinya pada dasarnya sama yaitu menekankan kehidupan yang rukun dan damai, saling kerjasama di antara berbagai unsur atau kelompok keagamaan yang berbeda dalam masyarakat.

Jauh sebelum lahirnya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tahun 2006 yang menjadi sebuah kebijakan Pemerintah secara nasional

dalam upaya meningkatkan kerukunan antarumat beragama, di berbagai daerah telah terbentuk forum-forum kerukunan lintas agama. Sebagai contoh, di Sukabumi telah ada forum kerukunan sejak tahun 1997, dengan nama Forum Kerukunan Umat Beragama Sukabumi (FKUSI), di Medan –Sumatera Utara terdapat Forum Komunikasi Antar Pemuka Agama (FKPA). Selain itu terdapat kegiatan dialog-dialog antarumat yang diselenggarakan oleh kalangan akademisi maupun lembaga masyarakat, serta kegiatan kerjasama lintas agama dalam rangka memberi bantuan kemanusiaan. Tentu saja, kegiatan ini lebih bersifat insidental, dilakukan sehubungan adanya kasus/kejadian tertentu, seperti: pemberian bantuan kepada para penerima musibah bencana banjir, tanah longsor dan gempa bumi.

Di daerah-daerah yang penduduknya cenderung homogen dari segi etnis, budaya maupun agama, biasanya cenderung tercipta kehidupan masyarakat yang relatif rukun. Namun sehubungan dengan modernisasi yang berdampak terhadap perubahan sosial dan semakin meningkatnya arus migrasi penduduk di berbagai daerah dari tahun ke tahun, mengakibatkan semakin langkanya daerah yang berpenduduk homogen sebagaimana digambarkan di atas. Banyak daerah dengan penduduk yang heterogen, sehingga rentan bagi timbulnya konflik horizontal. Konflik sosial yang terjadi seringkali bernuansa agama sehingga dapat mengancam kerukunan antarumat beragama. Nilai-nilai budaya maupun nilai keagamaan yang dulunya menjadi perekat kerukunan pada masa lalu –karena penduduknya homogen- semakin tidak berperan. Kerjasama antarumat beragama yang mungkin pernah ada, tidak dilakukan lagi akibat konflik.

Gambaran tentang kondisi di atas kiranya mendorong Puslitbang Kehidupan Keagamaan untuk melakukan kajian melalui sebuah penelitian dengan judul *“Pengaruh Budaya dan Nilai-Nilai Keagamaan Terhadap Kerjasama Antarumat Beragama”* yang di antaranya dilakukan di Kota Palu. Pemilihan Kota Palu sebagai lokasi kajian antara lain atas pertimbangan bahwa masyarakat penduduk kota tersebut di samping tergolong heterogen baik dari segi etnis, budaya maupun agama, berjarak relatif dekat dengan Poso -sebagai daerah yang

dikenal pernah timbul konflik antarumat beragama-, sehingga dimungkinkan rawan bagi hubungan antarumat beragama yang kondusif.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan

Adapun permasalahan yang dikaji dalam penelitian meliputi dua hal, yakni: a) Bagaimana pengaruh budaya dan nilai-nilai keagamaan dalam mewujudkan kerjasama antarumat beragama di Kota Palu ? b). Apa saja bentuk-bentuk kerjasama yang dilakukan antarumat beragama di kota tersebut?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk: a) Mengetahui pengaruh budaya dan nilai-nilai keagamaan dalam mewujudkan kerjasama antarumat beragama di Kota Palu; b) Mengetahui bentuk-bentuk kerjasama antarumat beragama di Kota Palu. Sedangkan kegunaannya yakni bahan untuk menyusun kebijakan terkait dengan peningkatan kerjasama antarumat beragama dalam mewujudkan kerukunan di daerah penelitian.

Metodologi

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil kajian yang diperoleh melalui metode ini dipaparkan secara deskriptif analitis. Data dikumpulkan melalui wawancara, studi pustaka dan dokumentasi serta observasi. Wawancara dilakukan kepada sejumlah informan kunci di daerah penelitian terdiri atas individu-individu yang terkait, secara holistik (*Bogdan dan Taylor, 1992:32-33*). Untuk panduan wawancara, dibuat pedoman wawancara berupa sejumlah pertanyaan yang terkait dengan masalah penelitian. (*Dedy Mulyana, 2002:59-60*). Untuk pengayaan informasi dan data lapangan sekaligus untuk memperoleh data yang akurat, dilakukan penelusuran dan telaah kepustakaan, baik berupa buku, dokumen termasuk hasil penelitian.

Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah secara deskriptif analitik melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan interpretasi atau penafsiran untuk memperoleh pengertian

dan kesimpulan baru. Dalam proses analisis, data dimaknai secara mendalam berdasarkan perspektif *emic*, yaitu penafsiran data secara alamiah sebagaimana adanya (*Bogdan dan Taylor, 1992:13*). Hasil interpretasi dan penafsiran data tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai bahan penyusunan hasil penelitian, berupa deskripsi atas kondisi yang dikaji (*Paul B. Horton, Chester L. Hunt, dalam Aminuddin Ram, Tita Sobari (Alih Bahasa), 1999:38*).

Tinjauan Pustaka

Kajian mengenai kerjasama antarumat beragama akhir-akhir ini terlihat semakin menarik, terbukti dilakukan oleh berbagai kalangan dalam forum seminar maupun dialog dan pertemuan-pertemuan.

Penelitian tentang *Kerjasama Antarumat Beragama di Indonesia: Pengaruh Karakteristik Individu, Tingkat Sosial Ekonomi, Sikap Keberagamaan dan Tingkat Kepercayaan/Trust Terhadap Kerjasama Antarumat Beragama*. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif ini menghasilkan temuan antara lain bahwa semua variabel bebas dalam penelitian tersebut memiliki pengaruh langsung terhadap tingkat kerjasama umat beragama secara signifikan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Puslitbang Kehidupan Keagamaan pada tahun 2009 ini tidak dikaji pengaruh budaya dan nilai-nilai keagamaan terhadap kerjasama antarumat beragama (*Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2009*).

Seminar hasil penelitian tentang Peran Lembaga Sosial Keagamaan dalam Pengembangan Wawasan Multikultural yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2007, mengemukakan tentang pemahaman, sikap dan komitmen pimpinan lembaga sosial keagamaan, bahwa empat dimensi, yaitu: toleransi, demokrasi, pendidikan dan kesetaraan gender adalah merupakan modal dasar yang penting dalam upaya pengembangan wawasan multikultural (*Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 2007*). Penelitian yang dilakukan, secara khusus juga tidak mengkaji tentang pengaruh budaya dan nilai-nilai keagamaan terhadap kerjasama antarumat beragama.

Mengingat hal itu maka dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan akan dapat melingkupi hasil kajian serupa yang telah dilakukan terdahulu.

Kerangka Teori

Keragaman agama dalam kehidupan masyarakat, sesuai ajaran universal setiap agama, selain mengandung potensi integrasi juga dapat berpotensi disintegrasikan atau konflik. Namun keragaman itu apabila dikelola secara baik dapat menimbulkan kekuatan yang sinergis sehingga dapat menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa.

Konflik yang dilatarbelakangi oleh faktor agama cenderung lebih peka dan sensitif dibanding dengan konflik yang dilatarbelakangi faktor lain, karena masalah agama tidak mengenal batas geografis, demografis maupun sosiologis. Untuk meredakan atau menetralkan potensi konflik yang diakibatkan keragaman agama dapat diupayakan melalui suatu model yang dapat mengintegrasikan perbedaan-perbedaan yang ada, sekaligus memperkuat kesamaan-kesamaan. Upaya demikian dirasa penting dalam rangka membangun kerjasama antarumat beragama. Sedangkan kerjasama antarumat beragama akan mudah terwujud apabila setiap unsur umat beragama menaati ajaran agama masing-masing, terlebih ajaran agama yang mengandung nilai-nilai kebersamaan, persaudaraan dan cinta kasih terhadap sesama. Perbedaan agama –dalam kaitan ini- dapat menjadi spirit kerjasama ketika masing-masing kelompok agama benar-benar menjadikan nilai-nilai universal ajaran agamanya tersebut sebagai dasar dalam bermasyarakat, sehingga kerukunan diharapkan dapat terwujud.

Agama, secara umum dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan tentang hubungan antara manusia dengan dunia gaib khususnya dengan Tuhan, antar sesama manusia, serta antara manusia dengan alam lingkungannya. Secara khusus agama juga dapat didefinisikan sebagai sistem keyakinan yang dianut dan dilaksanakan sebagai kewajiban oleh suatu kelompok dalam menginterpretasikan dan merespon terhadap yang dirasakan dan diyakini sebagai gaib dan

suci. Glock dan Stark mendefinisikan agama sebagai sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang melembaga. Sementara itu Syaltut memberikan batasan agama sebagai ketetapan-ketetapan Ilahi yang diwahyukan kepada nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia.

Definisi yang dikemukakan Glock dan Stark itu bersentuhan dengan pengertian tentang kebudayaan. Dalam setiap agama mempunyai ciri adanya ide, gagasan dan konsep, perilaku maupun benda, yakni ciri budaya immateri di samping ciri berupa materi. Apabila antara arti agama dan budaya disandingkan, maka dalam aspek-aspek tertentu memiliki persamaan. Keduanya merupakan sistem nilai dan simbol-simbol yang berisi kaidah, ajaran dan aturan, meskipun sumbernya berbeda. Sistem nilai budaya dihasilkan oleh kemampuan manusia, sedangkan kaidah dan ajaran agama diyakini bersumber dari wahyu Tuhan.

Agama berpengaruh kuat dalam totalitas kepribadian seseorang, sehingga dalam realita kehidupan agama merupakan suatu sistem yang total. Koentjaraningrat dengan mengutip pendapat Emil Durkheim mengatakan bahwa ada empat unsur pokok dalam agama, yaitu: emosi keagamaan, sistem kepercayaan, sistem upacara dan komunitas keagamaan. (*Koentjaraningrat, 1978:136-137*). Emosi keagamaan menyebabkan seseorang menjadi religius. Sistem kepercayaan mengandung keyakinan serta bayangan manusia tentang sifat-sifat Tuhan dan wujud alam gaib. Sistem upacara keagamaan bertujuan mencari hubungan antara manusia dengan Tuhan. Komunitas keagamaan terdiri atas kelompok-kelompok religius berupa kesatuan-kesatuan sosial menganut sistem kepercayaan melakukan upacara-upacara religius. Masyarakat selaku warganegara dalam kehidupan mereka sehari-hari memiliki kesadaran yang tinggi dan terbiasa dalam melihat dan memahami karakteristik agama maupun budaya masyarakat lain.

Adapun *kebudayaan*, secara sederhana Taylor mendefinisikan sebagai keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat

dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Koentjaraningrat menjelaskan, kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik diri manusia dengan cara belajar. (*Koentjaraningrat, 1990:180*). Sedangkan Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi mengartikan kebudayaan sebagai sarana hasil karya, rasa dan cipta masyarakat. Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat diperoleh pengertian bahwa kebudayaan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia yang mempengaruhi tingkat pengetahuan yang bersifat abstrak.

Perwujudannya berupa perilaku dan benda-benda bersifat nyata yang diciptakan manusia, misalnya: pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan sebagainya, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupannya. Kebudayaan secara global dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu *kebudayaan materi* seperti: hasil-hasil pabrik, bangunan, ladang dan segala benda fisik yang telah diubah orang, serta *kebudayaan non materi* seperti: kata-kata/ bahasa, hasil pemikiran, adat-istiadat, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan. Kebudayaan materi selalu merupakan hasil perkembangan kebudayaan non materi dan tidak ada artinya tanpa kebudayaan non materi. (*Horton, Paul, B. dan L.Hunt, dalam Aminuddin Ram, Tita Sobari, 1989:58*).

Baik kebudayaan maupun agama yang keduanya sama-sama mempunyai ciri berupa materi maupun immateri sebagaimana dipaparkan di atas, mempunyai seperangkat nilai-nilai. Dalam realita kehidupan masyarakat, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama itu memberikan pengaruh terhadap perilaku individu-individu dalam masyarakat sesuai budaya yang dimiliki dan agama yang dianut. Nilai budaya dan nilai agama tersebut masing-masing memberikan peran dalam kegiatan kerjasama antarumat beragama.

Hakekat kerjasama adalah upaya memenuhi kebutuhan hidup bersama. Dengan demikian kerjasama antarumat beragama pada

dasarnya dapat dibangun melalui semua lini kehidupan sosial, seperti: aspek sosial, ekonomi, politik, keamanan dan budaya.

Oleh karena itu, kerjasama antarumat beragama bagi bangsa kita –karena telah terkondisikan sejak lama- maka perlu terus dilestarikan dan dikembangkan. Kerjasama dapat dilakukan melalui berbagai aspek kehidupan. Sementara itu nilai-nilai agama dan budaya memberi pengaruh terhadap terlaksananya kerjasama antarumat beragama dalam upaya menciptakan kehidupan beragama yang rukun.

Sekilas Kota Palu: Geografi dan Demografi

Penduduk Kota Palu tidak hanya heterogen dari segi agama, tetapi juga heterogen dari segi suku dan status sosial. Dari segi agama, penduduk Kota Palu terdiri atas berbagai agama. Penduduk beragama Islam menempati posisi mayoritas, mencapai lebih dari 2/3 jumlah penduduk Kota Palu yang menurut hasil proyeksi Supas Tahun 2008 berjumlah 309.032 jiwa (*BPS Kota Palu, 2009:39*). Penduduk beragama Kristen menempati posisi mayoritas kedua, mayoritas ketiga penduduk beragama Katolik, selanjutnya penduduk beragama Buddha dan terakhir penduduk beragama Hindu. Komposisi jumlah penduduk masing-masing agama berdasarkan data terakhir dapat dipaparkan dengan prosentase berikut: penduduk beragama Islam 81,19 %, Kristen 12,71 %, Katolik 2,67 %, Buddha 2,39 % dan Hindu 1,03 % (*BPS Kota Palu, 2009:139*).

Untuk sentra tempat peribadatan dan kegiatan keagamaan, masing-masing umat beragama memiliki rumah ibadat yang tersebar di wilayah kecamatan di Kota Palu yang terdiri atas empat kecamatan, yaitu: Kecamatan Palu Barat, Palu Selatan, Palu Timur dan Palu Utara. Seiring dengan jumlah umatnya yang mayoritas, umat Islam memiliki rumah ibadat paling banyak, yaitu masjid 300 buah, mushalla/langgar 78 buah; umat Kristen memiliki gereja 64 buah, umat Katolik 2 buah, umat Hindu memiliki pura 2 buah dan umat Buddha memiliki vihara 4 buah.

Untuk pembinaan rohani dan pelayanan keagamaan serta dakwah agama, masing-masing umat beragama memiliki sejumlah rohaniwan. Umat Islam memiliki ulama 5003 orang, mubaligh 231 orang, khatib 540 orang; umat Kristen memiliki Pendeta 156 orang, Pendeta Muda 108 orang; umat Katolik memiliki Pastor 5 orang; umat Hindu memiliki Pemangku 3 orang; dan umat Buddha memiliki Pandita 40 orang dan Upasaka 266 orang. (*BPS Kota Palu, 2009:140-142*). Selain itu masing-masing agama memiliki tenaga penyuluh agama yang jumlahnya secara proporsional relatif sebanding dengan jumlah umat masing-masing agama. Jumlah tenaga penyuluh agama Islam 567 orang, tenaga penyuluh agama Kristen 160 orang, tenaga penyuluh agama Katolik 50 orang, tenaga penyuluh agama Hindu 25 orang dan tenaga penyuluh agama Buddha 22 orang. Dengan demikian jumlah seluruh tenaga penyuluh agama di Kota Palu mencapai 824 orang, dan hanya 9 orang dari mereka yang telah berstatus Pegawai Negeri Sipil. (*Kantor Kementerian Agama Kota Palu, 2010*). Tersedianya tenaga rohaniwan dan penyuluh bagi setiap agama dengan jumlah yang relatif memadai di atas, menunjukkan bahwa pembinaan keagamaan masing-masing umat memperoleh pelayanan dari unsur umat masing-masing secara merata .

Kalangan umat Islam di Kota Palu memiliki sejumlah lembaga atau organisasi keagamaan, antara lain: al-Khairat, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), Dewan Dakwah Indonesia (DDI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII). Selain itu terdapat kelompok tarekat, seperti Tarekat Naqshabandiyah, Hidayatullah dan Kelompok Dzikir Surau Bahrul Amin. Lembaga atau organisasi keagamaan umat Kristen antara lain: Sinode GPID, Sinode GKST, BK, dan Advent. Umat Hindu memiliki organisasi atau lembaga pendidikan yaitu Patrama Jagat Nata, sedangkan umat Buddha memiliki organisasi keagamaan bernama Magabudhi (*Kantor Kementerian Agama Kota Palu, 2010*).

Untuk sarana pendidikan, selain tersedia sarana pendidikan umum mulai tingkat Taman Kanak-kanak s/d tingkat Perguruan Tinggi, terdapat pula sarana pendidikan agama. Bagi kalangan umat Islam tersedia sarana pendidikan agama mulai tingkat Raudlatul

Athfal (RA), MI Negeri /MI Swasta s/d MA Negeri /MA Swasta. Jumlah masing-masing jenjang pendidikan agama tersebut di Kota Palu adalah: RA 18 buah, MI Negeri 2 buah, MI Swasta 16 buah, MTs Negeri 4 buah, MTs Swasta 18 buah, MA Negeri 2 buah dan MA Swasta 7 buah. Selain itu terdapat tidak kurang dari 18 buah pondok pesantren putra maupun putri, tersebar di berbagai desa dan kecamatan di Kota Palu. Banyaknya pondok pesantren dan madrasah swasta itu mengindikasikan tingginya kepedulian masyarakat utamanya para tokoh agama terhadap pendidikan agama para generasi penerus mereka.

Dilihat dari segi suku, penduduk Kota Palu tergolong heterogen. Wilayah Kota Palu yang pada mulanya didiami oleh suku Kaili sebagai penduduk asli. Seiring dengan sistem kebijakan Pemerintah Kota Palu yang terbuka bagi para pendatang, menjadikan Kota Palu didiami oleh berbagai suku. Penduduk Kota Palu selain terdiri atas berbagai suku yang berasal dari daerah Sulawesi Tengah seperti: Pamona, Banggai, Saluan, Balantak, Toli-Toli dan Buol, juga didiami oleh berbagai suku yang berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, antara lain: Makassar, Bugis, Manado dan lainnya. Selain itu terdapat suku-suku yang berasal dari luar Sulawesi, antara lain: Jawa, Ternate, Bali, Madura, Padang dan lain-lain. Keadaan demikian memungkinkan menjadi pemicu timbulnya/terbentuknya komunitas-komunitas yang cenderung rawan bagi timbulnya konflik komunal.

Heterogenitas penduduk Kota Palu baik dari segi agama maupun etnis/suku memungkinkan rentan bagi timbulnya konflik horizontal akibat perbedaan yang ada. Sementara itu perbedaan dan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat dapat menjadi pemicu tersendiri bagi timbulnya konflik sosial. Perbedaan-perbedaan dan keragaman masyarakat di atas secara komulatif dapat memungkinkan timbulnya disharmoni sosial. Kesenjangan ekonomi, penguasaan aset-aset ekonomi oleh kelompok tertentu dapat mengakibatkan timbulnya konflik antar kelompok ekonomi. Jika di antara kelompok yang berbeda/konflik itu secara kebetulan berbeda agama maka konflik yang terjadi dapat dikait-kaitkan dengan masalah agama. Demikian

pula konflik yang terjadi antar suku, dapat pula dibawa-bawa kepada perbedaan agama. Akan tetapi kemungkinan timbulnya konflik akibat perbedaan-perbedaan sebagaimana digambarkan di atas, sejauh ini di Kota Palu secara umum dapat dikatakan masih relatif kondusif.

Penguatan Kerjasama melalui Budaya dan Nilai Agama

Pengaruh Budaya dan Nilai-nilai Agama

Baik adat-istiadat atau budaya dan nilai-nilai agama secara bersama-sama memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat Kota Palu dalam mewujudkan kerjasama antarumat beragama. Adat dan budaya masyarakat Kaili sebagai penduduk yang pertamakali mendiami wilayah Kota Palu, terasa mendominasi dalam kehidupan masyarakat, terlebih di daerah pinggiran kota. Kenyataan demikian dapat dimengerti karena sebagai penduduk asli Palu, dilihat dari segi etnis suku Kaili merupakan penduduk paling besar jumlahnya (mayoritas) dibanding dengan suku lain di Kota Palu.

Dengan masuknya agama Islam di tanah Kaili (wilayah Palu) pada abad tujuh belas, hukum adat di wilayah itu menjadi lebih jelas dan jernih. Sekalipun sumber hukum antara keduanya berbeda, namun kedua hukum yakni hukum adat dan hukum Islam dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat, karena dalam masalah keduniaan kedua hukum itu memiliki sendi dan dasar yang banyak persamaannya. Hukum agama (Islam) menghubungkan secara vertikal antara manusia dengan Tuhannya, sedangkan hukum adat menghubungkan secara horizontal antara sesama manusia. Perpaduan antara agama dengan adat merupakan sendi hakiki yang mempunyai peranan luas dan merata di kalangan manusia untuk dinikmati semua orang (*Irwan, H, tanpa tahun:19*).

Nilai-nilai adat/budaya yang berkembang dalam kehidupan masyarakat, antara lain adalah sikap kebersamaan, tenggang-rasa, hormat-menghormati/menghargai orang lain, serta sikap sayang-menyayangi, kasih-mengasahi. Adapun nilai-nilai keagamaan yang

berkembang dalam kehidupan masyarakat pada dasarnya tidak berbeda dengan nilai-nilai yang berkembang dalam kehidupan budaya masyarakat. Hanya saja aktualisasi nilai-nilai keagamaan yang dilakukan oleh umat beragama dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat lebih berorientasi kepada nuansa keagamaan sebagai perwujudan dan bentuk pengamalan ajaran agama.

Dari sikap kebersamaan menghasilkan bentuk-bentuk kegiatan dalam masyarakat yang bersifat gotong-royong, kerja bakti, kerjasama dan saling membantu antar sesama anggota masyarakat sekalipun suku maupun agama mereka berbeda. Dari sikap tenggang-rasa menghasilkan perilaku berupa pembiaran kepada orang lain berbeda dengan dirinya, termasuk berbeda agama. Sedangkan dalam kaitannya nilai dan sikap hormat-menghormati dan menghargai orang lain, masyarakat Kota Palu sesuai budaya orang-orang Kaili sangat menghormati tamu.

Selain itu, dalam masyarakat Kota Palu yang dalam kehidupan budaya relatif didominasi oleh suku Kaili, berlaku berbagai adat antara lain: *balia*, *nosalama*, *nobau*, *funja* dan *momporeki* atau *nipaka pore*.

Aspek-aspek Kerjasama

Aspek pendorong terjadinya kerja sama diantaranya adalah aspek sosial atau kemasyarakatan yang dilakukan dengan melibatkan anggota masyarakat yang berbeda agama antara lain. Contohnya yaitu kerja bakti membersihkan lingkungan oleh masyarakat di BTN Bumi Rofika Kecamatan Palu Timur dan di berbagai daerah lain.

Juga dengan jalan menghormati tamu dengan memberi jamuan sesuai kemampuan. Tuan rumah akan merasa kurang dihargai jika jamuan yang disuguhkan (makanan atau minuman) tidak dimakan walaupun sedikit. Bahkan ada daerah, jika ada tamu harus mencicipi makanan/minuman yang disuguhkan. Jika belum mencicipi, maka tidak diperbolehkan berpamitan pulang. Bagi tetangga yang dirundung musibah sakit, para menjenguk si sakit.

Selain itu juga aspek religiusitas (keagamaan masyarakat) yang dilakukan dengan melibatkan umat lain, antara lain seperti gotong-royong mendirikan rumah ibadat pada masyarakat Kelurahan Tondo Kecamatan Palu Timur. Kerjasama saling memberi bantuan, seperti dilakukan masyarakat Kecamatan Palu Selatan terhadap pembangunan rumah ibadat (masjid) yang dibangun dengan bantuan/sumbangan uang dari umat lain.

Pada perayaan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dihadiri umat lain yang diundang, umat lain ikut berpartisipasi membantu persiapan acara seperti mendirikan tenda. Kepanitiaan dalam PHBI diisi oleh orang-orang yang seagama. Juga tradisi saling memaafkan pada Hari Raya Idul Fitri, ada tetangga non muslim yang ikut bersilatullah ke rumah-rumah orang Islam. Pada acara halal bi halal, para undangan tidak hanya terdiri atas umat muslim.

Umat Hindu dalam acara perayaan Dharma Shanti mengundang para tokoh agama lain. Umat Hindu mempunyai organisasi bernama Serati yang di antara kegiatannya menghimpun dana, sebagian disumbangkan ke Panti Asuhan, pesantren, umat lain yang mendirikan rumah ibadat dan orang miskin. Juga perayaan natalan oleh umat Kristiani, mereka mengundang juga umat lain untuk merayakannya.

Pada upacara pembukaan MTQ setiap tahun saat iring-iringan kafilah, umat beragama lain (Kristen) ikut serta. Demikian pula pada upacara/*ceremony* MTQ tahun 2007 yang lalu di Provinsi Sulteng (Palu), Paduan Suara Gereja Kristen di Palu ikut menampilkan lagu Mars MTQ.

Aspek lainnya yaitu aspek ekonomi dengan menyelenggarakan arisan kelompok. Juga terjadi, hubungan dagang atau berbagai usaha dalam masyarakat tidak membedakan latar belakang agama. Dalam penerimaan pegawai, karyawan maupun tenaga kerja oleh instansi maupun sentra-sentra usaha, tidak didasarkan latar belakang agama. Aspek politik juga sangat menentukan. Dari segi politik, masyarakat dengan berbagai latar belakang agama dan etnis bergabung dalam

suatu wadah partai tertentu, baik sebagai anggota maupun sebagai pengurus partai.

Aspek seni juga tidak dapat dipandang sebelah mata. Di Kota Palu terdapat jenis tarian “Dero” berasal dari Poso, biasanya ditampilkan pada waktu acara peringatan-peringatan seperti Hari Besar Nasional (17 Agustus) dan acara lain. Juga adanya Gamelan “Kakula”, biasanya ditampilkan selain dalam acara perayaan Hari Besar Nasional, juga pada upacara perkawinan saat calon pengantin laki-laki datang. Sementara itu, umat Hindu Kota Palu pernah diminta menampilkan seni tari Bali dalam acara resepsi perkawinan oleh warga non Hindu, yakni umat Islam dan Kristen. Selain aspek-aspek di atas, aspek berikut juga sangat mendukung, seperti olah raga, pendidikan, dan keamanan.

Analisis

Penduduk Kota Palu yang heterogen tidak hanya dari segi etnis dan budaya, namun juga heterogen dari segi agama yang dianut masyarakatnya, secara teori –kondisi demikian- dapat memicu timbulnya konflik di antara kelompok yang berbeda. Kelompok-kelompok yang berbeda di kalangan masyarakat baik dari segi budaya ataupun agama, lantaran adanya perbedaan kepentingan acapkali dapat menimbulkan konflik di kalangan mereka. Keadaan demikian, secara umum dapat terjadi di kalangan *masyarakat di berbagai daerah, tidak hanya masyarakat Kota Palu.*

Budaya dan agama, dalam dimensi tertentu memiliki persamaan berupa pengaruh yang kuat terhadap manusia. Keduanya sama-sama mempunyai sistem nilai yang ditaati oleh para penganutnya, sekalipun keduanya berasal dari sumber yang berbeda. Ketaatan terhadap aktualisasi nilai-nilai yang terkandung baik dalam budaya maupun agama dalam kehidupan masyarakat demikian kuat, sehingga berimplikasi terhadap totalitas kepribadian manusia. Karenanya logis apabila seseorang direspon melalui sentimen keagamaan maupun suku atau budaya, maka akan mudah terpancing

emosional dan solidaritas kelompoknya dibanding direspon aspek lain. Agama, melalui ajaran universalnya dan juga budaya melalui nilai-nilai universalnya –dengan demikian- mengandung potensi konflik, namun secara bersamaan juga mengandung potensi integrasi. Persoalannya adalah, bagaimana keragaman tersebut dapat dikelola dengan baik sehingga dapat menghasilkan kekuatan yang sinergis yang pada gilirannya dapat menciptakan kondisi masyarakat yang rukun, bersatu dan suasana kebersamaan dalam ke-*bhinneka-an*.

Di Kota Palu, sinergitas demikian agaknya tercipta lantaran pengaruh kuat adat-istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat -serta nilai-nilai ajaran agama tentunya-. Adat dan budaya Suku Kaili sebagai penduduk yang pertamakali mendiami wilayah Kota Palu terasa dominan dalam kehidupan masyarakat, terlebih di kalangan masyarakat pinggiran kota.

Terdapatnya kesejajaran implementasi dan aktualisasi antara adat dan nilai-nilai budaya dengan nilai-nilai ajaran agama –Islam sebagai agama mayoritas penduduk-dalam kehidupan masyarakat Kota Palu, ternyata relatif ikut serta memberikan andil terhadap keharmonisan hubungan antarumat beragama. Dengan masuknya Islam di tanah Kaili dan wilayah Palu pada abad ke tujuh belas, ternyata dapat menjernihkan dan lebih memperjelas posisi hukum adat. Sekalipun kedua hukum yakni hukum adat dan hukum Islam masing-masing berasal dari sumber yang berbeda, namun keduanya dapat berjalan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Kaili, kedua hukum itu dalam masalah keduniaan memiliki sendi persamaan. Penilaian demikian oleh masyarakat dapat memperkokoh jalinan hubungan yang kondusif dalam kehidupan masyarakat sekalipun berbeda latarbelakang budaya maupun agama. Hubungan yang kondusif serta kehidupan antarumat beragama yang harmonis itu, antara lain tercermin dalam kegiatan kerjasama antarumat beragama dalam berbagai aspek kehidupan, seperti aspek sosial, keagamaan, politik, seni maupun budaya.

Penutup

Studi ini menyimpulkan diantaranya: a) Budaya dan nilai-nilai keagamaan, secara bersama-sama memberikan pengaruh secara signifikan terhadap kerjasama antaumat beragama di Kota Palu. Budaya masyarakat Kaili (karena Suku Kaili dominan) mendominasi praktek budaya di wilayah kota ini. Terdapatnya titik singgung antara budaya dan nilai-nilai keagamaan maka pengaruh positif terhadap kerjasama antarumat beragama cenderung saling memberikan penguatan. Budaya dan nilai-nilai keagamaan dimaksud antara lain: gotong-royong, hormat-menghormati –termasuk menghormati tamu-, kebersamaan, tenggang rasa dan sayang-menyayangi antar sesama; ; b) Bentuk-bentuk kerjasama antarumat beragama yang ada di Kota Palu meliputi berbagai aspek kehidupan, antara lain aspek-aspek: sosial/kemasyarakatan, keagamaan, ekonomi, politik, budaya/seni, olah raga, pendidikan, keamanan dan kelembagaan/organisasi.

studi ini merekomendasikan beberapa hal berikut: a) Pengaruh positif budaya masyarakat Kaili dan nilai-nilai keagamaan terhadap kerjasama antarumat beragama di Kota Palu, kiranya perlu dipertahankan dan dikembangkan oleh pihak Kementerian Agama Kota Palu bekerjasama dengan pada tokoh adat/budaya setempat dan instansi terkait, misalnya melalui pertemuan-pertemuan koordinatif dengan para tokoh adat/budaya dan para tokoh/pemuka agama setempat; b) Agar dalam pelaksanaan kerjasama antarumat beragama oleh masyarakat tidak menimbulkan pembauran ajaran agama, kiranya perlu dilakukan pemantauan terhadap kerjasama antarumat beragama oleh pihak Kementerian Agama Kota Palu bekerjasama dengan instansi terkait. Di samping itu, untuk menghindari kemungkinan timbulnya pembauran ajaran agama dimaksud maka seyogyanya Kantor Kementerian Agama Kota Palu melakukan pembinaan, misalnya melakukan penyuluhan kepada kelompok-kelompok kerjasama antarumat beragama secara periodik dan terprogram dengan melibatkan tenaga penyuluh agama dari berbagai agama.

Daftar Pustaka

- Abduh, Syuhada, 2004, *Kebijakan Pemerintah Pasca Rekonsiliasi di Daerah Kerusuhan: Kasus Kerusuhan di Maluku Utara*, dalam *Harmoni*, Volume III, Nomor 12, Oktober-Desember, 2004, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Ali, Mursyid, 2003, *Konflik Poso dan Solusi Malino: Kajian Tentang Lika-Liku Kerusuhan dan Upaya Rekonsiliasi*, dalam *Harmoni*, Volume II, Nomor 7, Juli-September 2003, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Palu, 2009, *Kota Palu dalam Angka*, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu.
- Bogdan dan Taylor, Steven J., Terj. Arif Furkhan, 1992, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*, Usaha Nasional, Surabaya.
- Daulay, Zainuddin, M, 2002, *Konflik Kekerasan di Situbondo-Jawa Timur*, dalam Imam Tholhah, Dkk., (Ed.), *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Horton, B. Paul, Hunt, L., Chester, 1999. *Sosiologi*, (alih Bhs. Aminuddin Ram, Tita Sobari, Erlangga, Jakarta.
- Irwan, H., tt, *Kumpulan Adat Kaili (Naskah)*, Palu.
- Kantor Kementerian Agama Kota Palu, *Data Keagamaan Kota Palu 2010*, Kementerian Agama Kota Palu, Palu.
- Koentjaraningrat, 1990, *Pengantar Ilmu Antropologi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1978, *Kebudayaan, Mentalitet dan Pembangunan*, Gramedia, Jakarta.

- Muchtar, Ibnu Hasan, 2004, *Kajian tentang Kerukunan Hidup Umat Beragama di Provinsi Nusa Tenggara Timur*, dalam *Harmoni*, Volume III, Nomor 11, Juli-September 2004, Puslitbang Kehidupan Beragama, Badan Litbang Agama & Diklat Keagamaan, Departemen Agama RI, Jakarta.
- Mulyana, Dedy, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nicolas, J., Woly, dkk., Peny, 2009, *Nilai-Nilai Agama Sebagai Motivator Pembangunan*, Yayasan Penerbit Gita Kasih-Kupang, NTT. (Bekerjasama dengan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta), Kupang.

Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan Umat Beragama: Studi terhadap Masyarakat Angantiga Bali

Joko Tri Hariyanto

*Peneliti Balai Litbang
Agama Semarang*

Abstract

The multicultural Balinese harmony in the society is supported by the social institutions embraced by the community through the Nyama Braya norm. This study reveals the meaning and practice of Angantiga community in Badung, Bali in maintaining harmony among religious believers; Islam and Hinduism through Nyama Braya social institution. The Nyama Braya norm has overwhelmed the people's behavior in interacting with others, whereas others will be known as brothers, and this brings about a strong cohesion for the societal harmony of Balinese in general. Qualitative research is conducted with an ethnographic approach.

Keywords: *Local Wisdom, Multiculturalism, Harmony, imitate Braya, Angantiga*

Latar Belakang

Negara Indonesia yang sangat luas terbentang dari kota Sabang di ujung paling barat dan utara Sumatera Utara sampai kota Merauke di Papua. Dari bentangan wilayah yang sangat luas tersebut, berjajar pulau-pulau yang didiami oleh masyarakat-masyarakat suku bangsa yang teramat banyak, lebih kurang 658 etnis.

Dari enam ratusan etnis itu, 109 kelompok etnis berada di Indonesia belahan barat, sedangkan Indonesia belahan timur terdiri atas 549 etnis. (Rahab 2008, dalam Tumanggor 2009, 10) Masing-masing suku bangsa ini memiliki kebudayaan berupa adat istiadat dan tradisinya masing-masing. Oleh karena itu, Indonesia dengan sendirinya menjadi masyarakat majemuk (*plural society*) karena memiliki budaya dan tradisi yang sangat keragaman. Masyarakat majemuk terbentuk dari dipersatukannya masyarakat-masyarakat suku bangsa oleh sistem nasional, yang biasanya dilakukan secara paksa (*by force*) menjadi sebuah bangsa dalam wadah negara. (Suparlan 2004) Keragaman etnis, agama dan budaya di bentangan Nusantara ini diintegrasikan secara politis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Masyarakat mejemuk tidak serta merta menjadi masyarakat multikultural. Dalam masyarakat majemuk dengan demikian ada perbedaan-perbedaan sosial, budaya, dan politik yang dikukuhkan sebagai hukum ataupun sebagai konvensi sosial yang membedakan mereka yang tergolong sebagai dominan yang menjadi lawan dari yang minoritas. Pembedaan tersebut menghasilkan prasangka-prasangka, yang berdasarkan pada adanya: a). perasaan superioritas pada mereka yang tergolong dominan; b). sebuah perasaan yang secara intrinsik ada dalam keyakinan mereka bahwa golongan minoritas yang rendah derajatnya itu adalah berbeda dari mereka dan tergolong sebagai orang asing; c). adanya klaim pada golongan dominan bahwa sebagai akses sumber daya yang ada adalah merupakan hak mereka, dan disertai adanya ketakutan bahwa mereka yang tergolong minoritas dan rendah derajatnya itu akan mengambil sumberdaya-sumberdaya tersebut. (Parsudi Suparlan 2004).

Keadaan yang demikian ini, memang disadari masih ada terjadi di Indonesia. Hal tersebut tidak dipungkiri menyebabkan munculnya sikap deskriminasi yang berujung pada pertentangan bahkan konflik di masyarakat. Adapun cara yang terbaik untuk mempererat kohesi sosial bangsa Indonesia adalah dengan merubah masyarakat majemuk (*plural society*) menjadi masyarakat multikultural (*multicultural society*), dengan cara mengadopsi ideologi multikulturalisme sebagai

pedoman hidup dan sebagai keyakinan bangsa Indonesia untuk diaplikasikan dalam kehidupan bangsa Indonesia. (Suparlan 2004) Masyarakat pemilik budaya, tradisi, dan agama hidup berdampingan secara egaliter, saling menghormati dan menerima perbedaan akan menjadikan bangsa Indonesia ini sebagai bangsa yang multikultural.

Kemajemukan dapat menjadi modal kekayaan budaya dan memberikan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi yang sangat kaya bagi proses konsolidasi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu tantangan bagi bangsa Indonesia untuk membangun kerukunan bersama dalam masyarakat yang multikultural melalui budaya-budaya dan tradisi-tradisi lokal yang dimiliki. Secara substansial, kearifan lokal adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai tersebut diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah laku sehari-hari masyarakat setempat. Nilai-nilai kearifan lokal ini dipandang sebagai entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya karena di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreatifitas dan pengetahuan lokal dari para elit dan masyarakatnya. (Ridwan, 2007: 27-38) Kearifan lokal menjadi elemen perekat (kohesi) sosial dalam kehidupan lintas agama, lintas kepercayaan, dan bahkan lintas budaya, sehingga dapat memberi warna kebersamaan secara dinamis dan damai, terutama dalam masyarakat yang multikultur.

Salah satu wilayah yang komposisi masyarakatnya majemuk atau multikultur, tetapi memegang tradisi dan budayanya dengan kuat adalah provinsi Bali. Pada masyarakat Bali yang mayoritas adalah beragama Hindu, ternyata terdapat satu wilayah yang dihuni oleh komunitas muslim, yakni kampung Islam Angantiga Kecamatan Petang Kabupaten Badung. Kampung Islam Angantiga ini malah diakui tidak saja oleh warga muslim di sana, tetapi juga warga Hindu bahwa kampung tersebut cikal bakalnya didirikan oleh orang Islam pendatang dari Bugis di abad XIV. Warga Hindu dan Islam di wilayah tersebut hidup berbaur satu sama lain dan menjalankan aktivitas-aktivitas sosial bersama secara rukun. Kerukunan tersebut karena

mereka memegang teguh konsep sosial yang mereka sebut sebagai *Nyama Braya*. Kearifan lokal *Nyama Braya* ini menganggap orang lain sebagai saudara atau kerabat sehingga sangat efektif dalam menjaga hubungan sosial antara umat Hindu dan umat Islam di sana.

Rumusan Masalah

Masyarakat Angantiga di Bali terdapat dua komunitas umat beragama, Islam dan Hindu yang mampu menjaga hubungan secara harmonis dalam kerukunan umat beragama. Hal ini karena mereka diikat oleh norma sosial yang disebut *Nyama Braya*. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah, apa makna dan arti penting kearifan lokal dari norma *Nyama Braya* ini bagi masyarakat Angantiga, serta bagaimana fungsi kearifan lokal ini bagi kerukunan masyarakat Angantiga yang multikultur.

Kerangka Konseptual

Multikulturalisme

Masyarakat multikultural tidak saja mengisyaratkan adanya keragaman budaya, tetapi juga pandangan yang positif terhadap keragaman tersebut. Pandangan inilah yang disebut multikulturalisme. Menurut Hendar Putranto, (dalam Ujan, et.al., 2009: 153) multikulturalisme adalah paham yang berbasis pada kepercayaan akan adanya dan pentingnya menghargai sekaligus mengakui (*afirmation and recognition*) terhadap keanekaragaman budaya (*cultural diversity*).

Lawrence Blum (dalam Ujan, et.al. 2009, 14) menawarkan definisi sebagai berikut :

“Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan, dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis lain. Multikulturalisme meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri.”

Dengan demikian multikulturalisme bukan merupakan cara pandang yang menyamaratakan kebenaran-kebenaran lokal, tetapi justru mencoba membantu pihak-pihak yang saling berbeda untuk dapat membangun sikap saling menghormati satu sama lain terhadap perbedaan-perbedaan dan kemajemukan yang ada sehingga tercipta perdamaian dan kesejahteraan bersama.(Ujan, et.al., 2009: 15)

Supardi Suparlan (2004) mendefinisikan multikulturalisme sebagai sebuah ideologi yang menekankan pengakuan dan penghargaan pada kesederajatan perbedaan kebudayaan. Tercakup dalam pengertian kebudayaan adalah para pendukung kebudayaan, baik secara individual maupun secara kelompok, dan terutama ditujukan terhadap golongan sosial askriptif yaitu sukubangsa (dan ras), gender, dan umur.

Kearifan Lokal

Kearifan lokal (*local wisdom*) terdiri dari dua kata: kearifan (*wisdom*) dan lokal (*local*). *Local* berarti setempat, sedangkan *wisdom* (kearifan) sama dengan kebijaksanaan. Secara umum maka *local wisdom* (kearifan setempat) dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan setempat (*local*) yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakatnya.(Sartini, tt)

Kearifan lokal, menurut E. Tiezzi, N. Marchettini, & M. Rossini (dalam Ridwan, 2007: 27-38) merupakan pengetahuan yang eksplisit yang muncul dari periode panjang yang berevolusi bersama-sama masyarakat dan lingkungannya dalam sistem lokal yang sudah dialami bersama-sama. Secara substansial, kearifan lokal itu adalah nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan menjadi acuan dalam bertingkah-laku sehari-hari masyarakat setempat. Oleh karena itu, sangat beralasan jika Greertz (dalam Ridwan, 2007: 27-38) mengatakan bahwa kearifan lokal merupakan entitas yang sangat menentukan harkat dan martabat manusia dalam komunitasnya. Hal itu berarti kearifan lokal yang di dalamnya berisi unsur kecerdasan kreativitas dan pengetahuan lokal

dari para elit dan masyarakatnya adalah yang menentukan dalam pembangunan peradaban masyarakatnya.

Teezzi, Marchettini, dan Rosini (dalam Ridwan, 2007: 27-38) mengatakan bahwa akhir dari sedimentasi kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi tradisi atau agama. Dalam masyarakat kita, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal biasanya tercermin dalam kebiasaan-kebiasaan hidup masyarakat yang telah berlangsung lama. Keberlangsungan kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dan menjadi pegangan kelompok masyarakat tertentu serta menjadi bagian hidup tak terpisahkan yang dapat diamati melalui sikap dan perilaku mereka sehari-hari.

Al Rasyidin dkk. (dalam Rohimin, et.al., 206-207) menyimpulkan bahwa kearifan lokal meliputi segenap aspek kehidupan, antara lain: berkenaan dengan tata aturan yang menyangkut interaksi sosial atau hubungan antarsesama manusia; hubungan manusia dengan lingkungan alam sekitar; dan hubungan manusia dengan yang gaib, seperti hubungan dengan Tuhan dan roh-roh gaib. Terkait dengan persoalan interaksi antarmanusia, terutama kerukunan hidup dalam masyarakat, menurut John Haba, (dalam Amirrachman, 2007: 334-335) setidaknya ada enam signifikansi serta fungsi sebuah kearifan lokal jika hendak dimanfaatkan sebagai salah satu bentuk pendekatan dalam menyelesaikan sebuah konflik. Pertama, sebagai penanda identitas sebuah komunitas. Kedua, elemen perekat (aspek kohesif) lintas warga, lintas agama dan kepercayaan. Ketiga, kearifan lokal tidak bersifat memaksa atau dari atas (*top down*), tetapi sebuah unsur kultural yang ada dan hidup dalam masyarakat. Karena itu, daya ikatnya lebih mengena dan bertahan. Keempat, kearifan lokal memberikan warna kebersamaan bagi sebuah komunitas. Kelima, *local wisdom* akan merubah pola pikir dan hubungan timbal balik individu dan kelompok, dengan meletakkannya di atas *common ground*/kebudayaan yang dimiliki. Keenam, kearifan lokal dapat berfungsi

mendorong terbangunnya kebersamaan, apresiasi sekaligus sebagai sebuah mekanisme bersama untuk menepis berbagai kemungkinan yang meredusir, bahkan merusak, solidaritas komunal, yang dipercayai berasal dan bertumbuh diatas kesadaran bersama, dari sebuah komunitas terintegrasi.

Metodologi

Penelitian lapangan dilakukan selama satu bulan dengan mengambil lokasi di Desa Dinas Angantiga, Kecamatan Petang, Kabupaten Badung Bali. Desa tersebut terdapat dua komunitas umat beragama, yaitu umat Islam dan umat Hindu. Umat Islam terikat dengan struktur formal Kampung Islam Angantiga dan umat Hindu dalam Banjar Adat Angantiga, yang dalam praktek faktualnya kehidupan mereka saling berbaur di wilayah yang disebut Angantiga tersebut. Perikehidupan masyarakat Angantiga dapat terjaga kerukunannya karena mereka memiliki kearifan lokal berupa Norma *Nyama Braya* yang menjadi pandangan dasar yang hidup di masyarakat dan mendasari perikehidupan masyarakat yang bersangkutan. Hal ini tidak saja dipandang sebagai fenomena antropologis atau sosiologis belaka, tetapi sekaligus sebagai keyakinan tentang struktur-struktur dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan menyangkut hakikat manusia, dunia dan Tuhan. (Bakker dan Zubair, 1992: 92)

Penelitian kualitatif dengan pendekatan antropologis ini dilakukan melalui metode etnografi. Etnografi adalah kegiatan untuk mendeskripsikan suatu kebudayaan. Dengan kata lain, tujuan etnografi ini untuk memahami suatu pandangan hidup dari sudut pandang penduduk asli, hubungannya dengan kehidupan, untuk mendapatkan pandangannya mengenai dunianya. (Spradley, 1997: 3) Namun karena keterbatasan waktu pengumpulan data di lapangan, maka penelitian etnografi ini dilakukan dengan format etnografi praktis / EP (*practical ethnography*). Format penelitian etnografi praktis ini tetap berpijak pada sejumlah prinsip umum dan metode etnografi konvensional, tetapi dengan waktu dan fokus penelitian yang

terbatas pada aspek budaya yang diteliti. Format EP sebagaimana etnografi konvensional, juga menggunakan sejumlah instrumen atau alat pengumpulan data seperti pengamatan (observasi) sambil lalu, pengamatan terfokus (terhadap tindakan dan konsekuensi tertentu), wawancara biasa dan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan sejumlah informan kunci yang terpilih (*selected key informant*). (Azca, 2004: 28-29)

Metode etnografi dilakukan untuk mengungkapkan realitas budaya di wilayah penelitian, yang meliputi realitas empirik maupun simbolik dan makna dalam fenomena budaya tersebut. (Thohir, 2007: 5) Analisis dilakukan secara *Holistik* untuk menggambarkan metode tinjauan yang mendekati suatu kebudayaan itu sebagai suatu kesatuan yang terintegrasi. Peneliti etnografi menganalisa kebudayaan dengan berbagai cara untuk memerincinya ke dalam unsur-unsur yang kecil dan mempelajari unsur-unsur itu secara detail, selain itu juga memahami kaitan antara tiap unsur kecil itu dan keterkaitannya dengan keseluruhannya. (Koentjaraningrat, 1986: 210) Secara praktis, analisis etnografi ini dilakukan guna mengetahui realitas empirik sekaligus memahami realitas makna konsep *Nyama Braya* di masyarakat Angantiga.

Konteks Sosio-Religius Masyarakat Angantiga

Kampung Angantiga terdapat di Desa Petang Kecamatan Petang Kabupaten Badung yang berada di ketinggian kurang lebih 700 meter di atas permukaan laut, dan terletak hampir di ujung paling utara Kabupaten Badung. Desa Petang sendiri terdiri dari beberapa banjar atau kelompok lingkungan setingkat dukuh atau RW. Kampung Angantiga berada di bawah Banjar Dinas Angantiga, yang masyarakatnya terdiri dari dua komunitas yaitu umat Hindu dan umat Islam. Oleh karena itu, Banjar Dinas Angantiga ini membawahi dua banjar adat, yaitu Banjar Adat Hindu Angantiga membawahi umat Hindu yang dipimpin oleh Klian Adat, dan Kampung Islam Angantiga yang membawahi umat Islam yang dipimpin oleh kepala kampung.

Keberadaan kampung Islam Angantiga yang merupakan komunitas muslim di tengah-tengah masyarakat Hindu di Pulau Bali ini cukup menarik. Keberadaan komunitas muslim di Angantiga ini termasuk kantong muslim di Provinsi Bali yang berdasarkan sejarahnya termasuk generasi awal masuk di Pulau Bali. Kampung Islam Angantiga ini telah ada sejak tahun 1442 berdasarkan naskah Lontar Purana yang tersimpan di Puri Carangsari. Berdasarkan lontar tersebut dan penuturan turun temurun dari orang-orang tua di Kampung Angantiga, leluhur kampung Angantiga ini adalah tiga orang pengembara dari Bugis. Ketiga orang ini diminta bantuannya oleh raja *Ida Gusti Ngemangkurat Kacung Gede*, penguasa puri Carangsari yang saat itu bernama kerajaan *Pungingpuspo* untuk mengamankan daerah bernama *Bangkian Jaran* dari berbagai marabahaya.

Ketiga tokoh Bugis yang kebetulan beragama Islam itu akhirnya berhasil mengamankan wilayah *Bangkian Jaran* sehingga oleh Raja diperkenankan untuk menggunakan wilayah tersebut sebagai tempat tinggalnya sambil menjaga lokasi tersebut. Daerah itu kemudian oleh pihak puri atau Raja disebut *Angantiga*. Angantiga ini berasal dari bahasa Bali halus yang mengandung penghormatan. *Angan* artinya raga atau diri manusia, dan *tiga* artinya tiga dalam bahasa Bali halus, yang bahasa umumnya *telu*. Karena itu pemberian nama Angantiga ini merupakan bentuk penghormatan Puri terhadap ketiga orang Bugis yang telah membantu kerajaan *Pungingpuspo* ini.

Kisah perjalanan ketiga orang ini, dan bahkan siapa saja ketiganya masih simpangsiur. Namun nama yang pasti dari salah satunya adaah Daeng Mapilih. Setelah berhasil mengamankan wilayah tersebut, mereka diberi wewenang untuk menempati daerah Angantiga tersebut, dan keberadaan mereka kemudian disusul oleh masyarakat Hindu. Mereka kemudian mengawini warga Hindu sehingga Islam berkembang dan menjadi saling bersaudara dengan warga Hindu. Persaudaraan ini terus terjalin hingga sekarang ini. Hal ini tidak saja diyakini oleh warga kampung Islam Angantiga, tetapi juga diakui oleh warga Hindu di Angantiga.

Pengertian *Nyama Braya*

Hubungan yang harmonis dan rukun antara umat Islam dan umat Hindu di Desa Angantiga terpelihara diantaranya dengan dipegangnya norma *Nyama Braya* oleh seluruh warga Angantiga. Istilah *Nyama Braya* hampir telah dikenal oleh semua orang Bali, termasuk warga Angantiga Petang. *Nyama Braya* merupakan istilah umum yang mengacu pada hal kekerabatan atau hubungan sosial. Kata *Nyama* mengandung arti saudara atau kerabat. Adapun kata *Braya* sebenarnya sinonim dari kata *Nyama*, dengan makna yang lebih luas atau umum. Orang menyebut saudara sekeluarganya dengan *Nyama*. Tetapi terhadap orang lain juga menyebut *Nyama*, dalam pengertian menunjukkan sikap menyaudarakan dirinya dengan orang tersebut. Warga Hindu menyebut tetangga yang beragama Islam dengan *Nyama Selam*, sebaliknya warga muslim menyebut tetangga yang beragama Hindu dengan *Nyama Bali*. Kata *Braya* sendiri digunakan untuk menunjukkan pada hal pertetanggaan; *Braya* berarti semua saudara atau tetangga. Menyebut tetangganya secara umum dengan *Braya*.

Nyama Braya oleh masyarakat dipergunakan untuk menunjuk beberapa hal, antara lain: hubungan antarwarga; hubungan antarorang yang didasari acuan moral; etika atau moralitas dalam berinteraksi sosial dalam lingkungan masyarakat; dan sikap saling menganggap orang lain sebagai kerabat atau saudara. *Nyama Braya* ini ditunjukkan dengan solidaritas sosial, sikap toleransi, kerjasama, tolong-menolong dan kebersamaan antarwarga. Setiap orang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Orang dianggap tidak *nyama braya* manakala tidak mau berbaur, tidak mau berpartisipasi dalam kegiatan bersama warga, atau tidak mau terlibat dengan aktivitas suka duka masyarakat seperti menghadiri undangan atau mengunjungi warga yang keluarganya meninggal. Orang yang tidak mengikuti kelaziman sosial, tradisi, dan nilai-nilai yang berlaku di lingkungan masyarakat tersebut dipandang buruk.

Bagi masyarakat Angantiga, orang hidup bersama harus bersedia saling mendukung, saling membantu dan bahkan turut merasakan

suka duka sesamanya. Masyarakat memandang bahwa manusia pasti mengalami *memalum medura*, sekarang ia punya senang, suatu saat ia juga akan mengalami susah. *Memalun* artinya depan dan *medura* artinya belakang, ini menunjukkan kehidupan manusia memiliki sisi depan yang menyenangkan dan sisi belakang yang berarti kesusahan. Setiap orang tidak hanya mengalami kesenangan saja tetapi juga kesusahan, karena itu dengan membantu orang lain pada saat kesusahan maka pada saat membutuhkan bantuan orang lain akan bersedia menolong.

Istilah lainnya adalah *suka duka*, yaitu situasi kesenangan dan kesusahan, kegembiraan dan kesedihan yang dialami oleh masyarakat. Dalam *nyama braya*, setiap anggota warga dituntut untuk menunjukkan sikap dan saling merasa turut bersama dalam kegembiraan dan kesedihan. Sikap ini ditunjukkan melalui partisipasi dalam kegiatan bersama di lingkungan masyarakat, baik kegiatan pesta maupun kematian. Pengertian yang lain dari *suka duka* ini adalah ikut menanggung beban warga yang telah lebih dahulu mengalami beban kerja atau biaya untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, di dalam *awig-awig* atau peraturan adat di Angantiga terdapat istilah *uang suka duka* atau *pemogpog* yang dibebankan pada warga baru sebagai pengganti beban kerja/biaya yang sama dikeluarkan oleh warga yang telah terlebih dahulu tinggal.

Kebersamaan atau solidaritas ini juga disebut *Sagilik saguluk*. Kata *Gilik* dan *guluk* artinya bulat, istilah *sagilik saguluk* merupakan tautologi yang berarti bulat utuh. Istilah ini dari ungkapan “*Sagilik saguluk, parasparos sapranaya, salunglung sabayantaka*” atau solidaritas yang tinggi dalam suka dan duka, baik buruk ditanggung bersama, bersama dalam kegiatan baik suka maupun duka. Dalam satu lingkungan masyarakat, semua orang harus menunjukkan rasa kebersamaan, solidaritas, suka duka bersama, dan senasib sepenanggungan terhadap keadaan yang terjadi di lingkungan ataupun yang menimpa anggota masyarakat yang lain. Di antaranya ditunjukkan dengan sikap atau perilaku *sidikara* atau *masidikara* yakni “saling idihin, saling silihin”, atau bergaul akrab, selalu tolong

menolong dan pinjam meminjam. *Sidikara* berasal dari kata *sidi* dan *kara*. *Sidi* berarti sukses dan *kara* berasal dari karya yang artinya pekerjaan atau tangan. Sikap saling tolong menolong karena semua orang dalam lingkungan masyarakat harus menunjukkan rasa kebersamaan,

Selain itu masyarakat juga kepercayaan adanya pembalasan terhadap perbuatan manusia, atau dalam ajaran Hindu disebut *Karmaphala* atau hukum karma. Kalau orang berbuat kebaikan, maka ia akan mendapatkan balasan kebaikan pula, demikian pula kalau ia berbuat keburukan maka ia akan mendapatkan balasan keburukan." *Ala ulah, ala tinemu; ayu kinardi, ayu pinanggih*" artinya baik berbuat, baik hasilnya; buruk perbuatan, buruk juga hasilnya yang dinikmati. Oleh karena itu setiap orang dituntut untuk menjaga perilakunya dalam masyarakat, karena akibat dari perilaku itu akan berdampak pada diri sendiri.

Umat Hindu juga memegang ajaran *Tri Hita Karana*, yang terdiri dari *parahyangan* atau hubungan dengan Tuhan; *pawongan* atau hubungan dengan sesama manusia; dan *palemahan* atau hubungan dengan lingkungan. Ajaran tentang *pawongan* mengajarkan agar manusia senantiasa menjaga keharmonisan hidup bersama, berbuat baik dan menghormati orang lain. Ajaran lain terkait dengan hubungan sosial adalah ajaran *Desa Kala Patra*, *Desa* artinya tempat, *Kala* artinya waktu, dan *Patra* berarti situasi. Ajaran ini mengajarkan agar setiap orang bertindak sesuai dengan tempat, waktu dan situasinya. Dengan demikian, dalam kehidupan sosial setiap orang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, adat-istiadat, budaya, kebiasaan dan norma yang berlaku di wilayah tersebut.

Meskipun masing-masing orang memiliki perbedaan kepentingan, kesenangan, agama, kepercayaan, tradisi dan budaya, tetapi dalam kehidupan di masyarakat, ia harus bersedia untuk menerima dan menjalankan aturan sosial yang berlaku di masyarakat tersebut. *Desa amawa cara negara amawa tata*, setiap masyarakat memiliki aturan, adat istiadat, dan budayanya sendiri-sendiri yang

harus dihormati dan ditaati. Sehingga setiap orang boleh saja berbeda-beda, tetapi kepentingan masyarakat harus didahulukan, sehingga keutuhan masyarakat, solidaritas sosial, dan keharmonisan hidup bersama dapat tercapai, seperti dalam ungkapan *Bhinneka Tunggal Ika*. Di antara norma sosial tersebut adalah *Nyama Braya* ini. Termasuk di dalam norma sosial ini adalah norma sosial yang menjadi aturan tertulis yang berlaku di lingkungan masyarakat atau hukum adat yang disebut *awig-awig*.

Awig-awig merupakan hukum adat yang mengatur kehidupan bersama untuk masing-masing masyarakat adat atau kampung. Di Angantiga, kampung Islam Angantiga dan Banjar Adat Angantiga memiliki *awig-awig* sendiri-sendiri. Setiap warga yang tergabung dalam banjar atau kampung harus mentaati peraturan yang terdapat dalam *awig-awig* tersebut, dan untuk pelanggaran terhadap peraturan yang ada dalam *awig-awig* tersebut akan mendapatkan sanksi.

Nyama Braya dalam Praktek Sosial

Norma sosial *Nyama Braya* ini prakteknya dapat dilihat dalam bentuk-bentuk tradisi kerjasama dan kunjungan antarwarga. Dalam masyarakat Angantiga dikenal bentuk-bentuk kerjasama yaitu *metulungan*, *ngayah*, dan *ngeroyong*. Sedangkan bentuk-bentuk kunjungan warga adalah *ngeraris* dan *majenukan*. Praktek-praktek sosial ini menjadi kewajiban warga yang dewasa di masyarakat Angantiga. Keaktifan anggota warga dalam kegiatan kerjasama atau kunjungan menjadi indikasi warga tersebut telah *Nyama Braya*, dan ketidakhadiran atau tidak turut berpartisipasi dalam kegiatan warga dapat dipandang kurang *Nyama Braya* yang berakibat sanksi sosial, seperti pengucilan maupun denda.

Aktivitas dalam masyarakat, baik kegiatan itu bersifat pribadi ataupun keagamaan dan lingkungan pada umumnya dilaksanakan dengan saling bantu membantu atau kerjasama. Istilah *mebat* merupakan istilah umum untuk menyebut kegiatan membantu atau kerjasama. Kalau *mebat* yang dilakukan untuk membantu orang lain sebagai pribadi, seperti persiapan untuk menyelenggarakan acara

pernikahan, atau tradisi menyambut kelahiran bayi, atau kematian salah satu anggota keluarga dari tetangga, maka *mebat* itu disebut *metulungan*. Warga yang akan menyelenggarakan acara keluarga dapat meminta bantuan kepada tetangganya untuk membantu, dan biasanya tetangga terdekat akan sukarela membantu meskipun tidak diminta.

Adapun kegiatan bersama yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan acara keagamaan atau dilaksanakan di tempat ibadah disebut *ngayah*. Ibu-ibu yang mempersiapkan masakan untuk kegiatan perayaan Maulud Nabi disebut *ngayah*, atau kerja bakti untuk membersihkan masjid atau pura, disebut *ngayah*. Aktivitas *ngayah*, meskipun kegiatan untuk keagamaan, tetapi di Angantiga ada kalanya melibatkan umat yang lain. Seperti pada saat renovasi Masjid Baiturrahman Angantiga tahun 2006, warga umat Hindu di Angantiga juga turut berpartisipasi melakukan *ngayah* di masjid Baiturrahman tersebut. Demikian juga sebaliknya, ketika di pura desa ada pembangunan yang membutuhkan banyak tenaga, warga muslim juga turut melakukan *ngayah* di pura.

Sedangkan kerjasama yang dilakukan untuk kepentingan bersama tetapi tidak terkait dengan acara keagamaan atau di lingkungan tempat ibadah, maka disebut *ngeroyong*. Kegiatan kerjasama masyarakat terkait pembuatan atau pemeliharaan fasilitas umum, seperti jalan, selokan, dan sebagainya termasuk *ngeroyong*. Kegiatan *ngeroyong* ini juga dilakukan bersama antara warga muslim dan Hindu karena terkait dengan fasilitas lingkungan yang mereka tempati dan pergunakan bersama.

Hubungan sosial masyarakat di Angantiga juga dilakukan dalam bentuk kegiatan saling berkunjung. Secara umum, antarwarga terbiasa bertamu ke tetangganya, baik untuk suatu keperluan atau hanya sekedar berkunjung saja. Namun ada kegiatan berkunjung yang menjadi bagian dari tradisi sosial yang disebut *ngeraris* dan *majenukan*. *Ngeraris* dan *majenukan* ini menjadi tanda atau bukti sebagai warga masyarakat yang baik. Sehingga apabila tidak dapat atau berhalangan untuk berkunjung pada waktunya, atau sama sekali tidak bisa hadir

harus diwakilkan oleh anggota keluarga yang lain, mengunjungi di lain kesempatan, atau menyampaikan pesan ketidakhadirannya pada tuan rumah.

Ngeraris adalah bentuk sikap turut bersuka pada saudara atau tetangga yang tengah mendapat kesenangan atau suka cita, seperti pernikahan, kelahiran bayi, dan sebagainya. Pada saat tetangga melaksanakan kegiatan tersebut, maka tetangga-tetangga yang lain akan datang berkunjung untuk menunjukkan rasa turut bersukacita. Mereka datang dengan membawa *aban-aban* atau bingkisan, baik beras, uang, atau barang-barang lain yang sekiranya bermanfaat bagi keluarga yang dikunjungi.

Demikian juga pada saat tetangga mendapatkan kemalangan, seperti kematian, maka tetangga yang lain akan datang berkunjung untuk menghibur keluarga dan menyatakan turut berbelas sungkawa. Mengunjungi tetangga atau saudara yang tengah mengalami kesusahan terutama karena ada anggota keluarganya yang meninggal dunia ini disebut *majenukan*. Tetangga yang datang juga akan membawa *aban-aban* sebagai tanda turut berduka cita.

Tradisi acara kematian di Angantiga yang muslim, umumnya dilakukan sampai hari ketujuh kematian. Pada hari-hari itu, warga kampung biasanya mengunjungi keluarga mendiang untuk menyampaikan bela sungkawa. Waktu tujuh hari ini memberi kesempatan pada keluarga yang jauh, ataupun tetangga yang beragama Hindu yang pada saat itu berhalangan hadir karena pantangan adat, misalnya bertepatan dengan hari raya agama Hindu, maka dapat majenukan pada rentang tujuh hari tersebut. Hal ini karena dalam kepercayaan Hindu, mayat termasuk kekotoran (*nista*) sehingga dilarang untuk mendatangi keluarga yang meninggal pada hari raya.

***Nyama Braya* dalam Toleransi Beragama**

Nyama Braya di masyarakat Angantiga juga diwujudkan dalam bentuk toleransi kehidupan beragama. Kebersamaan antara umat Islam dan umat Hindu telah terjalin sejak dahulu kala, sehingga

sikap saling menghormati bahkan saling mendukung dalam praktek agama juga dilakukan. Dalam tradisi Hindu yang peribadatannya banyak melibatkan sesajian, termasuk daging binatang, ternyata juga ada sesajian yang disebut *banten selam* atau *bebangkit selam*. *Banten* atau *bebangkit* artinya sesajian; *bebangkit selam* berarti sesajian yang tidak menggunakan makanan atau daging yang diharamkan oleh muslim, seperti babi, dan menggantinya dengan itik atau ayam. Istilah mengacu pada aturan makanan orang Islam, yang mengharamkan babi. Dalam prakteknya di masa lalu, pihak penguasa kerajaan atau puri meminta bantuan kepada orang-orang kampung yang saat itu adalah pembantu atau masih memiliki hubungan dengan pihak puri untuk membuatkan sesajian. Sebagai muslim, maka sesajian yang dibuatkan tidak menggunakan daging yang diharamkan, dan sesajian itu disebut *banten selam*. Menurut Anak Agung Ngurah Bagus Suryamandala, *bebangkit selam* merupakan salah satu sesaji yang diperuntukan bagi acara yang sangat sakral atau untuk dewa yang khusus.

Perayaan hari besar agama baik Islam maupun Hindu, di Angantiga juga melibatkan dua umat tersebut untuk saling membantu kelancaran perayaan. Pada saat umat Islam melaksanakan shalat Idul Fitri atau Idul Adha, di mana jamaah di masjid Baiturrahman meluber sampai ke jalan raya di depan masjid, maka pecalang dari banjar adat hindu Angantiga yang membantu mengamankan lokasi, menutup jalan dan mengarahkan masyarakat non-muslim untuk melewati jalan yang lain sehingga tidak mengganggu kekhusyukan umat Islam dalam menjalankan shalat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Demikian pula sebaliknya, pada saat hari raya Nyepi, di mana umat Hindu wajib untuk melaksanakan nyepi dengan tidak keluar rumah, tidak menyalakan api, tidak melakukan kerja, maka umat Islam Angantiga yang dikoordinir pengurus kampung turut membantu mengamankan suasana Nyepi. Umat Islam di lingkungan Angantiga turut menjaga ketentraman lingkungan dengan tidak melakukan aktivitas yang mengganggu hari nyepi, bahkan untuk pergi ke tetangga yang agak jauh di lingkungan Angantiga pun keluar tidak menggunakan sepeda motor tetapi jalan kaki.

Warga kampung Islam Angantiga banyak yang mata pencahariannya bercocok tanam. Petani muslim pun ikut bergabung dalam lembaga pengelolaan air di tingkat banjar yang disebut Subak. Dalam tradisi subak ada upacara *mapag yeh* atau menyambut air. Acara ini dilakukan pada saat awal musim tanam. Bagi umat Hindu, *mapag yeh* dilakukan di pura subak lengkap dengan sesajiannya. Bagi anggota subak yang beragama Islam, *mapag yeh* juga dilakukan, tetapi di hari yang berbeda dengan umat Hindu. Umat Islam menyelenggarakan *mapag yeh* dengan berdoa di rumah salah satu anggota subak yang muslim atau dilaksanakan di lokasi dekat dengan sawah mereka menurut tata cara Islam.

Muslim Angantiga memiliki hubungan yang istimewa dengan Puri Carangsari. Oleh karena leluhur Puri Carangsari telah menjalin hubungan yang harmonis dengan leluhur muslim Angantiga, maka penerus Puri Carangsari berupaya menjaga *ajeg* tradisi yang diwariskan oleh leluhurnya itu, yakni menjalin kerukunan dengan umat Islam, utamanya muslim kampung Angantiga. Oleh karena itu, Puri Carangsari senantiasa menyambut baik undangan untuk mengikuti acara di kampung Angantiga, seperti kegiatan Maulud Nabi Muhammad SAW, Idul Fitri, dan sebagainya. Bahkan Puri Carangsari mengundang warga kampung Angantiga untuk melaksanakan buka puasa dan takbir lebaran di Puri Carangsari. Demikian juga sebaliknya, Puri Carangsari melibatkan warga kampung Angantiga dalam kegiatan yang dilakukan puri, terutama kegiatan *Piodalan* atau peringatan leluhur, di mana warga kampung Angantiga turut berpartisipasi mengiringi arak-arakan untuk *melasti* atau pembersihan *pelinggihan* (simbol-simbol) leluhur dengan bertugas membawakan pusaka-pusaka puri.

Makna *Nyama Braya* bagi Masyarakat Angantiga

Masyarakat tumbuh dari kesatuan individu-individu yang saling berhubungan dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, hidup bermasyarakat bagi masyarakat di Angantiga harus dapat menciptakan suasana yang rukun. *Nyama Braya* menjadi norma sosial

yang diterima oleh masyarakat Angantiga untuk membina kehidupan bermasyarakat yang rukun tersebut. Dengan *Nyama Braya* masyarakat Angantiga membangun kerukunan hidup bersama. Setiap warga menganggap anggota warga yang lain sebagai nyama, memunculkan ikatan sosial yang kuat sehingga terbangun kerukunan. Pada akhirnya kerukunan ini akan mendukung ketentraman hidup masyarakat dan menjamin tercapainya kebutuhan hidup bersama.

Nyama Braya juga bermakna penghormatan dan kepercayaan pada sesama warga. Keterlibatan anggota masyarakat dalam aktivitas bersama, selain merupakan tuntutan sosial juga sekaligus menunjukkan adanya pengakuan terhadap keberadaan si individu di masyarakat; menghargai setiap orang dengan melibatkannya dalam kegiatan-kegiatan bersama; dan juga menunjukkan kepercayaan terhadap kerja orang lain, serta kemauan baik orang lain. Kegiatan *Ngayah*, *metulungan*, dan *ngeroyong* menunjukkan bahwa warga yang terlibat memang dibutuhkan bantuannya. Dengan demikian, *nyama braya* juga menunjukkan kerjasama yang dilakukan oleh masyarakat Angantiga. Tujuan kepentingan bersama didukung dan dilakukan bersama-sama, bahkan untuk membantu kepentingan pribadi-pribadi pun dilakukan bersama, karena pribadi-pribadi dalam masyarakat merupakan bagian dari masyarakat itu sendiri.

Nyama Braya juga menunjukkan solidaritas terhadap sesama warga. *Suka-duka* dan *ngeraris-majenukan* membangun kepedulian terhadap keadaan sesama anggota masyarakat. Semua orang menunjukkan perhatian dan perasaan yang senasib, kegembiraan dan kesedihan yang dirasakan bersama. Solidaritas sosial ini juga merupakan modal sosial bagi masing-masing anggota warga untuk menjalani kehidupan bersama, karena pada saat seseorang mengalami kesusahan maka ada orang lain yang akan membantunya dan keluarganya.

Masyarakat Angantiga dengan demikian memandang hidup ini setiap orang membutuhkan orang lain, karena itu setiap orang rukun, bekerjasama, dan saling menghormati. Norma sosial *Nyama Braya*

ini merupakan standar moralitas bermasyarakat. Kualitas individu di masyarakat dipandang baik apabila menunjukkan sikap *Nyama Braya* di lingkungannya, yakni dengan menghormati orang lain, bekerjasama, suka-duka, dan menaati norma tradisi yang berlaku di masyarakat.

Fungsi *Nyama Braya* bagi Multikulturalisme di Angantiga

Masyarakat Angantiga termasuk masyarakat yang plural. Secara garis besar, wilayah Angantiga dihuni oleh masyarakat yang terdiri dari dua komunitas etnis dan agama. Dari sisi etnis, yaitu keturunan suku Bugis dan suku Bali. Dari aspek agama, di Angantiga masyarakat menganut agama Islam dan agama Hindu. Agama Islam dianut oleh semua warga keturunan Bugis dan beberapa warga Bali. Kedua etnis ini hidup bersama dan berbaur dalam wilayah Angantiga sejak lama, yang menurut sejarahnya sejak tahun 1442. Kedua komunitas suku ini tetap mempertahankan tradisi masing-masing dan menghormati tradisi suku lainnya. sukunya. Meskipun terjadi pembauran, asimilasi baik dalam bentuk akulturasi maupun amalgamasi, tetapi masing-masing komunitas masih tetap memiliki identitas budayanya sendiri-sendiri. Dengan demikian masyarakat Angantiga tidak hanya menjadi masyarakat majemuk, tetapi telah mempraktekkan multikulturalisme sejak lama.

Hal tersebut dapat terjadi karena norma sosial sebagai pedoman pandangan dan perilaku bagi masyarakat Angantiga dalam berhubungan dengan sesama warga. Norma sosial tersebut adalah konsep *Nyama Braya*. Konsep ini merupakan kearifan lokal masyarakat di Bali, termasuk juga di Angantiga, yang dipegang teguh oleh komunitas Hindu ataupun Islam yang hidup bersama. Konsep *Nyama Braya* dipertahankan sebagai norma sosial oleh masyarakat karena konsep ini memiliki kesesuaian dengan budaya dari komunitas Hindu maupun Islam.

Konsep *Nyama Braya*, meskipun telah menjadi norma sosial yang berlaku umum bagi masyarakat Bali, tetapi praktik *Nyama Braya* bagi masing-masing komunitas agama memiliki dalilnya

masing-masing yang menjadikan membenaran dan penerimaan atas konsep ini dalam mengatur kehidupan sosial mereka. Bagi warga kampung Islam Angantiga, *Nyama Braya* ini dapat ditemukan landasan normatifnya dalam ajaran Islam, antara lain: perintah untuk menjalin hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia secara baik, *hablum minallah wa hablum minannas*; perintah untuk menghormati tetangga; persaudaraan atas dasar Islam dan persaudaraan atas dasar kemanusiaan, *ukhwah islamiyah, ukhwah bashariyah*; perintah menghormati kepercayaan orang lain; dan sebagainya. Sementara bagi warga Banjar Adat Angantiga, praktik *Nyama Braya* ini juga memiliki sumber dalam ajaran Hindu, antara lain : ajaran *Tri Hita Karana, kahyangan-pawongan-palemahan*, harmoni dengan Tuhan, sesama manusia dan alam; ajaran *Tat Twam Asi*, dia adalah kamu, menganggap orang lain sama dengan dengan dirinya; dan sebagainya.

Kehidupan multikulturalisme di Angantiga yang telah berjalan beratus tahun ini menjadi pengalaman hidup yang juga merupakan sumber penerimaan terhadap konsep *Nyama Braya* di luar dari ajaran masing-masing agama. Masyarakat Angantiga telah menjadikan *Nyama Braya* sebagai praktek sosial yang menjaga eksistensi mereka bersama, dalam lingkungan budayanya masing-masing dalam lingkungan geografis yang sama. Semua warga saling menjaga hubungan sosialnya dengan menghormati orang lain sehingga orang lain pun menghormati dirinya, merasakan suka duka orang lain sebagaimana orang lain juga bersedia turut suka dukanya. Kearifan inilah yang menjaga eksistensi Angantiga sebagaimana sekarang ini, keragaman tetapi tetap dalam persaudaraan.

Nyama Braya menunjukkan bahwa hakikatnya manusia membutuhkan keberadaan manusia yang lain. Untuk itu dibutuhkan sikap saling menghormati, bekerjasama, dan solidaritas. Sekalipun berbeda budaya, agama dan keyakinan, tetapi dalam kehidupan bersama manusia memiliki tujuan menjalani hidup yang sama yaitu kehidupan yang tenang, damai dan bahagia. Tujuan kehidupan di dunia tersebut hanya mampu diciptakan dengan membangun

harmoni di lingkungannya. Hal ini dapat terwujud melalui *Nyama Braya* dengan sesama.

Dengan demikian *Nyama Braya* ini memiliki fungsi-fungsi dalam masyarakat multikultural, di antaranya: *pertama*, menjaga eksistensi dan identitas budaya. Masyarakat Angantiga dengan budayanya yang berbeda antara warga yang Islam dan yang Hindu tetap dapat harmonis dalam menjalani kehidupan bersama. Hal ini karena norma sosial *Nyama Braya* tidak dimaksudkan untuk menyamakan budaya dan tradisi, melainkan menghormati perbedaan-perbedaan budaya tersebut. Masing-masing orang bebas untuk menjalankan tradisi agama dan kepercayaannya, bahkan dalam lingkungan atau dalam institusi yang sama. Misalnya dalam organisasi subak, upacara *Mapag Yeh* dilakukan sesuai dengan agama masing-masing. Bahkan dalam kegiatan tradisi atau adat keagamaan, bahkan kegiatan keagamaan sekalipun, masyarakat Angantiga saling dukung dan membantu kelancaran pelaksanaan acara dimaksud.

Falsafat *Desa Amawa Cara Negara Amawa Tata* dan *Bhinneka Tunggal Ika* mendorong masyarakat Angantiga untuk menghormati keberbedaan budaya dari dua komunitas yang ada di Angantiga. Meskipun hidup bersama dalam wilayah Angantiga, tetapi antara kampung Islam Angantiga dan Banjar Adat Angantiga memiliki tata aturan sendiri-sendiri bagi masing-masing warganya. *Awig-awig* di Angantiga yang merupakan hukum adat yang tertulis pun masing-masing komunitas memilikinya. Warga banjar adat dan kampung Islam memiliki *awig-awig* sendiri-sendiri yang merepresentasikan tradisi dan norma susila bagi warganya masing-masing.

Dengan demikian eksistensi dan budaya dari masing-masing komunitas yang ada di Angantiga ini dapat terjaga. Masing-masing komunitas dapat melestarikan dan mengembangkan budayanya sendiri-sendiri secara leluasa dengan tetap berpegang pada norma *Nyama Braya*. Masing-masing anggota komunitas tetap memiliki budayanya sendiri sebagaimana terwujud dalam bentuk tradisi-tradisi yang dilestarikannya, sehingga *sense of outhonomy* dari tradisi etnis atau agama dapat berkembang menjadi identitas budaya.

Bersamaan dengan itu, masing-masing komunitas juga menghormati komunitas lain dalam mengembangkan dan memelihara identitas budayanya.

Kedua, mengembangkan kerukunan dan resolusi konflik. Terpeliharanya sikap saling menghormati eksistensi dan identitas budaya dan tradisi-tradisi yang ada di antara masyarakat Angantiga dengan sendirinya mendukung terciptanya kerukunan hidup dan harmonisasi di antara mereka. Toleransi dan sikap saling bekerjasama dalam kehidupan sehari-hari, dan juga dalam kegiatan keagamaan juga dapat terjalin dengan baik. *Nyama Braya* menjadi pendorong kerukunan hidup yang ditunjukkan dengan praktek-praktek kerjasama di antara mereka, baik terkait pribadi-pribadi seperti *mebat* atau *metulungan*, maupun untuk kepentingan bersama seperti *Ngayah* dan *Ngeroyong*. Kerjasama ini juga lintas komunitas dan antarumat beragama. Hal ini ditunjukkan melalui kerjasama untuk saling menjaga lingkungan untuk menjamin terlaksananya kegiatan keagamaan yang membutuhkan kekhitmadan dan ketenangan, seperti saat pelaksanaan shalat Idul Fitri dan shalat Idul Adha bagi kaum muslim dan peringatan hari Nyepi bagi umat Hindu.

Nyama Braya membangun situasi saling kekeluargaan dalam hubungan antarwarga. Praktik sosial seperti saling membantu antara warga melalui *metulungan*, kunjungan *ngeraris* dan *majenukan* menunjukkan bahwa warga telah *Nyama Braya*, dan turut dalam suka duka bersama. Praktik-praktik sosial tersebut merupakan perwujudan konsep *Nyama Braya* dalam kehidupan masyarakat Angantiga yang mampu mendukung kerukunan hidup dan kerukunan antarumat beragama.

Kehidupan masyarakat dalam keberbedaan tentu tidak luput dari munculnya persoalan-persoalan antarwarga atau konflik. Selama ini di Angantiga tidak pernah terjadi konflik yang menimbulkan gesekan fisik antar warga. Norma *Nyama Braya* juga menjadi acuan dalam penyelesaian atau resolusi konflik yang terjadi. Umumnya, jika terjadi perselisihan antarwarga diselesaikan dengan kekeluargaan, dengan mengedepankan sikap *Nyama Braya* tersebut. Konflik yang terjadi

dalam komunitas akan diselesaikan di hadapan pengurus adat baik di kampung maupun di banjar Angantiga masing-masing. Adapun konflik yang terjadi melibatkan warga antarkomunitas, misalnya antara warga kampung dengan warga banjar, maka persoalan itu diselesaikan bersama yang bersangkutan dengan antara pengurus adat kampung dan pengurus adat banjar. Penyelesaian dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan sehingga tetap menjaga kerukunan bersama. Namun untuk persoalan yang melibatkan pelanggaran terhadap adat, maka penyelesaiannya dilakukan dengan berdasarkan sanksi yang telah diatur dalam *awig-awig* masing-masing.

Ketiga, fungsi mengembangkan solidaritas sosial. *Nyama Braya* juga mengembangkan sikap solidaritas sosial. Masyarakat dituntut untuk memiliki rasa kepedulian, senasib, dan suka duka dengan sesama warga. Sikap saling peduli terhadap sesama warga ini muncul karena kesadaran diri, bahwa setiap manusia tidak bisa hidup sendiri melainkan membutuhkan kehadiran orang lain. Sementara kehidupan manusia tidak lepas dari *memalun medura*, ada kalanya senang ada kalanya susah, sehingga kepedulian orang lain akan turut meringankan beban kesusahan dan menolong mengatasi persoalannya. Untuk mendapatkan perhatian dan bantuan orang lain, maka orang juga harus bersedia membantu, menolong, dan peduli terhadap orang lain.

Dalam praktiknya, *ngeraris* dan *majenukan* menunjukkan sikap empati dan kepedulian yang tinggi terhadap sesama warga. Pada saat senang, maka sesama warga turut diajak merayakan kegembiraan, dan sebaliknya, saat ada kesusahan atau kematian, maka warga yang lain turut berbela sungkawa dan menghibur keluarga yang sedang mendapat musibah. Semua keluarga dalam masyarakat berupaya untuk menghadiri *ngeraris* maupun *majenukan*, sehingga kalau tidak bisa menghadiri umumnya akan mewakili anggota keluarga lainnya, dan atau datang di waktu yang lain.

Kontrol dan Sanksi Sosial dalam *Nyama Braya*

Norma sosial *Nyama Braya* yang menyangkut hubungan antar sesama warga terutama dalam masing-masing komunitas, baik kampung Islam Angantiga ataupun banjar adat Angantiga secara formal diatur melalui hukum adat yang disebut *awig-awig*. Melalui *awig-awig* ini, perilaku sosial dan hubungan sosial secara formal diatur. Oleh karena itu *awig-awig* ini menjadi acuan norma dan mengontrol perilaku warganya. Dalam *awig-awig* ini diatur kehidupan dalam kampung ataupun banjar adat, berupa hak, kewajiban, kegiatan warga, upacara adat keagamaan, suka duka, kepengurusan, pelanggaran dan sanksinya.

Awig-awig Kampung Islam Angantiga, misalnya, mengatur bahwa syarat untuk menjadi warga disebutkan karena memiliki warisan *karang* (bagian dalam tanah pokok yang diwariskan turun temurun), telah satu tahun menikah (bagi keluarga baru), atau pendatang. Adapun untuk pendatang ini harus membayar dana suka duka (*pemogpog*) yang jumlahnya telah ditentukan. Dalam kegiatan warga berupa kegiatan kerjasama yang telah ditentukan oleh pengurus kampung, maka apabila ada warga yang tidak mengikuti dikenai sanksi membayar *dedosen*, bahkan dapat dikeluarkan dari anggota warga kampung. Pelanggaran sosial terhadap norma susila, seperti perzinahan, perjudian, dan minuman keras juga dikenai sanksi berupa sanksi moral (seperti mandi taubat dan diarak), denda (*dedosen*), sampai di bawa ke pihak berwajib.

Penerapan konsep *Nyama Braya* ini, tentu saja lebih luas lagi dalam praktik sosialnya dibanding yang tercantum dalam *awig-awig*. Oleh karena itu kontrol sosial terhadap praktik *Nyama Braya* secara langsung dilakukan oleh masyarakat sendiri. Warga yang tidak menunjukkan sikap *Nyama Braya* akan mendapatkan sanksi moral dari masyarakat. Sanksi tersebut dapat berupa sindiran atau teguran, tidak diacuhkan dan dipedulikan oleh warga yang lain, dan kalau pelanggarannya tergolong berat maka dapat dikeluarkan dari kampung.

Nyama Braya dalam berbagai bentuknya di masyarakat Angantiga tetap terjaga karena masyarakat sendiri membutuhkan untuk memelihara lingkungan sosial sehingga kondusif, rukun, aman, dan harmonis. Situasi semacam ini menjadi prasyarat bagi masyarakat untuk mendapatkan ketenangan dalam mencapai kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Oleh karena itu, konsep ini mampu bertahan dan dipertahankan oleh masyarakat untuk dijadikan acuan dalam berinteraksi antar sesama manusia. Hal ini mendukung terciptanya kerukunan antarwarga, antaretnis dan antarumat beragama di wilayah Angantiga.

Penutup

Warga yang tinggal di wilayah Angantiga merupakan masyarakat yang multikultural karena terdiri dari dua komunitas, yaitu komunitas Hindu Bali, dan komunitas Islam keturunan Bugis. Meskipun mereka berbeda secara kultur dan agama, tetapi kehidupan sosial mereka dalam keadaan yang rukun dan harmonis. Harmonisasi sosial ini di antaranya didukung dengan adanya norma adat dan tradisi keagamaan, *Nyama Braya* yang telah berlaku dan dilaksanakan semenjak dahulu. Norma sosial *Nyama Braya* tidak dimaksudkan untuk menyamakan budaya dan tradisi, melainkan menghormati perbedaan-perbedaan budaya tersebut. Masing-masing orang bebas untuk menjalankan tradisi agama dan kepercayaannya, bahkan dalam lingkungan atau dalam institusi yang sama. Dengan *Nyama Braya* ini, perselisihan antar warga dapat dihindarkan sehingga muncul kerukunan sosial.

Norma sosial *Nyama Braya* dalam masyarakat multikultural di Angantiga memiliki fungsi menjaga eksistensi dan identitas budaya masing-masing komunitas. Warga kampung Islam Angantiga dan warga banjar Adat Hindu Angantiga tetap memiliki budayanya sendiri sebagaimana terwujud dalam bentuk tradisi-tradisi yang dilestarikannya, sehingga *sense of outhonomy* dari tradisi etnis atau agama dapat berkembang menjadi identitas budaya. Bersamaan

dengan itu, masing-masing komunitas juga menghormati komunitas lain dalam mengembangkan dan memelihara identitas budayanya.

Praktik-praktik Nyama Braya ditunjukkan dalam bentuk *Mebat*, *Metulungan*, *Ngayah* dan *Ngeroyong*; maupun kunjungan *Ngeraris* dan *Majenukan*. Praktik-praktik sosial tersebut merupakan perwujudan konsep *Nyama Braya* dalam kehidupan masyarakat Angantiga yang mampu mendukung kerukunan hidup dan kerukunan antarumat beragama. *Nyama Braya* juga mengembangkan sikap solidaritas sosial. Masyarakat dituntut untuk memiliki rasa kepedulian, senasib, dan suka duka dengan sesama warga.

Daftar Pustaka

- Amirrachman, Alpha. 2007. *Revitalisasi Kearifan Lokal: Studi Resolusi Konflik di Kalimantan Barat, Maluku dan Poso*. Jakarta : IICIP dan European Commission (EC). www.lsaf.org/content/view/176/150/ diunduh 17 juni 2010
- Azca, M. Najib. 2004. *Ketika Moncong Senjata Ikut Berniaga: Laporan Penelitian Keterlibatan Militer dalam Bisnis di Bojonegoro, Boven Digoel dan Poso*. Jakarta : Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS). Dalam www.prakarsa-rakyat.org/download/Buku/ dan www.kontras.org/buku/Laporan_utama.pdf diunduh 17 juni 2010.
- Bakker, Anton dan Zubair, Achmad Charris. 1990. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Koentjaraningrat. 1986. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Aksara Baru
- Rahab, Amiruddin al. 2008. *Kekerasan Komunal di Indonesia: Sebuah Tinjauan Umum*. *Jurnal Dignitas*, Volume V No.1.
- Ridwan, Nurma Ali. 2007. "Landasan Keilmuan Kearifan Lokal". *Jurnal Studi Islam dan Budaya Ibdā'* Vol. 5/No. 1/ Januari-Juni 2007. Purwokerto : P3M STAIN Purwokerto, 27-38.

- Rohimin, et.all. 2009. *Harmonisasi Agama dan Budaya di Indonesia*. Jakarta : Balai Litbang Agama Jakarta.
- Sartini. Tt. *Menggali Kearifan Lokal Nusantara: Sebuah Kajian Filsafat*. <http://www.wacananusantara.org> diunduh 17 juni 2010
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Suparlan, Parsudi. 2004. "Masyarakat Majemuk, Masyarakat Multiultural, dan Minoritas: Memperjuangkan Hak-hak Minoritas". Makalah dalam *Workshop Yayasan Interseksi, Hak-hak Minoritas dalam Landscape Multikultural, Mungkinkah di Indonesia?*, Wisma PKBI, 10 Agustus 2004 http://www.interseksi.org/publications/essays/articles/masyarakat_majemuk.html diunduh 6 Juni 2010
- Thohir, Mudjahirin. 2007. "Agama Masyarakat Nelayan". Makalah *Seminar Desain Operasional Penelitian Tahun 2007*. Balai Litbang Agama Semarang.
- Tumanggor, Rusmin. 2009. *Buku Paket Panduan Penyadaran dan Pendampingan Penguatan Kedamaian (Peace Making)*. Jakarta: Depad RI, Badan Litbang dan Diklat, Puslitang Kehidupan Keagamaan
- Ujan, Andre Ata et.al. 2009. *Multikulturalisme, Belajar Hidup Bersama dalam Perbedaan*. Jakarta: PT. Indeks

Kajian Upaya Deradikalisme Keagamaan: Studi Kasus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama

Abdul Jamil

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Indonesian society which is known moderate and tolerant now experiencing a transition, a process of dynamic attitude and behavior that leads Muslims to an exclusive and radical form. It is undeniable that the researches on ethno-religious conflict events have been largely carried out. The current study which uses qualitative approach acknowledges that NU LAKPESDAM is trying to counter the growth of radicalism and confirm the moderate identity of NU. LAKPESDAM develops a critical discourse and moderate religiosity as an integral part of the democratization and strengthening the civil society.

Keywords: *Radicalism, LAKPESDAM NU, ethno-religious conflict.*

Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 memberikan jaminan konstitusional terhadap kebebasan beragama. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara teokratis, dan bukan pula negara sekuler, tetapi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama yang tidak didasarkan pada satu paham keyakinan agama tertentu. Sikap

keberagamaan yang moderat dan toleran diyakini ikut memberikan andil pada kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis. Model keberagamaan inilah yang telah terajut lama dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehingga umumnya riak-riak perpecahan dengan santun selalu dapat diselesaikan.

Pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru di tahun 1998 oleh gerakan reformasi, keran kebebasan seakan terbuka lebar bagi masyarakat untuk menyatakan pikiran dan pendapatnya, muncul berbagai organisasi dengan basis ideologi yang beragam yang tidak harus monolitik mengikuti pakem yang dibuat penguasa, di antaranya muncul organisasi-organisasi yang berbasis ideologi Islam, baik yang berorientasi politik maupun sosial keagamaan. Seiring dengan munculnya fenomena tersebut, terjadi proses dinamika sikap dan perilaku sebagian umat Islam yang sebelumnya moderat dan toleran ke arah bentuk yang intoleran dan radikal. Krisis multi dimensi serta kondisi sosial politik ekonomi yang tidak menentu pasca gerakan reformasi 1998 ikut andil dalam mengembangbiakkan secara cepat pola dan model gerakan yang cenderung intoleran dan radikal tersebut. Pola gerakan ini telah menempatkan posisi Islam pada pemaknaan yang jahat. Terjadinya berbagai ledakan bom oleh kelompok teroris yang mengatasnamakan agama dan beberapa kasus gerakan radikal lainnya telah mendegradasi kohesivitas kehidupan sosial kebangsaan dan kenegaraan.

Dari catatan riset beberapa lembaga kajian terhadap kehidupan keagamaan di Indonesia, terdapat laporan bahwa konflik etno-religius masih sering terjadi, seperti pembakaran atau pengrusakan rumah ibadah maupun aset sosial keagamaan, pembubaran secara paksa kegiatan keagamaan umat tertentu, dan penganiayaan terhadap tokoh agama oleh pihak lain. Tahun 1996 terjadi kerusuhan berupa pembakaran beberapa gereja dan sekolah Kristen di Situbondo, pada tahun yang sama juga terjadi pembakaran gereja, vihara, dan kelenteng di Tasikmalaya, pada tahun 1998 di Kupang terjadi pengrusakan bangunan milik umat Islam seperti masjid, sekolah dan asrama haji oleh umat Kristen. Sepanjang tahun 1998-2008 di Poso telah terjadi

konflik antar kaum Muslim dan Kristen, selanjutnya terjadi pula kerusuhan di Ambon dan Maluku sejak 1999-2002. (Ghazali, 2007: 2-3).

Dalam laporan riset Center for Religious and Cross-cultural Studies (CRCS) Universitas Gadjah Mada Tahun 2008, disebutkan bahwa di Indonesia sepanjang tahun 2008 saja telah terjadi sekitar 12 kasus kerusuhan yang menyangkut pendirian rumah ibadah. (Tim CRCS. 2009).

Secara garis besar munculnya sikap intoleran dan radikal ini disebabkan karena faktor kondisi sosial-politik dan faktor yang terkait dengan pola pikir (*mindset*). Pada umumnya para pelaku radikalisme telah mengalami indoktrinasi relatif lama, dan dalam indoktrinasi ini digunakan legitimasi-legitimasi agama sehingga memunculkan sikap anti toleransi dan menolak dialog terhadap pihak-pihak yang tidak sepemahaman dengan mereka. Gerakan-gerakan radikal yang mengatasnamakan agama sebenarnya memiliki prosentase yang relatif kecil. Mayoritas umat Islam Indonesia masih menjaga nilai-nilai moderasi dan toleran dalam kehidupan keagamaannya.

Nahdlatul Ulama (NU) adalah organisasi sosial keagamaan yang mendasarkan prinsip keberagamaannya pada cara pandang, sikap serta perilaku keagamaan yang moderat dan toleran. NU mempunyai pandangan bahwa kehadiran Islam harus ditunjukkan oleh umatnya untuk memberikan kedamaian dan kebaikan bagi keberlangsungan kehidupan, Islam adalah agama yang harus mampu membawa kedamaian dan memberikan rahmat bagi alam (*rahmatan lil 'alamin*). Bukan sebaliknya, agama Islam seakan menjadi penyebab terhadap ketidaknyamanan dan “duri” bagi ketentraman hidup bermasyarakat.

NU sebagai organisasi besar memiliki banyak perangkat organisasi, hal ini dimaksudkan agar NU lebih mudah untuk mewujudkan berbagai tujuan yang hendak dicapainya, perangkat organisasi tersebut ada yang disebut lembaga, lajnah, dan badan otonom. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

(LAKPESDAM) adalah lembaga NU yang secara khusus bergerak dalam pemberdayaan masyarakat. LAKPESDAM bergerak dalam kerja-kerja sosial baik pendidikan, ekonomi, maupun sosial budaya. Dalam hal pemikiran dan gerakan keagamaan, LAKPESDAM sebagaimana organisasi induknya yaitu NU secara konsisten mendesiminasikan Islam yang moderat, yaitu paham dan gerakan Islam yang memiliki kecenderungan menghindari sikap ekstrim dan radikal. Langkah tersebut merupakan upaya membangun eksistensi kehidupan hakiki keagamaan yang sesuai dengan ajaran Islam. Desiminasi Islam moderat yang diusung oleh Lakpesdan NU juga dirahkan untuk peneguhan identitas moderatisme NU sekaligus untuk membendung kuatnya arus wacana konservatif di tingkat nasional. (El-Mawa 2005).

Berkembangnya radikalisme agama pada satu sisi merupakan suatu kenyataan sosio-historis dalam kemajemukan bangsa, namun di sisi lain juga bisa menjadi ancaman bagi masa depan pluralitas dan kemajemukan Indonesia. Dalam penelitian Puslitbang Kehidupan Keagamaan terhadap para terpidana teroris di Indonesia disebutkan bahwa latar belakang kultur keagamaan para teroris berasal dari keluarga besar *Nahdliyyin* yang merasa tidak puas dengan model pengamalannya, kemudian berpindah ke model pengamalan keagamaan modernis, puritan dan sebagian berbau Wahabisme. (Sugiyarto. 2009: 110). Untuk itu menarik dilakukan kajian, bagaimanakah pandangan dan sikap LAKPESDAM terhadap radikalisme dan bagaimana pula langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengisolasi gerakan intoleran dan radikal yang ada di internal maupun eksternal NU.

Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat

Dari latar belakang masalah di atas, dapat diketahui bahwa hadirnya fenomena sosial dalam bentuk radikalisme berupa teror bom, kerusuhan atau konflik sosial keagamaan, dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki sikap intoleran dan radikal yang memiliki pemahan tertentu atas teks-teks agama. Melalui penelitian

ini akan dikaji bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan oleh LAKPESDAM dalam menghadapi radikalisme keagamaan yang ada di masyarakat.

Tujuan Penelitian ini adalah: a). Mengidentifikasi dan mendeskripsikan pandangan LAKPESDAM dalam menyikapi radikalisme; b). Mengidentifikasi dan mendeskripsikan upaya-upaya LAKPESDAM untuk meminimalisir radikalisme di tengah masyarakat;

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah antara lain: a). Sebagai bahan kajian akademis dalam memahami upaya-upaya mengurangi radikalisme keagamaan; b). *Feedback and policy redesign* bagi pemerintah dan lembaga/organisasi keagamaan yang memiliki kepentingan dalam mengembangkan paham Islam moderat.

Kerangka Teori

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami batasan dalam penelitian ini maka terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian tentang radikalisme. Kata “radikal” berasal dari bahasa Latin *radix* yang artinya akar. Dalam bahasa Inggris kata *radical* dapat bermakna ekstrim, menyeluruh, fanatik, revolusioner, ultra dan fundamental. Sedangkan *radicalism* artinya doktrin atau praktek penganut paham radikal atau paham ekstrim. Pengertian radikal dalam penelitian ini mengikuti pengertian yang dikemukakan oleh Bahtiar Effendi bahwa Islam radikal adalah kelompok yang mempunyai keyakinan ideologis tinggi dan fanatik yang mereka perjuangkan menggantikan tatanan nilai dan sistem yang sedang berlangsung. Dalam kegiatannya mereka seringkali menggunakan aksi-aksi yang keras, bahkan tidak menutup kemungkinan kasar terhadap kelompok lain yang dinilai bertentangan dengan keyakinan mereka. (Effendi, 1998).

Penelitian ini didasarkan pada dua teori. *Pertama*, Teori Emile Durkheim yang menyatakan bahwa agama memiliki “*dynamogenic quality*”, yaitu kemampuan, bukan saja untuk mendominasi individu, tapi juga untuk mengangkat individu di atas kemampuannya yang

biasanya. Agama juga oleh Durkheim dinyatakan sebagai realitas *sui generis*, bahwa simbol-simbol agama bukanlah khayalan (*delusion*), tapi bersifat konstitutif bagi masyarakat yang bisa mengendalikan motivasi pribadi dan membuat masyarakat terwujud. (Sila . 2010).

Kedua. Kritik Juergen Habermas terhadap filsafat positivisme yang memisahkan secara tegas antara pemikiran dan realitas, dalam positivisme pengetahuan adalah bersih dan terbebas dari kepentingan manusia. Tesis Habermas berseberangan dengan pandangan positivisme. Baginya pengetahuan dan kepentingan senantiasa memiliki pertautan. Dengan bahasa yang puitis, ia menyatakan: “dalam daya kekuatan refleksi diri maka pengetahuan dan kepentingan adalah satu”. (Hardiman, F. 1993). Bagi Habermas kepentingan adalah bersifat niscaya bagi pengetahuan dan setiap pembentukan pengetahuan pasti memiliki kepentingan tertentu sehingga bisa diartikan tidak ada keabsolutan dan tafsir tunggal dalam suatu pemahaman.

Kedua teori tersebut akan dijadikan sebagai pisau analisa dalam penelitian ini untuk memahami upaya-upaya LAKPESDAM NU dalam menjawab radikalisme keagamaan. Analisis akan difokuskan pada beberapa hal, yaitu: a). Agama oleh masyarakat biasanya dipahami sebatas mengagungkan Tuhan dan melaksanakan perintahnya, agama jarang dipahami sebagai “konstitusi” pencapaian tujuan sosial. Apakah LAKPESDAM bekerja dalam menciptakan sistem-sistem sosial yang terpadu dan utuh dan menjadikan agama sebagai “kekuatan” bagi gerakan pencapaian tujuan sosial dan perubahan masyarakat? b). Pengetahuan keagamaan seringkali “dibatasi” oleh klaim kebenaran individu atau kelompok, tafsir atas agama sering dianggap sebagai kebenaran tunggal, yang seolah lepas dari konteks sosio-kultural. Apakah ada “ruang bebas” yang disuarakan LAKPESDAM untuk menafsirkan doktrin agama sebagai kontruksi “kenyataan” sosial sehingga paham atas suatu doktrin menjadi bersifat dinamis dan relatif?

Penelitian tentang LAKPESDAM sebelumnya pernah dilakukan oleh Martin Van Bruinessen. Dalam tulisannya Martin mengungkap

berbagai peran pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh LAKPESDAM pasca NU kembali ke Khittah. (Bruinessen, 1994).

Sementara itu Laode Ida juga meneliti dan memberikan penjelasan yang cukup luas terkait peran-peran LAKPESDAM, oleh Laode LAKPESDAM dinilai sebagai salah satu lembaga yang memiliki visi dan person-person yang dinilai progresif. (Ida, L. 2004).

Dari kedua hasil penelitian tersebut banyak informasi yang bisa digali untuk memahami LAKPESDAM, kondisi sosio-kultural yang mengiringi kehadirannya, serta peran-peran yang telah didedikasikan bagi pemberdayaan masyarakat. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah bahwa telaah lebih ditekankan pada bagaimana respon (pandangan dan reaksi) LAKPESDAM dengan munculnya sikap keagamaan yang intoleran dan radikal baik di internal NU maupun eksternal.

Metode Penelitian

Penelitian tentang LAKPESDAM ini dilakukan selama satu bulan, yaitu pada bulan September 2010, tempat penelitian di Jakarta. Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah dengan mewawancarai 3 orang pengurus LAKPESDAM, baik yang masih aktif maupun mantan pengurus, dengan pertimbangan bahwa informan tersebut memiliki informasi yang aktual tentang LAKPESDAM, serta memiliki keterkaitan dengan gagasan dan kebijakan yang dibuat LAKPESDAM, Keyiga informan ini dinggap dapat memberi informasi yang mendalam tentang tema yang diusung dalam penelitian ini. Selain wawancara, data juga diperoleh melalui kajian pustaka (analisis dokumen) dan observasi. Hasil penelitian akan dideskripsikan dan sedapat mungkin memberi kejelasan terhadap sasaran penelitian.

Profil LAKPESDAM

Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) lahir tanggal 6 April 1985 bertepatan dengan 15 Rajab 1405 H. Kehadiran lembaga ini ditandai dengan keluarnya SK

PBNU pada tanggal yang sama. Pada awalnya LAKPESDAM lahir sebagai lajnah yaitu pelaksana *ad hoc* untuk mengawal kerja-kerja NU yang patut ditangani secara khusus, tepatnya dalam menangani pengembangan sumberdaya manusia NU. Kantor Sekretariatnya berada di Jl. Haji Ramli No. 20 A, Menteng Dalam Tebet, Jakarta Selatan.

Latar belakang berdirinya LAKPESDAM, sebagaimana tertuang dalam amanat Mukhtamar NU ke-27 di Situbondo, menurut El-Mawa mengutip MM. Billah, gagasan terbentuknya LAKPESDAM sebagai lembaga yang bergerak dalam pengembangan sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh wacana modernisasi, dimana istilah sumber daya manusia itu sebenarnya berasal dari pejuang modernis.³

Adapun tujuan utama berdirinya LAKPESDAM adalah untuk membantu NU dalam mengubah keberadaannya menuju suatu organisasi yang efektif dalam melakukan kegiatan sosial kultural diseluruh Indonesia. Sedangkan tujuan khusus didirikannya LAKPESDAM antara lain yaitu: a) Menyebarkan gagasan dan pengetahuan mengenai pengembangan sosial-ekonomi terhadap warganya sebagai bagian dari orientasi baru NU; b) Memobilisasi sumberdaya manusia dari kalangan warga NU sendiri untuk keperluan pengembangan sosial budaya dan ekonomi rakyat NU; c) Mengembangkan dan mengubah alternatif pendidikan dan model pengembangan masyarakat dari dan oleh NU serta organisasi jaringannya.

Pada Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung tahun 1994, LAKPESDAM yang semula lajnah berubah menjadi lembaga, hal ini menjadikan LAKPESDAM lebih "otonom". Pengertian lajnah adalah pelaksana program NU yang memerlukan penanganan khusus. Sedangkan lembaga di organisasi NU adalah perangkat departementasi organisasi NU yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan NU, khususnya yang berkaitan dengan suatu bidang tertentu, dalam hal ini adalah di bidang pengkajian dan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

Nilai-Nilai Agama sebagai *Entry Point* Gerakan

Secara teologis, menurut Bahtiar Effendi gerakan Islam garis keras dipengaruhi oleh teologi salafi. Teologi salafi sendiri dipengaruhi oleh: a). pemikiran Ibn Taimiyah yang menentang infiltrasi budaya lokal dalam praktik keagamaan, b). secara gerakan, teologi salafi dipengaruhi oleh gerakan kaum Wahabi di Arab Saudi, dan c). ini yang paling mendasar, gerakan radikal umumnya dipengaruhi oleh penafsiran yang literal yang lebih melihat teks tanpa melihat konteksnya. Pemahaman yang literal atau skripturalis ini mengimbas pada pemahaman mereka terhadap sejarah dan peradaban. Dalam memperjuangkan negara, mereka merujuk pada zaman Nabi dan *Khulafa ar-Rasyidin* serta ingin menerapkan apa adanya. (Bachtiar. 2005).

Secara sosio-historis lahirnya NU pada tanggal 31 Januari 1926 adalah respon terhadap upaya-upaya penggusuran tradisi Aswaja yang dilakukan oleh penguasa Arab Saudi yang terpengaruh Wahabi. NU berusaha menjaga keseimbangan. Dalam setiap upaya kreatif yang dilakukannya, terutama dalam praktek keagamaan yang sudah mentradisi hidup dalam masyarakat, NU secara garis besar tetap menjaga hal-hal yang tidak menyimpang dengan prinsip-prinsip kepercayaan Islam. Karena itu berbeda dengan Wahabi, NU menjaga keseimbangan antara pengembangan Islam dan pelestarian apa yang hidup di masyarakat yang sesuai dengan kepercayaan yang dipegang NU. (Ma'arif NU. 2004).

Bersikap moderat (*tawasuth*) yaitu berupaya berada di "jalur tengah" telah menjadi bagian dari "*plat-form*" kemasyarakatan NU. Menurut Marijan ada beberapa ciri khas komunitas NU yaitu: a) *Tawasuth* dan *i'tidal*, sikap tengah (moderat) dengan menjunjung tinggi keharusan berlaku lurus ditengah kehidupan bersama; b) *Tasamuh*, sikap toleransi terhadap perbedaan; c) *Tawazun*, sikap seimbang dan tidak bersifat ekstrim; d) *Amar ma'ruf nahi munkar*, menganjurkan kebaikan dan mencegah kejelekan. (Marijan. 1992).

Dalam butir Rekomendasi muktamar NU ke-31 tahun 2004 di Solo tertuang pernyataan bahwa NU sebagai organisasi keagamaan yang menganut *Ahlussunnah wal Jamaah* (Aswaja) menolak segala bentuk fundamentalisme, ekstremisme, liberalisme, dan aliran-aliran yang menyimpang. (TIM NU. 2004). Rekomendasi ini menegaskan bahwa sikap kemasyarakatan NU adalah pada "jalur tengah" sehingga menolak segala bentuk sikap ekstrim dalam sikap keagamaan, baik radikalisme maupun liberalisme.

Menurut Imdadun Rahmat, sebagai lembaga yang mengusung aspirasi NU, tentu saja LAKPESDAM dalam strategi perjuangannya selalu berpijak pada koridor nilai sosial-keagamaan NU dalam melangsungkan pemberdayaannya. Termasuk dalam agenda semisal demokratisasi dan penguatan *civil society* yang menjadi konsen gerakan, LAKPESDAM tetap meniscayakan titik pijak agama sebagai *entry point* dalam gerakan-gerakannya.

Menurut Fawaid Sadzili LAKPESDAM berupaya membendung gerakan-gerakan radikalisme karena beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, radikalisme cenderung bersifat destruktif, ini bertentangan dengan sikap NU yang *tawasuth, tawazun, dan tasamuh*, serta ajaran Islam yang mengusung semangat *rahmatan lil 'alamin*. *Kedua*, berbeda dengan Wahabi, NU senantiasa menjaga keseimbangan antara pengembangan Islam dan pelestarian apa yang hidup di masyarakat yang masih sesuai dengan ajaran Islam. *Ketiga*, LAKPESDAM memiliki pandangan bahwa kebenaran doktrin agama tidak bisa dimonopoli seseorang. LAKPESDAM mencoba mendorong terciptanya "ruang bebas" untuk mentafsirkan doktrin agama, sehingga tidak lagi bersifat literalis, yaitu dengan tidak hanya melihat teks tapi juga melihat konteksnya.

Deradikalisasi

LAKPESDAM melihat bahwa seiring era reformasi, Islam di Indonesia menghadapi empat tantangan serius yang bisa menghadirkan ancaman bagi masa depan bangsa, yaitu: a) radikalisme agama yang diekspresikan secara beragam, b) praktik korupsi di

negara yang mayoritas berpenduduk muslim, c) diskriminasi gender, dan d) formalisasi agama ke dalam dunia politik.

Dalam rangka menangkal empat isu tersebut, El-Mawa mengungkapkan bahwa LAKPESDAM mencanangkan sejumlah langkah-langkah strategis dengan mengarahkan wawasan keagamaan dalam kontruksi pengembangan masyarakat sipil menuju demokratisasi.³ Hal tersebut dilakukan oleh LAKPESDAM melalui beberapa program kegiatan yaitu:

Program Pengembangan Wawasan Keulamaan (PPWK)

Melalui program PPWK, LAKPESDAM hendak memberikan wawasan tambahan bagi para ulama guna meningkatkan kemampuan dalam memainkan peran-peran kesyuriahuan untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil dan demokratis. Dalam program PPWK ini ada tiga materi besar yang dijadikan modal yaitu Wawasan keulamaan, Wawasan sosial dan wawasan manajemen.

Wawasan keulamaan meliputi epistemologi ilmu keislaman, tradisi keilmuan pesantren, orientasi ilmu fiqh, orientasi ilmu kalam, orientasi ilmu tasawuf, sejarah dan kebudayaan Islam, serta sejarah Islam Indonesia. Sedangkan wawasan sosial meliputi sosiologi yang ditekankan pada teori dan analisa perubahan sosial politik yang ditekankan pada teori dan penerapan demokrasi dan dasar politik Indonesia, serta studi pembangunan yang ditekankan pada pembahasan mengenai ideologi-ideologi dunia, teori pembangunan, dan pembangunan di Indonesia.

Wawasan manajemen ditekankan pada pembahasan mengenai manajemen organisasi nirlaba, baik manajemen programnya, kepemimpinannya, serta pendanaan dan manajemen keuangannya, dan pembahasan mengenai NU dan program transformasi sosial.

Program PPWK ini menjadikan santri senior sebagai kelompok sasaran (target group) dengan sejumlah asumsi diantaranya yaitu bahwa mereka kelak yang akan menduduki posisi syuriah dilingkungannya masing-masing, posisi ini merupakan posisi yang

tertinggi dalam hirarki sosial-keagamaan sehingga kelak mereka memiliki kewenangan institusional untuk mengarahkan perubahan.

Halaqoh Perubahan Sosial (HPS)

Halaqoh Perubahan Sosial adalah sejumlah halaqoh yang dilangsungkan di berbagai daerah. Tujuan halaqoh ini adalah untuk menumbuhkan sikap kritis peserta (warga) terhadap realitas sosial serta tumbuhnya komitmen dan pembelaan terhadap umat yang terpinggirkan oleh proses demokrasi. Halaqoh ini dikemas dengan beragam pola, seperti diskusi, observasi langsung, dan analisa hasil observasi. Program ini berhasil melahirkan kader yang berpikir moderat sekaligus kritis, dan juga mampu melakukan advokasi terhadap persoalan sosial yang dialaminya.

Penerbitan Jurnal

Dalam rangka menangkal massifnya kecenderungan fundamentalistik dan ekstrim dalam wacana keagamaan maka sebagai strategi *counter hegemony* lewat media LAKPESDAM menerbitkan Jurnal Taswirul Afkar yang merupakan jurnal pemikiran keagamaan dan kebudayaan. Jurnal ini telah terbit sejak 1997. Jurnal Tashwirul Afkar mengangkat berbagai pemikiran baru, segar dan aktual yang memacu perdebatan dan dialog dalam diskursus keislaman dan keindonesiaan.

Penerbitan Taswirul Afkar ini disamping sebagai sarana *counter hegemony* lewat media juga memiliki dua agenda. *Pertama*, agenda memacu perdebatan pemikiran dalam kerangka memproduksi pemikiran-pemikiran baru. *Kedua*, agenda sosial pemikiran baru tersebut untuk memberikan "pencerahan" bagi masyarakat di satu sisi dan untuk *counter* wacana Islam fundamentalis di sisi lain.

Talk Show di Radio, Layanan Iklan Sosial dan Publikasi

Di samping apa yang telah disebutkan di atas, LAKPESDAM NU juga mengadakan *talk show* di radio. *Talk show* ini ditujukan sebagai media interaktif dengan masyarakat Islam secara luas, terutama dalam

rangka merekonstruksi keberagaman yang membebaskan, sejalan dengan doktrin agama Islam yang *rahmatan lil 'alamin*. LAKPESDAM melakukan kerjasama siaran dengan beberapa radio swasta di Jakarta seperti: CBB, Jakarta News FM, MS Tri FM, radio At-Tahiriyah, Radio As-Syafi'iyah, dan lain-lain.

Persebaran wacana Islam moderat oleh LAKPESDAM juga disuguhkan melalui program iklan layanan masyarakat yang disosialisasikan lewat televisi. Iklan tersebut berisi pesan-pesan agama mengenai perdamaian, seruan anti kekerasan, toleransi, pengentasan kemiskinan, pemberantasan korupsi, kesetaraan gender, solidaritas kemanusiaan dan Agama sebagai rahmat. Kegiatan ini juga menjadi semacam media dakwah untuk persebaran pesan agama yang toleran dan inklusif.

LAKPESDAM menerbitkan sejumlah buku, baik terkait dengan institusi NU maupun dengan isu-isu dan wacana yang mencerminkan moderatisme NU. Beberapa buku yang berhasil diterbitkan atas kerjasama LAKPESDAM NU dan penerbit Kompas yaitu: *Dinamika NU: Perjalanan Sosial dari Mukatamar Cipasung (1994) ke Mukatamar Kediri (1999)* dan *Geger di Republik NU: Perebutan Wacana, Tafsir Sejarah, dan Tafsiran Makna*. Sedangkan yang diterbitkan secara mandiri adalah buku *Kritik Nalar Fiqih NU : Transformasi Paradigma Bahtsul Masail*.

Jaringan Intelektual Kampus

Untuk membangun kekuatan baru dalam persebaran gagasan Islam moderat, LAKPESDAM NU menjalin jaringan "Komunitas Kritis" yang tersebar di beberapa kampus. Diskusi terkait sejumlah kajian keagamaan ini dikemas dalam bentuk *road show* ke kantong jaringan di berbagai komunitas studi yang tersebar di berbagai kampus di Jakarta, Ciputat, Bekasi, dan Depok. Melalui jaringan itulah LAKPESDAM mensosialisasikan gagasan keagamaan dan kebudayaan demi menyangga agenda besar penguatan *civil society* dan demokratisasi serta desiminasi pemikiran keagamaan yang *rahmatan lil alamin*.

Penemuan ilmu sosial terhadap agama telah memberi kesaksian bahwa agama memiliki peran yang fundamental dalam fungsi-fungsi sosial (dan psikologis). Dalam pandangan Nottingham, agama diyakini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial, Peran sosial agama harus dilihat terutama sebagai sesuatu yang mempersatukan, sebagai kekuatan yang mempersatukan, mengikat dan melestarikan, namun ia juga memiliki fungsi lain. Jika tidak dianut oleh seluruh atau oleh sebagian kelompoknya, ia bisa menjadi kekuatan yang menceraai-beraikan, memecah-belah bahkan menghancurkan. (Nottingham. 2002).

Apa yang dilakukan LAKPESDAM nampaknya mempertimbangkan pandangan ini, LAKPESDAM melihat radikalisme bersifat destruktif bagi pengembangan demokrasi dan pembangunan masyarakat sehingga tidak boleh dibiarkan tumbuh berkembang, LAKPESDAM mendesiminasikan wacana keagamaan yang kritis dan moderat sebagai upaya meminimalisir adanya pemahaman agama yang intoleran dan radikal. Di sini nampak LAKPESDAM sebagaimana Durkheim memandang agama bersifat konstitutif bagi masyarakat, nilai-nilai agama oleh LAKPESDAM ingin dijadikan sebagai nilai dan norma yang memberi dorongan atas terwujudnya etos saling menghormati dan menghargai sesama manusia, sehingga terwujud cita-cita sosial yaitu demokratisasi dan penguatan *civil society*. Ini dilakukan LAKPESDAM melalui program pengembangan wawasan keulamaan (PPWK). Jurnal Taswirul Afkar, penerbitan buku, *talk show* di radio, pembentukan jaringan kampus, dan lainnya.

Di samping radikalisme LAKPESDAM juga merespon berbagai isu dan wacana aktual dengan nalar kritis, sehingga melahirkan dialektika keagamaan yang progresif. Berbagai diskursus dimunculkan dalam jurnal Tashwirul Afkar, seperti: Menafsir Ulang Ahlussunah wal Jama'ah, Manantang Wacana Resmi: Pergolakan Umat Islam di Bawah, Gerakan Perempuan dalam Islam, Memotret Mesir Mengusung Islam Liberal, Menelusuri Liberalisme Islam di NU, Pos Tradisionalisme Islam, Menuju Pendidikan Islam Pluralis, Deformalisasi Syari'at, Islam Pribumi, Menolak Arabisme Mencari

Islam Indonesia, Perebutan Identitas Islam, Pergulatan Islamisme dan Islam Progresif. Diskursus semacam ini secara kritis diangkat oleh LAKPESDAM sebagai upaya mencari interpretasi baru atas konsep keagamaan yang selama ini dianggap “tabu” untuk didiskusikan.

Dari berbagai diskursus yang diangkat LAKPESDAM dalam jurnal di atas, nampak bahwa LAKPESDAM tidak hanya menggunakan pendekatan yang bersifat teologis semata namun juga sosiologis. Pandangan teologis kadang melahirkan pandangan yang *committed* terhadap teologi kelompoknya saja, sikap ini kadang diiringi dengan pelenyapan teologi kelompok lain, sehingga mengingkari keselamatan umum yang dijanjikan agama. LAKPESDAM mengajak untuk menggunakan pendekatan dialog antar golongan maupun agama, guna mencari titik persamaan bukan mencari mana golongan yang benar dan tidak benar.

Dalam perspektif sosiologis pengetahuan, “kenyataan” dipandang sebagai produk sosial, dan setiap produk sosial bersifat prulal dan dialektis, karenanya menjadi relatif. Sehingga tidak ada “kenyataan” sosial yang sempurna, apalagi suci. Atas dasar paradigma tersebut klaim atas kebenaran doktrin agama tidak bisa dimonopoli oleh orang atau kelompok tertentu. LAKPESDAM mencoba mendorong terciptanya “ruang bebas” untuk mentafsirkan doktrin agama, sehingga tidak lagi bersifat literalis. Dalam beberapa hal pandangan LAKPESDAM nampak berbeda dengan umumnya pandangan kaum radikal, seperti isu tentang jihad, pluralisme, demokrasi, penerapan syari’at Islam serta bentuk dan dasar negara.

Strategi yang dikembangkan LAKPESDAM dalam mentransformasikan gagasan Islam yang kritis dan moderat dilakukan melalui iklan di media televisi, penerbitan jurnal dan buku, dialog melalui radio, serta penguatan jaringan di kampus-kampus, bisa dibaca sebagai sebuah inovasi yang mencerminkan terjadinya dinamika dalam model gerakan, pola-pola tersebut tidak sama dengan pola-pola transformasi gagasan maupun pengetahuan yang umumnya dilakukan oleh NU.

Pencapaian progres tersebut, tidak lepas dari adanya kenyataan bahwa munculnya LAKPESDAM dipengaruhi oleh adanya dua kondisi, yaitu: a) perjalanan sejarah NU, khususnya perjalanan khittah NU yang kembali meneguhkan NU sebagai organisasi sosial keagamaan yang bertumpu pada kegiatan pengembangan masyarakat di semua tingkatan, b) fenomena meningkatnya pendidikan generasi muda NU telah merubah "santri tradisional" menjadi komunitas yang mencitrakan sebuah komunitas ilmiah yang telah "tercerahkan" dan aktif melakukan aksi sosio-kultural sekaligus pembaharuan pemikiran. Munculnya LAKPESDAM tidak lepas dari hadirnya kelas terpelajar muslim yang meskipun berbasis pesantren namun kemudian mereka memperoleh akses pendidikan modern.

Penutup

Berbagai hasil penelitian telah melaporkan hadirnya fenomena sosial dalam bentuk radikalisme berupa teror bom, kerusakan atau konflik sosial keagamaan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan mengatasnamakan agama. Fenomena ini oleh LAKPESDAM dianggap sebagai hal yang destruktif dan mengancam kemajemukan masyarakat. Sikap keagamaan yang intoleran dan moderat ini muncul karena adanya pemahan tertentu atas teks-teks keagamaan yang bersifat literalis, yaitu hanya berpedoman pada teks dan kurang memperhatikan konteks.

LAKPESDAM aktif melakukan gerakan pengembangan wacana keagamaan yang kritis dan moderat, gerakan ini dilakukan disamping sebagai *counter* atas fenomena sikap keberagaman yang intoleran dan radikal, sekaligus memberikan "tafsir" yang dinamis terhadap teks agama dan realitas sosial-budaya sebagai terlihat dalam isi jurnal Tashwirul Afkar. Wacana keagamaan yang kritis dan moderat juga dijadikan sebagai *entry point* dan spirit bagi kerjakerja sosial LAKPESDAM, baik di bidang pendidikan, ekonomi dan sosial-budaya. Adanya "ruang bebas" bagi tafsir yang dinamis atas teks keagamaan ini penting karena gerakan radikalisme umumnya dipengaruhi oleh penafsiran yang literalis.

Desiminasi dan internalisasi nilai-nilai itu dilakukan melalui sejumlah program kegiatan yang inovatif. LAKPESDAM meminjam kata Habermas, telah aktif dalam penciptaan "wilayah publik" yang baru bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Hal ini penting, karena demokratisasi hanya mungkin terjadi jika umat Islam sebagai mayoritas terlibat secara keseluruhan dalam proses tersebut, keterlibatan umat Islam secara masif hanya mungkin terjadi jika ada kebebasan dalam menciptakan arena baru yang partisipatoris dan perubahan yang bersemangat publik. LAKPESDAM juga sejalan dengan Durkheim yang melihat adanya dimensi sosial dalam agama, ada garis paralel antara praktik agama dan praktik sosial, sehingga agama harus mampu membawakan kedamaian dan kebaikan bagi masyarakat dan bukan sebaliknya.

Agama mempunyai peran yang strategis, masyarakat Indonesia menempatkan agama sebagai acuan cara berpikir, bersikap, dan bertindak. Untuk itu hasil penelitian ini mencatatkan beberapa saran bagi pemerintah terkait peran pemerintah dalam hal pembinaan keagamaan, yaitu: a) Mendorong organisasi sosial keagamaan untuk melakukan berbagai strategi peningkatan pemahaman dan sikap keagamaan yang menghargai kemajemukan dalam keyakinan dan perbedaan-perbedaan pemikiran; b) Mendorong terciptanya dialog-dialog wacana keagamaan yang kritis dan dinamis, serta produktif dalam melahirkan wacana keagamaan yang bersemangat pembaharuan sehingga mendukung demokratisasi dan *civil society*.

Daftar Pustaka

- Ghazali, M . 2007. *Prakarsa Perdamaian*. Tashwirul Afkar.
- Tim CRCS, 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Keagamaan 2008*. Yogyakarta: CRCS UGM
- El-Mawa. M, Rahmat. I, Washil I. 2005. *Memberdayakan Warga NU 20 Tahun Perjalanan LAKPESDAM*. Dalam Syadzili. F. (Ed). Jakarta: LAKPESDAM.
- Sugiarto, W. 2009. *Jihad di Mata para Terpidana Teroris Indonesia*. Harmoni, 8.
- Effendi, B. 1998. *Radikalisme Agama*. Jakarta: PPIM
- Sila, Adlin. 2010. *Teori Pengamalan dan Pelayanan Keagamaan*. Makalah dalam Acara Diklat Peningkatan Kompetensi Peneliti. Ciputat. 4 Juli: Pusdiklat Tenaga Teknis Keagamaan Balibang dan Diklat Kementerian Agama.
- Hardiman, F. 1993, *Kritik ideologi Pertauatan Pengetahuan dan Kepentingan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Bruinessen, Martin van. 1994. *NU: Relasi-Relasi Kuasa dan Pencarian Wacana Baru*. Yoyakarta: LKiS.
- Ida, L. 2004. *NU Muda Kaum Progresif dan Skularisme Baru*. Jakarta: Erlangga.
- Effendi, Bachtiar. 2005. *Gerakan Salafi*. Jakarta: Gramedia
- Tim Pusat LP. Ma'arif NU. 2004. *Nahdlatul Ulama Ideologi Garis Politik dan Cita-Cita Pembentukan Umat*. Jakarta: PP LP Ma'arif NU.
- Marijan, K. 1992. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Erlangga.
- NU. 2004. *Hasil-Hasil Keputusan Muktamar NU ke 31*. Jakarta: PBNU.
- Nottingham, K, Elizabeth. 2002. *Agama dan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.

Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah Eks Transmigrasi: Studi Kasus di Kecamatan Sausu Parigi Moutong Sulawesi Tengah

Nuhrison M Nuh

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

The condition of religious harmony in the Sausu Kab district, Central Sulawesi Moutong has been improving with the establishment of Inter Religious Harmony Forum (FKUB) and the Forum for Religious Harmony Brotherhood (FKP). Both is able to create a communication forum of mutual understanding. In the management of both organizations represent all the religious elements in the area. The committees are always involved in religious activities. Whether intentional or not, the relationship between religious leaders and among followers of different religions took place. Intentional relationship took place such as attending a wedding invitation, a funeral ceremony, and religious events which are ceremonial in nature. While it is accidental as it take place in offices, schools, gardens and markets.

Keywords: *social relation, conflick, integration.*

Latar Belakang

Transmigrasi telah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia. Manfaatnya telah dirasakan dan resikonyapun telah dipahami. Nilai tambah bagi pembangunan daerah dan pembangunan bangsa telah

dirasakan, seperti perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang dituju oleh warga transmigrasi. Meskipun demikian dalam beberapa hal terdapat banyak persoalan yang mengiringi program transmigrasi ini.

Di zaman kolonial belum dikenal istilah transmigrasi, yang dipakai pada waktu itu adalah kolonisasi. Ketika itu banyak berdiri perkebunan milik pemerintah kolonial di pulau Sumatera, Kalimantan dan Sulawesi yang memerlukan tenaga buruh murah untuk dipekerjakan. (*Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun (Ed), Jakarta, 1986*). Pemasok buruh murah paling banyak berasal dari pulau Jawa dan Bali. Program pemerintah kolonial ini didasari kebijakan Politik Etis untuk membantu perusahaan yang ada di luar Pulau Jawa dalam memperoleh tenaga buruh. (*Zainuddin Tulie: dalam "Perkembangan Penyelenggaraan Transmigrasi Dalam Upaya Meningkatkan Kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya di Kecamatan Pagayaman Kabupaten Gorontalo"*, (<http://w.w.w.dikti.depdiknas.go.id>).

Pada zaman kemerdekaan, istilah transmigrasi kemudian digunakan dengan pemahaman dan penggunaan yang berbeda. Meskipun begitu, Jawa dan Bali tetap menjadi pemasok penduduk yang akan ditransmigrasikan. Hanya tujuannya yang berbeda. Di zaman Orde Baru, transmigrasi lebih dimaknai sebagai perpindahan penduduk dari daerah yang padat (Jawa dan Bali) ke daerah yang jarang penduduknya karena ingin mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa dan Bali yang sangat padat.

Pada tahun 1969 sampai dengan tahun 1973 di Parigi Departemen Transmigrasi telah berhasil menempatkan 1852 kepala keluarga transmigran berasal dari Bali. Departemen Transmigrasi sangat berhati-hati dalam menempatkan para transmigran: mereka tidak mencampur orang migran yang berasal Bali dengan migran yang berasal dari daerah lain. Pelanggaran aturan *melting pot* ini bukan karena alasan kesukuan tetapi karena alasan keyakinan (agama). Pada kenyataannya orang Bali, yang umumnya beragama Hindu, suka memelihara babi di luar kandang. Hal ini sangat menjengkelkan

migran yang berasal dari Jawa, Madura, Sunda, Bugis dan Sasak, yang umumnya beragama Islam. Untuk menjaga agar kejengkelan itu tidak berkembang menjadi konflik antar umat beragama, Departemen Transmigrasi mengelompokkan orang Bali di perkampungan atau desa yang homogen. Untuk mencegah generasi kedua mengalami kekurangan tanah, para pejabat memutuskan untuk melipatgandakan tunjangan awal. Dengan demikian di Parigi setiap keluarga diberi 1,75 hektar tanah sawah, dan ladang yang luasnya tidak ditentukan. (Charras:1982,163).

Di Sausu, Parigi Moutong migran memperoleh tanah dengan lingkungan alam yang sangat menguntungkan. Tanahnya pada umumnya terdiri dari endapan dan muntahan gunung berapi yang masih baru, menunjukkan karakteristik kimiawi dan fisik yang sangat menguntungkan. Daerah ini terletak pada garis lintang yang sangat dekat dengan garis khatulistiwa, curah hujan merata sepanjang tahun. Seluruh lokasi mirip dengan lembah sempit di pesisir dengan lereng yang landai dan kering. Lembah itu digunakan untuk pembuangan air dari sejumlah besar sungai yang berasal dari pegunungan yang terjal, dengan puncak yang menjulang tinggi lebih dari 2350 meter (Charras, 1982: 179-182).

Pada awal tahun 1980an ditempatkan di Sausu 550 kepala Keluarga (KK) transmigran yang berasal dari daerah: Bali 238 KK, Jawa Tengah 210 KK, Jogja 83 KK, DKI 50 KK dan Sisipan 50 KK, tetapi 81 KK dari Jawa Tengah dipindahkan ke Tambarana sekarang masuk Kecamatan Poso Pesisir. (Wawancara dengan Kepala Desa Sausu Sugianto, di Kantor Desa Sausu,2006).

Dengan bertemunya mereka yang berasal dari suku yang berbeda dan agama yang berbeda pula, memungkinkan terjadinya konflik baik konflik sosial maupun konflik yang berdasarkan agama. Untuk mengetahui bagaimana tingkat kerukunan masyarakat di daerah ini dirasakan perlunya untuk mengadakan penelitian tentang "*Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Kecamatan Sausu Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah*".

Permasalahan yang dikaji melalui penelitian ini adalah : a). Bagaimana pola hubungan antar umat beragama pada masyarakat ex transmigrasi Sausu? b). Sejauh manakah potensi konflik dan integrasi di lingkungan masyarakat ex transmigrasi Sausu? c). Bagaimanakah rumusan yang tepat untuk membina kerukunan beragama di lingkungan masyarakat ex transmigrasi?.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a). Untuk mengetahui pola hubungan antar umat beragama pada masyarakat ex transmigrasi. b). Untuk menemukan potensi-potensi konflik dan integrasi di lingkungan masyarakat ex transmigrasi. c). Untuk merumuskan cara-cara yang tepat dalam membina kerukunan beragama di lingkungan masyarakat ex transmigrasi.

Kerangka Konseptual

Transmigrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dari daerah yang padat penduduknya ke daerah yang kurang padat penduduknya dalam rangka mencari kehidupan baru sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan. Di lain pihak, untuk membantu kekurangan tenaga kerja terutama di sektor pertanian, khususnya pada daerah yang potensial untuk berkembang.

Transmigrasi secara umum dibagi atas dua jenis yaitu transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa (atau spontan). Transmigrasi swakarsa terbagi atas Transmigrasi Swakarsa Berbantuan (TSB) dan Transmigrasi Swakarsa Mandiri (TSM). Dalam penelitian ini yang dijadikan sasaran penelitian adalah transmigrasi umum. (Lihat *DO Studi Tentang Relasi Sosial*, ibid, hal 5).

Datangnya warga transmigrasi yang mempunyai latar belakang sosial budaya yang berbeda dengan masyarakat pemukim pada umumnya jelas menimbulkan masalah bagi terwujudnya kerukunan antar umat beragama. Warga transmigrasi membawa serta sistem keyakinan dan sosial keagamaannya ke daerah baru. Oleh karena itu, dalam program transmigrasi ini pemerintah memfasilitasi pendampingan (advokasi) melalui aparat yang bertugas khusus dalam melakukan fungsi pelayanan transmigrasi maupun dari instansi lintas

sektor terkait, sehingga diharapkan masyarakat yang bermukim telah ada prasarana dasar dan bimbingan awal untuk menuju terciptanya integrasi dan akulturasi dengan warga transmigrasi yang berasal dari berbagai daerah asal dan suku. Dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan pola relasi sosial dalam penelitian ini adalah pola relasi yang bersifat integrativ antar umat beragama pada masyarakat transmigrasi. (*DO Studi tentang Relasi Sosial, ibid, hal 9*).

Metodologi

Bentuk penelitian ini merupakan *penelitian kualitatif*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap tokoh agama, aparat pemerintah, dan warga masyarakat. Untuk melengkapi data dan informasi dilakukan dengan telaah dokumen, kepustakaan dan sumber-sumber dari instansi terkait. Kemudian dilakukan tahapan-tahapan pengolahan dan analisis data, sehingga menjadi sebuah hasil kajian yang utuh.

Gambaran Umum Wilayah

Kecamatan Sausu merupakan salah satu kecamatan dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Provinsi Sulawesi Tengah. Secara geografis terletak pada 122 derajat Bujur Timur. Jarak Kecamatan Sausu dengan Ibukota Provinsi sejauh 153 km yang dapat ditempuh selama 4 jam dengan kendaraan mobil, dan dengan ibukota Kabupaten sejauh lebih kurang 50 km, yang dapat ditempuh selama 1,5 jam.(*BPS Kecamatan Sausu, Kecamatan Sausu Dalam Angka, 2004*).

Secara administratif Kecamatan Sausu membawahi 8 buah desa (sebelum pemekaran 13 desa), yaitu: Desa Maleale, Sausu Toure, Sausu Torono, Sausu Trans, Malakosa, Suli, Balinggi dan Desa Pakareme. Desa yang paling jauh jaraknya dengan ibukota kecamatan adalah Desa Makeale dengan jarak 22 km, sedangkan desa yang paling dekat adalah Desa Sausu Torono dengan jarak 4 km. Sebagian besar pejabat di Kecamatan Sausu dipegang oleh orang Islam (*BPS Kecamatan Sausu, Ibid, 2004*).

Keadaan tanah di kecamatan ini terdiri dari tanah dataran, perbukitan dan pegunungan dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 1700 meter. Sebagian besar tanah terdiri dari tanah dataran. Curah hujan tergolong tinggi, dengan jumlah hari hujan sebanyak 108 hari dengan jumlah curah hujan 1,120 milimeter.

Sumber daya alamnya terdiri dari tanah yang subur dan tersedianya beberapa sungai besar dan kecil yang dimanfaatkan untuk bendungan atau irigasi guna mengairi sawah, sehingga sangat menunjang penghasilan penduduk. (*Ibid*, 2004).

Pada tahun 2005 jumlah penduduk Kecamatan Sausu berjumlah 35.333 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 18.298 jiwa dan perempuan 17.035 jiwa, menempati wilayah seluas 902,75 km. Kecamatan ini terbagi dalam 8 buah desa, 48 dusun, 46 rukun warga (RW) dan 133 rukun tetangga (RT). Desa yang paling banyak penduduknya adalah desa Sausu Trans (Ibukota Kecamatan) sedang yang paling sedikit penduduknya adalah desa Sausu Pakareme, sebuah desa yang baru dimekarkan. (*Ibid*, 2004)

Sebagian besar penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani. Selain sawah, rata-rata mereka mempunyai kebun coklat dan cengkeh. Sekarang ini banyak sawah yang dialih fungsikan menjadi kebon coklat, karena dianggap lebih menguntungkan.

Sarana pendidikan yang tersedia antara lain SD (negeri dan swasta) 30 buah, dengan tenaga guru berjumlah 243 orang, dan jumlah murid 4.292 orang. Selain itu terdapat pula 4 buah SMP, 4 buah SMA, 1 buah MI, 1 buah MTsN dan 1 buah Aliyah. (BPS Kecamatan Sausu, 2004).

Di bidang pendidikan dikuasai oleh orang Bali. Kepala Dinas Dikjar tingkat kecamatan dipegang oleh orang Bali, demikian pula sebagian besar guru berasal dari suku Bali. Menurut informasi tokoh masyarakat setempat, orang Bali sangat mementingkan pendidikan bagi anak-anaknya, sehingga anak-anak orang Bali banyak yang sudah menjadi sarjana. Menurut perkiraan mereka, 10 tahun ke depan aparat pemerintahan akan dipegang oleh orang Bali. Sekarang ini 3

orang dari 4 orang anggota DPRD Kabupaten Parigi Moutong berasal dari suku Bali. Kebanyakan anak orang Bali, sekarang menjadi polisi di Palu. (*Ahmad Yani, Ibid, 2006*)

Penduduk Kecamatan Sausu bila dilihat dari pemeluk agama sebagian besar beragama Hindu (50,43%), kemudian Islam (33,64%), Kristen (10,09%), Katolik (5,25%), dan Buddha (0,59%). Sedangkan untuk Desa Sausu dari jumlah penduduk sebanyak 6.847 jiwa, sebagian besar beragama Islam (4.448 jiwa), Hindu (2.027 jiwa), Kristen (225 jiwa), Katolik (145 Jiwa) dan Buddha (7 jiwa). (*KUA Kecamatan Sausu, Data Keagamaan Kecamatan Sausu, 2005*).

Di kalangan umat Islam terdapat kelompok organisasi Al-Khairat, Muhammadiyah dan LDII. Menurut keterangan Kepala Desa Sausu, keberadaan LDII di desa ini tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Sedangkan di kalangan agama Kristen terdapat Gereja Pantekosta, GKST, GPI Donggala, Advent dan Gereja Elim. (*KUA Kecamatan Sausu, Ibid, 2005*).

Tempat ibadah sebagai tempat pembinaan umat, dimiliki umat Islam berupa masjid 25 buah, mushalla 26 buah, Gereja (Kristen/Katolik) 26 buah, Pura 61 buah. Untuk Desa Sausu Trans terdapat 4 buah masjid, 11 buah mushalla, 5 buah gereja Kristen, dan 3 buah Pura. Di desa ini telah berdiri Forum Kerukunan Umat Beragama, yang diketuai oleh Sulaiman Jalil, seorang tokoh yang sangat disegani, karena dia termasuk orang yang terkaya di desa Sausu Trans. Di kalangan penganut Kristen terdapat perkumpulan Oikumene, yang anggotanya terdiri dari berbagai denominasi yang ada di desa tersebut. (*KUA Kecamatan Sausu, Ibid, 2005*)

Hubungan antar tokoh agama di desa ini sangat baik. Melalui FKUB para tokoh agama ini setiap satu bulan sekali bertemu, bahkan ketika terjadi kerusuhan di Poso, mereka setiap hari bertemu. Demikian pula hubungan antar warga yang berbeda agama dan etnis terjalin dengan baik, bahkan mereka saling mengunjungi dalam berbagai perayaan keagamaan yang bersifat seremonial. (*wawancara dengan Fathul Khoiri, Muhammadiyah*).

Pola Relasi Sosial Umat Beragama

Strategi Pemeliharaan Kerukunan

Masyarakat ex transmigrasi yang berdomisili di Kecamatan Sausu, sebagian besar merupakan para migran yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Oleh sebab itu penduduknya merupakan masyarakat yang majemuk baik dilihat dari segi suku maupun agama. Dalam masyarakat yang majemuk, sangat mungkin terjadinya konflik baik konflik latent maupun manifest. Oleh sebab itu upaya untuk memelihara kerukunan dalam masyarakat yang demikian itu, diperlukan berbagai strategi.

Strategi pertama adalah mendirikan Forum Kerukunan Umat Beragama disingkat FKUB. Forum ini di ketuai oleh H.Sulaiman Jalil yang berasal dari Bugis, ia merupakan tokoh masyarakat yang sangat disegani di Kecamatan Sausu, karena ia mempunyai akses ke pemerintahan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Melalui forum ini para pemuka agama dapat bertemu, dan berusaha memecahkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan masalah hubungan antar umat beragama. Forum ini sangat aktif ketika terjadi konflik di Poso. Mereka bersama-sama menjaga daerah perbatasan dengan desa Tambarana Kecamatan Poso Pesisir. Setiap orang yang akan masuk ke Sausu diperiksa identitasnya. Bagi mereka yang mencurigakan langsung disuruh pergi meninggalkan wilayah tersebut. Bagi mereka yang mempunyai identitas yang jelas ditampung dan diberi bantuan seperlunya. Dalam setiap upacara keagamaan para tokoh ini saling mengunjungi, sehingga menjadi contoh bagi umatnya masing-masing. (*wawancara dengan Ketua FKUB H.Sulaiman Jalil, tokoh masyarakat yang sangat berpengaruh di Kecamatan Sausu*).

Untuk menyatukan mereka yang berbeda suku didirikan Forum Kerukunan Persaudaraan disingkat FKP. Melalui forum ini disatukan berbagai organisasi yang bersifat kesukuan. Di daerah Sausu terdapat berbagai organisasi kesukuan antara lain: Kerukunan Keluarga Tanah Toraja (KKT); Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS);

Kerukunan Keluarga Sami Kalo (Jogja) dan Kerukunan Keluarga Jawa. Tujuan dari organisasi ini adalah untuk meningkatkan silaturahmi dan menciptakan rasa kekeluargaan yang semakin akrab. Anggota forum ini bertemu setiap bulan, sambil melakukan arisan keluarga. Forum ini berusaha memecahkan berbagai persoalan umum yang dihadapi oleh masyarakat. (*wawancara dengan Kepala Desa Sausu, Sugianto*).

Strategi lain yang digunakan adalah melibatkan semua unsur agama dalam berbagai organisasi kemasyarakatan. Seperti dalam kepengurusan PGRI tingkat Kecamatan, ketuanya dari Islam, sekretarisnya dari Hindu, anggotanya dari Kristen dan Katolik. Begitu pula dalam panitya hari-hari besar nasional, semua unsur agama dilibatkan. (*wawancara dengan Drs. Soim, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sausu: 2006*).

Bahkan dalam setiap event keagamaan tingkat kabupaten yang diadakan di Kecamatan Sausu, semua umat beragama dilibatkan. Sebab acara tersebut menyangkut nama baik daerah mereka, bila dilihat oleh daerah lain.

Ketika diadakan MTQ tingkat kabupaten di Kecamatan Sausu tahun 2005, semua umat beragama ikut terlibat, sebab berdasarkan keputusan rapat, setiap desa harus menyumbang Rp 15.000.000,-. PHDI Kecamatan Sausu secara khusus menyumbang Rp 30.000.000,-. Keberanian Camat H. Ahmad Yani S.Pd, M.Si melakukan hal tersebut, mendapat pujian dari Bupati Parigi Moutong, sebab hal tersebut belum pernah terjadi di kecamatan lain di kabupaten tersebut. (*Ahmad Yani, op cit, 2006*).

Rintisan lain yang dilakukan oleh Camat Sausu adalah melakukan upacara keagamaan secara bersamaan di tanah lapang, yang dihadiri oleh umat dari berbagai agama. Pada waktu itu kebetulan peringatan hari Maulid Nabi, Hari Raya Nyepi dan Paskah jatuh pada hari yang berdekatan. Pada acara tersebut pemuka agama Islam, Hindu dan Kristen/Katolik berceramah secara bergiliran. Melalui acara tersebut menurut Camat, paling tidak warga yang berbeda agama tersebut

dapat mengenal ajaran agama lain, sehingga dapat menumbuhkan sikap saling hormat menghormati terhadap agama lain. (wawancara dengan Camat Sausu, H.Ahmad Yani, 2006).

Pola Relasi

Pola relasi sosial umat beragama dapat berlangsung dalam berbagai aktivitas sosial dan keagamaan. Relasi sosial diantara mereka yang berbeda suku dan agama di daerah ini berlangsung dengan baik. Belum terjadi konflik berdasarkan agama maupun suku. Bila terjadi konflik hanya bersifat perorangan. Berdasarkan hasil pengamatan relasi sosial diantara mereka yang berbeda agama tersebut berlangsung di pasar, di sekolah, di tempat kerja, upacara lingkaran hidup, upacara keagamaan dan kegiatan gotong royong.

Di pasar tradisional umpamanya, terjadi relasi sosial diantara mereka yang berbeda suku dan agama. Para pedagang di pasar ini terdiri dari mereka yang berasal dari suku dan agama yang berbeda, begitu pula para pembelinya. Mereka dapat menyatu dan berdampingan tanpa ada sekat-sekat tertentu berdasarkan suku maupun agama. Para pedagang tersebut saling kenal mengenal, karena hal tersebut berlangsung secara kontinu.

Relasi sosial juga berlangsung di bidang pendidikan. Di sekolah baik murid maupun gurunya terdiri dari mereka yang berbeda suku dan agamanya, meskipun demikian mereka dapat bergaul, berteman dan bersahabat dengan baik Guru dalam mengajar tidak pernah membeda-bedakan murid-muridnya berdasarkan suku dan agamanya. Mereka diperlakukan sama, mereka dinilai sesuai dengan kecerdasan masing-masing, bukan berdasarkan suku atau agamanya. Pergaulan diantara guru yang berbeda suku dan agamanya juga terjalin dengan baik. Bahkan yang menarik adalah di Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah, pernah orang Hindu menyumbangkan tenaganya, dengan mengajar pelajaran matematika dan pendidikan jasmani. (*Wawancara dengan Kepala Dinas Dikjar, I.Made Sandrya, S.Pd, dan Drs Soim, Kepala Madrasah Aliyah Negeri Sausu:2006*).

Interaksi diantara mereka yang berbeda agama dan suku terjadi juga ditempat pekerjaan. Membersihkan rumput dan memetik coklat tidak selalu dikerjakan sendiri, bila kebun yang dimiliki terlalu luas, maka biasanya untuk mengerjakan kebun tersebut diupahkan kepada orang lain. Orang Bali biasanya mempunyai kebun yang cukup luas, maka untuk menggarap kebunnya, ia mempekerjakan mereka yang berasal dari suku Jawa, dan beragama Islam. Begitu pula sebaliknya, orang Bali yang tidak mempunyai kebun yang cukup luas, mengerjakan kebun milik orang Jawa yang kebunnya cukup luas. Pertemuan yang berlangsung cukup intens, hampir setiap hari selama mengerjakan kebun tersebut, menciptakan hubungan yang baik di antara mereka. Sebab di sini bertemu dua kepentingan yang sama, disatu pihak membutuhkan pekerjaan, sedangkan di pihak lain membutuhkan tenaga kerja. Begitu juga di kantor instansi pemerintah, tidak semua pegawainya berasal dari suku dan agama yang sama. Di kantor camat, ketika peneliti berkunjung kesana didapati pegawai yang berasal dari Toraja dan beragama Kristen. Komandan Polsek Sausu beragama Kristen, sedangkan stafnya banyak yang beragama Islam, demikian pula di kantor Dinas Dikjar, kepalanya beragama Hindu, stafnya kebanyakan beragama Islam. Semuanya dapat bekerjasama bahu membahu dalam menjalankan tugas mereka dengan baik. (*Ibid*, 2006).

Pada upacara lingkaran hidup di antara mereka yang berbeda agama dan suku saling mengundang dan yang diundang selalu berusaha untuk menghadiri undangan tersebut. Ketika terjadi upacara perkawinan, khusus untuk orang Bali, sudah diatur sedemikian rupa. Biasanya undangan untuk sesama orang Bali dan non Bali dibedakan waktunya. Makanan yang dihidangkan juga berbeda, untuk orang Islam biasanya makanan dimasak dan dihidangkan oleh orang Islam. Sedangkan bila orang Islam, yang mengundang orang Bali, tidak ada persoalan mengenai makanan yang akan dihidangkan.

Dalam upacara kematian mereka juga saling menghadiri, dan pada kegiatan tersebut mereka saling bantu membantu, baik berupa material maupun tenaga. Mereka turut mendirikan tenda, membuat

nisan dan bahkan turut menggotong mayat untuk diantar ke kuburan. Hanya pada kegiatan yang bersifat ibadah keagamaan, mereka tidak turut serta. (*wawancara dengan Kepala Desa Sausu Trans, Fathul Khoiri, dan I Made Sandrya: 2006*).

Setiap agama mempunyai hari raya. Dalam setiap hari raya terdapat dua aspek kegiatan, yaitu kegiatan ritual (ibadah) dan seremonial (upacara). Pada kegiatan ibadah yang diadakan di masjid, gereja dan pura, hanya dihadiri oleh umat masing-masing. Tetapi dalam perayaan yang bersifat bukan ibadah seperti acara halal bi halal, bagi umat Islam, maka umat lainnya ikut hadir untuk mengucapkan selamat "Idul Fitri" dan saling bermaaf-maafan. Selain itu mereka berkunjung ke rumah-rumah tetangga dan teman, untuk melakukan hal yang sama. Sebelum upacara itu berlangsung mereka juga mengirim makanan kepada para tetangga sekitar, termasuk mereka yang berlainan agama. Bahkan menurut keterangan I Made Sandrya, yang selain menjabat sebagai Kepala Dinas Dikjar, juga menjabat sebagai Ketua PHDI Kecamatan Sausu, dalam upacara Ngaben kolektif dan upacara peresmian Pura, panitianya selalu melibatkan orang Islam dan Nasrani.

Dalam peringatan hari-hari besar yang bersifat nasional, mereka juga saling bahu membahu untuk merayakannya. Masing-masing suku berusaha menyumbangkan keseniannya yang terbaik, untuk memeriahkan acara tersebut. Hal itu sangat tampak dalam memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam memperingati hari Proklamasi 17 Agustus, biasanya diadakan pertandingan olahraga, antar desa maupun antar RT, pada kesempatan itu mereka yang berbeda agama dan suku berbaur menjadi satu untuk membela desa dan RT -nya masing-masing. Panitia peringatanpun biasanya terdiri dari unsur-unsur agama yang terdapat di kecamatan dan desa tersebut. (*Wawancara dengan Drs. Moh. Soim, dan Nasikun, anggota BPD Desa Sausu Trans:2006*).

Relasi sosial juga terjadi dalam kegiatan gotong royong. Kegiatan gotong royong dilakukan dalam hal membersihkan lingkungan (di daerah ini digalakkan jum'at bersih), membangun rumah,

membersihkan gorong-gorong, dan membersihkan kebun tetangga. Pada kegiatan gotong royong tersebut diikuti oleh mereka yang berasal dari berbagai suku dan agama. Melalui kegiatan semacam itu mereka dapat berkenalan, menggali pengalaman dari masing-masing pihak, yang dapat dipetik menjadi contoh dalam kehidupannya sendiri. Kegiatan demikian dapat menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan. (*wawancara dengan Kepala Desa Sausu Trans, Fathul Khoiri dan I Made Sandrya: 2006*).

Integrasi

Ketika para transmigran pertama kali datang, telah ditekankan oleh para aparat Departemen Transmigrasi dalam hal ini Kepala UPT, agar mereka dapat bersatu membangun daerahnya. Tanpa persatuan sangat sulit untuk membangun daerah mereka yang saat itu masih sangat terbelakang, karena berbagai fasilitas sosial dan ekonomi masih sangat terbatas. Menurut Nasikun salah seorang petugas transmigrasi memberikan kepanjangan kata Transmigrasi sebagai berikut: *T (inimbang), R(ekoso), A(luhung), N(ekad), S(asmito), M(akarya), I (n), G(apuraning), R(eboisasi), A(ntoro), S(asuene), I(jih urip)*; yang artinya: daripada menderita lebih baik berkarya di depan gapura reboisasi selama masih hidup. Jadi yang ditekankan adalah bekerja dan bekerja demi untuk kebahagiaan di masa datang. Selain itu selalu ditekankan bahwa *tujuan dari program transmigrasi adalah untuk mengintegrasikan suku, agama, ras dan golongan menjadi satu*, dan hal itu dihayati betul oleh para transmigran.

Selain itu menurut Fathul Khoiri, kepada masyarakat selalu ditekankan perasaan memiliki dan membangun daerah mereka, agar sejajar dengan daerah lain. Agar daerah dapat dibangun diperlukan adanya persatuan dan kebersamaan. Kata Khoiri orang Toraja bilang: Kerusakan Poso agar dapat dijadikan pelajaran bagi kita di Sausu. Kita datang ke daerah ini dalam rangka mencari makan, kalau terjadi kerusakan maka akan sulit untuk bekerja dengan tenang, maka ciptakanlah ketenangan dalam masyarakat dengan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Berkembangnya dua budaya dominan mendukung kehidupan harmoni dalam masyarakat. Di Desa Sausu Trans terdapat dua suku yang dominan yaitu Bali dan Jawa Tengah, kedua suku ini dikenal sebagai suku yang sangat tolerans terutama dalam hal beragama. Agama Hindu sebagai agama yang dianut mayoritas orang Bali adalah sebuah agama yang non misionaris. Orang Hindu sangat patuh pada pemerintah dan pimpinan agamanya, berdasarkan ajaran *Catur Warna*.

Dalam ajaran catur warna orang dibedakan berdasarkan profesi masing-masing. Tidak boleh orang biasa berbicara masalah agama, karena itu tugasnya kaum brahmana yang diwadahi oleh "Parisada". Orang Hindu akan tunduk pada apa yang dikatakan oleh Pimpinan Parisada. Selain itu orang Bali cenderung mengalah, bukan karena takut berkelahi, tetapi karena tujuan mereka datang ke daerah ini adalah dalam rangka mencari kesejahteraan. Apalagi dalam agama Hindu dikenal dengan hukum *karmapala*, siapa yang berbuat dia yang memetik. Sedangkan orang Jawa selalu mengembangkan budaya rukun dalam berbagai aspek kehidupan.

Contoh dari para pemuka agama yang saling mengunjungi dalam setiap upacara keagamaan yang bersifat ceremonial, memberikan contoh yang baik kepada masing-masing pengikutnya. Apalagi para pemuka agama dalam setiap ceramahnya selalu menekankan akan pentingnya kerukunan, dan waspada terhadap berbagai provokasi orang yang datang dari luar. Sehingga tak heran kalau daerah ini pernah menjadi sasaran kunjungan studi banding anggota DPRD dari Kabuapten Tarakan Provinsi Kalimantan Timur. Mereka heran mengapa daerah yang majemuk dari segi agama, dan berbatasan dengan daerah konflik (Poso), tetapi tidak terimbas konflik.

Dibuatnya berbagai kesepakatan diantara mereka, juga merupakan faktor yang mendukung terciptanya integrasi dalam masyarakat. Sudah disepakati oleh mereka tidak boleh adanya perkawinan berbeda agama. Kalau ada mereka yang berbeda agama akan menikah maka salah satu pihak harus mengalah, dan itu berdasarkan kesepakatan antara calon pengantin pria dan calon

pengantin wanita, dan orang tua masing-masing tidak boleh turut campur. Kalau ada pesta perkawinan orang Bali, dan mengundang orang Islam, maka penyembelihan hewan, dan memasak makanan yang akan dihidangkan dilakukan oleh orang Islam.

Faktor lain yang mendukung integrasi masyarakat di daerah ini, adalah faktor ekonomi. Di daerah Sausu ini meskipun masalah ekonomi di dominasi oleh orang Bali, tetapi karena kehidupan ekonomi masyarakat cukup terpenuhi, maka didaerah ini faktor ekonomi bukan menjadi sumber konflik, tetapi justru menjadi sumber integrasi. Tidak terdapat kesenjangan ekonomi yang terlalu tajam antara mereka yang berpunya dan yang kurang berpunya. Apalagi kalau dilihat orang terkaya di daerah ini, justru orang Islam, yang juga berasal dari suku Bali.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik

Sebagaimana diuraikan sebelumnya di daerah ini belum pernah terjadi konflik antar umat beragama, yang terjadi hanyalah konflik antar pribadi yang disebabkan oleh masalah ekonomi maupun sosial.

Yang banyak terjadi adalah masalah tanah. Setiap transmigran diberi tanah seluas 2 hektar. Karena kebutuhan sebagian tanah itu dijual kepada orang lain, ketika itu anak-anaknya masih kecil. Jual beli tersebut tidak disertai surat menyurat. Ketika orang tuanya meninggal, maka anak-anaknya yang tidak mengetahui bahwa tanah orang tuanya tersebut sudah dijual, menuntut si pembeli untuk mengembalikan tanah yang digarapnya tersebut kepada mereka, sehingga terjadilah perselisihan. Pemerintah sangat sulit menyelesaikan kasus semacam ini, karena kedua belah pihak tidak mempunyai surat-surat yang autentik.

Faktor penyebab konflik lainnya adalah: adanya suku tertentu yang masih mengembangkan budaya dan adat istiadat tempat asalnya, mereka tidak mau mengikuti peraturan-peraturan yang dibuat bersama, tidak mau membayar iuran, tidak mau siskamling, dan tidak mau bergotong royong. (*Sugianto, op cit, 2006*).

Di Desa Sausu Piore, penduduknya sebagian besar terdiri dari penduduk asli suku Kaili, mengeluhkan adanya pemotongan babi dan kotoran babi yang dibuang ke sungai. Sedangkan air sungai tersebut mengalir ke daerah mereka, pada hal air sungai itu menjadi sumber air bersih bagi mereka untuk diminum. Hal ini perlu pengaturan dari pihak pemerintah. Selain itu adanya keluhan dari penduduk asli tentang pemotongan beras raskin. Beras yang mereka terima tidak sesuai dengan uang yang mereka bayar, selain itu penentuan orang yang berhak menerima raskin juga dianggap kurang berpihak kepada mereka yang membutuhkan. (*Wawancara dengan Nasikun, 2006*).

Pemuda yang suka mabuk-mabukan juga merupakan salah satu penyebab munculnya konflik antar warga. Tetapi konflik semacam ini segera dapat dicegah, dengan menyerahkan masing-masing mereka yang bertikai, kepada tokoh masyarakat setempat dan orang tuanya. Masalah perpindahan agama, kalau tidak dapat disikapi dengan arif bisa menimbulkan konflik. Ketika perekonomian masih sulit, banyak warga transmigran asal Jogjakarta yang pindah ke agama lain. Demikian pula penggantian kepala keluarga banyak berasal dari mereka yang beragama non Islam. Tetapi hal tersebut menurut Nasikun, tidak dipersoalkan oleh masyarakat. Masyarakat memandang agama apa saja yang dipeluk dipersilahkan saja, yang penting ajaran agama tersebut diamalkan. (*Nasikun, Ibid*)

Perbedaan paham keagamaan bisa memicu munculnya konflik. Dulu terjadi semacam ketegangan antara pengikut Al-Khairat dengan pengikut Muhammadiyah. Sekarang ketegangan tersebut telah mencair, bahkan Al-Khairat telah mengikuti pola pengajian yang diadakan oleh Muhammadiyah. (*Wawancara dengan Fathul Khoiri, 2006*).

Penutup

Pola Relasi sosial antar pemuka agama yang berbeda dan antar penganut agama yang berbeda berlangsung dengan baik. Relasi tersebut berlangsung secara disengaja maupun tidak disengaja. Hubungan yang berlangsung secara sengaja antara lain memenuhi

undangan pernikahan, menghadiri upacara kematian, dan menghadiri upacara keagamaan yang bersifat seremonial. Sedangkan hubungan yang berlangsung secara tidak disengaja, adalah di kantor, sekolah, kebun dan di pasar.

Potensi konflik antar umat beragama dan antar suku di daerah ini tergolong kecil, kebanyakan konflik bersifat individual bukan komunal. Sedangkan potensi integrasi di daerah ini sangat besar. Faktor utama adalah adanya budaya dominan yang mendukung terwujudnya kerukunan, faktor ekonomi yang tidak menimbulkan kesenjangan baik berdasarkan suku maupun agama, dan pemuka agama yang bersikap terbuka dan mempunyai paham keagamaan yang inklusif.

Mengenai kerukunan, menurut masyarakat setempat hendaknya mampu menciptakan kerukunan yang dinamis, yaitu kehidupan yang rukun tetapi disertai adanya kerjasama dalam beberapa aspek kehidupan masyarakat. Untuk memelihara kerukunan pola yang dikembangkan sekarang dengan memberi peran kepada pemuka agama dan masyarakat untuk membina umatnya masing-masing, sudah cukup berhasil.

Strategi pemeliharaan kerukunan di Kecamatan Sausu yang dibuat pemerintah dan masyarakat setempat sudah sangat efektif. Strategi tersebut berupa pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kerukunan Persaudaraan (FKP). Melalui kedua forum ini komunikasi antar pemuka agama dan pemuka masyarakat berlangsung, sehingga tercipta saling pengertian. Selain itu melibatkan semua perwakilan agama dalam kepengurusan organisasi kemasyarakatan, melibatkan semua umat beragama dalam kepanitiaan upacara keagamaan, dan yang cukup fenomenal adalah mengadakan upacara keagamaan secara bersamaan. Semua strategi itu mendapat dukungan dari semua pemuka agama.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kecamatan Sausu, Kecamatan Sausu Dalam Angka, 2004.
- Kantor Urusan Agama Kecamatan Sausu, Data Keagamaan Kecamatan Sausu, 2005.
- Sri Edi Swasono dan Masri Singarimbun (Ed), 1986. Transmigrasi di Indonesia (1905 – 1985), Jakarta, UI Press,
- Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah kepada Bupati Parigi Moutong di Parigi, 2006.
- Tim Peneliti. 2006. Kajian Tentang Pola Relasi Sosial Umat Beragama Pada Wilayah Transmigrasi, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta.
- Tulie, Zainuddin dalam “Perkembangan Penyelenggaraan Transmigrasi Dalam Upaya Meningkatkan Kehidupan Ekonomi dan Sosial Budaya di Kecamatan Paguyaman Kabupaten Gorontalo”, ([http:// w.w.w. dikti. Depdiknas. go.id](http://w.w.w.dikti.Depdiknas.go.id)).

Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Propinsi Kalimantan Tengah

Kustini

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This study is to reveal policy of at MORA at Central and at the Office of Central Kalimantan Province; about the management of handling funds for the synagogue and religious organizations; social impact of religious assistance funds for the development of religious life; as well as the factors supporting and inhibiting the implementation of the program. By using the theory of public policy, this study was designed as an evaluative study with data collection through techniques of document review, interviews, and observations. One result of this study indicates that the impact of aid can only be viewed until the outcome. While further impact which is the social change among the society, cannot be fully detected through this research.

Keywords: *Ministry of Religious Affairs, help, synagogue, religious social institutions.*

Latar Belakang

Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan keagamaan, Kementerian Agama Pusat maupun provinsi memiliki program dana bantuan sosial keagamaan yang antara lain dimaksudkan untuk peningkatan peran dan fungsi rumah

ibadat baik sebagai tempat ibadat maupun tempat pembelajaran dan pencerahan umat (Lihat Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/325/Tahun 2009 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan Pembangunan Masjid). Di samping tujuan secara umum tersebut, bantuan dimaksudkan sebagai stimulus bagi masyarakat sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan atau pemeliharaan rumah ibadat

Selain rumah ibadat yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas kehidupan beragama masyarakat, tidak kalah pentingnya adalah fungsi lembaga sosial keagamaan. Lembaga ini merupakan media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya sekaligus menggalang berbagai potensi yang dimiliki para anggota. Seperti juga rumah ibadat, maka bantuan untuk lembaga sosial keagamaan lebih merupakan stimulus bagi masyarakat untuk memberi perhatian lebih pada lembaga sosial kemasyarakatan.

Sejauh ini belum banyak studi evaluasi terhadap bantuan tersebut baik dari sisi penentuan penerima bantuan maupun dari sisi pemanfaatan bantuan. Studi tentang itu dirasa penting sebab meskipun bantuan secara nyata telah memberi manfaat bagi penerima, masih ada beberapa pihak yang mempertanyakan bantuan tersebut baik dengan maksud untuk memberi masukan agar bantuan tersebut efektif atau dalam rangka mencari celah-celah kelemahan Kementerian Agama (Wawancara dengan Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 26 April 2010).

Secara teoritis, studi evaluasi terhadap kebijakan, termasuk kebijakan dalam memberikan bantuan, sangat penting untuk kepentingan keberlanjutan (*sustainable*) suatu program. Dengan melakukan evaluasi, kebijakan-kebijakan ke depan akan lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan yang sama (Subarsono, 2009: 123).

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang Evaluasi Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Provinsi Kalimantan Tengah. Permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam pertanyaan sebagai berikut. *Pertama*, bagaimana kebijakan

Kementerian Agama di Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan. *Kedua*, bagaimana pengelolaan bantuan dana rumah ibadat dan ormas keagamaan Kementerian Agama oleh penerima bantuan. *Ketiga*, bagaimana dampak sosial bantuan dana keagamaan bagi pengembangan kehidupan keagamaan. *Keempat*, apa saja faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program bantuan dana rumah ibadat dan ormas keagamaan.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: a). Mengetahui kebijakan Kementerian Agama di Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah dalam pelaksanaan program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan; b). Mengetahui pengelolaan dana bantuan Kementerian Agama untuk rumah ibadat dan ormas keagamaan oleh penerima bantuan; c). Mengetahui dampak sosial dana bantuan keagamaan bagi pengembangan kehidupan keagamaan; dan d). Mengetahui faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penyempurnaan pedoman program bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan bagi unit-unit pemberi bantuan di lingkungan Kementerian Agama; serta bahan bahan kelengkapan dan perbandingan bagi hasil audit yang dilaksanakan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama.

Kerangka Konseptual

Dalam berbagai literatur tentang ilmu administrasi negara, kebijakan yang ditetapkan pemerintah, termasuk kebijakan terkait dengan bantuan untuk rumah ibadat dan lembaga sosial keagamaan, disebut dengan kebijakan publik (*public policy*). Menurut Thomas Dye (1981, dalam Subarsono, 2009) kebijakan publik adalah *whatever governments choose to do or not to do*. (<http://www.scribd.com/doc/8524602/Ringkasan-Kebijakan-Publil>. Diakses 10 Maret 2011).

Dari definisi tersebut terlihat bahwa pengertian kebijakan publik mencakup sesuatu yang sangat luas karena di dalamnya membahas

apa yang dilakukan maupun tidak dilakukan pemerintah ketika menghadapi suatu masalah publik. Pengertian tersebut sedikitnya menyebutkan dua unsur dalam kebijakan publik yaitu: a). kebijakan publik dibuat oleh badan pemerintah, bukan organisasi swasta; b). kebijakan publik menyangkut pilihan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan oleh badan pemerintah.

Sementara itu David Easton (dalam Subarsono, 2009) melihat bahwa ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai. Oleh karena itu Subarsono (2009) berpendapat bahwa suatu kebijakan publik tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang berlaku dalam masyarakat. Jika suatu kebijakan bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan memperoleh penolakan ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik-praktik yang berkembang di masyarakat sehingga mudah untuk diimplementasikan.

Untuk mengetahui apakah suatu kebijakan publik, dalam hal ini program terkait bantuan di lingkungan Kementerian Agama, berjalan efektif atau tidak diperlukan penelitian evaluasi. Melalui penelitian ini dapat dianalisis tingkat kinerja suatu kegiatan. Agar evaluasi dapat maksimal, maka hendaknya dilakukan ketika suatu kebijakan sudah berjalan cukup lama. Penelitian evaluasi ini dianggap penting karena setidaknya memiliki beberapa tujuan yang relevan dengan program bantuan yaitu: a). menentukan kinerja suatu kegiatan; b). mengukur tingkat efisiensi; c). mengukur tingkat keluaran; d). Mengukur dampak kebijakan; e). untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan; f). bahan masukan/input untuk kebijakan yang akan datang. Dengan demikian, penelitian untuk melakukan evaluasi kebijakan memiliki tujuan yang sangat luas antara lain untuk mengetahui dampak kebijakan, perubahan perilaku, atau terjalinnya hubungan antara berbagai proses terkait kebijakan. (Subarsono. 2009: 121). Melalui evaluasi kebijakan juga dapat diketahui keluaran (output) dari kebijakan tersebut (Hovland, 2010).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi (*evaluation research*) terhadap kebijakan publik yaitu program bantuan dana sosial keagamaan di lingkungan Kementerian Agama. Penelitian evaluasi merupakan salah satu tipe dari *applied research* yang mencoba menetapkan bagaimana sebuah program atau kebijakan berjalan atau mencapai tujuan (Neuman: 2003; 534). Penelitian kebijakan dikonsentrasikan pada evaluasi suatu program atau intervensi terhadap sebuah organisasi (Bryman, 2004; 40) dalam hal ini Kementerian Agama sebagai pelaksana program dana bantuan terhadap rumah ibadat dan lembaga sosial keagamaan.

Lokasi penelitian adalah wilayah Provinsi Kalimantan Tengah sebagai wilayah kerja Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Subyek penelitian adalah komunitas penganut agama Islam dan Kristen yang memperoleh bantuan dana keagamaan baik dari Departemen Agama Pusat yaitu Direktorat Urusan Agama, maupun bantuan yang berasal dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dari segi waktu, bantuan yang menjadi fokus penelitian ini adalah bantuan yang diberikan pada tahun 2009.

Sebagai sebuah penelitian evaluatif, maka data yang dikumpulkan dapat berupa data kualitatif yang berasal dari studi lapangan di lokasi tempat penerima bantuan, foto-foto bangunan rumah ibadat penerima bantuan, studi dokumen terhadap berbagai kebijakan terkait dengan bantuan maupun wawancara terbuka dengan informan baik penerima bantuan atau penyelenggara program. (Neuman: 2003: 527).

Wawancara (*interview*) dilakukan terhadap beberapa informan kunci yaitu para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah yang mengelola bantuan dana rumah ibadat dan lembaga sosial keagamaan, para pengurus rumah ibadat dan pengurus lembaga sosial keagamaan yang memperoleh bantuan, serta masyarakat di sekitar rumah ibadat yang memperoleh bantuan. Kajian dokumen dilakukan terhadap berbagai naskah yang terkait dengan kebijakan atau pelaksanaan bantuan maupun

naskah yang ada di penerima bantuan berupa laporan keuangan atau pertanggungjawaban keuangan dari pengurus rumah ibadat yang memperoleh bantuan. Untuk melengkapi data, dilakukan juga observasi lapangan yaitu peneliti langsung melihat ke lapangan untuk meninjau dan mencari data terkait dengan kondisi fisik dari bangunan rumah ibadat yang telah memperoleh bantuan.

Kebijakan Kementerian Agama tentang Program Dana Bantuan

Kebijakan Kementerian Agama terkait pelaksanaan program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan antara lain dapat dilihat pada Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Nomor 77 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Lembaga-Lembaga dan Kegiatan Keagamaan*. Dalam penelitian ini, kajian terhadap bantuan yang diberikan Sekretariat Jenderal Departemen Agama dibatasi pada 2 (dua) hal yaitu: a). rumah ibadat pada komunitas Islam, dan Kristen; dan b). lembaga dan kegiatan sosial keagamaan yang meliputi organisasi-organisasi masyarakat keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan keagamaan.

Pedoman pemberian bantuan juga dikeluarkan oleh pimpinan unit kerja eselon I di lingkungan Departemen Agama. Pada Dirjen Bimas Islam, setidaknya ada dua peraturan tentang bantuan yang diterbitkan tahun 2009. Peraturan dimaksud adalah: 1) Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/325 Tahun 2009 tertanggal 23 Juni 2009 tentang *Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan Pembangunan Masjid*.

Sebagaimana kebijakan dalam pemberian bantuan untuk pembangunan masjid, penentuan bantuan diseleksi dari proposal yang masuk serta dikuatkan oleh hasil survei Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah. Dalam lampiran surat keputusan tersebut terdaftar 189 (seratus delapan puluh sembilan) masjid yang memperoleh bantuan masing-masing sebanyak 48.250.000,- (empat puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Pada tahun 2009, ada 2 (dua) masjid di Provinsi Kalimantan Tengah yang

memperoleh bantuan yaitu: a). Masjid Ar Rahman Jl. Barito Selatan Hulu Kec. Selat Kabupaten Kapuas; b). Masjid Al Amin Desa Tahai Jaya Kec. Maluku Kab. Pulang Pisau. c). Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor: DJ.II/392 Tahun 2009 tertanggal 4 September 2009 tentang Pemberian Bantuan Rehabilitasi dan Pembangunan Musholla. Dalam lampiran surat keputusan tersebut tercatat sebanyak 125 musholla yang mendapat bantuan masing-masing Rp. 19.296.000,- (sembilan belas juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Untuk bantuan musholla, dari 125 yang ada, hanya 1 yang diberikan untuk rehabilitasi musholla di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu Musholla Darul Iman Desa Mantaren Kec. Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala.

Di lingkungan Ditjen Bimas Kristen, pada tahun 2009 telah diterbitkan *Pedoman Pemberian Bantuan di Lingkungan Direktorat Urusan Agama*. Dalam sambutan pengantar pedoman tersebut, Direktur Urusan Agama, Edison Pasaribu, M. Th. menyatakan bahwa pedoman bantuan ini merupakan acuan dasar yang mengatur ketentuan-ketentuan pemberian, penggunaan, dan pertanggungjawaban atas realisasi bantuan, serta pelaporan dari penggunaan bantuan. Sebagai tindaklanjut dari pedoman tersebut, pada tahun 2009 Dirjen Bimas Kristen mengeluarkan Keputusan Nomor DJ.III/KEP/HK.00.5/166/2009 tentang Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan untuk Rehabilitasi Tempat Ibadat dari Program Peningkatan Pelayanan Kehidupan Beragama. Dalam lampiran surat tersebut tercatat sebanyak 50 (lima puluh) gereja yang mendapatkan bantuan masing-masing Rp. 20.000.000,-

Dari gambaran tentang surat-surat keputusan tersebut terlihat bahwa Ditjen Bimas Kristen memberi perhatian yang cukup memadai kepada sejumlah gereja meskipun dalam nominal yang tidak terlalu besar yaitu rata-rata Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Selama tahun 2008 lebih dari 130 buah gereja yang memperoleh bantuan untuk perbaikan atau rehab sebesar Rp. 20.000.000,- dan sekitar 150 (seratus lima puluh) buah gereja memperoleh bantuan masing-masing sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Kebijakan Kepala Kanwil Departemen Agama

Dalam rangka program bantuan dana keagamaan untuk rumah ibadah dan lembaga sosial keagamaan, Kanwil Departemen Agama telah menyediakan anggaran yang bersumber pada DIPA Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam bentuk keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah.

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor KW.15.5/3/PP.03.1/956/2009 tentang Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadat Kabupaten/Kota se Kalimantan Tengah. Dalam lampiran surat tersebut terdaftar 20 (dua puluh) nama masjid yang memperoleh bantuan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 103/PLB.PRT/KTG/2009 tanggal 11 Februari 2009 tentang Penunjukan Lokasi Bantuan Pembangunan/Rehabilitasi Tempat Ibadat (Gereja) di Kalimantan Tengah Tahun 2009. Dalam lampiran surat tersebut tertera 6 (enam) buah gereja yang memperoleh bantuan masing-masing sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Kalimantan Tengah Nomor 278/BP.MAK/KTG/2009 tanggal 20 April 2009 tentang Penunjukan Lokasi Bantuan Pembinaan Majelis Agama Kristen di Kalimantan Tengah Tahun 2009. Ada 2 (dua) majelis agama Kristen yang menerima bantuan masing-masing sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Penerima dan Pengelolaan Program Bantuan

Bantuan untuk Masjid

Penelitian ini menelusuri lebih lanjut bantuan yang diberikan ke masjid Al Muhajirin yang beralamat di Jl. Cilik Riwut Km 7

Palangka Raya. Masjid Al Muhajirin dimulai pembangunannya yaitu pemasangan fondasi dan tiang-tiang pada tahun 2004. Namun sampai tahun 2008 tidak ada perkembangan berarti dari pembangunan tersebut. Kemudian diadakan pergantian panitia pembangunan masjid yang diketuai oleh Bpk. H. Effendi yang mulai bekerja sejak 17 Januari 2008 untuk masa 3 tahun ke depan. Sebagai seorang PNS di lingkungan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, H. Effendi memiliki kenalan yang cukup di berbagai instansi. Ia memperoleh informasi bahwa di Departemen Agama Pusat ada bantuan untuk masjid. Untuk itu ia mengajukan proposal melalui Kanwil Departemen Agama.

Beberapa bulan kemudian, ada petugas dari Departemen Agama yang datang untuk mengambil foto lokasi yang akan dibangun masjid. Dengan bantuan dari salah seorang Kepala Seksi di lingkungan Departemen Agama maka setelah memenuhi beberapa persyaratan administratif bantuanpun datang. Bantuan dikirim langsung ke rekening Masjid Al Muhajirin pada tanggal 1 September 2008 sebesar Rp. 50.000.000,- Uang bantuan tersebut digunakan untuk membeli berbagai material antara lain besi, pasir, kerikil, semen, paku, serta upah pegawai.

Masjid tersebut sekarang telah berdiri dengan megah yang terletak di Jl. Tjilik Riwut KM7 di pinggir jalan kabupaten yang menghubungkan Kota Palangkaraya dengan Kota Waringin Barat dan Kota Waringin Timur. Bagian bangunan masjid yang belum selesai adalah tempat wudhu dan menara. Secara keseluruhan biaya yang diperlukan untuk membangun masjid adalah sebesar Rp. 1 milyar rupiah.

Selain bantuan dari Departemen Agama Pusat, panitia telah menerima bantuan dari berbagai sumber antara lain Pemerintah Daerah tingkat Provinsi sebesar Rp. 150.000.000,- serta Kanwil Departemen Agama sebesar Rp. 20.000.000,- yang diterima tanggal 1 Juli 2009. Untuk menggalang dana, panitia pembangunan masjid pernah mengajukan permohonan agar masjid tersebut dijadikan tempat teraweh keliling yang dihadiri oleh Wakil Gubernur, serta Danrem. Ketika memberikan sambutan Wagub menghimbau

sumbangan secara spontan. Maka pada saat itu terkumpullah sekitar Rp. 37,5 juta.

Saat ini masjid telah digunakan secara rutin. Untuk menjaga kebersihan masjid dan mempersiapkan alat-alat ketika sholat berjamaah, maka pengurus masjid telah mempekerjakan seorang kaum dengan upah Rp. 500.000/bulan. Kaum itulah yang mempersiapkan speaker, mengatur mimbar dan membersihkan masjid setiap hari. Namun sampai saat ini belum ada pengurus imam masjid. Memang telah nampak ada perkembangan dalam kegiatan misalnya majelis taklim atau pengajian anak-anak. Tetapi ustadz yang secara khusus bertanggung jawab terhadap kegiatan masjid belum ada.

Kegiatan rutin masjid tersebut selain sholat jamaah 5 waktu adalah peringatan hari-hari besar Islam. Tetapi, seperti diakui Ketua Pembangunan Masjid yaitu Effendi, belum ada kegiatan yang monumental. Pengurus masjid baru merencanakan untuk mengadakan tabligh akbar dengan mengundang Haji Bakir dari Banjarmasin. Tetapi itu masih rencana. Dengan kata lain, pengaruh keberadaan masjid terhadap kegiatan keagamaan masyarakat sekitar terkait dengan keberadaan masjid tersebut relatif belum terlihat.

Bantuan untuk Umat Kristen

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimas Kristen Departemen Agama RI No. DJ.III/KEP/HK.00.5/ 324/2008 dalam bagian lampiran disebutkan bantuan untuk lembaga sosial keagamaan/sinode/gereja di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2008 mencakup bantuan untuk 2 rumah ibadat yaitu: a). Gereja Bethel Indonesia Kab. Lamandau, dan (2) GKE Palangkaraya Jl. Diponegoro Palangkaraya. Masing-masing bantuan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Namun demikian, pejabat di lingkungan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini Kabid Bimas Kristen tidak mengetahui adanya bantuan dari Dirjen Bimas Kristen. (*Wawancara dengan Kabid Bimas Kristen Kanwil Kemenag Kalteng, tanggal 27 April 2010*).

Untuk bantuan umat Kristen yang berasal dari DIPA Kanwil, penentuan gereja atau yayasan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Kanwil Departemen Agama berdasarkan masukan dari Kepala Bidang Bimas Kristen. Di Bidang Bimas Kristen penentuan lembaga atau gereja berdasarkan proposal yang masuk serta informasi secukupnya yang dimiliki Bidang Bimas Kristen. Proposal yang masuk setiap tahun bisa mencapai puluhan. Tetapi yang dipenuhi adalah sesuai dengan yang tercantum di DIPA Kanwil (Wawancara dengan Kabid Bimas Kristen, 29 April 2010).

Dari beberapa bantuan tersebut, penelitian ini memilih dua bantuan yaitu Gereja Kristen Evangelis yang memperoleh bantuan dari Dirjen Bimas Kristen tahun 2008 dan Yayasan Yusuf Arimatea yang memperoleh bantuan dari Kanwil Departemen Agama Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2009 masing-masing sebesar Rp. 20.000.000,-. Gereja Kristen Evangelis (GKE) merupakan gereja terbesar di Provinsi Kalimantan Tengah baik dilihat dari jumlah umat maupun dari jumlah bangunan gereja.

Terkait dengan bantuan untuk Gereja Kristen Evangelis yang berasal dari Ditjen Bimas Kristen sebesar Rp. 20.000.000,-, Badan Pengurus Harian Majelis Resort GKE Palangka Raya menjelaskan bahwa pada tahun 2008 GKE Palangkaraya menerima surat dari Ditjen Bimas Kristen bahwa gereja tersebut termasuk dalam daftar gereja yang akan diberi bantuan dan agar disalurkan ke gereja yang membutuhkan. Kebetulan beberapa bulan sebelumnya GKE di Desa Petuk Liti Kabupaten Pulang Pisau mengajukan proposal bantuan untuk perbaikan gereja. Karena pada saat itu hanya ada satu proposal permohonan bantuan, maka proposal dari GKE Petuk Liti itulah kemudian ditetapkan dalam rapat Majelis Resort GKE Palangka Raya sebagai gereja yang akan menerima bantuan. (Wawancara dengan Sekretaris BPH Majelis Resort GKE Palangka Raya).

Berikut ini gambaran gereja dan lingkungan sekitar Desa Petuk Liti. Jumlah penduduk Desa 552 orang, terdiri atas 299 orang laki-laki dan 253 perempuan, tergabung dalam 145 KK. Sebagian besar penduduk (sekitar 300 orang) beragama Kristen yang terbagi dalam

Gereja Kristen Evangelis dan Gereja Bethel Indonesia. Selebihnya atau sekitar 200 orang terdiri atas umat Islam, Katolik (Santo Petrus), juga mereka yang masih menyebut menganut kepercayaan Kaharingan sekitar 5 Kepala Keluarga Adat Kaharingan masih kental di wilayah tersebut. Bu Ester juga bercerita bahwa upacara *tiwah* masih berlaku. Nenek Bu Ester yang telah meninggal selama 31 tahun baru beberapa bulan kemarin dibongkar untuk kemudian diupacarakan dengan *tiwah*. Tokoh masyarakat Dayak disebut *Mantir Adat*. Ia biasanya berperan dalam mendamaikan masyarakat yang berselisih, didamaikan secara adat. Jika *Mantir Adat* tidak bisa mendamaikan baru diajak untuk dimusyawarahkan di tingkat kecamatan, kabupaten dan seterusnya. Sebagian besar masyarakat di desa ini adalah keturunan Dayak Kahayan. Kahayan adalah nama sebuah sungai. (Wawancara dengan ER, Kamis 28 April 2010).

Gereja Sinta Petuk Liti yang merupakan salah satu majelis jemaat di bawah Majelis Resort GKE Palangkaraya berada di Desa Siaga Kabupaten Pulang Pisang. Gereja itu telah ada sejak tahun 70-an yang terletak sekitar 100 meter di pinggir jalan raya yang menghubungkan Palangkaraya dan Sampit. Awalnya gereja merupakan bangunan yang berdinding dan berlantai. Setelah digunakan lebih dari 30 tahun, kondisi fisik gereja sudah mulai rusak. Papan kayu di lantai banyak yang sudah berjamur. Demikian juga dinding kayu banyak yang rapuh. Kebetulan ada seorang jemaat gereja yang menyediakan tanah di pinggir jalan raya. Maka mulai tanggal 19 April 2006 dilakukan penggalian tanah untuk memasang pondasi. Biaya pembangunan diperoleh dari sumbangan jemaat dalam bentuk kolekte yang dikumpulkan setiap minggu. Ada juga sumbangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar Rp. 10.000.000,-

Pada awal tahun 2008, panitia pembangunan gereja mengajukan proposal ke Majelis Resort GKE Palangkaraya. Kebetulan beberapa bulan kemudian ada pemberitahuan dari Dirjen Bimas Kristen bahwa ada bantuan untuk Majelis Resort GKE Palangkaraya. Melalui berbagai pertimbangan di Badan Pengurus Harian GKE Palangkaraya, akhirnya bantuan itu disalurkan ke Majelis Jemaat Petuk Liti. Untuk

menerima bantuan itu, pengurus gereja membuat rekening di Bank Pembangunan Kalteng, rekening atas nama Gereja Sinta Jemaat GKE Desa Petuk Liti Kabupaten Pulang Pisau.

Uang bantuan dari Dirjen Bimas Kristen diterima di rekening gereja pada tanggal 25 November 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- Seluruh uang tersebut kemudian diambil pada tanggal 4 Desember 2008. Uang tersebut digunakan untuk membeli sejumlah material untuk keperluan gereja antara lain keramik (Rp. 9.450.000,-), selebihnya digunakan untuk engsel jendela, engsel pintu, kunci, hendel, cat, semen, lem, amplas, cat dinding, upah pengerjaan maupun uang bensin pembelian material. Keseluruhan yang dibelanjakan berjumlah Rp. 15.240.000,- Uang bantuan memang sengaja tidak dibelanjakan seluruhnya karena pernah ada informasi bahwa dari sebagian bantuan harus disisihkan untuk uang administrasi.

Jika ditaksir secara keseluruhan, maka biaya pembangunan gereja mencapai Rp. 250.000.000,- Gereja tersebut penggunaannya dimulai ketika perayaan natal tahun 2008. Waktu itu memang pembangunan gereja belum selesai. Bantuan sebesar Rp. 20 juta juga belum semuanya dipergunakan karena uang baru diambil pada tanggal 4 Desember. Waktu itu keramik sudah dibeli tetapi belum dipasang, tetapi pada tanggal 25 Desember 2008 gereja sudah bisa digunakan. Sekarang gereja sudah mulai rutin digunakan tinggal langit-langit yang belum rapi.

Bagaimana pengaruh pembangunan gereja terhadap umat setempat maupun kegiatan gereja? Dilihat dari jumlah jemaat sebetulnya tidak ada perubahan meningkat. Setiap kebaktian dihadiri antara 50 sampai 75 jemaat. Kegiatan gereja juga tidak ada perubahan yang berarti. Ada beberapa tambahan kegiatan setelah gereja itu jadi yaitu jemaat mitra dan pertukaran mimbar. Tapi hal itu memang telah menjadi program dari GKE Palangkaraya.

Bantuan lain diberikan oleh Kanwil Kementerian Agama untuk Yayasan Yusuf Arimatea. Yayasan yang telah berdiri sejak tahun 1991 tersebut telah mengelola pemakaman untuk umat Krsiten di atas lahan

seluas 30 ha yang merupakan bantuan dari Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya. Yayasan Yusuf Arimatea didirikan berdasarkan Akta Notaris Melyo Unan Sawang, SH Nomor 17 tahun 1990 tertanggal 7 Nopember 1990. Tujuan didirikan Yayasan Yusuf Arimatea adalah: a). Memberi pelayanan kepada anggota Jemaat GKE atau keluarga Kristen Protestan lainnya serta masyarakat umum yang ditimpa kematian; b). Mengelola kompleks pemakaman Kristen Protestan supaya teratur dan tertata dengan baik; dan c). Mengamankan asset milik Yayasan Yusuf Arimatea Resort GKE Palangkaraya.

Yayasan Arimatea mulai menggunakan lahan tersebut untuk pemakaman sejak Desember 1991 bertepatan dengan perayaan Natal. Waktu itu memang ada umat Kristen yang meninggal dan dikubur dengan biaya gratis sekaligus dalam rangka promosi Yayasan. Sampai saat ini tanah atau lahan yang telah digunakan baru mencapai 2 ha dengan jumlah makam sekitar 1.500 buah.

Meskipun berbentuk yayasan, Yusuf Arimatea tidak semata-mata mencari keuntungan. Biaya pemakaman di Yayasan ini relatif murah, berkisar antara 0 rupiah sampai sekitar 15 juta rupiah. Harga normal biaya pemakaman sekitar 5 juta rupiah. Tetapi kalau memang betul-betul tidak mampu, dengan beberapa persyaratan antara lain surat keterangan tidak mampu dari aparat setempat, maka bisa saja biaya menjadi gratis. Namun hal itu sesungguhnya menyulitkan Yayasan sebab jika ada 1 orang saja yang meminta pemakaman dengan biaya gratis, maka biaya tersebut baru terpenuhi setelah ada sekitar 10 kali pemakaman berikutnya. Oleh karena itu digunakan sistem subsidi silang. Bagi yang relatif mampu diminta biaya agak lebih untuk menutup yang tidak mampu membayar.

Dalam rangka mendukung kegiatan pelayanan pemakaman tersebut, Pengurus Yayasan memandang perlu didirikan sebuah sekretariat yang letaknya di sekitar lokasi pemakaman. Tujuan didirikan kantor sekretariat antara lain untuk memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Sebagaimana diketahui, sejak Yayasan ini didirikan pada tahun 1990 belum ada kantor tetap sehingga sekretariat selalu berpindah-pindah karena sifatnya masih

kontrakan. Di samping itu karena sesuatu dan lain hal seringkali jemaat yang tertimpa musibah kematian tidak bisa disemayamkan di rumah yang layak. Hal itu terjadi karena antara lain yang meninggal dunia tidak memiliki sanak keluarga atau karena alasan budaya maka rumah keluarga tidak mau dijadikan persemayaman jenazah. Dalam kondisi seperti ini maka ruang sekretariat sekaligus dapat berfungsi sebagai rumah duka. Dengan dana yang tersedia, maka dibangunlah ruang sekretariat. Untuk mendukung penyelesaian pembangunan gedung sekretariat tersebut, maka pihak yayasan mengajukan permohonan bantuan dana sebesar Rp. 20.000.000,- Uang bantuan tersebut telah digunakan untuk membeli plafon, cat kayu, pembelian dan pemasangan pintu dan jendela.

Dampak bantuan terhadap komunitas agama Kristen tampaknya tidak terlalu terlihat secara sendiri-sendiri. Bahwa setiap bantuan bermanfaat berapapun jumlahnya, adalah sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Bantuan telah memperlancar atau mempercepat penyelesaian pembangunan Gereja Sinta di Petuk Liti. Bantuan untuk Yayasan Yusuf Arimatea juga sangat bermanfaat untuk membantu penyelesaian gedung sekretariat. Tetapi tanpa bantuan itupun sesungguhnya gereja tetap didirikan. Demikian juga Yayasan Yusuf Arimatea akan tetap berjalan aktifitasnya meskipun gedung sekretariat belum final.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Dalam pelaksanaan program dana bantuan untuk rumah ibadat dan lembaga sosial keagamaan, ada beberapa faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung maupun faktor penghambat. Faktor pendukung adalah: a). Kebijakan pimpinan yang menempatkan bantuan sebagai hal yang penting untuk diprogramkan; b). Antusias masyarakat untuk memperoleh dan memanfaatkan bantuan telah ikut mempercepat pelaksanaan program bantuan; c). Proses administrasi yang cukup sederhana, serta pertanggungjawaban yang juga relatif mudah. d). Ada kelonggaran bagi penerima bantuan untuk memanfaatkan bantuan sesuai dengan kebutuhan.

Sementara itu beberapa hal yang dianggap sebagai penghambat pelaksanaan program bantuan. a). Tidak semua pelaksanaan bantuan dari pusat ke daerah terkoordinasi dengan Kanwil Kementerian Agama di Provinsi Kalimantan Tengah; b) Belum ada data tentang rumah ibadat serta kondisinya sehingga tidak dapat dipetakan kebutuhan riil bantuan yang diperlukan; c) Tidak semua bantuan dilengkapi dengan pedoman sebagai panduan baik bagi pemberi maupun penerima bantuan; d). Jumlah bantuan relatif kecil dibanding dengan jumlah yang dibutuhkan. Dengan jumlah tersebut menjadi sulit untuk mengevaluasi sejauh mana bantuan memberi dampak positif bagi penerima; e) Bantuan hanya digunakan untuk kepentingan fisik bangunan dan tidak ada panduan ataupun pendampingan agar bantuan digunakan untuk hal yang produktif dan berkelanjutan.

Analisis

Jika dilihat dari kerangka analisis *input*, proses dan *output* (diadopsi dari pemikiran Subarsono, 2009), bisa dijelaskan bahwa dalam rangka melaksanakan program bantuan dana untuk rumah ibadat dan lembaga sosial keagamaan, Kementerian Agama di Pusat maupun di tingkat provinsi telah memiliki *input* sebagai bahan (*raw materials*) untuk penentuan kebijakan, *input* tersebut di dalamnya mencakup anggaran, sumber daya manusia penentu kebijakan, kebutuhan di masyarakat akan pentingnya rumah ibadat serta adanya dukungan masyarakat yang akan mengimplementasikan kebijakan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam aspek *input*, ada hal yang kurang terpenuhi yaitu data tentang rumah ibadat serta kebutuhan masyarakat akan rumah ibadat. Data tersebut penting untuk membuat peta sasaran yang tepat dalam penentuan bantuan rumah ibadat.

Tahap selanjutnya adalah proses diskusi, negosiasi, dan konversi sehingga mengubah *input* tersebut menjadi *output* yaitu keluarnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Keputusan Dirjen, maupun Keputusan Kepala Kanwil Kementerian Agama. Dalam proses ini, terjadi *bargaining* dan *negosiasi* antara

para aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Pelaksanaan kebijakan ini kemudian terwujud dalam bentuk terbantunya biaya pembangunan atau renovasi rumah ibadat masjid, gereja maupun fasilitas pemakaman umat Kristen yang dikelola Yayasan Yusuf Arimatea. Satu hal yang masih dirasakan kurang mendukung proses pelaksanaan kebijakan ini adalah untuk beberapa bantuan kurang koordinasi antara pembuat kebijakan di Pusat dengan pelaksana di daerah yaitu Kanwil Kementerian Agama.

Outcome bantuan untuk rumah ibadat maupun bantuan lembaga sosial keagamaan dapat dilihat antara lain tersedianya rumah ibadat yang lebih nyaman bagi masyarakat muslim di sekitar masjid yang memperoleh bantuan, umat Kristen dapat beribadat dengan lebih tenang karena tersedianya gereja di Petuk Liti. *Impact* (dampak) atau akibat lebih jauh dari bantuan yang diberikan Kementerian Agama belum dapat diidentifikasi. Hal ini terjadi karena untuk melihat dampak diperlukan jangka waktu yang relatif lama (sekitar lima tahun) sejak bantuan diberikan. Demikian pula, jumlah bantuan yang relatif sedikit telah mengaburkan dampak yang bisa dilihat dari pemberian bantuan tersebut.

Penutup

Dari uraian di atas, peneliti menyimpulkan diantaranya bahwa dalam rangka pelaksanaan program bantuan, Kementerian Agama telah memiliki sejumlah kebijakan berupa penerbitan Surat Keputusan, Surat Edaran dan sejenisnya. Namun demikian, belum semua pemberi bantuan membuat buku pedoman sehingga pelaksanaan bantuan belum sepenuhnya dapat dipertanggungjawabkan secara objektif. Akibat tidak adanya pedoman, maka tidak diketahui alasan yang pasti mengapa satu rumah ibadat memperoleh bantuan, sementara rumah ibadat lainnya tidak memperoleh bantuan.

Untuk memperoleh dana bantuan, khususnya yang berasal dari DIPA Kanwil Kementerian Agama, masyarakat (penerima bantuan) mengajukan permohonan atau proposal ke Kanwil Kementerian Agama untuk kemudian dilakukan seleksi seperlunya. Sementara

untuk bantuan yang berasal dari Dirjen, beberapa dilakukan dengan penunjukkan langsung ke suatu rumah ibadat. Setelah ada penunjukkan tersebut, baru penyusunan proposal dari pengurus rumah ibadat. Dana bantuan telah dimanfaatkan dan dikelola semaksimal mungkin oleh pihak penerima, meskipun dari segi jumlah belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan riil.

Dampak sosial dari pemberian bantuan dana untuk rumah ibadat maupun untuk lembaga keagamaan dapat dilihat sampai pada tahap *outcome* yaitu antara lain tersedianya sebuah tempat ibadat yang cukup megah yaitu masjid Al Muhajirin di Jl. Cilik Riwut Km 7 Palangkaraya, atau tersedianya gereja yang lebih nyaman untuk beribadat yaitu Gereja Kristen Evangelis Sinta di Desa Petuk Liti Kabupaten Pulang Pisau. Sementara dampak lebih jauh (*impact*) yaitu perubahan sosial pada masyarakat, melalui penelitian ini tidak sepenuhnya dapat terdeteksi.

Ada beberapa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan bantuan tersebut. Faktor pendukung antara lain kebijakan pimpinan yang menempatkan bantuan sebagai hal penting, ada minat dari masyarakat, serta kelonggaran dalam penggunaan bantuan. Sementara faktor penghambat adalah kurang koordinasi antara Pusat dan daerah, belum ada pedoman yang memadai, serta jumlah bantuan yang relatif kecil.

Sebagai rekomendasi kebijakan diantaranya perlu panduan yang memadai bagi pelaksanaan bantuan. Hal ini akan menghindari ketidakpuasan masyarakat serta menghindari temuan pihak pemeriksa bahwa penentuan lembaga penerima bantuan kurang objektif.

Perlu dilakukan survei dan monitoring dalam penentuan penerima bantuan serta monitoring pelaksanaan bantuan menjadi bagian penting dalam setiap pelaksanaan program bantuan. Perlu meningkatkan koordinasi secara berkesinambungan antara Direktorat Jenderal Bimas masing-masing agama dengan Kanwil Kementerian Agama dalam pelaksanaan bantuan. Dalam hal ini

Kanwil Kementerian Agama dapat dilibatkan dalam proses survey dan monitoring sehingga pelaksanaan bantuan dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Agar bantuan dapat terlihat dampak sosial yang lebih jauh (*impact*), hendaknya dilakukan pendampingan pelaksanaan program bantuan dengan dana yang relatif memadai.

Juga diperlukan *data base* tentang kondisi rumah ibadat pada masing-masing kelompok agama. Setiap direktorat hendaknya menggagas program penyediaan *data base* bekerjasama dengan unit-unit terkait termasuk Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Melalui *data base* ini diketahui berapa jumlah kebutuhan rumah ibadat serta klasifikasinya.

Daftar Pustaka

- Bryman, Alan. 2004. *Social Researsch Methods*. Second Edition. Oxford University Press. USA.
- Hovland, Ingie. 2010. *Membuat Perbedaan: Pemantauan dan Evaluasi Penelitian Kebijakan*. Working Paper 281.
- <http://www.bimasislam.depag.go.id>. *Dana Bantuan Depag Bukan Untuk Konsumtif*. Akses 21 Juli 2010
- Menteri Agama RI. Sambutan pada Rapot Koordinansi Nasional FKUB yang dilaksanakan di Hotel Sahid Jakarta tanggal 25 – 27 Mei 2010
- Neuman, W. Lawrence. 2003. *Social Researsch Methods Qualitative and Quantitive Approaches*. Fifth Edition. Pearson Education. USA.
- Subarsono, 2009. *Analisis Kebijakan Publik, Konsep Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama telah mengeluarkan Nomor 77 Tahun 2008 tentang *Pedoman Pemberian Bantuan Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama bagi Lembaga-Lembaga dan Kegiatan Keagamaan*.

Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan Kementerian Agama di Provinsi Aceh: Sebuah Kajian Evaluasi

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan

Abstract

The grants to synagogues and religious organizations that were distributed by the central government to the city of Aceh is still very limited. Aceh, the area affected by the tsunami and afflicted in the middle of the conflict, still needs various support and assistance from both physical and spiritual side so that the slightest assistance provided by the central and local governments. To obtain maximum results, the assistance provided by the Ministry of Religious Affairs should be evaluated. This study used a qualitative approach.

Keywords: *social conflict, cultural values, communal conflicts, economic disparities.*

Latar Belakang

Keberadaan Kementerian Agama RI berkembang sebagai sebuah birokrasi dalam konteks sosial budaya dan sejarah bangsa Indonesia. Ia lahir dari sejarah dan merupakan tuntutan bangsa, yang berakar kokoh dalam tata-nilai kemasyarakatan bangsa Indonesia. Kementerian ini lahir dalam rangka memenuhi hasrat bangsa dan negara, yang tidak lepas dari motif beragama dan sejarah perjuangan bangsa. Sesuai

dengan visi Kementerian Agama “Terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, rukun, cerdas, mandiri dan sejahtera lahir batin” Dan misinya antara lain: meningkatkan kualitas kehidupan beragama; meningkatkan kualitas kerukunan umat beragama; meningkatkan kualitas raudhatul athfal, madrasah, perguruan tinggi agama, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan; meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji; dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 Buku II Bab II Bidang Pembangunan Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama, bahwa negara dan pemerintah berkewajiban memberikan jaminan dan perlindungan atas hak setiap warganya untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, serta memberikan fasilitas dan pelayanan pemenuhan hak dasar warga tersebut. Berkaitan dengan kualitas beragama yang belum optimal, dinyatakan bahwa pelayanan kehidupan beragama masih terbatas, untuk itu peran pemerintah perlu lebih meningkatkan pelayanan dan fasilitas kepada umat beragama dalam menjalankan aktivitas keagamaannya dengan mudah dan aman.

Tujuan jangka panjang pembangunan bidang agama yang hendak dicapai Kementerian Agama adalah terwujudnya masyarakat Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, dan cerdas saling menghormati antar pemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Untuk mewujudkan tujuan tersebut Kementerian Agama berusaha memberikan bimbingan dan dorongan kepada usaha/kegiatan organisasi sosial Islam, pembangunan/rehabilitasi masjid, mushalla, dan pemeliharaan makam-makam bersejarah dengan pemberian dana bantuan kepada lembaga-lembaga keagamaan dimaksud.

Namun dana bantuan keagamaan Kementerian Agama yang dimaksudkan untuk peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama di masyarakat Indonesia dewasa ini

dirasa masih kurang memadai serta belum terlihat dampaknya bagi kehidupan beragama, pada sebagian masyarakat baru nampak pada tataran simbol-simbol keagamaan, dan belum menyentuh permasalahan substansial. Begitu pula pelayanan kehidupan beragama dinilai masih kurang memadai, hal itu terlihat dari kurangnya sarana dan prasarana ibadah, belum optimalnya pemanfaatan tempat peribadatan, serta belum optimalnya pengelolaan serta pemanfaatan dana sosial keagamaan.

Permasalahannya adalah bantuan pemerintah pada umumnya dan khususnya bantuan Kementerian Agama RI, banyak dipertanyakan oleh berbagai lapisan masyarakat dan berita di media massa terutama mengenai dampak sosialnya bagi pembangunan kehidupan beragama di Indonesia. Dikabarkan oleh Indonesia.com, 19 Maret 2009 memuat berita berjudul "*Bantuan Departemen Agama dan Masalahnya*", Dalam terbitan tersebut antara lain memuat program terkait bantuan Kementerian Agama. Sementara di lapangan diduga mekanisme kerja penanganan dana bantuan keagamaan selama ini disalurkan melalui Kantor Kementerian Agama Pusat masih sering kurang tepat sasaran, tidak tepat waktu, serta tidak jarang disalahgunakan oleh oknum-oknum serta kepentingan-kepentingan tertentu, maupun orang-orang yang kurang bertanggung jawab dengan melakukan kolusi, nepotisme dan lain-lain.

Pelaksanaan program pemberian bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan Kementerian Agama pada tahun 2008 dan 2009 masih menemui kendala-kendala, diantaranya adalah: Pelaksanaan program bantuan salah prosedur, sehingga terjadi program bantuan diberikan kepada sesama unit kerja Kementerian Agama sendiri. Misalkan bantuan dari Direktorat diberikan ke Kanwil dan diteruskan ke Kankemag; pada perumusan penentuan sasaran belum menggunakan data dan tidak dilakukan studi kelayakan, yang mengakibatkan proses penentuan bantuan tidak tepat sasaran. Dampaknya banyak terjadi penyimpangan dalam pemanfaatan program bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan; pelaksanaan pemberian program bantuan rumah ibadat dan organisasi keagamaan

tidak dilakukan monitoring dan pengawasan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan kepada pihak penerima bantuan.

Mengacu pemikiran di atas Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama tahun anggaran 2010 telah melakukan penelitian tentang *Evaluasi Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan Kementerian Agama di Provinsi Aceh* bagi pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Apa saja kebijakan yang ditempuh Kementerian Agama dalam pelaksanaan program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan; bagaimana pengelolaan dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan Kementerian Agama oleh penerima bantuan; bagaimana pemanfaatan dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan oleh penerima bantuan; dampak sosial apa saja dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan Kementerian Agama bagi pengembangan kehidupan keagamaan; dan apakah faktor-faktor pendukung dan penghambat keberhasilan program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan.

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini merupakan salah satu kegiatan bagi upaya pencapaian pelayanan kehidupan beragama yang lebih baik, dan meningkatkan penghayatan dan pengamalan agama masyarakat Indonesia. Diharapkan melalui kegiatan penelitian ini dapat diperoleh data dan informasi yang akurat mengenai program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan, serta dampak sosialnya bagi pengembangan kehidupan beragama di Indonesia.

Sedangkan secara khusus tujuan penelitian ini adalah: mendapatkan data dan informasi kebijakan yang ditempuh Kementerian Agama dalam pelaksanaan program dana bantuan rumah ibadat dan organisasi keagamaan dengan maksud dana tersebut sudah dimanfaatkan dan didayagunakan sesuai dengan

tujuan untuk mendorong atau memberi motivasi; mengungkap pengelolaan pemberian program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan oleh masing-masing unit kerja Kementerian Agama sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; memperoleh informasi mengenai pemanfaatan program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan oleh penerima bantuan; mengetahui dampak sosial program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan bagi pengembangan kehidupan beragama; mengetahui faktor pendukung dan penghambat program dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan Kementerian Agama serta apakah dana bantuan sudah dilaksanakan secara efektif oleh lembaga penerima bantuan.

Kerangka Konseptual

Program pemberian dana bantuan keagamaan dicanangkan oleh Kementerian Agama dimaksudkan untuk mendorong atau memberi motivasi agar aktifitas lembaga-lembaga dan ormas keagamaan dapat semakin meningkat, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas kinerja Kementerian Agama.

Menurut sifatnya suatu organisasi cenderung merupakan kesatuan yang kompleks dengan berusaha mengalokasikan sumberdayanya (*resources*) secara rasional demi tercapainya tujuan. Menurut Streers (1985:2) makin rasional suatu organisasi, makin besar upayanya pada kegiatan yang mengarah ke tujuan. Makin besar kemajuan yang diperoleh kearah tujuan, organisasi makin efektif pula.

Pengertian evaluasi menurut (Stufflebeam dan Shinkfield, 1995) adalah merupakan suatu proses menyediakan informasi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk menentukan harga dan jasa dari tujuan yang dicapai, desain, implementasi, dan dampak untuk membantu membuat keputusan, membantu pertanggungjawaban, dan meningkatkan pemahaman terhadap fenomena.

Bantuan dibagi menjadi dua, yaitu bantuan sosial dan bantuan keuangan. Bantuan sosial adalah bantuan yang digunakan untuk

pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bantuan sosial tidak diberikan secara terus menerus atau tidak berulang setiap tahun anggaran, selektif dan memiliki kejelasan di dalam peruntukannya. Bantuan dana keagamaan adalah anggaran atau dana yang diberikan oleh Kementerian Agama kepada beberapa lembaga yang dibatasi pada Mata Anggaran Belanja Lembaga Sosial lainnya dan Biaya Lembaga Sosial Daerah.

Lembaga keagamaan dalam penelitian ini diartikan sesuai yang disebutkan dalam SK Sekjen Departemen Agama Nomor 77 Tahun 2008 bahwa sasaran bantuan meliputi: (1) Rumah Ibadah yang meliputi antara lain: Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng/Kuil; dan (2) Lembaga dan Kegiatan Sosial keagamaan yang meliputi antara lain: Organisasi-organisasi Masyarakat Keagamaan dan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini lebih menekankan pada penelitian evaluasi juga berupa studi kelayakan atas program dana bantuan rumah ibadah dan ormas keagamaan.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan evaluatif, dimana hasil kajiannya bersifat deskriptif. Pendekatan evaluatif yang bersifat normatif, untuk memperoleh informasi atau hasil kajian berupa *feedback* dari suatu aktivitas dalam proses sehingga dapat meningkatkan produk (Sugiono, 2001:5).

Penelitian ini dilakukan di Provinsi Aceh pada komunitas agama Islam dan Buddha. Pemilihan lokasi penelitian tersebut berdasarkan daerah-daerah tersebut dalam kelompok yang bervariasi baik ditinjau dari segi besar jumlah bantuan, sosial ekonomi, karakter budaya, agama, permasalahan dan ormas keagamaan, serta lembaga-lembaga penerima bantuan.

Informan dalam penelitian ini adalah para pejabat di lingkungan Kementerian Agama Pusat dan para pejabat Kementerian Agama

Provinsi Aceh yang mengelola dana bantuan rumah ibadah. Panitia pembangunan Masjid Al Maghfiroh dan Ormas MPU: LP-POM serta panitia rehab Vihara Budha Dharma tahun 2009 serta tokoh agama dan masyarakat disekitar lokasi penerima program dana bantuan keagamaan Kementerian Agama Pusat Tahun Anggaran 2009.

Temuan dan Pembahasan

Banda Aceh merupakan salah satu kota yang terkena bencana dashyat Tsunami akhir tahun 2004 yang lalu. Bencana ini hampir melumpuhkan seluruh aktivitas perekonomian di kota ini, demikian dengan beberapa sarana infrastruktur penting. Namun, untungnya, hal tersebut juga membawa dampak positif bagi kota ini maupun Provinsi Aceh. Kota Banda Aceh kembali terdengar di setiap tempat di permukaan bumi ini, seperti yang pernah terjadi di abad ke-13 hingga abad ke-16 dahulu, saat wilayah semenanjung Malaka ini ramai dikunjungi orang-orang di berbagai negeri.

Pergerakan atau mobilisasi cukup besar terjadi ke Aceh setelah bencana Tsunami tersebut, berbagai daerah dan tempat berbondong-bondong menawarkan bantuan. Mereka ada dari dalam negeri, tapi tidak jarang juga dari luar negeri. Bahkan Mantan Presiden Amerika Serikat, Bill Clinton, datang khusus mengunjungi Aceh dan memberikan bantuan. Gelombang besar ini mendorong peningkatan wisatawan dari domestik maupun luar negeri datang ke Banda Aceh. Selain itu, Banda Aceh juga kaya akan sejarah, budaya, dan keindahan alamnya yang masih belum dimanfaatkan secara optimal.

Ada beberapa segi adat istiadat dan pandangan hidup etnis Aceh yang khas dari masyarakat Aceh yaitu, menyapa dengan memberi salam, tidak menerima sesuatu atau menghimbau seseorang dengan tangan kiri atau kaki, dilarang memegang kepala, menghormati kepada yang dituakan, merasakan hubungan kekeluargaan yang mesra dengan tetangga, berperasaan damai, tidak pendendam, baik dalam pergaulan, dan kekeluargaan.

Sehubungan dengan hal tersebut dapat disebutkan bahwa adat pergaulan dan tata cara hidup etnis Aceh telah terjalin rapat dengan

nafas Islam yang tidak terpisahkan itu. Ajaran-ajaran agama Islam yang dihayati oleh penduduk (orang Aceh) sejak dahulu masih membekas sampai sekarang. Salah satu warisan pengaruh agama yaitu tradisi bahasa tulisan yang ditulis dalam huruf Arab. Meskipun etnis Aceh mempunyai bahasa sendiri yang disebut bahasa Aceh (termasuk rumpun bahasa Austronesia), tetapi tidak memiliki sistem huruf khas bahasa Aceh asli.

Secara kuantitatif, kondisi umat beragama di Provinsi Aceh, data tahun 2009, terdiri dari Muslim 98% (4.356.624 jiwa); Protestan 0,595% (26.212 jiwa); Katolik 0,363 (15.971 jiwa); Hindu 0,010% (437 jiwa); Budha 0,139% (5.928 jiwa). Sementara untuk umat Konghucu sampai saat penelitian ini berlangsung belum terdata di Aceh. Sedangkan daftar rumah ibadat di Provinsi Aceh hingga tahun 2009 adalah: Agama Islam 12.584 tempat ibadat, Katolik 11 tempat ibadat, Protestan 15 tempat ibadat, Hindu satu tempat ibadat, dan budha tiga tempat ibadat. Khususnya yang berada di kota Sabang jumlah Vihara umat Budha ada 1 buah, jumlah gereja umat Katolik ada 2 buah dan jumlah tempat ibadat umat Islam ada 229 buah. (Laporan Tahunan Kanwil Kemenag Provinsi Aceh tahun 2009).

Kondisi kerukunan umat beragama di Aceh berjalan dengan baik dan harmonis. Bahkan sudah sekian lama di Provinsi Aceh tidak terjadi konflik keagamaan yang serius antar umat. Permasalahan yang pernah muncul antara umat beragama di Aceh secara umum ada dua, yaitu obyek dakwah atau misi, seperti konflik internal antar sesama pemeluk agama. Ini terjadi akibat perbedaan penafsiran, pandangan, atau karena ada upaya-upaya penistaan agama yang sering dianggap sebagai aliran sesat. Karena penduduk Aceh mayoritas Muslim, maka kasus yang menonjol adalah kasus-kasus penodaan agama Islam, yang kemudian dapat dituntaskan oleh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan lembaga keagamaan yang ada seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Kementerian Agama dan Pemda dan yang ke dua persoalan pendirian rumah ibadat. Namun kedua permasalahan itu selama ini dapat diselesaikan melalui jalur musyawarah dan tidak sampai menjadi kasus hukum. Sumber dana

bantuan rumah ibadah dan ormas keagamaan yang diteliti di Aceh ini ialah berasal dari DIPA Kementerian Agama Pusat tahun anggaran 2008 dan 2009.

Kebijakan Pemberi Bantuan

Pengelolaan Bantuan Sosial oleh Ditjen Bimas Islam

Menurut data dari Ditjen Bimas Islam, pengelolaan bantuan sosial keagamaan Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam dalam pemberian bantuan sosial keagamaan memperhatikan beberapa aspek, diantaranya membuat buku pedoman pelaksanaan sarana peribadatan diantaranya dalam rangka pemenuhan tugas pokok Subdit Kemasjidan; dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, bimbingan, dan dorongan kepada masyarakat dalam pembangunan maupun rehabilitas masjid dan mushalla sehingga akan terwujud kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat melakukan ibadah. Untuk itu bantuan rehabilitasi dan pembangunan masjid bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi masjid.

Sedangkan syarat-syarat untuk mendapatkan bantuan diantaranya mengajukan permohonan bantuan dan proposal yang meliputi: RAB, susunan panitia, gambar bangunan, *photo copy* sertifikat tanah, dan foto-foto bangunan; adanya rekomendasi Kanwil Kementerian Agama provinsi; memiliki rekening bank atas nama pengurus dan atau panitia.

Kemudian proses penetapan bantuan diawali dengan seleksi proposal oleh unit teknis yaitu Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah; diadakan survey kelayakan bagi permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi oleh petugas pusat dan wilayah; penyusunan daftar calon penerima bantuan untuk mendapatkan persetujuan pimpinan; adanya penetapan Surat Keputusan oleh Ditjen Bimas Islam; dan adanya pemberitahuan SK kepada Kanwil Provinsi dan Kabupaten atau Kota. Kemudian mekanisme pencairan dana diantaranya ada sosialisasi pemberian bantuan kepada calon penerima bantuan; calon penerima bantuan mengajukan keleng-

kanan administrasi dan pencairan bantuan transfer melalui KPPN IV Jakarta.

Selanjutnya sesuai kebijakan yang ditempuh oleh Direktorat Urais dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam adanya pemanfaatan bantuan agar sesuai dengan usulan dalam proposal dan kegiatan berupa pembangunan atau rehab fisik. Juga adanya monitoring secara langsung maupun tidak langsung atas bantuan yang akan diberikan dan survey ke lapangan pada saat dan sesudah bantuan diberikan. Untuk ketertiban administrasi sebagai bukti fisik adanya laporan pertanggungjawaban kepada Dirjen Bimas Islam c.q. Direktur Urais dan Pembinaan Syariah oleh penerima bantuan dan diakhiri dengan evaluasi oleh Subdit Kemasjidan terhadap program bantuan dan menyampaikan usulan atau saran untuk perbaikan masa yang akan datang.

Dalam DIPA Pusat Kementerian Agama tahun 2008 dan 2009 terdapat anggaran bantuan untuk rumah ibadat di Provinsi Aceh. Pada tahun 2008 pemberian bantuan diberikan untuk enam buah masjid yang masing-masing memperoleh @ Rp. 50.000.000,-. Sedangkan pada tahun 2009 pemberian bantuan diberikan kepada lima buah masjid yang masing-masing memperoleh @ Rp. 48.250.000,-.

Pengelolaan Bantuan Sosial oleh Ditjen Bimas Buddha

Data dari Ditjen Bimas Buddha dan hasil wawancara dengan Ibu Supartini, SH, MM selaku Subdit Lembaga dan Upacara Keagamaan, kebijakan yang ditempuh dalam pemberian bantuan sosial keagamaan diantaranya adalah dalam pengelolaan bantuan sosial keagamaan dengan membuat Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada tempat-tempat peribadatan Agama Buddha.

Jenis-jenis bantuan meliputi: hibah, bantuan sosial, dan bantuan lain seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak terduga lainnya. Tempat peribadatan yang berhak menerima bantuan adalah yang benar dan aktif dipakai sebagai tempat peribadatan, memiliki tanda daftar dari Kanwil, dan memiliki status tanah yang sah.

Adanya susunan pengurus Vihara (panitia rehab); adanya Perincian biaya yang dibutuhkan; foto copy piagam pendaftaran dari Kementerian Agama yang masih berlaku; adanya keterangan domisili yang dikeluarkan oleh kepala desa setempat; adanya foto copy rekening dan NPWP atas nama Vihara; adanya foto copy sertifikat tanah vihara; dan adanya Rekomendasi penyelenggara atau Bimas Buddha wilayah setempat.

Menurut informasi Ibu Supartini, SH, MM bantuan diberikan langsung secara LS. Latar belakang pemberian bantuan adalah sebagai stimulasi/motivasi masyarakat setempat untuk mendorong mereka memberikan bantuan pada rumah ibadat maupun lembaga sosial keagamaan. Bantuan diprioritaskan bagi rumah ibadat yang terkena musibah seperti bencana alam, dsb. Tujuan pemberian bantuan antara lain agar rumah ibadat dapat digunakan dengan nyaman dalam beribadah juga memberikan motivasi kepada jamaah untuk beramal memelihara rumah ibadat.

Mengenai adanya usulan permohonan bantuan, maka tidak harus mendapat rekomendasi dari Kantor Wilayah ataupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Tidak ada monitoring secara khusus, monitoring dilakukan dengan *liding sector* yaitu ketika ada pejabat pusat ke daerah yang kebetulan mendapat bantuan, maka monitoring sekalian dapat dilakukan. Selain itu, monitoring juga dilakukan oleh Pembimas Kanwil Kementerian Agama masing-masing Provinsi setelah mendapat tembusan dari pusat mengenai tempat ibadat yang mendapatkan bantuan. Ketika proposal permohonan bantuan sudah masuk Kemenag pusat, maka proposal akan diseleksi agar tidak terjadi pemberian bantuan yang berulang pada rumah ibadat ataupun organisasi keagamaan yang sama dan juga agar pembagian bantuan dapat merata.

Pada tahun 2009 Kementerian Agama pusat melalui Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Budha telah memberikan dana bantuan rehabilitasi tempat ibadat Agama Budha yang diberikan kepada 20 vihara yang masing-masing vihara memperoleh Rp. 15.000.000,- Salah satu penerima bantuan rehabilitasi tempat ibadat

adalah Vihara Budha Dharma dengan nomor Dj.VI/29/SK/2009 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal di Jakarta pada tanggal 23 Maret 2009.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Bantuan

Dana Bantuan ke Masjid Al Maghfiroh

Sebelum musibah gempa dan tsunami melanda di dusun Gano berdiri sebuah masjid yang diberi nama Al Maghfiroh yang diresmikan oleh Walikota Banda Aceh Bapak Bahtiar, pada tahun 2001 yang dapat menampung jamaah dengan kapasitas sampai ratusan jamaah. Gano adalah nama sebuah dusun yang letaknya persis di bibir pantai di kawasan Desa Lamdingin Kecamatan Kuta Alam Jln. Syiah Kuala Kota Banda Aceh Provinsi Aceh.

Luas tanah Masjid Al Maghfiroh lebih kurang 1.400 m² dan luas bangunan masjid 18 x 20 m² belum termasuk dua kamar istirahat dan teras. Masjid ini sebenarnya sudah dibangun sejak tahun 1998 sebelum kejadian tsunami 24 Desember tahun 2004. Waktu itu sudah dibangun pondasi, namun karena terhempas Tsunami, semua sarana yang ada hilang tersapu gelombang besar, dan masjid Al Maghfiroh hanya tinggal menjadi kenangan. Jadi pembangunan masjid ini adalah sebagai lanjutan dari pembangunan sebelumnya. Jumlah penduduk masyarakat Dusun Gano lebih dari 200 KK. Selama ini masyarakat Dusun Gano dan sekitarnya yang berdampingan dengan beberapa Desa lainnya melaksanakan kewajiban shalat Jum'at, Aidul Fitri dan Idul Adha ke Masjid Al-Abrar dengan jarak tempuh lebih kurang satu Km jalan kaki.

Dusun Gano adalah Dusun yang mayoritas berpenduduk muslim yang berdampingan dengan sebuah Makam Kerajaan Tgk. Chik di Kuta (Tgk. Syiah) hampir semua pelosok mulai dari Provinsi Aceh sampai ke seluruh provinsi se-Sumatera mengenal luas sejarah makam tersebut, sehingga dijuluki sebagai Makam Keramat dan selalu menjadi tempat penziarah bagi masyarakat yang sudah mengenal Makam tersebut sampai sekarang ini, bahkan sesudah Tsunami

pada 26 Desember 2004 makam tersebut sudah dikenal hampir di seluruh pelosok Indonesia.

Berdasarkan Keputusan Ditjen Bimas Islam RI No. Dj.II/325/Tahun 2009 dalam bagian lampiran disebutkan salah satu bantuan rehabilitasi dan pembangunan Masjid diberikan kepada Masjid Al Maghfiroh dengan alamat lengkap Dsn. Anggreg Gano Kec. Kuta Alam Kota Banda Aceh sebesar Rp. 48.250.000. Anggaran ini adalah dari DIPA Pusat Kementerian Agama tahun 2009.

Penetapan pemberian dana bantuan rumah ibadat ditetapkan melalui Keputusan Direktur Bimbingan Masyarakat Islam, sesuai dengan prosedur permohonan bantuan dan syarat administrasi sesuai pedoman pelaksanaan bantuan sarana peribadatan Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah Ditjen Bimas Islam tahun 2009. Menurut pejabat Kemenag Provinsi Aceh, sebelum penetapan bantuan, sesungguhnya sudah banyak proposal permohonan bantuan untuk rumah ibadat dari beberapa masjid yang masuk kemudian diseleksi sesuai prioritas dan selanjutnya diusulkan ke Kementerian Agama Pusat. Proposal yang masuk ke Kanwil dalam tiap tahun mencapai puluhan namun setelah diseleksi dan dipilih sesuai prioritas maka yang diusulkan ke Kementerian Agama Pusat hanya beberapa saja.

Menurut informasi dari panitia pembangunan Masjid Al-Maghfiroh, sebelum bantuan diberikan ada petugas dari pusat yang melakukan monitoring, begitu juga setelah dana itu cair. Dengan demikian, proses monitoring oleh Kemenag sudah dilakukan sebanyak dua kali ke Masjid Al Maghfiroh.

Dana bantuan dari Kemenag Pusat digunakan untuk biaya rehabilitasi Masjid Al Maghfiroh dengan perincian untuk pembelian semen, batu bata, besi batangan, dan kayu. Seluruh dana bantuan ini digunakan untuk pembelian bahan bangunan yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid dan tidak digunakan untuk ongkos tukang, sehingga kalau dilihat dalam proses pemanfaatan bantuan sudah sesuai dengan tujuan pemberi bantuan.

Menurut Fauzan selaku bendahara panitia pembangunan, untuk proses kelancaran pembangunan Masjid Al Maghfiroh dibentuklah kepanitiaan yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara dan bagian teknis lapangan yang mengurus proses pembangunan di lapangan sesuai gambar bangunan yang ada di proposal. Sehingga dilihat dari struktur kepanitiaan pembangunan ini sudah dibuat sesuai dengan syarat-syarat memperoleh bantuan dari Kemenag Pusat.

Dana bantuan yang diterima panitia pembangunan dari Kemenag Pusat sebesar Rp. 48.250.000. Jumlah ini sesuai dengan yang diterima panitia pembangunan melalui *photo copy* rekening bank milik panitia. Dana bantuan ini digunakan untuk pembangunan Masjid Al Maghfiroh bukan untuk renovasi, karena memang proses pembangunan ini masih dalam tahap awal.

Dana bantuan Kementerian Agama Pusat yang jumlahnya Rp. 48.250.000,- tentunya masih jauh dari permintaan seperti tersebut dalam proposal yang jumlahnya mencapai Rp. 2.121.814.000,- sehingga dana bantuan selain dari Kemenag pusat sangat dibutuhkan. Oleh karena itu panitia pembangunan juga mencari bantuan dari berbagai lapisan masyarakat dan pemberi bantuan lainnya yang tidak mengikat.

Masjid maupun masyarakat sekitarnya merasa sangat bersyukur kepada Kemenag Pusat yang berkenan membantunya, dari dana yang dibutuhkan untuk pembangunan Masjid Al Maghfiroh sesuai proposal sebesar Rp. 2.121.814.000,-. Selain ada dana bantuan dari Kemenag ada juga bantuan dari BRR Aceh sebesar Rp. 410.000.000, dengan dua kali proses pemberian bantuan. Dana dari masyarakat sekitar terkumpul dana Rp. 25.000.000. serta dari dermawan sebanyak Rp. 5.000.000. sehingga total dana yang sudah terkumpul dan sudah dimanfaatkan lebih kurang Rp. 488.250.000. untuk sementara ini pembangunan baru lebih kurang 30% dan sampai penelitian ini dilakukan proses pembangunan sedang berhenti karena belum ada dana lagi. Walaupun demikian panitia dan masyarakat sekitarnya masih tetap berusaha untuk menyelesaikan pembangunan Masjid Al-Maghfiroh dengan mengumpulkan dana bantuan dari masyarakat dan para

dermawan yang berkenan membantunya dan ketika nantinya sudah ada dana yang digunakan untuk melanjutkan proses pembangunan, akan diteruskan pembangunannya.

*Dana Bantuan ke Ormas Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU):
LPPOM*

Organisasi Keagamaan Islam di Kabupaten/Kodya Banda Aceh menurut data Kanwil Kementerian Agama Aceh tanggal 2 Oktober 2009 dari agama Islam ada 65 antara lain: Badan Musyawarah Organisasi Islam Indonesia (BMOIWI), Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Nahdlatul Ulama (LAKPESDAM), Rabithah Ulama Dayah Aceh (RUDA), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Organisasi Foto Amatir Baiturrahman (OFAB), DPP-Front Pembela Syari'at Islam Provinsi Aceh, Majelis Taklim Putroe Kande, PW-Ikatan Remaja Muhammadiyah Aceh, Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA), Pemuda Islam, Forum Penegak Syari'at Islam (FPSI), Pelajar Islam Indonesia (PII), Rabithah Thaliban Aceh, Komite Alumni Pesantren Aceh (KAPA), Majelis Dakwah Islamiyah (MDI), Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), PW-Pemuda Muhammadiyah, PP-Dewan Kemakmuran Masjid Aceh (DKMA), Manajemen Dakwah Aceh (Madah) Jroeh Nanggroe, Lembaga Cinta Al-Qur'an (LCA), DPW-Asosiasi Pengacara Syari'ah Indonesia (DPW-APSI), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Yayasan An-Nisaa' Centre, Majleis Amanah Rakyat Aceh (MARA), Lembaga Kajian Agama dan Sosial (LKAS), Lembaga Muslimat Keadilan, Forum Silahturrahmi Wali Santri/Dayah Aceh (Forsiwarsa Aceh), Majelis Daerah Masyarakat Wisata Ziarah Indonesia (Mawaz), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Kesatuan Aksi Pelajar Muslim Indonesia (KAPMI), Majelis Permuyawaratan Ulama (MPU), Al-Jami'ah Washliyah, Muhammadiyah, Muslimin Indonesia (MI), Nahdlatul 'Ulama (NU), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PTI), Syarikat Islam (SI), Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), Wanita Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Wanita PERTI), Pengajian Al-Hidayah (Al-Hidayah), Majelis Muslimin Indonesia (MMI), Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), Badan Pembina Perpustakaan Masjid

Indonesia (BPPMI), FKDAI, Korp Alumni IAIN Ar-Raniry (Koniry), Aisyiah, PW Ikatan Kader Dakwah (Iskada), Muslimat Al-washliyah (MA), Persatuan Dayah Inshafuddin, Satuan Karya Ulama Indonesia (Satkar Ulama Indonesia), Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Provinsi Aceh (ORWIL ICMI), Jam'iyah Al-Waliyyah (Al-Waliyyah), Persatuan Pengamal Thareqat Islam (PPTI), Persatuan Islam (PERSIS), Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK-NU), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII), Persaudaraan Muslim Indonesia (Parmusi), Muslimat Nahdlatul Ulama (Muslimat NU), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Persaudaraan Muslim, Badan Pembina Perpustakaan Masjid Indonesia (BPPMI), DPW BKPRMI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), Forum Komunikasi Lembaga Dakwah (FKLD) Aceh, dan Ikatan Da'i Indonesia (IKADI) Aceh.

Menurut beberapa informan di Kanwil Kemenag Provinsi Aceh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Provinsi Aceh pada tahun 2009 telah menerima bantuan dari Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan No. Dj.II.2/ 3/KU.05/1272/ 2009 sebesar Rp. 50.000.000,- Bantuan tersebut diperuntukkan pada LP POM yaitu salah satu struktur organisasi dalam MPU yang termaktup dalam Badan Otonom. Badan Otonom adalah badan khusus yang dibentuk oleh pimpinan MPU Aceh untuk menangani masalah-masalah tertentu diantaranya adalah Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM).

Beberapa syarat yang perlu dilengkapi oleh MPU sehubungan dengan adanya bantuan sertifikasi halal antara lain: Rekening Bank MPU serta *photo copy* buku rekening, berita acara serah terima dan kwitansi penerimaan.

Seharusnya pelaksanaan bantuan tersebut dapat direalisasikan mulai bulan September s/d November 2009, dan pertanggungjawaban keuangan paling lambat enam hari setelah dana bantuan direalisasikan, namun dalam proses pengurusan dana bantuan, menurut staf khusus personalia peneliti dan pemeriksaan obat-obatan dan makanan MPU Aceh periode 2009-2012 Hendra Herawadi, ada kesalahan dalam

pembuatan rekening sehingga ada keterlambatan proses pencairan dana sehingga pada tahun 2010 ini dana tersebut baru dapat ditransfer. Menurut Hendra, dana bantuan tersebut nantinya akan digunakan sebagai operasional kegiatan dan juga untuk sertifikasi halal bagi pengusaha kecil/UKM, seperti yang tertera dalam peruntukan dana bantuan tersebut.

Dana Bantuan Rumah Ibadat di Vihara Buddha Dharma

Pada tahun 2009 rumah ibadat di Aceh yang mendapatkan bantuan adalah Vihara Buddha Dharma dengan alamat Jl. Perdagangan No.127 Sabang, Aceh, sesuai surat pemberitahuan dengan nomor DJ.VI/Dt.VI.1/BA.01.1/241/2009. Perlu diketahui Vihara Buddha Dharma dahulu bernama Kelenteng Khong Fuk Kiung aliran Buddha.

Setelah adanya kepastian memperoleh bantuan, kemudian Vihara Budha Dharma melengkapi syarat untuk mendapatkan dana bantuan rumah ibadat. Syarat-syarat yang harus dilengkapi antara lain: Surat permohonan bantuan ditujukan ke Dirjen bimas Budha Kementerian Agama RI, *photo copy* No. rekening atas nama yayasan/Vihara, Proposal pembangunan atau rehab Vihara, *photo copy* sertifikat/ girik/ surat hibah Vihara, Tanda daftar Vihara dari Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama

Menurut informasi dari Pembimas Buddha Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh Wiswadasi, S.Ag, M.Si dan panitia rehabilitasi Vihara dana bantuan rehabilitasi Vihara Buddha Dharma yang diterima adalah sebesar Rp. 15.000.000,- dan digunakan untuk memperbaiki plafon, pengecatan dan pemasangan keramik. Dengan perincian untuk pembelian bahan, pemasangan keramik, pengecatan, dan pemasangan plafon. Setelah dilakukan pengecekan ke lokasi Vihara memang sudah dilakukan perbaikan seperti yang tertera dalam pemberitahuan proposal permohonan rehabilitasi Vihara Budha Dharma. Namun nampaknya dana bantuan tersebut masih juga digunakan untuk ongkos tukang, sehingga masih kurang tepat dalam pemakaian dana bantuan tersebut, yang seharusnya hanya untuk rehab saja.

Dampak Bantuan Sosial Keagamaan

Masjid Al Maghfiroh

Bantuan yang diberikan kepada Masjid Al Maghfiroh sebesar Rp. 48.250.000,- sudah sampai kepada sasaran dan tepat waktunya. Jika dilihat sesuai aturan pemberian bantuan ini sudah dengan proses dan prosedur pemberian bantuan, dimana pada tahap awal dan setelah dana itu cair sudah ada tim evaluasi.

Mengenai dampak bantuan bagi pengembangan fisik Masjid Al Maghfiroh sudah terlihat, dimana sudah berdiri bangunan satu lantai dengan tembok belum diplester dan belum dicat. Namun demikian, kalau bangunan tersebut digunakan untuk kegiatan peribadatan dan sosial keagamaan, maka belum layak untuk digunakan. Untuk sementara ini kegiatan peribadatan masih dilakukan di mushala Al Muhajirin yang berada di samping Masjid Al Maghfiroh, di mana setiap hari telah dilaksanakan kegiatan keagamaan, diantaranya pengajian umum yang dalam satu minggu dilaksanakan tiga kali yaitu setiap malam senin, malam kamis dan malam jum'at. Selain itu juga ada pengajian anak-anak yang dilaksanakan pada malam ahad, selasa dan rabu, sedangkan pada malam sabtu khusus untuk kegiatan wiridan bagi warga sekitarnya. Di dalam mushala Al Muhajirin, pada tahun 2009 juga pernah dilakukan akad nikah sebanyak empat kali oleh warga sekitarnya.

Adanya pembangunan Masjid Al Maghfiroh menurut beberapa informan karena mushala Al Muhajirin sudah tidak bisa menampung para jamaah. Dan untuk melakukan ibadah shalat jum'at bertempat di masjid lain. Untuk melaksanakan ibadah jum'at, masyarakat sekitar Masjid Al Maghfiroh harus berjalan kaki cukup jauh, karena dari empat desa di sekitarnya belum ada masjid.

Menurut panitia pembangunan dan masyarakat sekitar Masjid Al Maghfiroh, ketika pembangunan sudah selesai, masjid ini akan digunakan untuk empat desa disekitarnya. Penggunaan masjid Al Maghfiroh nantinya tidak hanya digunakan untuk kegiatan

keagamaan, namun juga akan digunakan untuk kegiatan sosial masyarakat sekitarnya.

LPPOM: MPU Aceh

Menurut pengurus LPPOM, kesadaran pengusaha di Aceh untuk menggunakan sertifikasi halal masih rendah padahal untuk memperolehnya sangat mudah, tanpa dikutip bayaran.

Hingga saat ini baru enam produk yang mendapat sertifikasi halal, yakni kopi Gayo Mountain, Shuns (bumbu masakan), bubuk kopi Ule Kareng, sirup menara, dendeng ikan blang raya, emping, dan kopi produk Blangrakal. Sebenarnya banyak sekali produk makanan di Aceh yang seharusnya memiliki sertifikasi halal, tapi hal tersebut tidak dilakukan oleh pengusaha di daerah itu. Untuk itu, diharapkan agar pengusaha Aceh mendaftarkan segera produknya ke LPPOM MPU Aceh untuk mendapatkan sertifikasi halal, agar bisa bersaing di pasar dalam dan luar negeri.

Jadi selama ini LPPOM MPU Aceh kurang melakukan sosialisasi, karena katanya terkendala dana sehingga kondisi riil yang dihadapi LPPOM MPU Aceh masih belum bisa bekerja maksimal dan struktur organisasi belum memadai, karena personelnnya masih bersifat sementara atau tenaga lepas. Sehingga dengan adanya bantuan Kemenag LPPOM merasa sangat bersyukur. Harapan LPPOM agar pemerintah Aceh serius untuk memperhatikan LPPOM ini, sehingga menjadi badan yang benar-benar serius menangani sertifikasi halal demi kemajuan industri di daerah ini.

Vihara Budha Dharma Sabang

Menurut informasi dari beberapa pengurus Vihara sebelum dilakukan perbaikan, Vihara Budha Dharma atapnya bocor dan lantainya juga rusak sehingga ketika sedang melakukan ibadah menjadi kurang nyaman dan kalau sedang musim penghujan atap Vihara tersebut bocor. Namun setelah dibenahi Vihara Budha Dharma menjadi lebih nyaman dan semakin khusyu dalam melakukan peribadatan.

Para pengurus Vihara Budha Dharma merasa sangat bersyukur terhadap adanya bantuan rehabilitasi rumah ibadat ini. Mereka juga berharap selain mendapatkan bantuan rehabilitasi rumah ibadat hendaknya pemerintah juga memperhatikan umat Budha yang berada di Sabang baik dari sisi pembinaan maupun dari sisi pendidikan. Menurut pengurus Vihara Budha Dharma Chandra Sien, S. Ag, jumlah umat Budha di Sabang lebih kurang 80 KK, namun belum ada Panditanya, juga belum ada guru tetapnya/PNS, sehingga pengurus Vihara khawatir kalau-kalau umat mereka terseret pada ajaran sesat karena pak Chandra sendiri belajar tentang agama Budha lebih banyak dari buku-buku agama yang ada dan dikirimkan oleh pemerintah Pusat. Pandita yang datang ke Sabang hanya sekitar tiga bulan sekali dan untuk pembinaan terhadap umatnya dengan waktu yang amat singkat tentunya belum bisa maksimal. Untuk itu hendaknya pemerintah benar-benar memperhatikan hal ini. Organisasi Keagamaan yang berasal dari Agama Buddha ada satu yaitu VBT Buddha dan belum pernah mendapat dana bantuan keagamaan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Beberapa faktor pendukungnya antara lain warga masyarakat sekitar rumah ibadat dan pemerintah setempat mendukung sepenuhnya dengan adanya pembangunan Masjid Al Maghfiroh, renovasi Vihara Buddha Dharma dan operasionalisasi LP-POM. Kemudian adanya persyaratan pengajuan administratif yang simpel sehingga banyak pemohon bantuan yang masuk ke Kanwil, walaupun hanya sebagian saja yang dapat dipenuhi. Adanya koordinasi pusat dengan Kanwil atau Kabupaten atau Kota sehingga bantuan menjadi tepat sasaran, khususnya ke Masjid Al-Maghfiroh dan Vihara Budha Dharma.

Adapun faktor penghambatnya antara lain adanya keterbatasan dana dari pemerintah pusat sehingga hanya sebagian proposal yang mendapatkan bantuan. Pencairan dana memakan waktu cukup lama, bahkan terjadi kesalahan dalam pembuatan rekening

sehingga berdampak keterlambatan pencairan dan dana belum dapat dimanfaatkan sesuai keperluan penerima bantuan seperti di LPPOM.

Penutup

Pemberian dana bantuan rumah ibadat dan ormas keagamaan oleh pemerintah pusat ke Kota Aceh masih sangat terbatas. Padahal bantuan tersebut sangat dibutuhkan, karena Aceh pasca Tsunami dan berbagai konflik yang telah melanda masih memerlukan berbagai dukungan dan bantuan baik dari sisi fisik maupun rohani sehingga sekecil apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam hal ini Kementerian Agama sangat diharapkan.

Bantuan yang diterima oleh panitia pembangunan Masjid Al Maghfiroh sudah sesuai prosedur yang ditentukan oleh Kementerian Agama Pusat, seperti mengajukan proposal ke Dirjen Bimas Islam. Pada waktu pencairan dana bantuan, dari pihak penerima bantuan ormas Keagamaan MPU (LP-POM) kurang memahami syarat-syaratnya walaupun sudah diberitahukan dan kurang adanya koordinasi antara Kemenag Pusat dan Kanwil sehingga terjadi kesalahan dalam pembuatan rekening. Karena kesalahan tersebut, dana bantuan menjadi terlambat dan terlambat pula dalam pemanfaatannya.

Dalam hal realisasi dana bantuan keagamaan di Masjid Al Maghfiroh sudah digunakan sebagaimana tujuan penggunaan dana bantuan. Sedangkan dana bantuan untuk renovasi Vihara juga sudah digunakan sebagaimana mestinya bahkan sumbangan dari umat Budha justru lebih banyak. Sedangkan dana bantuan untuk LPPOM belum dapat direalisasikan karena adanya keterlambatan dalam penerimaan.

Dengan adanya dana bantuan untuk rumah ibadat dan ormas keagamaan tersebut telah meringankan beban masyarakat sekitarnya dan menambah semangat beribadah warga sekitar di komunitas agama masing-masing.

Daftar Pustaka

- Asry, M. Yusuf dan Amiur Nuruddin, 2009. *Pemberdayaan Lembaga Keagamaan Dalam Kehidupan Ekonomi dan Sosial*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat.
- Departemen Agama RI, Inspektorat Jenderal, 2005. *Pengawasan Dengan Pendekatan Agama*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Agama RI Nomor 77 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Menteri Agama dan Sekretaris Jenderal Departemen Agama Bagi Lembaga-Lembaga dan Kegiatan Keagamaan
- Departemen Agama RI, Inspektorat Jenderal, 2008. *Modul Pengawasan Dengan Pendekatan Agama*. Jakarta.
- Departemen Agama RI, Dirjen Pendis, 2009. *Pondok Pesantren*. Jakarta.
- Faisal, Sapaniah, 2003. *Format-format Penelitian Sosial*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Makmur, Syarif, 2008. *Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektifitas Organisasi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu, 2009. *Evaluasi Kinerja SDM*, PT. Refika Aditama, Cet. Ke IV.
- Sinambela, Lijan Poltak, (et.all.) 2008. *Reformasi Pelayanan Publik Teori Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara, Cet. Ke IV.
- <http://kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id2=visimisi> diakses tanggal 26 Juni 2010

Penyiaran Agama dalam Perspektif Islam dan Kristen di Panakkukang Kota Makassar

Muchit A Karim

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

In Makassar city there are many problems and issues concerning religious life. The main cause is not on the main teachings, but it is more on historical circumstances, economic, and political, such as the competition for control of economic resources is unfair. Domination and power politics which are unequal have prevented the harmonious relationship between religious groups. That is why, the escalation of problems that arise in the relationship among religious groups are determined by the appeal and influence of religious leaders at all levels.

Keywords: *religious broadcasting, mutual cooperation, national stability, tabligh akbar.*

Latar Belakang

Penyiaran agama merupakan tugas suci bagi para penganut agama, sehingga umat menganggap aktivitas penyiaran agama merupakan ibadah. Sebagai aktivitas beribadah, semestinya secara teoritik pelaksanaan penyiaran agama dilakukan dengan tidak mencemari ibadah yang dilakukan, yakni tidak menggunakan cara-cara kekerasan. Akan tetapi dalam praktek

masih dijumpai penyiaran agama dilakukan kurang mengindahkan etika, dan tidak mengindahkan tata aturan berdakwah. Apalagi jika tingkat fanatisme keagamaan para tenaga penyiar agama cukup tinggi dan cenderung eksklusif, maka penyiaran agama yang dilakukan akan lebih memberikan informasi negatif terhadap agama lain yang berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama. Dinamika penyebarluasan ajaran agama di tengah maraknya penyiaran agama itu pada gilirannya cenderung rentan terjadinya praktek penyiaran agama yang dapat mengganggu keharmonisan hubungan antar umat beragama.

Menyikapi kemungkinan terjadinya disharmoni antar umat beragama akibat praktek penyiaran agama itu, pemerintah sejak lama telah mengeluarkan beberapa peraturan ttg penyiaran agama. Peraturan dimaksud antara lain Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1979 ttg Tatacara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri Kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia, khususnya Bab III Pasal 3 dan Pasal 4 menyebutkan antara lain bahwa penyiaran agama dilakukan dengan semangat kerukunan tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati antara sesama umat beragama serta dilandaskan kepada penghormatan atas hak kemerdekaan seseorang untuk menganut dan melakukan agamanya. Sedangkan pasal 4 menyebutkan antara lain penyiaran agama tidak dibenarkan ditujukan kepada orang atau kelompok orang yang telah memeluk agama lain dengan cara: bujukan, penyebaran panflet, majalah atau sejenisnya, serta melakukan kunjungan dari rumah ke rumah.

Persebaran pemeluk agama tidak merata antara satu dengan agama lain. Oleh karena itu penyiaran agama tidak merata di berbagai daerah yang akan menimbulkan karakter-karakter daerah mayoritas, minoritas agama tertentu dan daerah yang cenderung seimbang antara agama satu dengan yang lain. Adanya perbedaan karakter daerah mayoritas dan minoritas jumlah pemeluk agama dalam kajian ini diasumsikan adanya perbedaan penyiaran agama antara daerah mayoritas dan minoritas pemeluk agama di daerah-daerah tertentu,

yang dimungkinkan terjadi tekanan mayoritas terhadap minoritas umat beragama sebagai sub-ordinasi.

Maraknya konflik bernuansa agama di kalangan masyarakat di berbagai daerah akhir-akhir ini salah satu faktor penyebabnya dimungkinkan adanya praktek penyiaran agama yang cenderung eksklusif, lebih mementingkan kelompok agama sendiri, kurang mengindahkan etika serta rambu-rambu dan tatacara penyiaran agama yang telah diatur pemerintah, sehingga kurang memberikan kontribusi bagi peningkatan kerukunan antar umat beragama. Berkenaan dengan hal tersebut perlu untuk melakukan kajian tentang Penyiaran Agama dalam Perspektif Agama Islam dan Kristen di Panakukang Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Permasalahan

Permasalahan pokok dalam kajian ini adalah Penyiaran Agama dalam perspektif Agama Islam dan Kristen, di Panakukang Makassar Sulawesi Selatan, mengungkap persoalan-persoalan berikut: pelaksanaan sistem penyiaran agama Islam dan Kristen di Kota Makassar dan dampak penyiaran agama terhadap pengamalan ajaran agama, latar belakang subjek (pelaku: individu atau lembaga), metode penyiaran agama di masing-masing agama, dan fakta penyiaran yang ekspansif atau bijak, Bagaimana pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem dakwah masing-masing komunitas agama terkait pasal 3 dan 4 SKB Menag-Mendagri tahun 1979 dan Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penyiaran di masing-masing komunitas agama.

Tujuan

Pengkajian ini bertujuan: Mengetahui pelaksanaan sistem penyiaran agama di komunitas agama Islam dan komunitas agama Kristen, Mengetahui latar belakang subjek (pelaku: individu atau lembaga), metode penyiaran agama di komunitas Islam dan Kristen serta ada tidaknya praktek penyiaran agama yang ekspansif, Pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan sistem dakwah masing-

masing komunitas agama terkait SKB Menag–Mendagri tahun 1979 dan mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penyiaran agama di masing-masing komunitas di atas.

Kerangka Konsep

Dalam agama Islam, dakwah (Islamiyah) berarti ajakan, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran agama (Islam). Da'i adalah orang yang melakukan dakwah (Ensiklopedi Indonesia 2, 1980:739). Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan, seruan, panggilan atau undangan (Chatidjah Nasution, 1971: 5). Selain berarti seruan atau ajakan kepada pemeluk, juga berarti mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran agama Islam (Pdt. P. Sihabutar, dalam Arifinsyah (Ed), 2003: 68-71).

Dalam agama Kristen, penyiaran agama diistilahkan missi. Dalam sejarah gereja, missi dipahami sebagai suruhan (dari Tuhan) untuk keluar dari lingkungan sendiri ke tengah masyarakat untuk memberitakan berita Injil. Tugas dalam missi adalah memberitakan, mengajarkan Injil dan barangsiapa yang percaya dibaptis. Missi tidak saja menyangkut iman, tetapi juga menyangkut kehidupan manusia, ditujukan untuk mensejahterakan manusia lahir batin. Umpama: membantu orang miskin, orang terpenjara, orang sakit, tuna wisma.

Memperhatikan berbagai pengertian di atas, maka penyiaran agama dapat dipahami sebagai seruan, maupun ajakan untuk melakukan kebaikan sesuai ajaran agama, untuk memeluk, serta untuk melaksanakan ajaran agama. Masing-masing agama mengenal istilah penyiaran dengan nama yang beragam. Setiap agama cenderung hampir sama dalam memahami istilah penyiaran agama, namun untuk keperluan kajian ini pengertian dakwah dielaborasi sesuai pengertian dan pemaknaan menurut masing-masing agama.

Penyiar agama dalam kajian ini meliputi para juru penyiar baik perorangan maupun penyiar agama yang berafiliasi dalam lembaga dakwah. Adapun penyiaran agama dalam kajian ini lebih diutamakan agama-agama yang dianggap memiliki intensitas dakwah cukup tinggi, seperti Islam dan Kristen.

Metodologi Penelitian

Kajian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan sosiologis. Eksplanasi hasil kajiannya bersifat deskriptif. Sebagai kajian dengan paradigma kualitatif sebagaimana diusung oleh Merriam (1988) maka dalam kajian ini peneliti merupakan instrumen pokok, baik dalam proses pengumpulan data maupun analisis data. Data didekati melalui instrumen manusia (John W. Creswell, dalam Aris Budiman, et. All, (Ed), 2002: 140).

Data dikumpulkan melalui wawancara, penelusuran literatur dan dokumen serta pengamatan. Wawancara dilakukan kepada para informan yang terdiri atas unsur masyarakat dari umat beragama di Panakkukang, seperti: para pemimpin/tokoh agama, pimpinan organisasi dan lembaga keagamaan serta pelajar/mahasiswa (Ida Bagoes Mantra, 2004: 86).

Penelusuran literatur dan dokumen dilakukan dengan menelaah buku-buku, majalah serta naskah dan dokumen yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sedangkan pengamatan dilakukan terhadap kegiatan penyiaran agama selagi hal itu memungkinkan untuk dilakukan. Data yang berhasil dikumpulkan kemudian diolah melalui tahap: editing, klasifikasi, komparasi dan selanjutnya diinterpretasi untuk memperoleh pengertian baru untuk bahan penyusunan laporan hasil kajian.

Gambaran Umum Wilayah

Kondisi Geografis

Panakkukang merupakan salah satu dari 14 kecamatan di Kota Makassar, berbatasan di sebelah utara dengan Kecamatan Ujung Pandang, sebelah timur Kecamatan Mamajang, sebelah selatan Kecamatan Tamalate, dan sebelah barat Selat Makassar. Wilayahnya mencapai 17.15 km², meliputi 11 kelurahan masuk kategori swasembada, terbagi atas 88 RW serta 456 RT. (BPS Kota Makassar. 2006: 6). Yakni Kelurahan Palopo, Karampuang, Pandang,

Masale, Tamamaung, Koruwisi, Sinnijala, Koruwisi Utara, Pampang, Panaikang dan Kelurahan Teblobaru.

Penyiaran Agama dan Kebijakan Pemerintah

Penyiaran agama mempunyai istilah yang berbeda dalam berbagai agama di Indonesia, terutama: dalam agama Islam, dakwah berarti ajakan, seruan untuk memeluk, mempelajari dan mengamalkan ajaran Islam. Da'i (juru dakwah (ensiklopedi Indonesia), 1980: 739. Kata dakwah berasal dari bahasa Arab yang berarti ajakan seruan, panggilan atau undangan (Chodijah Nasution, 1971: 5). Selain itu berarti juga mempelajari, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam (Pdt. P. Sihaputar, dalam Arifansyah (Ed) 2003: 68-71).

Penyiaran dalam Kristen diistilahkan missi. Dalam sejarah gereja, missi dipahami sebagai suruhan (dari Tuhan) untuk keluar dari lingkungan sendiri ke tengah masyarakat untuk memberitakan berita Injil. Tugas dalam missi adalah memberitakan mengajarkan Injil dan barangsiapa percaya dibaptis. Missi tidak saja menyangkut iman, tetapi juga menyangkut kehidupan manusia, ditujukan untuk mensejahterakan manusia lahir batin. Umpama: membantu orang miskin, orang terpenjara, orang sakit, tuna wisma. Agama Katolik, mendefinisikan "penyiaran agama" hampir sama dengan perkataan "missi atau Zending" sama halnya dakwah Islam, missi Katolik bersifat universal. Untuk menghindari bentrokan sifat damai keagamaan maka harus dibina dengan suatu cara yang mengindahkan tugas suci keagamaan yang diyakini.

Kementerian Agama mengeluarkan pedoman penyiaran agama dan memberi fasilitas bagi umat beragama untuk mengadakan dialog dan kerjasama membangun kerukunan hidup beragama merupakan agenda yang harus dijalankan dengan hati-hati mengingat agama lebih menegaskan "klaim kebenaran" daripada "mencari kebenaran". Sejumlah pedoman telah digulirkan, namun pada kenyataannya di lapangan terutama penyiaran agama, pembangunan rumah ibadah, masih saja menimbulkan masalah.

SKB Menag – Mendagri No. 1 tahun 1979 di atas dewasa ini telah dipahami keberadaannya sebagian besar penyiar agama di Panakkukang. Muhiddin salah seorang da'i mengatakan :

Namun sebagian penyiar agama belum memahami peraturan tersebut memberi bantuan sekaligus melakukan kunjungan ke rumah-rumah tanpa memperhatikan apa agama dan keyakinan yang mereka anut.

Akan tetapi rasa empati seperti itu sering mengundang kecurigaan umat lain. Tema-tema penyiaran yang sering diangkat adalah jangan menjual iman dengan sebungkus Indomie. Tidak jelas seberapa banyak orang yang ditolong itu kemudian beralih agama.

Subyek Penyiaran Agama

Penyiar agama adalah para penyiar baik perorangan maupun yang berafiliasi ke lembaga dakwah.

Juru dakwah adalah seorang kader atau pemimpin. hidup dalam masyarakat yang terus berubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam memberikan arah yang benar penyiar agama pasti akan menemukan tantangan yang berat. Penyiar agama harus mempunyai kesiapan ilmu yang baik, berupa ilmu agama maupun ilmu-ilmu berdakwah, pengalaman hidup dan memahami karakter umat yang menjadi obyek dakwah. Dalam Islam ada beberapa hal yang menjadi kriteria kepribadian seorang da'i yaitu: a) Iman dan taqwa kepada Allah Swt; b) Tulus Ikhlas dan tidak mementingkan diri sendiri; c) Ramah dan penuh pengertian; d) Tawadhu' (rendah hati); e) Sederhana dan jujur; f) Memiliki semangat; g) Sabar dan tawakkal; h) Memiliki sifat toleran; i) Bersifat terbuka; j) Berakhlak mulia; k) Disiplin dan bijaksana; l) Bertanggungjawab; m) Berpengetahuan dan berpandangan luas. (Kasma. 1999: 51).

Lembaga Dakwah

Seorang da'i wajib memiliki pengetahuan mengenai permasalahan dakwah, syari'at Islam, halal-haram, ilmu-ilmu sosial dan budaya.

Karena dengan kecerdasannya itu seorang da'i akan mampu menganalisis permasalahan seseorang, peristiwa dengan solusi ilmiah, sistematis dan akurat, sehingga ia dapat mengubah penerima dakwah dari tidak tahu atau kurang baik menjadi lebih baik.

Di Panakkukang terdapat beberapa lembaga keagamaan yang bergerak di bidang penyiaran agama Islam antara lain:

Persyarikatan Muhammadiyah

Organisasi keagamaan ini dianggap berhasil mengembangkan dakwahnya karena dalam membina umat mempunyai banyak usaha, seperti pembangunan sekolah-sekolah. Aisyiyah yang mampu memotivasi kegiatan pengajian dan arisan. Secara aktif organisasi ini menyelenggarakan pengajian-pengajian di rumah-rumah penduduk yang dilaksanakan secara berkala,

Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)

Organisasi ini bekerjasama dengan pemerintah memfokuskan kegiatannya pada pengajian ibu-ibu, dan para remaja masjid. MDI menyelenggarakan acara-acara lomba qasidah, adzan, wudlu, shalat dan lain-lain.

Remaja Masjid

Setiap masjid di Panakkukang sudah terbentuk organisasi ini. Kegiatannya tadarus setelah selesai shalat maghrib dan isya', dan pengajian secara berkala setiap bulan.

Panitia peringatan Hari-hari Besar Islam (PHBI)

Pelaksanaan peringatan hari-hari besar Islam di Panakkukang tidak sekedar untuk mengenang sejarah perjuangan Rasulullah, bersama para sahabat dalam menegakkan dan membela Islam dari orang-orang kafir, tapi juga harus mampu memotivasi atau mendorong umat untuk mengembangkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat, terutama dalam mewujudkan solidaritas sosial.

Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga dimaksud adalah formal dan non Formal Lembaga Formal berupa: Madrasah dan Sekolah Dasar Islam, sedangkan non Formal seperti Taman Pendidikan al-Qur'an. Keberadaannya merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dan masyarakat dalam mengembangkan dakwah Islamiyah. Misi lembaga tersebut ialah menciptakan dan melahirkan manusia-manusia berilmu dan beriman sebagai generasi penerus dakwah.

Ikatan Masjid Mushalla Indonesia Mittahidah (IMMIM)

Lembaga ini bergerak pada ruang lingkup masjid dan mushalla, serta sarana pendidikan di Kota Makassar keberadaannya mempunyai peran penting terhadap perkembangan umat Islam, lembaga ini berinisiatif mengambil alih tugas dan fungsi masjid sebagai tempat penggudokan para mubaligh agar penampilannya lebih berkualitas.

Di kalangan umat Kristen juga terbentuk berbagai organisasi gereja, yang tergabung dalam Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) yang mempunyai peranan besar dalam pengembangan misi keagamaannya. Di dalamnya terdapat ratusan aliran dengan sikap eksklusifnya masing-masing. Dan karena itu dapat dipahami kalau gereja akan banyak bertebaran dimana-mana sesuai persebaran kelompok aliran dan sub-sub aliran yang memiliki gereja sendiri-sendiri. Mereka tidak saling melintasi gereja untuk beribadah. Itulah sebabnya setiap komunitas Kristen selalu berusaha untuk mendirikan gerejanya sendiri, atau mereka akan mencari gereja sejenis meskipun di luar komunitas tempat tinggalnya.

Obyek Penyiaran Agama

Obyek penyiaran agama adalah umat beragama dan yang belum beragama. Umat beragama di Indonesia terdiri dari Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan Konghucu. Sedangkan mereka yang belum beragama pada umumnya suku terasing yang tinggal di pedalaman. Dakwah kepada kedua kelompok di atas berbeda dalam bobot materi, metode dan teknik penyampaiannya. Dakwah kepada

selain penganut Islam hanya bersifat menyeru dan mengajak serta harus dihindari sikap merendahnya. Sehingga pelaksana dakwah harus sabar, apabila seruan itu belum diperkenankan.

Menurut Mansur salah seorang da'i di Panakkukang, penerima dakwah adalah masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perkotaan maupun di desa, yang telah atau belum maju pola dan cara hidupnya. Penerima dakwah merupakan kesatuan kelompok persamaan profesi atau kerja, waktu mereka berkumpul dalam rangka pertemuan Rukun Warga (RW), atau Rukun Tetangga (RT) sehingga menjadi semakin sempit, maka dakwah melalui media cetak, media elektronik seperti radio dan televisi menjadi sangat penting, peranya. Shalat Jum'at pegawai atau buruh dilakukan di tempat kerja di kantor, pabrik dan sekolah. Bagi orang yang sehari-hari sibuk di luar, walaupun libur pada hari Sabtu dan Minggu umumnya dimanfaatkan untuk acara keluarga. Dan untuk itu penyiaran agama harus bisa menanti para penerima baik materi dan metode penyampainya.

Penerima dakwah yang telah berkeluarga, masyarakat keagamaan berbeda, seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI), Elemen-elemen Korp Alumni Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Hizbuttahrir, Wahdah Islamiyah, Jamaah Tabligh, Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), berbagai etnis, lingkungan kerja dan sebagainya.

Materi Penyiaran

Penyampaian materi penyiaran menggunakan pendekatan substansial, dengan memilih aspek ajaran agama dengan, dalil-dalil sesuai kebutuhan penerima dakwah. Dari substansi terpilih dijabarkan menjadi substansi yang lebih sempit. Kemudian juga pendekatan pragmatis yakni materi dakwah ditetapkan atas permintaan calon pendengarnya disesuaikan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Dalam forum tabligh akbar umpamanya, para peserta; berbeda jenis kelamin, usia, latar belakang sosial ekonomi, pendidikan dan tingkat berfikirnya, sehingga materinya harus bersifat umum.

Materi umum dan sejarah Islam. Penyiara agama di Panakkukang banyak menyampaikan materi menyangkut aspek keimanan, pengetahuan agama, pendidikan, ekonomi, dan kerukunan hidup beragama.

Dikalangan umat Kristiani penekanan materi penyiaran diarahkan pada ajaran, meliputi ajaran cinta kasih, dengan penekanan terhadap Keesaan gereja. Di dalam Kristen perbedaan gereja merupakan sesuatu yang biasa. Hal itu terkait dengan aliran yang mereka anut. Pendeta Yakob Kila Rumbi dari Persekutuan Gereja-gereja Indonesia Sulsel mengatakan, perlu dibedakan antara aliran dan sekte. Aliran itu misalnya Protestan, Katolik, dan Advent, sedangkan sekte itu sempalan-sempalan yang sesat keluar dari ajaran al-Kitab. Ajaran cinta kasih diharapkan umat Kristiani mampu melaksanakan ajaran al-Kitab dan memberitakannya kepada segenap umat manusia, baik anak-anak, muda-mudi, kaum remaja maupun orangtua.

Dampak Penyiaran

Misbah Djabir mengemukakan dakwah Islam mulai nampak berpengaruh ditandai dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengamalan ajaran agamanya. Kesenian yang bernafaskan Islam seperti qasidah rabbana, seni baca al-Qur'an mulai digemari masyarakat. Hal itu nampak pada acara-acara keagamaan yang diselenggarakan masyarakat. Pengaruh lain adalah dalam membina adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Islam seperti pelaksanaan adat perkawinan, kelahiran anak dan beberapa upacara keagamaan lainnya. Sedangkan adat istiadat yang tidak sesuai ajaran Islam, berangsur-angsur ditinggalkan masyarakat. Dalam acara pernikahan nampak pengaruh syariat Islam, perkawinan dilangsungkan sesuai ketentuan syariat Islam.

Di kalangan umat Kristiani, menurut Jeremia Djadi, Pendeta Gereja Tanatoraja, bahwa pelayan agama di Panakkukang cukup berpengaruh pada peningkatan pengamalan agama. Umpamanya anjuran terhadap para pemuda bahwa menghadapi hidup dan kehidupan di dunia ini, membutuhkan perjuangan panjang. Untuk

itu setiap umat Kristiani termotivasi melaksanakan ajaran itu sehingga jarang dijumpai umat Kristiani yang nganggur, mereka selalu kerja keras walaupun tidak sesuai dengan keahlian.

Metode Penyiaran Agama

Masyarakat Panakkukang yang majemuk dari segi etnis, agama maupun sosial budaya, ada yang tinggal di perkotaan dan pedesaan, ada yang cara berfikirnya sudah maju, ada pula yang masih rendah, begitu pula dalam masalah faham keagamaan yang dianut cukup beragama. Penziar agama dalam menghadapi kenyataan ini harus mampu menerapkan metode dakwah yang sesuai dan tepat menghadapi beragam karakter dengan ragam persoalan yang dihadapinya.

Menurut H. Nurdin mantan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, para da'i di daerahnya masih banyak menggunakan metode tradisional dalam bentuk pengajian, ceramah dan tabligh akbar, khususnya bagi masyarakat pedesaan. Bagi masyarakat perkotaan sudah mulai menggunakan metode-metode inovatif.

Metode ceramah digunakan ketika jamaah yang dihadapi cukup banyak misalnya di masjid-masjid, terutama ketika pelaksanaan shalat Jum'at, peringatan Hari-hari Besar Islam, Tabligh Akbar dan lain-lain para da'i menggunakan metode ini. Agar ceramah didengar secara luas oleh masyarakat pendengarnya, biasanya di masjid-masjid digunakan pengeras suara.

Metode Persuasif yakni metode yang digunakan untuk mengajak masyarakat ke jalan yang benar. Metode ini digunakan tidak terlepas adanya fakta-fakta sosial dan psikologis yang dihadapi masyarakat setempat, umpamanya menghadapi masyarakat Panakkukang yang mempunyai rasa solidaritas dan kekeluargaan tinggi, pemegang teguh adat dan tradisi nenek moyang. Untuk mengajak mereka ke arah yang lebih baik diperlukan pendekatan pribadi, atau kelompok, sehingga mereka merasa tersentuh sanubarinya. Dengan metode ini para da'i menyampaikannya secara menarik.

Metode Tabsyir (memberi kabar gembira), dimaksudkan untuk mendorong manusia melakukan kebajikan, dengan imbalan pahala dari Yang Maha Kuasa. Metode ini dilakukan dengan lemah lembut, penyajian materi secara sistematis sesuai tingkat pemahaman masyarakat setempat. Da'i membuat target yang ingin dicapai serta evaluasi sejauh mana materi dakwahnya dapat dipahami dan diamalkan masyarakat. Metode ini lebih tepat sebagai konsumsi masyarakat awam yang belum mampu menangkap pengertian yang tinggi, sehingga mereka mudah memahami ajakan yang disampaikannya.

Metode dialog dan tanya jawab; metode ini digunakan menghadapi masyarakat yang tingkat kecerdasannya berada antara level cendekiawan dan awam, mereka suka membahas sesuatu, tapi hanya pada tingkat dan batas tertentu serta tidak sanggup mendalam benar. Metode ini sering dilakukan pada pengajian atau Majelis Ta'lim kelompok bapak-bapak maupun ibu-ibu serta remaja, metode ini bukan hanya cocok pada ruang tanya jawab di radio, surat kabar dan majalah, tetapi sesuai untuk mengimbangi dan memberikan selingan pada waktu pelaksanaan ceramah di Majelis Ta'lim dan lain-lain, untuk mengurangi kesalah-pahaman, dan menjelaskan perbedaan pendapat serta penjelasan terhadap hal-hal yang belum dipahami.

Sementara di kalangan umat kristiani, di samping mereka menggunakan metode ceramah dan khutbah-khutbah di gereja, mereka memiliki metode dakwah yang jauh lebih maju dibanding umat islam, umpamanya membangun rumah-rumah ibadah, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, bantuan usaha ekonomi, seperti pemberian kredit, menyediakan tenaga ahli dan terampil, konsultan penyambung usaha dan sebagainya.

Dana untuk kegiatan dakwah diperoleh dari sumbangan anggota jemaah melalui persepuluhan, kotak gerakan, kotak amal serta sumbangan jemaat dan simpatisannya. Persepuluhan adalah dana yang diperoleh dari penghasilan jemaat, baik mingguan atau bulanan. Setiap penghasilan jemaat dipotong 10%. Dana diperoleh juga dari

pihak luar, karena simpati dengan kegiatan itu. Dana juga diperoleh dari Pemda setempat.

Pandangan Masyarakat

Di Kota Makassar masih banyak permasalahan di sekitar kerukunan hidup beragama, penyebab utamanya bukanlah inti ajaran namun lebih ditentukan oleh situasi historis, ekonomis, politisi yang melingkari komunitas umat beragama. Kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi, hegemoni politik dan kekuasaan jauh lebih tidak mewarnai ketidakmesraan hubungan antara pemeluk agama, oleh karena itu eskalasi masalah-masalah yang timbul dalam hubungan antar umat beragama sangat ditentukan oleh pemuka-pemuka agama di semua tingkatan. Peran kunci tokoh agama khususnya penyiar agama di semua lini amatlah menentukan perkembangan kehidupan beragama.

Menyikapi kondisi semacam itu hendaknya penyiar agama menyadari keberadaannya dengan melakukan langkah bijaksana dalam penyiaran agama ditengah masyarakat yang beragam agamanya, umpamanya dakwah agama tidak hanya mengekspresikan agamanyasendiri, melainkan dengan mempertimbangkan keberadaan pemeluk agama lainnya. Sehingga dakwahnya tidak dianggap dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Kesadaran para penyiar perlu terus ditingkatkan, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan.

Pembangunan rumah ibadat oleh umat kristiani di suatu wilayah masih sering di protes umat Islam. Hal itu tumbuh manakala, diduga akan dibangun rumah ibadah. Belakangan komunitas Islam di Jl. Racing Centre di Kelurahan Karampuang, melakukan aksi protes dengan mengumpulkan tanda tangan warga untuk menolak pembangunan sebuah gedung. Gedung itu tepat berada di sudut jalan berbatasan dengan perumahan UMI, masjid Alaudnyadaridin. Gedung tersebut kemudian diketahui sebagai kantor Persatuan Gereja-gereja Indonesia Sulsera. Pihak PGI menjelaskan, bahwa

protes dilakukan warga muslim. Menurut Pendeta Yakob Kila Rambi dari Persatuan Gereja-Gereja Indonesia Sulsera mengatakan.

Sejak awal dibangunnya kantor ini ada surat protes termasuk dari keluarga besar UMI, karena kurang jelasnya informasi. Mereka menyangka bangunan itu adalah gereja, padahal sebenarnya hanyalah kantor PGI yang merupakan himpunan semua gereja-gereja. Disana dibicarakan Tentang pelayanan umat di bidang kesehatan, ekonomi, dan masalah sosial lainnya. Setelah mereka mengetahui tujuan yang sebenarnya pendirian gedung itu masyarakat muslim menyadari dan tidak melakukan protes lagi.

Kantor Advent yang letaknya berdekatan kantor PGI juga pernah di teror orang tidak dikenal. Kantor Gereja Advent Masehi Hari Ketujuh Sulsera berfungsi sebagai kantor yang sifatnya umum, ada pelayanan kesehatan, kegiatan pertemuan Konferensi Tahunan Wilayah Sulawesi Selatan Tenggara. Sebelum dibangun panitia sudah mengantongi izin dari pemerintah. Drs. H. Paita Halim, pengurus komite persiapan Penegakan Sari'at Islam (KPPSI) dan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) manjelaskan mengapa timbul reaksi dari warga mengenai pembangunan kedua gedung tersebut. Alasan peling mendasar adalah untuk menghindari fitnah. Menurut Pait, keberadaan bangunan milik orang kristen itu sama sekali tidak merupakan ancaman bagi warga yang beragama islam. Masalah yang dianggap penting adalah agar persatuan dan kesatuan tidak tercemar akibat adanya fitnah.

Penganut agama tertentu melaksanakan penyiaran agama dengan memberikan buku-buku, majalah, buletin, menyebarkan panflet kepada umat beragama lain, serta melakukan kunjungan ke rumah-rumah. Sesuai dengan ajaran Kristiani yang menghendaki setiap orang harus berusaha memberitakan Injil kepada umat manusia. Media semacam itu dianggap mengganggu pihak umat Islam, karena mereka khawatir jamaah akan terpengaruh oleh ajaran agama lain.

Pelayanan terhadap umat beragama lain dilakukan gereja, apabila diminta oleh yang bersangkutan umpamanya dalam pelaksanaan

perkawinan, antara seorang Islam dengan pemeluk Kristen. Dalam pelaksanaannya dibutuhkan persyaratan adanya pernyataan dari pihak keluarganya, bahwa yang bersangkutan masuk Kristen atas kemauannya sendiri. Menurut keterangan pendeta Paul Patandan kasus perkawinan semacam ini di Panakkukang dalam lima tahun terakhir ini tercatat sebanyak 6 kepala keluarga.

Pemakaian pengeras suara di masjid-masjid dan mushola menjelang pelaksanaan shalat lima waktu dengan mengumandangkan azan dan puji-pujian, pelaksana khutbah Jum'at dan ceramah agama, dengan tujuan menyiarkan agama islam, dirasa mengganggu ketenangan umat beragama lain, terutama ketika mereka masih nyenyak tidur, menjelang shalat subuh, terdengar suara azan dari masjid.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung pelaksanaan penyiaran agama di Panakukkan adalah: Agama Islam maupun Kristen mempunyai misi yang sama yaitu pemeluk agama berkewajiban menyampaikan dakwah Islam kepada setiap manusia, begitu juga agama kristen mendorong pemeluknya untuk menyampaikan berita Injil. Dalam hubungan ini muncullah penyiar agama dalam setiap lapisan kehidupan masyarakat, merasa terpanggil untuk melakukan penyiaran agama kepada masyarakatnya, Pelaksanaan penyiaran agama pemerintah telah mengambil kebijakan menerbitkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 1979 tentang cara penyiaran agama. SK ini diterbitkan karena penyiaran agama yang dilakukan secara lisan, media cetak maupun elektronik dapat menimbulkan konflik antar umat beragama. Lebih-lebih jika penyiaran agama itu diarahkan kepada penganut agama lain, Infrastruktur untuk menjamin kondisi hidup rukun antar umat beragama sudah memadai. Berdasar perangkat perundang-undangan dan peraturan lainnya telah meng-cover kebutuhan kerukunan. Mulai dari Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 (pasal 29) dan peraturan pemerintah. Hampir semua aspek titik-titik rawan sudah ada aturannya. Begitu pula dialog-dialog antar umat beragama dan

pembentukan forum-forum Kerukunan bermunculan di berbagai wilayah.

Sedangkan faktor penghambatnya adalah: Di kalangan umat Islam, terdapat kendala masih terbatasnya da'i yang berkualitas, dan metode dakwah yang digunakan masih memacu kepada masyarakat agraris, sehingga dakwah lebih mengandalkan pada ceramah dan khutbah, dengan begitu metode dakwah di kalangan umat Islam masih kurang kreatif dan inovatif. Dalam masyarakat Islam muncul kelompok yang berbeda aliran atau paham keagamaan, akan berdampak pada pola pelaksanaan penyiaran agama, biasanya pada kelompok aliran yang satu dengan lainnya kurang seirama dalam menyampaikan dakwah, satu sama lain saling menyalahkan. Kondisi semacam ini kurang mendukung keberhasilan dakwah Islamiyah. Di dalam Kristen perbedaan itu ditandai dengan perbedaan gereja. Hal ini terkait dengan aliran yang mereka anut. Pendeta Yakob Kila Rambi dari persatuan gereja-gereja Indonesia Sulselra mengatakan, perlu dibedakan antara aliran dan sekte. Aliran itu seperti Protestan, Katolik dan Advent, sedangkan sekte itu sempalan-sempalan yang sesat dalam pelaksanaannya, artinya keluar dari ajaran Alkitab, kondisi semacam ini juga dapat menghambat penyiaran agama. Sebagian penyiar agama masih kurang memahami dan kurang mengetahui peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah yang ditujukan sebagai pedoman penyiaran dan dakwah agama.

Penutup

Kajian ini menyimpulkan diantaranya bahwa Penyiaran agama dalam masyarakat Panakkukang berpedoman pada SKB Menag Mendagri No. 1 tahun 1979 tentang tatacara penyiaran agama sebagai Pedoman Penyiaran agama di Indonesia, sehingga ketika berdakwah selalu dilandasi semangat kerukunan, tenggang rasa, saling menghormati baik intern maupun antar umat beragama.

Penyiaran agama di Panakkukang selain dilakukan perorangan juga tergabung dalam organisasi keagamaan yang berada di kecamatan Panakkukang.

Metode dakwah yang digunakan masih tradisional dalam bentuk pengajian, ceramah dan tabligh akbar, terutama bagi masyarakat pedesaan, di masyarakat perkotaan yang lebih maju mulai menggunakan metode yang inovatif, namun jumlahnya masih terlalu kecil untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sementara di kalangan umat Kristiani selain menggunakan metode ceramah dan khotbah-khotbah di gereja, mereka mempunyai metode dakwah jauh lebih maju di banding umat Islam, misalnya membangun rumah-rumah ibadah, pelayanan kesehatan, lapangan kerja, bantuan usaha ekonomi, pemberian kredit, menyediakan tenaga ahli dan terampil, konsultan penyambung usaha dan sebagainya.

Menurut masyarakat Panakkukang memandang SKB Menag Mendagri No. 1 tahun 1979 tentang tatacara penyiaran agama sebagai Pedoman Penyiaran agama di Indonesia sudah tepat untuk dijadikan pedoman dalam melakukan penyiaran agama terhadap umat masing-masing agama. Dengan berpedoman kepada SKB Menag Mendagri No. 1 tahun 1979 tentang tatacara penyiaran agama sebagai Pedoman Penyiaran agama di Indonesia dakwah di Panakkukang banyak manfaatnya, hal ini bisa dilihat dengan bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap ajaran agamanya, dan mulai meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai syariat Islam, menyukai kesenian yang bernafaskan Islam seperti qosidah, rebana, dan seni baca Al-Quran mulai digemari di masyarakat.

Faktor pendukung pelaksanaan penyiaran agama di Panakkukang adalah adanya kesadaran para penyuluh agama dalam berdakwah tetap berpedoman kepada SKB Menag Mendagri No. 1 tahun 1979 tentang tatacara Penyiaran agama di Indonesia. Sehingga dalam berdakwah saling menghormati dan tidak menyinggung agama lain. Adapun faktor penghambatnya adalah masih terbatasnya SDM para penyiar agama dan terbatasnya sarana yang menunjang juru dakwah.

Sedangkan rekomendasi dari studi ini diantaranya bahwa kerawanan yang terjadi perlu ditanggapi dari aspek akomodasi normatif berupa pembukaan spektrum yang lebih luas di dalam

undang-undang dan aturan-aturan bagi dinamika kehidupan beragama yang semakin meningkat. Baik secara teoritis maupun empiris, sangat diperlukan pengaktifan kreatifitas penyiar agama untuk membangun komunikasi terus menerus baik secara formal maupun non formal diantara mereka.

Forum komunikasi umat beragama secara kelembagaan pada tingkat tertentu sudah ada, akan tetapi program-program yang dilakukan lebih bersifat formalistik dari pada substansional yang menyentuh kesadaran dan pencerahan umat beragama. Kearifan lokal, seperti pengngadereng di Makassar, yang tekandung dalam tradisi dan adat istiadat diaktifkan kembali, dapat dimanfaatkan para penyiar agama sebagai suatu kekuatan perekat antar komponen warga masyarakat yang plural.

Daftar Pustaka

- Ahmad. Abdul Kadir, 2005. Potensi Laten Prejudice Dalam Hubungan Umat Beragama, *Al-Qalam Jurnal Penelitian Agama dan Sosial Budaya*, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Makassar.
- Anshari, Saefudin, t.t. *Kuliah Islam*, Bandung.
- Badan Litbang Agama, 2000, *Sistem Siaga Dini Terhadap Kerusakan Sosial*, Badan Litbang Agama Kerjasama Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) IAIN Jakarta.
- Djamas, Nurhayati, 1998, *Agama Orang Bugis*, Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Depatemen Agama RI.
- Kasma, Irawati M. Arifin, 1999, *IMMIM Sebagai Organisasi Dakwah Kontribusinya terhadap Peningkatan Kualitas Muballigh di Kotamadya Ujung Pandang*.
- Koordinator Statistik Kecamatan Panakkukang Badan Pusat Statistik Kota Makassar, *Kecamatan Panakkukang Dalam Angka Tahun 2002*.

- Nasution, Chaddijah, t.t. Ilmu Da'wah Lembaga Penerbitan Ilmiah Fakultas Usuluddin, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Natsir Moh.1993. *Fiqih Da'wah*, Media Da'wah, Jakarta.
- Puslitbang Kehidupan Beragama 1983/1984, *Sejarah Depatemen Agama (Naskah Tahap IV), Depatemen Agama dan Aliran /Faham Keagamaan Badan Litbang Agama*.
- Syamsiah, t.t. *Dinamika Pengembangan Dakwah Dalam Pembentukan Jamaah*, Fakultas Dakwah IAIN Alauddin Ujung Pandang.
- Syahidah, Andi Laila, 1994. *Peranan Da'i Dalam Pembangunan Manusia Indonesia Seutuhnya Melalui Dakwah Islamiyah di Kecamatan Panakkukang Kotamadya Ujung Pandang*, Fakultas Dakwah IAIN Alauddin, Makassar.
- Syakir. Asmuni, 1983. *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Al-Ikhlas Surabaya.

Agama dalam Pergulatan Ekonomi Politik di Aceh

M Yusuf Asry

*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Aceh is a "conflict area" between the colonial Dutch and Jakarta. It is also "Capital Region" for independence, and the "porch of Mecca" for Muslims from all over the archipelago (Indonesia). Geographically, Aceh is very strategic, because it becomes the traffic line of the world association, it also has its own beauty with the natural result of "spice", so it has become the target of traders from foreign countries. The result of Aceh's natural wealth does not only bring blessings, but also invite the invaders, starting from fighting for developing economy struggles to control the Islamic empire and the territories. The factor of high religious fanatics (Muslims), enables Aceh to survive and win in any conflict resolution and end up with harmony in the multicultural society and multi-religious communities

Keywords: *conflict, economics, politics and religion.*

Pendahuluan

Anthony Reid, seorang sejarawan lulusan Cambridge University tahun 1965. Ia menulis buku dengan judul: *The Contest for North Sumatra, the Netherlands and Britain 1858-1898*, yang dikembangkan dari

disertasi Doktornya (Pd.D), dan diterbitkan pertama tahun 1969. Buku ini telah diterjemahkan ke bahasa Indonesia oleh Masri Maris dengan judul, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, diterbitkan oleh Yayasan Obor Indonesia, Jakarta tahun 2005 dan 2007.

Ulasan (*review*) terhadap buku Reid ditulis dan disajikan oleh Harisun Arsyad disajikan dalam diskusi yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur Keagamaan, Keemeterian Agama. Harisun, seorang putera Aceh sekaligus peneliti pada Puslitbang Lektur Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat sehingga diharapkan lebih banyak memaknai diskusi mengenai Aceh. Tulisan ini merupakan telaah dan komentar terhadap buku Anthony Reid dan tulisan Harisun Arsyad tersebut, dengan menggunakan sejumlah referensi.

Anthony Reid, salah seorang asing yang menulis sejarah Aceh, di seputar konflik antara tahun 1838-1898. Tentu saja bermanfaat untuk mengenal sejarah Aceh, termasuk Pantai Timur Sumatera di masa silam, yang bersumber dari dokumen dan arsip Eropa, khususnya Inggris dan Belanda. Tulisan Reid lebih pada versi Eropa/Barat, tetapi bagaimanapun ada gunanya melengkapi kajian penulis Indonesia, khususnya sejarawan Aceh. Bahkan di balik konflik dapat diketahui bagaimana karakter masyarakat Aceh dalam keragaman bangsa Indonesia.

Tulisan ini bertujuan untuk mengungkapkan sebab utama konflik Aceh, kebijakan kolonialis Belanda, dan akhir kesudahannya. Bagaimana peran agama (Islam) dalam konflik Aceh. Tulisan berguna untuk dapat mengambil pelajaran tentang penyebab konflik guna dihindari dalam membangun integrasi untuk terwujudnya hidup berdampingan yang harmonis dalam masyarakat yang kental dengan agama yang dianutnya.

Konflik Aceh: Pandangan Anthony Reid dan Komentar Pengulas

Dari tulisan Reid yang berjumlah 337 halaman, (xviii+331+28) yang terkait dengan substansi yang menarik didiskusikan dibatasi pada delapan hal pokok saja. *Pertama*, Aceh daerah penghasil rempah, yang dibutuhkan banyak orang, baik dari dunia belahan Timur seperti Malaka, India, Cina dan Arab, maupun dari Eropa/Barat terutama, Belanda, Inggris, Perancis, Jerman, Italia dan Amerika (2007: 15 dan 55). Sejak abad ke-11 telah berdiri pos-pos perdagangan asing di Aceh. Komediti tersebut dan hasil alam lainnya diperebutkan, dengan menguasai Aceh sebagai daerah sumbernya, terutama oleh Inggris dan Belanda (2007: 1 dan 91), sehingga mengundang terjadi konflik.

Kedua, untuk menghindari konflik karena memperebutkan rempah dan hasil alam dari Pantai Timur Sumatera dan Aceh diadakan perjanjian di London tanggal 17 Maret 1824, yang dikenal "Traktat London". Di antara isinya: (1) Penyerahan semua pemukiman Inggris di Sumatera (Bengkulu) kepada Belanda. (2) Penyerahan semua wilayah milik Belanda di India dan Semenanjung Malaya (Malaka) kepada Inggris. Di samping itu, Inggris berjanji tidak akan ada permukiman yang akan didirikan di pulau itu (Sumatera), dan tidak akan ada perjanjian antara Inggris dengan raja, kepala suku atau negara. Belanda berjanji yang sama untuk di Semenanjung Malaka (2007:12).

Ketiga, Aceh kerajaan merdeka (1981:91), yang dalam perkembangannya pernah jaya, kemudian mengalami kemunduran, yang wilayah kekuasaannya makin berkurang. Sementara kekuatan laut dan kekuatan dagang Belanda memecah belah kerajaan Aceh (1981:5). Kelima, konflik Aceh-Belanda telah mendorong, Hubungan Luar Negeri Aceh dibawah Ibrahim dan Mahmud memperluas jaringan dengan pihak luar negeri, sembari meminta bantuan, seperti ke Turki, Inggris dan Amerika. Sementara Inggris dan Belanda sangat menantang campur tangan Turki di Sumatera. Kebijakan Aceh tersebut sangat mengkhawatirkan Belanda. Sebelum membuahkan hasil telah

dijadikan alasan Belanda mengeluarkan pernyataan perang melawan Aceh pada tahun 1873 (2007:90-91 dan 132).

Keenam, Belanda melakukan ekspedisi serangan kedua ke Kutaraja (Banda Aceh sekarang) dengan pengerahan tentara yang terbesar pada tanggal 24 Januari 1874. Van Swieten sebagai jenderal perang Belanda menyatakan “perundingan tidak mungkin dapat dilakukan dengan orang Aceh, karena ia menghapuskan kesultanan dan menaklukkan Aceh, sesuai hak pemenang perang” (2007: 119-121).

Ketujuh, pada tanggal 31 Januari 1874, Van Swieten mengeluarkan pernyataan blokade akan dicabut kepada negeri-negeri yang mau tunduk pada Belanda. Selanjutnya, dua hari sesudahnya diedarkan enam pasal pernyataan kepada raja-raja untuk ditanda-tangani. Isinya ialah menerima kedaulatan dan bendera Belanda, melarang berhubungan dengan kekuatan asing atau mendukung musuh Belanda, dan menantang perbudakan, pembajakan, dan pemerintahan yang tidak adil (2007:122).

Kedelapan, pada tahun 1881 Belanda menyatakan perang Aceh berakhir didorong oleh kepentingan-kepentingan Belanda, Aceh musuh yang lebih kuat dari sebelumnya, pasukan India Belanda tidak dilengkapi untuk itu (perang), dan pengeluaran (dana yang dibutuhkan) sangat besar, dan moral pasukan Belanda menurun sampai ke titik terendah. Sementara kepahlawanan rakyat Aceh meningkat, antara lain digerakkan oleh Teuku Chik Di Tiro, seorang ulama yang cerdas dan berpengaruh dalam masyarakat.

Pada akhir tulisan, semacam kesimpulan Anthony Reid menyatakan, “Belanda gagal menyelesaikan penaklukan yang telah dimulainya” (2007:310). Sementara itu orang Aceh sendiri tidak merasa diri kalah (2007: 119-121). Sembari menyitir pendapat Snouck Horgronye, “Selama berabad-abad orang Aceh telah membuktikan kemampuan mereka dalam perdagangan dan pertanian, juga dalam peperangan” (2007:312).

Harisun Arsyad, selaku reviewer dalam komentar terhadap tulisan Reid, antara lain, dari segi metodologi, tulisan Reid tidak

memuat secara eksplisit uraian tentang latar belakang, masalah dan tujuan penulisan (Harisun Arsyad, 2010:7). Dalam hal substansi, “miskin dalam aspek budaya lokal dan ideologi” Harisun Arsyad, 2010:6).

Kekuatan dan Kelemahan dalam Konflik

Jika dicermati konflik Aceh-Belanda selama 40 tahun (1858-1898) sebagaimana diungkapkan dalam kedua tulisan, yang pokok isinya telah dikemukakan terdapat beberapa hal menarik untuk dikritisi dan dijadikan pelajaran bagi semua pihak, terutama generasi masa depan bangsa yang mencintai kemerdekaan dan hidup berdampingan. Adalah sulit melihat konflik Aceh tanpa sedikit mengenal kondisi alam dan masyarakat pada waktu itu. Oleh karena itu, tulisan ini dimulai dari hal-hal tersebut yang dikemukakan secara ringkas. Dengan demikian dapat diketahui benang merah tentang asal mula konflik Aceh, upaya penyelesaian, dan kesudahannya.

Dari segi geografis dan dografis, bahwa posisi letak wilayah Aceh sangat strategis dalam pergaulan dunia. Aceh menjadi lalu lintas internasional antara Laut Hindia dan Laut Cina Selatan. Aceh menghubungkan negeri-negeri sebelah Timur seperti Cina dan Jepang, dan dengan sebelah Barat, yaitu anak benua India, Parsi dan negara-negara Arab, Afrika dan benua Eropa (Ibrahim Alfian, 2005:1).

Penduduk Aceh jauh sebelum abad ke-13 telah memeluk Islam terutama melalui para sudagar, baik dari Arab mapunn India. Dengan adayan komunitas muslim kemudia terbetuk kerajaan Islam. Menurut Aboebakar Aceh, Kerajaan Islam Pasai berdiri pada abad ke-13 menggantikan pengaruh agama Hindu (Aboekar Aceh, 1981; 3-4). Raja pertama masuk Islam ialah Sultan Malik Al Saleh dari Samudera Pasai tahun 1270-1297.

Kerajaan Pasai merupakan kerajaan Islam pertama berdiri di Indonesia. Aceh pernah mencapai zaman keemasannya dibawah Sultan Iskandar Muda (1607-1636) (Osman Raliby dalam Ismail Suny,1980:2). Oleh karena itu, wajarlah seperti pendapat Muhammad Hasan, seorang pelaku sejarah, dan salah satu *the founding fathers*,

bahwa sejak lama berkembang sebuah julukan Aceh “Serambi Mekkah”. Lingkungan sosial tersebut telah membentuk karakter rakyat Aceh dalam bersikap (Dwi Purwoko dan T. H.M. Sulaiman Shah, 11995:1). Nilai di balik “Serambi Mekkah” ialah rakyat Aceh paling sulit ditembus oleh militer penjajah, karena Aceh memiliki kekuatan historis tersendiri, sehingga menjadikannya sulit ditaklukan oleh penjajah, yaitu spirit keagamaan.

Dari segi ekonomi dapat terlihat pada asal kata Aceh. Menurut Aboebakar Aceh berasal dari kata “Aca”, yang lazim diucapkan oleh orang India, untuk menunjukkan “kecantikan” (1981:3-4). Demikian pula menurut Muhammad Nurdin, bahwa “aca” berarti “bagus”. Sebuah ucapan orang India yang datang pertama kali ke Aceh, yaitu melihat tanahnya penuh tumbuh-tumbuhan beraneka warna (dalam Ismail Suny, 1974:1). Keindahan Aceh dapat dilihat dari berbagai sisi, antara lain: keindahan alam, dan kekayaan sumberdaya alam. Oleh karena itu, diminati banyak orang.

Lahirnya Traktak London tahun 1824 merupakan menghindari konflik antara Belanda dan Inggris, bahkan antara Belanda dan Inggris dengan Aceh. Sayangnya, sebuah Nota yang merupakan lampiran dari Traktak London 1824 tidak diungkapkan oleh Reid, apakah karena tidak menemukan arsipnya, ataukah ada kesengajaan tidak diungkapkan. Menurut Ibrahim Alfian, seorang sejarawan Aceh bunyi dokumen tersebut, “tindakan permusuhan tidak akan dilakukan terhadap kerajaan Aceh” (Ibrahim Alfian, 2005:1). Jika prinsip ini ditegakan, maka tidak akan terjadi konflik Aceh, dan Belanda juga terhindar dari korban peperangan, yang berakhir angkat kaki dengan kegagalan.

Pada tahun 1829, atau baru lima tahun dari Perjanjian Traktat London, justeru Belanda menyerang Barus, Sumatera Utara. Barus merupakan daerah yang dikuasai Aceh. Selanjutnya, pada tahun 1834 dan 1835, beberapa perahu Aceh di Pulau Poncang ditahan Belanda, sebagian penumpangnya ditangkap, dan sebagian lagi dibunuh. Pada tahun 1836, kapal Belanda (Dolphin) dirampas oleh pelaut Aceh dan membunuh nakhodanya. Kapal tersebut dipersembahkan kepada

sultan Aceh. Pada tahun 1840, Belanda dibawah Kolonel Miechiels mengusir perahu Aceh di Sungai Maco, Barus.

Pada tahun 1858, Belanda dan Sultan Biak menandatangani perjanjian, bahwa Siak merupakan wilayah Hindia Belanda. Sedangkan kerajaan Aceh mengakui wilayah pantai Sumatera Timur, mulai dari Siak, Tamiang, Deli, Langkat dan Batu Bahara merupakan daerah pengaruh Aceh. Pada tahun 1863 terjadi penjarahan kapal layar kecil Cina di Tamiang, Aceh, dan pembunuhan dua pedagang Cina. Khoo Tiang Poh meminta kekuatan senjata Inggris untuk membantunya menutup ganti rugi. Belanda malah mengeluarkan pernyataan, bahwa Tamiang menjadi bagian dari India Belanda. Controleur Belanda di Deli yang ditunjuk menyelesaikan kasus Tamiang tersebut, tetapi tidak membuahkan hasil, bahkan sang Controleur tunggang langgang keluar dari Tamiang setelah dicabut kumisnya oleh orang Aceh (2007:49-50). Dengan dalih tersebut, Belanda melakukan ekspedisi serangan pertama pada tahun 1865.

Pada tahun 1871 Belanda dan Inggris kembali membuat perjanjian yang dinamakan dengan Traktak Sumatera. Menurut Perjanjian ini, Belanda diberi keleluasaan mengadakan perluasan di seluruh Sumatera, termasuk kesultanan Aceh, yang selama ini tidak boleh diganggu kedaulatannya (Sartono Kartodirjo, 1977:211). Belanda menilai kapal-kapal yang memasuki pelabuhan-pelabuhan Aceh menjadi tidak aman. Bahkan dikhawatirkan Aceh jatuh pada pengaruh negara lain. Pada bulan januari 1873, Sultan Aceh telah mengirim seorang utusan Habib Abdurrahman ke Turki untuk minta bantuan jika Belanda menggunakan kekerasan menaklukan Aceh. Pada saat pulang dari Turki, singgah di Bandar Singapura dan mengadakan persekutuan dengan konsul Italia dan Amerika Serikat. Amerika konon berjanji akan membantu Aceh. Di antara utusan Aceh yang berperan ialah Timbang Muhammad (Sartono Kartodirjo, 1977:211). Sedangkan Belanda menghendaki agar sultan Aceh mengakui kedaulatan Belanda. Jika menolak, Nieuwenhuyzen selaku Wakil Presiden Dewan Hindia akan mengumumkan perang atas nama Gubernemen Hindia Belanda. Akhirnya pada tanggal

26 Maret 1873 menyatakan perang kepada kerajaan Aceh (Ibrahim Alfian, 2005:92-98).

Kebijakan Belanda untuk menyelesaikan konflik Aceh dengan kekuatan bersenjata, dan pihak Belanda tidak boleh mengadakan kontak dengan Aceh sebelum menyerah" (Dwi Purwoko dan T. H.M. Sulaiman Shah, 1995:7). Untuk memenangkan perang Aceh, Belanda menggunakan taktik pecah-belah (*divide et impera*) antara golongan uleebalang (raja) dan ulama (Dwi Purwoko dan T. H.M. Sulaiman Shah, 1995:7). Setelah zaman keemasan Sultan Iskandar Muda mulai memudar, terutama beberapa tahun sebelum perang Aceh-Belanda, kedudukan raja/uleebalang di luar Aceh Besar memang tidak pernah diatur lagi oleh Sultan Aceh (T. Muhammad Hasan dalam Ismail Suny, 1980:5).

Menurut hemat saya, tulisan Anthony Reid mengenai Asal Mula Konflik Aceh, sekalipun penelitian historis yang terkait dengan ekonomi seyogyanya dikaitkan dengan kajian sosio-kultural dan keagamaan. Agaknya, Anthony Reid melihat konflik Aceh kurang komprehensif. Hal ini senada dengan pandangan Harisun Arsyad, dan saya sendiri meng"amin" kannya. Kurangnya informasi mengenai agama sangat dimungkinkan karena terbatas informasi dan arsip-arsip dibandingkan seperti tentang sejarah, perdagangan dan ekonomi. Di sinilah Reid kering dari data dan informasi keagamaan, yang justru bagi Aceh merupakan sarana pemersatu, mempertahankan kesatuan dan menolak kerjasama berbau penjajahan.

Dari segi metodologis penulisan sebuah penelitian yang oleh Harisun dinyatakan tidak terlihat jelas latar belakang masalah dan tujuan. Hal ini dimungkinkan, Reid tidak begitu teliti pada saat merubah bentuk sajian dari disertasi kepada buku. Namun, jika mencermati dari judul buku tersebut, tentu akan dapat menjawab pokok masalah Asal Mula Konflik Aceh, dengan membuat beberapa pertanyaan penelitian.

Jika dicermati, konflik Aceh adalah multi konflik. Konflik antar pedagang luar, berawal dari perbutan "rempah" (ekonomi). Dalam,

hal ini terutama Belanda dan Inggris, yang saling melanggar Perjanjian Traktat London tahun 1824. Namun, konflik di antara keduanya masih dalam batas pada perubahan kebijakan yang umumnya tidak menguntungkan pihak Inggris. Misalnya, dengan kebijakan Sistem Kerja Tanaman Paksa (*cultuurstelsel*) yang dimulai tahun 1830 oleh Van Bosch, semua hasil Aceh dibawa ke Belanda. Dengan kebijakan ini perdagangan Inggris di Jawa mengalami hambatan.

Konflik internal penduduk Aceh sendiri berawal dari upeti dan bea cukai yang tidak diberikan kepada kesultanan, perebutan pengaruh antar bangsawan (lama), yang menjadi uleebalang dan Imam (imeum) bersama pengikutnya (umat Islam). Konflik internal masyarakat terhadap kesultanan Aceh juga berdampak ke Sumatera Utara, dan seluruh Sumatera, bahkan Malaka. Misalnya, Kerajaan Siak menyatakan diri merupakan bagian dari Hindia Belanda. Demikian pula pernyataan kerajaan Idi di Aceh. Konflik antara Belanda dan Aceh ialah disebabkan melanggar Nota Perjanjian Traktat London seperti yang telah diuraikan. Perang Aceh melawan Belanda memakan waktu 40 tahun (1873-1912) merupakan perang terlama dalam sejarah kolonialisme Belanda dan menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak (Ibrahim Alfian, 2005:245)

Sumber tulisan Reid dari arsip Eropa, terutama yang termuat dalam kisah pelajaran pelaut-pelaut ternama, surat-surat yang tersimpan dalam arsip-arsip kantor, hanya dapat memberikan bahan-bahan yang perlu alakadarnya. Lebih lanjut harus diselidiki dan dikumpulkan sebagai bahan pokok (Aboebakar Aceh, 1982:1). Sesungguhnya, lektur keagamaan dalam bentuk kronik-kronik Melayu yang sudah dibukukan dan cerita anak negeri dari mulut ke mulut dapat digunakan sebagai sumber sejarah. Tentunya, jika diteliti, diseleksi dan diperbaiki serta diambil esensinya. Dalam konteks ini, saduran atau kutipan yang berasal dari sumber eksternal oleh Harisun digabungkan penyajiannya pada tulisan Reid perlu jelas fungsinya, sebagai pendukung, pembanding atau penolak. Bertambah tidak jelas lagi dengan adanya bagian tulisan yang diberi judul "Komentar". Sementara asal mula konflik Aceh oleh Harisun

tidak diungkapkan secara eksplisit, baik dalam komentar maupun penutup.

Perang Aceh sungguh melelahkan, memakan waktu lebih dari 40 tahun. Aceh berhasil ditaklukan oleh Belanda. Sekalipun orang Aceh terus berjuang melawan penjajah hingga masuknya tentara Jepang pada tahun 1942. Menurut S. M. Amin, rahasia ketangguhan perjuangan rakyat Aceh, baik sebelum tahun 1873 menghadapi unsur-unsur dari luar seperti Belanda, Portugis, dan Inggris yang ingin menguasai daerah Aceh, di masa perang Aceh-Belanda, di masa Jepang dan Indonesia merdeka, adalah karena cinta agama dan cinta kemerdekaan (dalam Ismail Suny, 1980:3).

Adalah kurang memadai pada saat Harisun Arsyad mengemukakan tulisan Reid “miskin dalam aspek budaya lokal maupun ideologi” tanpa contoh. Baiklah di sini diberikan sebuah contoh budaya lokal Aceh ialah rancang bangun rumah adat Aceh. Bangunan rumah besar, tetapi pintu utama rendah dan kecil. Hal tersebut mengandung makna, jika berhubungan dengan orang Aceh pada awal memulainya terkesan agak tertutup. Tetapi jika sudah dapat masuk akan menikmati ruang luas dan lebar. Pendekatan budaya lokal ialah melalui agama dan adat.

Berbeda dengan pendapat Harisun sebab konflik Aceh karena faktor ideologi. Ideologi Belanda ialah “liberalisme”. Jika itu dimaksud ideologi agama Kristen, Peran Belanda di Aceh dalam hal ini tidak cukup bukti, sebagai pembawa misi penyebaran agama. Reviewer sendiri menyatakan, bahwa Belanda tidak menarik dengan pendekatan agama. Memang, dalam agama Kolonialisme Belanda mengambil Politik Netral. Sekalipun diakui, di antara faktor yang mendukung keberhasilan Belanda menaklukkan Aceh justru menggunakan pendekatan agama, yang dimaikan oleh Snouck Hurgronje, seorang penasihat Belanda

Snouck Hurgronje, asal Belanda, seorang intelektual yang disusupkan ke Aceh. Beliau sempat di“madrasah”kan di Arab, terutama di Makkah tahun 1884-1885 (Anthony Reid, 2007:xvii).

Melalui modal bergaya ulama, bersorban putih, dengan nama Haji Abdul Ghafar ia masuk Aceh tanpa hambatan. Bahkan memperoleh sambutan baik dari masyarakat. Snouck Hurgronje sebagai misi penjajah berhasil masuk ke Aceh dan mengamati kehidupan umat Islam Aceh, baik kekuatan maupun kelemahannya. Selanjutnya, memberikaan resep yang jitu bagaimana menaklukkan umat Islam, dengan menganjurkan politik penghajaran tanpa ampun. Hal ini sesuai dengan pendiriannya yang cukup terkenal ialah ialah: "Selama para pemuka agama tidak berpolitik, perlu biarkan. Akan tetapi kalau melancarkan gerakan politik, perlu dihancurkan" (Lihat Cover buku *Snouck Hurgronje, Aceh Di Mata Kolonialis*, 1985).

Secara umum tulisan Reid Nampak sekali pada keberpihakan pada Belanda. Memang, kebanyakan penulis asing terdahulu, seperti Snouck Hurgronje memiliki tujuan untuk kepentingan imperialis kolonialis. Oleh karena itu, penulisan sejarah Aceh yang bersumber dari naskah dan dokumen dari para penakluk Aceh perlu kritik sejarah. Misalnya, apa perlunya Reid menyitir diakhir tulisannya pendapat Snouck Horgronje dan orang-orang sezamannya, seperti pernyataan: "orang Aceh itu fanatik, anarkis, dan suka berhianat, yang tidak dapat diajak untuk melakukan apapun kecuali bila kekuasaan melalui kekerasan telah ditegakkan". Menurut Reid, "Jika pandangan ini ada benar, maka ini adalah hasil dari 20 tahun peperangan".

Dari uraian di atas diketahui, bahwa *Konflik Aceh ialah multikonflik*. Konflik Belanda-Inggris lebih pada tataran kebijakan dalam bidang ekonomi, dan pelanggaran perjanjian kesepakatan Traktak London 1824. Dalam konflik ini, pihak Inggris tampak dalam posisi yang terkalahkan. Konflik Aceh-Belanda disebabkan nafsu Belanda memonopoli perdagangan hasil alam Aceh, menguasai kerajaan Aceh dan daerah tritorialnya, dengan melanggar Nota Perjanjian Traktak London 1824.

Konflik Aceh bukan masalah agama, disebabkan Belanda menganut politik netral dalam agama. Kehidupan beragama Aceh tempo dulu ialah rukun. Esensi jawaban judul tulisan Anthony Reid, bahwa asal mula konflik Aceh ialah *perebutan ekonomi, berkembang*

kepada politik. Sayangnya, selain Reid tidak proporsional dalam mengungkap akar konflik sesungguhnya dalam konflik Aceh, juga sangat fatal tidak mengungkap pelanggaran terhadap Nota Perjanjian Traktat London 1824. Yang berisi tidak mengganggu kerajaan Aceh.

Namun, dari konflik Aceh dapat diambil pelajaran berharga, bahwa dengan semangat cinta agama dan kemerdekaan, Aceh sepanjang sejarah tak pernah terkalahkan, baik masa penjajahan maupun di era kemerdekaan, seperti solusi kasus pemberontakan Darul Islam/Tentara Nasional Indonesia (DI/TII) yang digerakkan oleh Mohd. Daud Beureueuh (20 September 1953-1961) dengan mendapatkan status Daerah Istimewa Aceh (sekalipun diberikan Jakarta setengah hati), dan melahirkan provinsi tersendiri terpisah dari Sumatera Utara.

Pada masa Orde Baru Aceh konflik dengan Jakarta melalui Gerakan Aceh Merdeka (GAM) hingga tahun 2005, yang menuntut keadilan di bidang ekonomi, birokrasi dan pertahanan-kemamanan. Gerakan yang dimotori Hasan Muhammad Tiro ini baru berakhir dengan terpaksa melibatkan pihak ketiga (luar negeri/Swedia), di samping dibantu oleh alam, yaitu tsunami yang dahsrad terjadi tanggal 26 Desember 2004. Perundingan tersebutlah menghasilkan Perdamaian Hilsinki (2005), yang kemudian rakyat Aceh berhasil memilih pemimpinnya sendiri secara demokratis.

Adalah terlalu naif mengecilkan peranan Aceh dalam sejarah. Jakarta seakan lupa memperhatikan sebab konflik Aceh-Belanda. Pada saat Indonesia Merdeka, Jakarta memposisikan Aceh yang dulu sangat besar pengaruhnya di wilayah Sumatera Utara, malah dijadikan keresidenan Provinsi Sumatera Utara, sebagaimana disampaikan oleh Perdana Menteri Mohammad Natsir di depan corong RRI Kutaraja tanggal 23 Januari 1951. Bukankah dalam sejarah Aceh, bahwa Sumatera Utara merupakan wilayah pengaruh Kerajaan Aceh. Inilah yang oleh Jakarta terlupakan. Presiden pertama RI Soekarno, justeru menyatakan Aceh sebagai “daerah modal” bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, yang disampaikan dalam pidatonya di Meulaboh pada

tanggal 4 September 1959 (Ibrahim Alfian, 2005:246 dan 256). Pesawat Udara pertama (diberi nama Seulawah) yang dimiliki bangsa ini ialah sumbangan dari rakyat Aceh untuk perjuangan kemerdekaan.

Di sisi lain, masyarakat Nusantara, bahkan dunia memberikan julukan kepada Aceh sebagai “serambi Mekkah”. Inilah fakta sejarah melahirkan Aceh pernah memperjuangkan pemberlakuan syariat Islam, yang saat ini dan ke depan masih mencari format idealnya.

Penutup

Asal mula sebab konflik Aceh-Belanda yaitu faktor ekonomi dan politik, bukan agama. Namun, Aceh mampu bertahan melawan Belanda yang memiliki tentara dan persenjataan modern karena kebanggaan pada kemerdekaan dan spirit keagamaan. Di alam Indonesia merdeka terjadi konflik Aceh-Jakarta masih dalam penyebab yang sama – ekonomi dan politik - bahkan bertambah “runyam” dengan ketimpangan kebijakan Jakarta dalam birokrasi dan pertahanan-keamanan.

Kajian lektur keagamaan mengenai Aceh dalam bentuk surat-surat, dokumen dan naskah klasik sangat berharga merekonstruksi sejarah masa silam perlu terus dihimpun, dikaji dan dibukukan, selain sejarah lisan dihimpun dan juga dibukukan, dan atau diintegrasikan. Namun, tentu harus disertai dengan kritik internal dan eksternal.

Hanya dengan belajar dari sejarah, bangsa ini dapat menjadi besar, dan terhindar dari konflik yang sia-sia. Spirit keagamaan terbukti mampu membuat masyarakat bertahan dan memenangkan sebuah perang dalam konflik Aceh. Kiranya, generasi saat ini dan yang akan datang mampu membaca spirit keagamaan, dan mejadikannya fungsional dalam pembangunan kehidupan keagamaan dan kesejahteraan materiil.

Daftar Pustaka

- Aceh, Abubakar, 1982. *Sekitar Masuknya Islam Ke Indonesia*, Ramadhani, Semarang.
- Alfian, Ibrahim, 2005. *Wajah Aceh dalam Lintasan Sejarah*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Arsyad, Harisun, 2010. "Perang Aceh dalam Lintasan Sejarah: Review buku Asal Mula Konflik Aceh, dari Perebutan Pantai Timur Sumatera hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19, Karya Anthony Reid", Puslitbang Lektur Keagamaan, Jakarta.
- Giddens, Anthony dan David Held, Classes, 1987. *Power and Conflict: Classical and Contemporary Debates* Terjemahan Vidi R., *Perdebatan Klasik dan Kontemporer Mengenai Kelompok, Kekuasaan dan Konflik*, Rajawali Press, Jakarta.
- Hurgronje, Snouck, 1985. *The Acehnese(1906)*, Terjemahan Ng Singarimbun, dkk., *Aceh di Mata Kolonialis*, Yayasan Soko Guru, Jakarta.
- Kartodirdjo, Sartono, 2007. *Sejarah Nasional Indonesia, IV*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwoko, Dwi dan Sulaiman Shah, 1995. *Dr. Mr. T.H. Moehammad Hasan: Salah Seorang Pendiri Republik Indonesia dan Pemimpin Bangsa*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Reid, Anthony, 2007. *The Contest for North Sumatra, the Netherlands and Britain 1858-1898*, Terjemahan Masri Maris, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad ke-19*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Suny, Ismail, 1980. *Bunga Rampai tentang Aceh*, Bhatara, Jakarta,

Pedoman Penulisan Jurnal Harmoni

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris. Bila naskah berbahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Naskah ditulis dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali table. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm, maksimal 15 halaman isi duluar lampiran.
3. Kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut urutan sebagai berikut:
 - a. Judul.
 - b. Nama dan alamat penulis.
 - c. Abstrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
 - d. Kata kunci.
 - e. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis-opsional, tujuan).
 - f. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
 - g. Hasil dan pembahasan.
 - h. Kesimpulan.
 - i. Saran (opsional).
 - j. Ucapan terima kasih (opsional).
 - k. Daftar pustaka.
4. Judul diketik dengan huruf capital tebal (**bold**) pada halaman pertama maksimum 11 kata. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
5. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asterisk *) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.

6. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
7. Kata kunci 2-5 kata, ditulis *italic*.
8. Selain bahasa yang digunakan harus ditulis huruf miring (*italic*).
9. Pengutipan dalam naskah:
 - a. Dalam naskah diberikan tanda *superscript* pustaka yang digunakan, contoh: ...¹. Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - b. Bila nama pengarang harus ditulis, maka menulisnya sebagai berikut: menurut Ahmad Syafi'i Mufid¹... Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - c. Apabila ada *footnote* hanya berupa keterangan/penjelasan kalimat/kata dalam naskah.
10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan huruf abjad, adapun pengutipan sebagai berikut:
 - a. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam jurnal seperti contoh: Suwariyati, Titik, 2007, *Pola Relasi Sosial Umat Beragama...*, HARMONI, VI (23): 151-156.
 - b. Bila pustaka yang dirujuk berupa buku, seperti contoh: Pranowo, Bambang. 2009, *Memahami Islam Jawa*, Alfabet, Jakarta.
 - c. Bila pustaka yang dirujuk berupa bunga rampai, seperti contoh: Aziz, Abdul, 2006. *Faham Liberal di Kota Makassar*, dalam Nuhriison M. Nuh (Ed.). *Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
 - d. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding, seperti contoh: Mudzhar, M. Atho, 2009, *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan.
 - e. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa, seperti

- contoh: Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8).
- f. Bila pustaka yang dirujuk berupa website, seperti contoh: Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*. www.swaramuslim.org., diakses tanggal...
 - g. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga, seperti contoh: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, Jakarta.
 - h. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, siposium atau seminar yang belum diterbitkan, seperti contoh: Sugiyarto, Wakhid. 2007. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April.
 - i. Bila pustaka yang dirujuk berupa skripsi/tesis/disertasi, seperti contoh: Madjid, Nurcholis. 2001, *Ibnu Taimiyya on Kalam and Falasifa*. Disertasi. University of Chichago, US.
 - j. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten, seperti contoh: Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
 - k. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian, seperti contoh: Hakim, Bashori A. 2009. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta.
 - l. Daftar pustaka diberi nomor urut dengan font huruf superscript sesuai dengan urutan daftar pustaka dalam teks, seperti contoh: ¹Muzaffar, Chandra. 2004. *Muslim, Dialog, dan Teror*, Profetik, Jakarta.
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik, dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg, untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
 12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wewenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai dengan format HARMONI.

<p style="text-align: center;">Perjumpaan di Ranah Esoterisme</p> <p style="text-align: center;">Afif Anshori</p> <p><i>Setiap orang mendambakan harmonisasi dalam kehidupannya tanpa memandang suku, ras, dan agama. Namun faktanya di berbagai belahan dunia manusia saling menindas, mengintimidasi, merampas, bahkan saling membunuh. Padahal dalam ajaran agama manapun tidak diajarkan tindakan kekerasan. Kekerasan atas nama agama dipicu oleh mis-interpretasi, mis-informasi dan sempitnya wawasan tentang agama lain. Secara eksoteris, setiap agama jelas berbeda, baik dari aspek sejarah, ritual, nama Tuhan, kitab suci, upacara keagamaan, dan sebagainya. Dari aspek esoteris, ada kesamaan-kesamaan visi dan misinya. Karena itu pada aspek esoterisme inilah sesungguhnya agama-agama dapat saling berjumpa.</i></p> <p>Kata kunci: esoterisme, eksoterisme, pluralisme dan harmonisasi kehidupan.</p>	<p style="text-align: center;">The Encounter in Esoteric Sphere</p> <p style="text-align: center;">Afif Anshori</p> <p><i>Everyone is longing for harmony in his life regardless of ethnicity, race, and religion. But in fact, in many parts of the world people tend to mutually oppress, intimidate, rob and even to kill. Undoubtedly, the teachings of any religion are not to teach violence. Violence in the name of religion is triggered by mis-interpretation, misinformation and lack of insight of understanding towards other religions. Exoterically, each religion is obviously different, both from the aspect of the history, rituals, the name of God, scripture, religious ceremonies, and so on. From the esoteric aspect, there are commonalities of vision and mission. Hence on this aspect of esotericism religions can actually meet to each other.</i></p> <p>Keywords: esotericism, eksoterisme, pluralism and harmonisasi life.</p>
<p style="text-align: center;">From 'Abd Allah to Khalifat Allah: Imagining a New Model of Indonesian Muslim Education</p> <p style="text-align: center;">Abd. Rahman Mas'ud</p> <p><i>Humanisme Agama adalah suatu paradigma baru dalam mengimplementasikan pendidikan agama di Indonesia. Paradigma ini memberikan prinsip-prinsip dasar, seperti common sense, individualisme untuk mendapatkan kemerdekaan, kehausan untuk memperoleh pengetahuan, ajaran dalam pluralistik, kontekstualism, keseimbangan antara hukuman dan ganjaran. Humanism Agama penting untuk diperkenalkan pada masyarakat Indonesia karena sistem pendidikan Islam yang sekarang sedang</i></p>	<p style="text-align: center;">Dari Hamba Allah Menjadi Khalifah Allah: Membayangkan Model Pendidikan Muslim Indonesia</p> <p style="text-align: center;">Abd. Rahman Mas'ud</p> <p><i>Religious Humanism is a new paradigm offered to be implemented in the concept of Islamic education in Indonesia. This paradigm introduces the fundamental principles, including: common sense, individualism to get self-reliance, thirst for knowledge, the teaching of pluralism, contextualization, the balance of reward and punishment. Religious Humanism needs to be re-introduced in Indonesia because the system of Islamic education nowadays running has not yet developed the student's potential, and even ignored</i></p>

<p><i>berjalan belum mengembangkan potensi pelajar, dan sering berorientasi pada individu saja.</i></p> <p>Kata kunci: <i>religious humanism, education, students.</i></p>	<p><i>the values of individualism or self-reliance.</i></p> <p>Keywords: <i>religious humanism, education, students.</i></p>
<p>Dakwah Berbasis Multikulturalisme</p> <p>A Ilyas Ismail & Prio Hotman</p> <p><i>Dalam tiga dasawarsa terakhir, dikenal pandangan-pandangan eksklusif dan kurang bersahabat terhadap keragaman etnis-budaya. Keragaman etnis religious-cultural dianggap sebagai penghambat stabilitas politik. Akibat anggapan ini, maka kaum imigran, kelompok minoritas dan penduduk pedalaman menjadi objek yang terpinggirkan oleh kebijakan politik yang bias etnosentrisme. Di akhir abad dua puluh dan memasuki abad dua puluh satu, dipelopori oleh sejumlah negara-negara Barat, berkembang wacana yang lebih ramah terhadap multikulturalisme, peka terhadap keragaman, dan mengakui hak-hak dan keberadaan minoritas.</i></p> <p>Kata kunci: <i>globalisasi, multikulturalisme, inklusif, dakwah kultural.</i></p>	<p>Da'wah with Multiculturalism Sensitivity</p> <p>A Ilyas Ismail & Prio Hotman</p> <p><i>In the last three decades, many views of an exclusive and less friendly to ethnic-cultural diversity emerged clearly. Religious ethnic-cultural diversity is considered as a barrier to a political stability. Due to this assumption, the immigrants, minorities and rural residents have been marginalized by the object of political policies with ethnocentrism bias. At the end of the twentieth century and into the twenty-first century, spearheaded by a number of Western countries, a discourse that is more friendly towards multiculturalism has developed to support sensitiveness to diversity, and to recognize the rights and the existence of minorities.</i></p> <p>Keywords: <i>globalization, multiculturalism, inclusiveness, cultural propaganda.</i></p>
<p>Umat Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik</p> <p>Haidlor Ali Ahmad</p> <p><i>Kabupaten Kediri terletak di wilayah Jawa Timur memiliki keragaman etnis, budaya dan agama. Kearifan lokal yang ada di Kediri telah menciptakan kerukunan antar umat beragama disana. Kearifan lokal berupa pepatah "rukun agawe santosa congkrah agawe bubrah" (rukun membuat kita sentosa, percekcohan membuat kita</i></p>	<p>Religious Community in Kediri District: Between Harmony and Conflict</p> <p>Haidlor Ali Ahmad</p> <p><i>Kediri Regency is located in East Java which has a variety of ethnicities, cultures and religions. Local wisdom in Kediri has created harmony among religious communities. Local wisdom as it had said "rukun agawe Santosa congkrah agawe Bubrah" (harmony makes us prosperous, while break up makes us destroyed).</i></p>

<p><i>hancur). Selain itu, faktor ekonomi yang tenangpun telah mewujudkan kerukunan, apalagi bila dimunculkan kearifan lokal yang masih fungsional lainnya yang terdapat di Kediri. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.</i></p> <p>Kata kunci: kearifan lokal, kerukunan, aliran keagamaan, penyiaran agama.</p>	<p><i>In addition, even stabilized economic factors have realized a sense of harmony, especially when other local wisdoms which remain functional in Kediri are heard. This study used a qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: local wisdom, harmony, flow of religious, religious broadcasting.</p>
<p style="text-align: center;">Pengaruh Agama dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama Antarumat Beragama di Kota Palu</p> <p style="text-align: center;">Bashori A Hakim</p> <p><i>Budaya dan nilai agama memberi pengaruh signifikan terhadap kerjasama antarumat beragama di Kota Palu. Budaya masyarakat Kaili, sebuah etnis dominan di Palu mendominasi praktek budaya di wilayah kota ini. Budaya masyarakat seperti gotong-royong, hormat-menghormati (termasuk menghormati tamu), kebersamaan, tenggang rasa dan sayang-menyayangi antar sesama secara simultan bersentuhan dengan nilai-nilai agama dan berpengaruh positif terhadap kondisi harmoni dan kerjasama antarumat beragama. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.</i></p> <p>Kata kunci: Konflik sosial, nilai-nilai budaya, konflik komunal, kesenjangan ekonomi.</p>	<p style="text-align: center;">The Influence of Religion and Religious Values on the Cooperation among religious believers in</p> <p style="text-align: center;">Bashori A Hakim</p> <p><i>Cultural and religious values have given a significant influence on inter-religious cooperation in Palu. Kaili community culture has become a dominant in Palo which dominates the cultural practices in the area of the city. Cultural societies such as mutual help, respect to each individuals (including respect for guests), togetherness, tolerance and harmony between the members are simultaneously in contact with religious values and to give positive effects on the condition of harmony and cooperation among religious believers. This study used a qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: social conflict, cultural values, communal conflicts, economic disparities.</p>
<p style="text-align: center;">Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang</p> <p style="text-align: center;">Mursyid Ali</p> <p><i>Penduduk Indonesia belum sepenuhnya terbebas dari konflik sosial bernuansa agama. Berbagai persoalan seringkali</i></p>	<p style="text-align: center;">The Portrait of Religious Harmony in Malang</p> <p style="text-align: center;">Mursyid Ali</p> <p><i>The population of Indonesia has not entirely become free from religious social conflict. Various issues are often based</i></p>

<p><i>mengatas namakan agama yang dapat merugikan bangsa dalam konteks kerukunan umat beragama. Kasus bernuansa agama pernah terjadi di Kota Malang, Jawa Timur. Keberagaman etnis, budaya dan agama sebagai ciri dan identitas yang melekat pada kota tersebut, sangat berpontesi terjadinya konflik mengatas namakan agama, namun bila dikelola secara baik keberagaman tersebut dapat menciptakan kerukunan antarumat beragama di daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</i></p> <p>Kata kunci: aset bangsa, interaksi sosial, budaya global, komitmen bersama.</p>	<p><i>upon the name of religion which could harm the nation in the context of religious harmony. One case related by the matter of religion once happened in Malang, East Java. Ethnic diversity, culture and religion as the characteristics and identities attached to the city may become a high potential conflict in the name of religion, but if managed properly, harmony among the religious diversity in the area will be created. This study uses qualitative methods.</i></p> <p>Keywords: assets of the nation, social interaction, global culture, a shared commitment.</p>
<p style="text-align: center;">Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan Umat Beragama: Studi terhadap Masyarakat Angantiga Bali</p> <p style="text-align: center;">Joko Tri Hariyanto</p> <p><i>Kerukunan masyarakat di Bali yang multikultural ditopang oleh pranata sosial yang dianut oleh masyarakatnya melalui norma Nyama Braya. Penelitian ini mengungkapkan makna dan praktek masyarakat Angantiga di Kabupaten Badung, Bali dalam menjaga keharmonisan antarumat beragama, Islam dan Hindu melalui pranata sosial Nyama Braya. Norma Nyama Braya menjadi aturan perilaku masyarakat dalam berinteraksi dengan orang lain, dimana orang lain akan dipandang sebagai saudara menjadi kohesi yang kuat bagi kerukunan di masyarakat Bali pada umumnya. Penelitian kualitatif yang dilakukan dengan pendekatan etnografi.</i></p> <p>Kata kunci: Kearifan Lokal, Multikulturalisme, Kerukunan, Nyama Braya, Angantiga</p>	<p style="text-align: center;">Social norms Nyama Braya for Religious Harmony: Studies of Society Angantiga Bali</p> <p style="text-align: center;">Joko Tri Hariyanto</p> <p><i>The multicultural Balinese harmony in the society is supported by the social institutions embraced by the community through the Nyama Braya norm. This study reveals the meaning and practice of Angantiga community in Badung, Bali in maintaining harmony among religious believers; Islam and Hinduism through Nyama Braya social institution. The Nyama Braya norm has overwhelmed the people's behavior in interacting with others, whereas others will be known as brothers, and this brings about a strong cohesion for the societal harmony of Balinese in general. Qualitative research is conducted with an ethnographic approach.</i></p> <p>Keywords: Local Wisdom, Multiculturalism, Harmony, imitate Braya, Angantiga</p>

<p style="text-align: center;">Upaya Deradikalisasi Keagamaan: Studi Kasus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama</p> <p style="text-align: center;">Abdul Jamil</p> <p><i>Masyarakat Indonesia yang dikenal moderat dan toleran kini mengalami pergeseran, terjadi proses dinamika sikap dan perilaku sebagian umat Islam yang mengarah pada bentuk yang eksklusif dan radikal. Sesungguhnya penelitian mengenai peristiwa konflik etno-religius telah banyak dilakukan. Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini diketahui bahwa LAKPESDAM NU berusaha membendung berkembangnya radikalisme dan meneguhkan identitas moderatisme NU. LAKPESDAM mengembangkan wacana keagamaan yang kritis dan moderat sebagai bagian yang tak terpisahkan dari demokratisasi dan penguatan civil society.</i></p> <p>Kata kunci: Radikalisme, Lakpesdam NU, Konflik etno-religius.</p>	<p style="text-align: center;">The de-radicalization Efforts of Religious Studies: Case Studies and the Institute for Human Resources Development (Lakpesdam) NU</p> <p style="text-align: center;">Abdul Jamil</p> <p><i>Indonesian society which is known moderate and tolerant now experiencing a transition, a process of dynamic attitude and behavior that leads Muslims to an exclusive and radical form. It is undeniable that the researches on ethno-religious conflict events have been largely carried out. The current study which uses qualitative approach acknowledges that NU Lakpesdam is trying to counter the growth of radicalism and confirm the moderate identity of NU. Lakpesdam develops a critical discourse and moderate religiosity as an integral part of the democratization and strengthening the civil society.</i></p> <p>Keywords: Radicalism, Lakpesdam NU, ethno-religious conflict.</p>
<p style="text-align: center;">Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah ex-Transmigrasi Sausu Kabupaten Moutong Sulawesi Tengah</p> <p style="text-align: center;">Nuhrison M Nuh</p> <p><i>Kondisi kerukunan umat beragama di Kecamatan Sausu Kab. Moutong Sulawesi Tengah dilakukan melalui pembentukan Forum Komunikasi Antar Umat Beragama (FKUB) dan Forum Kerukunan Persaudaraan (FKP). Kedua forum komunikasi tersebut mampu menciptakan saling pengertian. Dalam kepengurusan kedua organisasi itu di wakili semua</i></p>	<p style="text-align: center;">The Pattern of Social Relation of religious community in the Region of ex-Transmigration Sausu Moutong District of Central Sulawesi</p> <p style="text-align: center;">Nuhrison M Nuh</p> <p><i>The condition of religious harmony in the Sausu Kab district, Central Sulawesi Moutong has been improving with the establishment of Inter Religious Harmony Forum (FKUB) and the Forum for Religious Harmony Brotherhood (FKP). Both is able to create a communication forum of mutual understanding. In the management of both</i></p>

<p>unsur agama di daerah tersebut. Dalam kegiatan kepanitiaan selalu melibatkan semua umat beragama. Adapun hubungan antar pemuka agama dan antar penganut agama berbeda berlangsung baik disengaja maupun tidak. Secara sengaja seperti memenuhi undangan pernikahan, menghadiri upacara kematian, dan menghadiri upacara keagamaan yang bersifat seremonial. Sedangkan secara tidak disengaja, seperti di kantor, sekolah, kebun dan dipasar.</p> <p>Kata kunci: pemuka agama, tokoh masyarakat, hubungan antar agama, forum komunikasi</p>	<p>organizations represent all the religious elements in the area. The committees are always involved in religious activities. Whether intentional or not, the relationship between religious leaders and among followers of different religions took place. Intentional relationship took place such as attending a wedding invitation, a funeral ceremony, and religious events which are ceremonial in nature. While it is accidental as it take place in offices, schools, gardens and markets.</p> <p>Keywords: religious prominent leader, prominent leader, interreligious relationship, communication's forum</p>
<p>Kajian Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Propinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Kustini</p> <p><i>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; kebijakan Kementerian Agama di Pusat dan Kantor Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah; pengelolaan dana bantuan untuk rumah ibadat dan ormas keagamaan; dampak sosial dana bantuan keagamaan bagi pengembangan kehidupan keagamaan; serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dengan menggunakan teori kebijakan publik (public policy), penelitian ini didesain sebagai penelitian evaluatif dengan teknik pengumpulan data kajian dokumen, wawancara, dan pengamatan. Salah satu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak bantuan hanya dapat dilihat sampai pada outcome. Sementara dampak lebih jauh (impact) yaitu perubahan sosial pada masyarakat, melalui penelitian ini</i></p>	<p>The Study of The Effectivity in Using Funds for House Worship and Religious Organizations in the Province of Central Kalimantan</p> <p>Kustini</p> <p><i>This study is to reveal policy of at MORA at Central and at the Office of Central Kalimantan Province; about the management of handling funds for the synagogue and religious organizations; social impact of religious assistance funds for the development of religious life; as well as the factors supporting and inhibiting the implementation of the program. By using the theory of public policy, this study was designed as an evaluative study with data collection through techniques of document review, interviews, and observations. One result of this study indicates that the impact of aid can only be viewed until the outcome. While further impact which is the social change among the society, cannot be fully detected through this research.</i></p>

<p><i>tidak sepenuhnya dapat terdeteksi.</i></p> <p>Kata kunci: Kementerian Agama, bantuan, rumah ibadat, lembaga sosial keagamaan.</p>	<p>Keywords: Ministry of Religious Affairs, help, synagogue, religious social institutions.</p>
<p>Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan di Provinsi Aceh: Sebuah Kajian Evaluasi</p> <p>Agus Mulyono</p> <p><i>Dana bantuan untuk rumah ibadat dan ormas keagamaan yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke Kota Aceh, faktanya masih sangat terbatas. Aceh, daerah yang terkena dampak tsunami dan tengah dirundung konflik, masih memerlukan berbagai dukungan dan bantuan baik dari sisi fisik maupun rohani sehingga sekecil apapun bantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, maka bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Agama perlu dievaluasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif.</i></p> <p>Kata kunci: Konflik sosial, nilai-nilai budaya, konflik komunal, kesenjangan ekonomi.</p>	<p>The Domestic Assistance Fund Program for the place of Worship and Religious Organizations in Aceh Province: An Evaluation Study</p> <p>Agus Mulyono</p> <p><i>The grants to synagogues and religious organizations that were distributed by the central government to the city of Aceh is still very limited. Aceh, the area affected by the tsunami and afflicted in the middle of the conflict, still needs various support and assistance from both physical and spiritual side so that the slightest assistance provided by the central and local governments. To obtain maximum results, the assistance provided by the Ministry of Religious Affairs should be evaluated. This study used a qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: social conflict, cultural values, communal conflicts, economic disparities.</p>
<p>Penyiaran Agama dalam Perspektif Islam dan Kristen di Panakkukang Kota Makassar</p> <p>Muchit A Karim</p> <p><i>Di Kota Makassar terdapat banyak persoalan mengenai kehidupan umat beragama. Penyebab utamanya bukan pada inti ajaran, namun oleh situasi historis, ekonomi, politik, seperti adanya kompetisi untuk menguasai sumber-sumber ekonomi secara tidak sehat,</i></p>	<p>The Propagation of Religion in the Islamic and Christian Perspectives on Panakkukang Makassar</p> <p>Muchit A Karim</p> <p><i>In Makassar city there are many problems and issues concerning religious life. The main cause is not on the main teachings, but it is more on historical circumstances, economic, and political, such as the competition for control of economic resources is unfair. Domination and</i></p>

<p><i>hegemoni politik dan kekuasaan yang tidak seimbang telah menghalangi harmonisasi hubungan antara pemeluk agama. Karena itu eskalasi masalah yang timbul dalam hubungan antarumat beragama ditentukan oleh seruan dan pengaruh para pemuka agama di semua tingkatan.</i></p> <p>Kata kunci: <i>penyiaran agama, gotong royong, stabilitas nasional, tabligh akbar.</i></p>	<p><i>power politics which are unequal have prevented the harmonious relationship between religious groups. That is why, the escalation of problems that arise in the relationship among religious groups are determined by the appeal and influence of religious leaders at all levels.</i></p> <p>Keywords: <i>religious broadcasting, mutual cooperation, national stability, tabligh akbar.</i></p>
<p style="text-align: center;">Agama dalam Pergulatan Ekonomi dan Politik di Aceh</p> <p style="text-align: center;">M Yusuf Asry</p> <p><i>Aceh merupakan “daerah konflik” antara kolonial Belanda dan Jakarta. “Daerah modal” bagi kemerdekaan bangsa, dan “serambi Mekkah” bagi umat Islam dari seluruh kepulauan Nusantara (Indonesia). Secara geografis Aceh sangat strategis, karena menjadi lalu lintas pergaulan dunia, memiliki kecantikan tersendiri dengan hasil alam berupa “rempah”, sehingga menjadi incaran para pedagang dari manca negara. Hasil kekayaan alam Aceh tidak hanya membawa berkah, tetapi juga mengundang penjajah, yang diawali dari perebutan ekonomi berkembang kepada penguasaan kerajaan Islam dan tritorialnya. Faktor fanatik agama yang tinggi (Islam), membuat Aceh mampu bertahan dan memenangkan dalam setiap penyelesaian konflik serta berakhir dengan kerukunan dalam masyarakat bersifat multikultural (multicultural) dan multiagama (multireligious).</i></p> <p>Kata Kunci: <i>Konflik, ekonomi, politik dan agama.</i></p>	<p style="text-align: center;">Religion in Economic and Political Struggle in Aceh</p> <p style="text-align: center;">M Yusuf Asry</p> <p><i>Aceh is a “conflict area” between the colonial Dutch and Jakarta. It is also “Capital Region” for independence, and the “porch of Mecca” for Muslims from all over the archipelago (Indonesia). Geographically, Aceh is very strategic, because it becomes the traffic line of the world association, it also has its own beauty with the natural result of “spice”, so it has become the target of traders from foreign countries. The result of Aceh’s natural wealth does not only bring blessings, but also invite the invaders, starting from fighting for developing economy struggles to control the Islamic empire and the territories. The factor of high religious fanatics (Muslims), enables Aceh to survive and win in any conflict resolution and end up with harmony in the multicultural society and multi-religious communities</i></p> <p>Keywords: <i>conflict, economics, politics and religion.</i></p>

A

Abd. Rahman Mas'ud

Kepala Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

From 'Abd Allah to Khalifat Allah: Imagining a New Model of Indonesia Muslim Education

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Abdul Jamil

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Kajian Upaya De-Radikalisme Keagamaan: Studi Kasus Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) Nahdlatul Ulama

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Islam Kaum Tua Melawan Ekspansi Mempertahankan Identitas: Studi Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas di Kota Bitung

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Agama Kristen dan Islam di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Program Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas Keagamaan Kementerian Agama di Provinsi Aceh: Sebuah Kajian Evaluasi

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Studi Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah
Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Arifinsah

Dosen IAIN Sumatera Utara

Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik di Sumatera Utara
Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

A Ilyas Ismail & Prio Hotman

Dosen FIDKOM UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Peneliti Forum Kebebasan untuk Keadilan dan Kemanusiaan
(F-3K) Jakarta

Dakwah Berbasis Multikulturalisme
Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

B**Bashori A Hakim**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Pengaruh Budaya dan Nilai-nilai Keagamaan terhadap Kerjasama Antar
Umat Beragama di Kota Palu*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

F**Fauziah**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam: dalam Realitas
Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

ISSN 1412-663X

H**Haidlor Ali Ahmad**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Haidlor Ali Ahmad

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Kehidupan Beragama di Kabupaten Kediri: Antara Harmoni dan Konflik

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

I**Ibnu Hasan Muchtar**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat
Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan Kota Bekasi*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

J**Joko Tri Hariyanto**

Peneliti Balai Litbang Agama dan Keagamaan Semarang

*Norma Sosial Nyama Braya bagi Kerukunan Umat Beragama: Studi
terhadap Masyarakat Angantiga Bali*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

K**Kustini**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Kajian Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Rumah Ibadat dan Ormas
Ormas Keagamaan di Propinsi Kalimantan Tengah*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

L**Lukmanul Hakim**

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP)

Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

M**M. Afif Anshori**

Dosen Dosen IAIN Raden Intan Lampung

Perjumpaan Agama-agama di Ranah Esoterisme

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

M. Hadi Masruri

Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang

Menyoal Kembali Fundamentalisme dalam Islam

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

M. Yusuf Asry

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Resensi: Agama dalam Pergulatan Ekonomi dan Politik di Aceh

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Muchit A. Karim

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Penyiaran Agama dalam Perspektif dan Kristen di Panakkukang Kota Makassar

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

Mursyid Ali

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Potret Kerukunan Umat Beragama di Kota Malang Jawa Timur

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

ISSN 1412-663X

N

Nuhrison M Nuh

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Pola Relasi Sosial Umat Beragama di Daerah Eks-Transmigrasi: Studi
Kasus di Kecamatan Sausu Parigi Moutong Sulawesi Tengah*

Volume X, Nomor 2, April-Juni 2011

R

Reslawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

*Menyoroti Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kabupaten
pasuruan Jawa Timur*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

T

Titik Suwariyati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

W

Wakhid Sugiyarto

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Resensi ~ Agama Publik dan privat: Pengalaman Islam Indonesia

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Z

Zaenal Muttaqin

Dosen STAIN Surakarta

Sunan Kudus's Legacy on Cross-Cultural Da'wa

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Redaksi Jurnal HARMONI mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan kualitas jurnal HARMONI. Selain itu juga telah memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengkayaan wawasan secara konstruktif.

Mitra Bestari dimaksud adalah:

1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, BA, MA, APU (Pakar Bidang Komunikasi Publik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
2. Dr. Dwi Purwoko, M.Si, APU (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
3. Prof. Dr. HM. Ridwan Lubis (Guru Besar Bidang Pemikiran Modern dalam Islam - UIN Syarif Hidayatullah - Jakarta);
4. Dr. H. Muhammad Hisyam (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI).



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 268/AU1/P2MBI/05/2010

Akreditasi Majalah Berkala Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 452/D/2010 Tanggal 6 Mei 2010

Nama Majalah : Harmoni

ISSN : 1412-663X

Penerbit

: Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama

Ditetapkan sebagai Majalah Berkala Ilmiah

TERAKREDITASI B

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkan

Cibinong, 6 Mei 2010

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ketua Panitia Penilai Majalah Berkala Ilmiah

Prof. Dr. Rochadi

NIP 195007281978031001,



